



PEMERINTAH PROVINSI BALI

**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR ISI

- I. KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN
PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
- II. PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANAN PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025**
- III. LAMPIRAN I : RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**
- IV. LAMPIRAN II : RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025**
- V. LAMPIRAN III : RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
 2. Dinas Kesehatan Provinsi Bali
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali
 4. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Bali
 7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber DayaMineral
Provinsi Bali
 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan
Catatan Sipil Provinsi Bali
 9. Dinas Perhubungan Provinsi Bali
 10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali

13. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
15. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
16. Dinas Pariwisata Provinsi Bali
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
20. Sekretariat Daerah Provinsi Bali
21. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
24. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
27. Badan Penghubung Provinsi Bali
28. Inspektorat Provinsi Bali
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

VI. LAMPIRAN IV : REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2025

VII. LAMPIRAN V : REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

VIII. LAMPIRAN VI : REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN ANGGARAN 2025

IX. LAMPIRAN VII : SINKRONISASI PROGRAM PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

- X. LAMPIRAN VIII : SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025**
- XI. LAMPIRAN IX : SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**
- XII. LAMPIRAN X : DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2025**
- XIII. LAMPIRAN XI : DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**
- XIV. LAMPIRAN XII : DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025**
- XV. LAMPIRAN XIII : DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN - LAIN TAHUN ANGGARAN 2025**
- XVI. LAMPIRAN XIV : DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2025**
- XVII. LAMPIRAN XV : DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2025**
- XVIII. LAMPIRAN XVI : DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI**

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025**



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4-3557 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Uraian lebih lanjut penyempurnaan Hasil Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dimaksud Diktum Kesatu, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan ini.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Bali sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Kedua dijadikan dasar Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali

Pada Tanggal 12 September 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI BALI,

Ketua,



Dewa Made Mahayadnya, SH.

Wakil Ketua,

I Wayan Disel Astawa, SE.

Wakil Ketua,

Ida Gede Komang Kresna Budi, S.AP.

Wakil Ketua,

I Komang Nova Sewi Putra, SE.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Bali di Denpasar;
3. Yth. Pimpinan DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
4. Bupati / Walikota se-Bali;
5. Ketua DPRD Kabupaten / Walikota Se-Bali;
6. Arsip;

MATRIK PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
I.	TUJUAN EVALUASI	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan ruang lingkup: A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; B. kepentingan umum; C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF); dan D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); sebagaimana maksud Pasal 314 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 111 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.	
II.	GAMBARAN UMUM EVALUASI	
	Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta butir 3.2.h dan butir 4.1.6.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan Gubernur Bali, meliputi: A. Fokus kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Proyeksi IPM pada tahun 2025 sebesar 78,78.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	2. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Proyeksi LPE pada tahun 2025 sebesar 5,50-6,00. 3. Proyeksi Angka Kemiskinan Proyeksi Angka Kemiskinan pada tahun 2025 sebesar 3,57-3,93. 4. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2025 sebesar 1,87-2,35. 5. Proyeksi Indeks Gini Proyeksi Indeks Gini pada tahun 2025 sebesar 0,343-0,347. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali memfokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib dan Belanja <i>Mandatory Spending</i> serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub	Pemerintah Provinsi Bali tetap berkomitmen memfokuskan kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib dan Belanja <i>Mandatory Spending</i>, pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	kegiatan yang menjadi kewenangan daerah serta menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah berupa uang yang masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan menambah ekuitas dana lancar serta merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk mengukur tingkat potensi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali, diuraikan tren alokasi dan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 1 sebagai berikut:	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025																																																																																																												
	Tabel 1 Tren Alokasi dan Realisasi Pendapatan Daerah <table><tr><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">APBD Tahun Anggaran 2023</th><th rowspan="2">%</th><th colspan="2">APBD Tahun Anggaran 2024</th><th rowspan="2">%</th><th colspan="2">APBD Tahun Anggaran 2025</th><th rowspan="2">%</th></tr><tr><th>Target (Rp)</th><th>Realisasi (Rp)</th><th>Target (Rp)</th><th>Realisasi (Rp)</th><th>Target (Rp)</th><th>Realisasi (Per 1 Agustus 2025) (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4=3:2</td><td>5</td><td>6</td><td>7=6:5</td><td>8</td><td>9</td><td>10=9:8</td></tr><tr><td>PENDAPATAN DAERAH</td><td>7.248.953.175.947</td><td>6.768.699.641.073</td><td>93,37</td><td>6.876.016.193.600</td><td>7.824.598.583.908</td><td>113,80</td><td>6.095.800.244.823</td><td>3.417.631.665.603</td><td>56,07</td></tr><tr><td>Pendapatan Asli Daerah</td><td>5.041.446.320.153</td><td>4.623.648.871.938</td><td>91,71</td><td>4.590.033.889.600</td><td>5.535.429.679.671</td><td>120,60</td><td>3.686.371.604.823</td><td>2.236.688.528.006</td><td>60,67</td></tr><tr><td>Pendapatan Transfer</td><td>2.182.312.055.794</td><td>2.139.850.791.635</td><td>99,42</td><td>2.280.238.060.000</td><td>2.283.418.060.237</td><td>100,14</td><td>2.403.720.640.000</td><td>1.180.939.097.597</td><td>49,13</td></tr><tr><td>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</td><td>55.194.800.000</td><td>5.199.977.500</td><td>9,42</td><td>5.744.244.000</td><td>5.750.844.000</td><td>100,11</td><td>5.708.000.000</td><td>4.040.000</td><td>0,07</td></tr></table> <table><tr><th>Uraian</th><th>Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)</th><th>Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)</th><th>Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)</th><th>Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)</th><th>Rasio dari Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025 (%)</th><th>Rata-Rata Rasio (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>11</td><td>12=11-8</td><td>13= (5-2):5 </td><td>14= (8-5):8 </td><td>15= (12-11) </td><td>16= (12+13):3 </td></tr><tr><td>PENDAPATAN DAERAH</td><td>6.656.231.731.286</td><td>560.431.486.463</td><td>(11,35)</td><td>9,19</td><td>8,42</td><td>0,28</td></tr><tr><td>Pendapatan Asli Daerah</td><td>4.211.871.128.917</td><td>525.499.524.094</td><td>(19,69)</td><td>14,26</td><td>12,48</td><td>(0,48)</td></tr><tr><td>Pendapatan Transfer</td><td>2.438.603.330.369</td><td>34.882.690.369</td><td>5,42</td><td>1,45</td><td>1,43</td><td>3,56</td></tr><tr><td>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</td><td>5.757.272.000</td><td>49.272.000</td><td>(0,63)</td><td>0,86</td><td>0,86</td><td>(22,13)</td></tr></table> Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren target pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali rata-rata sebesar 0,28% dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengambil langkah-langkah antara lain: 1. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan sistem pemungutan pajak untuk meminimalisir kebocoran dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.	Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023		%	APBD Tahun Anggaran 2024		%	APBD Tahun Anggaran 2025		%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Per 1 Agustus 2025) (Rp)	1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9	10=9:8	PENDAPATAN DAERAH	7.248.953.175.947	6.768.699.641.073	93,37	6.876.016.193.600	7.824.598.583.908	113,80	6.095.800.244.823	3.417.631.665.603	56,07	Pendapatan Asli Daerah	5.041.446.320.153	4.623.648.871.938	91,71	4.590.033.889.600	5.535.429.679.671	120,60	3.686.371.604.823	2.236.688.528.006	60,67	Pendapatan Transfer	2.182.312.055.794	2.139.850.791.635	99,42	2.280.238.060.000	2.283.418.060.237	100,14	2.403.720.640.000	1.180.939.097.597	49,13	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	55.194.800.000	5.199.977.500	9,42	5.744.244.000	5.750.844.000	100,11	5.708.000.000	4.040.000	0,07	Uraian	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)	Rasio dari Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025 (%)	Rata-Rata Rasio (%)	1	11	12=11-8	13= (5-2):5	14= (8-5):8	15= (12-11)	16= (12+13):3	PENDAPATAN DAERAH	6.656.231.731.286	560.431.486.463	(11,35)	9,19	8,42	0,28	Pendapatan Asli Daerah	4.211.871.128.917	525.499.524.094	(19,69)	14,26	12,48	(0,48)	Pendapatan Transfer	2.438.603.330.369	34.882.690.369	5,42	1,45	1,43	3,56	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.757.272.000	49.272.000	(0,63)	0,86	0,86	(22,13)	Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan sistem pemungutan pajak untuk meminimalisir kebocoran dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.
Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023		%	APBD Tahun Anggaran 2024		%	APBD Tahun Anggaran 2025		%																																																																																																					
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		Target (Rp)	Realisasi (Per 1 Agustus 2025) (Rp)																																																																																																						
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9	10=9:8																																																																																																					
PENDAPATAN DAERAH	7.248.953.175.947	6.768.699.641.073	93,37	6.876.016.193.600	7.824.598.583.908	113,80	6.095.800.244.823	3.417.631.665.603	56,07																																																																																																					
Pendapatan Asli Daerah	5.041.446.320.153	4.623.648.871.938	91,71	4.590.033.889.600	5.535.429.679.671	120,60	3.686.371.604.823	2.236.688.528.006	60,67																																																																																																					
Pendapatan Transfer	2.182.312.055.794	2.139.850.791.635	99,42	2.280.238.060.000	2.283.418.060.237	100,14	2.403.720.640.000	1.180.939.097.597	49,13																																																																																																					
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	55.194.800.000	5.199.977.500	9,42	5.744.244.000	5.750.844.000	100,11	5.708.000.000	4.040.000	0,07																																																																																																					
Uraian	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)	Rasio dari Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025 (%)	Rata-Rata Rasio (%)																																																																																																								
1	11	12=11-8	13= (5-2):5	14= (8-5):8	15= (12-11)	16= (12+13):3																																																																																																								
PENDAPATAN DAERAH	6.656.231.731.286	560.431.486.463	(11,35)	9,19	8,42	0,28																																																																																																								
Pendapatan Asli Daerah	4.211.871.128.917	525.499.524.094	(19,69)	14,26	12,48	(0,48)																																																																																																								
Pendapatan Transfer	2.438.603.330.369	34.882.690.369	5,42	1,45	1,43	3,56																																																																																																								
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.757.272.000	49.272.000	(0,63)	0,86	0,86	(22,13)																																																																																																								

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Menggali potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian dan perikanan serta peningkatan layanan publik yang sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang bersumber dari retribusi. 3. Pengembangan Infrastruktur Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi dan fasilitas umum serta meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menarik investor dan wisatawan. 4. Kerjasama dan Kemitraan Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan. 5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik investor.	Telah melakukan penggalian potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian dan perikanan serta peningkatan layanan publik yang sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang bersumber dari retribusi. Telah dilakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi dan fasilitas umum serta meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menarik investor dan wisatawan. Telah melakukan kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan. Telah menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik investor.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 7. Pengawasan dan Akuntabilitas Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. C. Belanja Daerah Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat yang diperlukan oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan bagi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, untuk mengukur belanja daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali, diuraikan tren alokasi dan realisasi belanja daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:	Telah disiapkan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Telah dilakukannya peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025																																																																																																																																
	Tabel 2 Tren Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah <table><tr><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="3">APBD Tahun Anggaran 2023</th><th colspan="3">APBD Tahun Anggaran 2024</th><th colspan="3">APBD Tahun Anggaran 2025</th><th rowspan="2">%</th></tr><tr><th>Target (Rp)</th><th>Realisasi (Rp)</th><th>%</th><th>Target (Rp)</th><th>Realisasi (Rp)</th><th>%</th><th>Target (Rp)</th><th>Realisasi (Per 1 Agustus 2025) (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4=3:2</td><td>5</td><td>6</td><td>7=6:5</td><td>8</td><td>9</td><td>10=9:8</td></tr><tr><td>BELANJA DAERAH</td><td>7.932.886.363.138</td><td>6.613.665.437.677</td><td>83,37</td><td>7.795.681.730.804</td><td>7.293.051.849.998</td><td>93,55</td><td>6.895.460.936.313</td><td>2.788.767.536.454</td><td>40,44</td></tr><tr><td>Belanja Operasi</td><td>4.474.769.277.170</td><td>3.954.414.302.114</td><td>88,37</td><td>4.755.763.778.329</td><td>4.461.088.682.471</td><td>93,80</td><td>4.862.680.127.941</td><td>2.339.959.897.905</td><td>48,12</td></tr><tr><td>Belanja Modal</td><td>1.409.820.872.741</td><td>920.204.818.153</td><td>65,27</td><td>798.894.222.750</td><td>667.689.607.145</td><td>83,58</td><td>1.004.143.981.067</td><td>104.956.239.931</td><td>10,45</td></tr><tr><td>Belanja Tidak Terduga</td><td>15.828.456.983</td><td>9.519.788.187</td><td>60,14</td><td>52.205.727.068</td><td>7.441.134.041</td><td>14,25</td><td>136.183.624.677</td><td>3.254.388.800</td><td>2,39</td></tr><tr><td>Belanja Transfer</td><td>2.032.467.756.244</td><td>1.729.526.529.224</td><td>85,09</td><td>2.188.818.002.657</td><td>2.156.832.426.341</td><td>98,54</td><td>892.453.202.628</td><td>340.597.009.818</td><td>38,16</td></tr></table> <table><tr><th>Uraian</th><th>Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)</th><th>Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)</th><th>Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)</th><th>Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)</th><th>Rasio dari Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025 (%)</th><th>Rata-Rata Rasio (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>11</td><td>12=11-8</td><td>13= (8-2):5 </td><td>14= (8-5):8 </td><td>15= (12-11) </td><td>16= (12+13):3 </td></tr><tr><td>BELANJA DAERAH</td><td>7.408.877.983.959</td><td>513.117.047.646</td><td>(11,55)</td><td>7,44</td><td>6,93</td><td>0,27</td></tr><tr><td>Belanja Operasi</td><td>5.044.756.280.735</td><td>182.076.152.794</td><td>2,25</td><td>3,74</td><td>3,61</td><td>3,97</td></tr><tr><td>Belanja Modal</td><td>964.192.242.527</td><td>(39.951.738.540)</td><td>25,69</td><td>(3,98)</td><td>(4,14)</td><td>(6,44)</td></tr><tr><td>Belanja Tidak Terduga</td><td>55.464.624.677</td><td>(80.719.000.000)</td><td>160,86</td><td>(59,27)</td><td>(145,53)</td><td>46,47</td></tr><tr><td>Belanja Transfer</td><td>1.344.164.836.020</td><td>451.711.633.392</td><td>(59,23)</td><td>50,61</td><td>33,61</td><td>8,17</td></tr></table> Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren alokasi belanja daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali rata-rata sebesar 0,27% dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengambil langkah-langkah antara lain: 1. Perencanaan Anggaran yang Tepat Memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat melalui analisis kebutuhan yang lebih baik yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya sehingga tepat sasaran.	Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023			APBD Tahun Anggaran 2024			APBD Tahun Anggaran 2025			%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Per 1 Agustus 2025) (Rp)	1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9	10=9:8	BELANJA DAERAH	7.932.886.363.138	6.613.665.437.677	83,37	7.795.681.730.804	7.293.051.849.998	93,55	6.895.460.936.313	2.788.767.536.454	40,44	Belanja Operasi	4.474.769.277.170	3.954.414.302.114	88,37	4.755.763.778.329	4.461.088.682.471	93,80	4.862.680.127.941	2.339.959.897.905	48,12	Belanja Modal	1.409.820.872.741	920.204.818.153	65,27	798.894.222.750	667.689.607.145	83,58	1.004.143.981.067	104.956.239.931	10,45	Belanja Tidak Terduga	15.828.456.983	9.519.788.187	60,14	52.205.727.068	7.441.134.041	14,25	136.183.624.677	3.254.388.800	2,39	Belanja Transfer	2.032.467.756.244	1.729.526.529.224	85,09	2.188.818.002.657	2.156.832.426.341	98,54	892.453.202.628	340.597.009.818	38,16	Uraian	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)	Rasio dari Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025 (%)	Rata-Rata Rasio (%)	1	11	12=11-8	13= (8-2):5	14= (8-5):8	15= (12-11)	16= (12+13):3	BELANJA DAERAH	7.408.877.983.959	513.117.047.646	(11,55)	7,44	6,93	0,27	Belanja Operasi	5.044.756.280.735	182.076.152.794	2,25	3,74	3,61	3,97	Belanja Modal	964.192.242.527	(39.951.738.540)	25,69	(3,98)	(4,14)	(6,44)	Belanja Tidak Terduga	55.464.624.677	(80.719.000.000)	160,86	(59,27)	(145,53)	46,47	Belanja Transfer	1.344.164.836.020	451.711.633.392	(59,23)	50,61	33,61	8,17	Pemerintah Provinsi Bali dalam merancang belanja, telah mengutamakan belanja urusan wajib, demikian juga dalam penyusunannya telah berdasarkan pada perencanaan anggaran yang tepat, prinsip anggaran berbasis kinerja, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023			APBD Tahun Anggaran 2024			APBD Tahun Anggaran 2025			%																																																																																																																								
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Per 1 Agustus 2025) (Rp)																																																																																																																										
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9	10=9:8																																																																																																																									
BELANJA DAERAH	7.932.886.363.138	6.613.665.437.677	83,37	7.795.681.730.804	7.293.051.849.998	93,55	6.895.460.936.313	2.788.767.536.454	40,44																																																																																																																									
Belanja Operasi	4.474.769.277.170	3.954.414.302.114	88,37	4.755.763.778.329	4.461.088.682.471	93,80	4.862.680.127.941	2.339.959.897.905	48,12																																																																																																																									
Belanja Modal	1.409.820.872.741	920.204.818.153	65,27	798.894.222.750	667.689.607.145	83,58	1.004.143.981.067	104.956.239.931	10,45																																																																																																																									
Belanja Tidak Terduga	15.828.456.983	9.519.788.187	60,14	52.205.727.068	7.441.134.041	14,25	136.183.624.677	3.254.388.800	2,39																																																																																																																									
Belanja Transfer	2.032.467.756.244	1.729.526.529.224	85,09	2.188.818.002.657	2.156.832.426.341	98,54	892.453.202.628	340.597.009.818	38,16																																																																																																																									
Uraian	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)	Rasio dari Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025 (%)	Rata-Rata Rasio (%)																																																																																																																												
1	11	12=11-8	13= (8-2):5	14= (8-5):8	15= (12-11)	16= (12+13):3																																																																																																																												
BELANJA DAERAH	7.408.877.983.959	513.117.047.646	(11,55)	7,44	6,93	0,27																																																																																																																												
Belanja Operasi	5.044.756.280.735	182.076.152.794	2,25	3,74	3,61	3,97																																																																																																																												
Belanja Modal	964.192.242.527	(39.951.738.540)	25,69	(3,98)	(4,14)	(6,44)																																																																																																																												
Belanja Tidak Terduga	55.464.624.677	(80.719.000.000)	160,86	(59,27)	(145,53)	46,47																																																																																																																												
Belanja Transfer	1.344.164.836.020	451.711.633.392	(59,23)	50,61	33,61	8,17																																																																																																																												

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	2. Anggaran Berbasis Kinerja Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap kegiatan atau program yang dibiayai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas belanja. 3. Biaya per Layanan Publik Mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Semakin rendah biaya per layanan dengan hasil yang optimal, semakin efisien pembiayaan tersebut. 4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Provinsi Bali perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya program secara <i>real-time</i> serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah Provinsi Bali dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel. 5. <i>E-Government</i> dan <i>E-Procurement</i> Penguatan implementasi platform <i>e-government</i> dan <i>e-procurement</i> untuk pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa proses	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	pengadaan melalui platform <i>e-government</i> dan <i>e-procurement</i> lebih efektif dan efisien. 6. Monitoring dan Evaluasi Program Melakukan Monitoring dan evaluasi guna mengetahui apakah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan <i>output</i> yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. D. Pembiayaan Daerah Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suatu langkah penting untuk menilai efektivitas jumlah dan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembiayaan daerah yang efektif juga dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain efisiensi, pemerataan, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Dalam mengukur pembiayaan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan perhitungan secara cermat, efektif, efisien, kewajaran, kepatutan dan rasionalitas dalam penggunaan pembiayaan daerah dimaksud sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk mengukur pembiayaan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali, diuraikan tren alokasi dan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025																																																																																												
	Daerah Provinsi Bali selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 3 sebagai berikut: Tabel 3 Tren Alokasi dan Realisasi Pembiayaan Daerah <table><tr><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">APBD Tahun Anggaran 2023</th><th rowspan="2">%</th><th colspan="2">APBD Tahun Anggaran 2024</th><th rowspan="2">%</th><th colspan="3">APBD Tahun Anggaran 2025</th></tr><tr><th>Target (Rp)</th><th>Realisasi (Rp)</th><th>Target (Rp)</th><th>Realisasi (Rp)</th><th>Target (Rp)</th><th>Realisasi (Per 1 Agustus 2025) (Rp)</th><th>%</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4=3:2</td><td>5</td><td>6</td><td>7=6:5</td><td>8</td><td>9</td><td>10=9:8</td></tr><tr><td>Pembiayaan Daerah</td><td>683.933.187.191</td><td>66.746.644.320</td><td>9,76</td><td>919.665.537.204</td><td>92.185.725.294</td><td>10,02</td><td>799.660.691.490</td><td>323.711.326.985</td><td>40,48</td></tr><tr><td>Penerimaan Pembiayaan</td><td>1.079.721.253.120</td><td>408.963.390.625</td><td>37,88</td><td>1.175.582.550.556</td><td>342.650.323.382</td><td>29,15</td><td>1.201.125.499.578</td><td>623.732.459.203</td><td>51,93</td></tr><tr><td>Pengeluaran Pembiayaan</td><td>395.788.065.929</td><td>342.216.746.305</td><td>86,46</td><td>255.917.013.352</td><td>250.464.798.088</td><td>97,87</td><td>401.464.808.088</td><td>300.021.132.218</td><td>74,73</td></tr></table> <table><tr><th>Uraian</th><th>Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025</th><th>Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)</th><th>Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)</th><th>Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)</th><th>Rasio dari Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025 (%)</th><th>Rata-Rata Rasio (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>11</td><td>12=11-8</td><td>13= (5-2):5 </td><td>14= (8-5):8 </td><td>15=(12:11)</td><td>16=(12+13):3</td></tr><tr><td>Pembiayaan Daerah</td><td>752.346.252.673</td><td>(47.314.438.816,60)</td><td>(13,05)</td><td>(5,92)</td><td>(6,29)</td><td>2,30</td></tr><tr><td>Penerimaan Pembiayaan</td><td>1.153.811.060.761</td><td>(47.314.438.816,60)</td><td>2,17</td><td>(3,94)</td><td>(4,10)</td><td>0,75</td></tr><tr><td>Pengeluaran Pembiayaan</td><td>401.464.808.088</td><td>0,00</td><td>56,87</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5,38</td></tr></table> Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren alokasi pembiayaan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali rata-rata sebesar 2,30% dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengambil langkah-langkah antara lain: 1. Efisiensi Penggunaan Anggaran Menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pelayanan publik.	Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023		%	APBD Tahun Anggaran 2024		%	APBD Tahun Anggaran 2025			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Per 1 Agustus 2025) (Rp)	%	1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9	10=9:8	Pembiayaan Daerah	683.933.187.191	66.746.644.320	9,76	919.665.537.204	92.185.725.294	10,02	799.660.691.490	323.711.326.985	40,48	Penerimaan Pembiayaan	1.079.721.253.120	408.963.390.625	37,88	1.175.582.550.556	342.650.323.382	29,15	1.201.125.499.578	623.732.459.203	51,93	Pengeluaran Pembiayaan	395.788.065.929	342.216.746.305	86,46	255.917.013.352	250.464.798.088	97,87	401.464.808.088	300.021.132.218	74,73	Uraian	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)	Rasio dari Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025 (%)	Rata-Rata Rasio (%)	1	11	12=11-8	13= (5-2):5	14= (8-5):8	15=(12:11)	16=(12+13):3	Pembiayaan Daerah	752.346.252.673	(47.314.438.816,60)	(13,05)	(5,92)	(6,29)	2,30	Penerimaan Pembiayaan	1.153.811.060.761	(47.314.438.816,60)	2,17	(3,94)	(4,10)	0,75	Pengeluaran Pembiayaan	401.464.808.088	0,00	56,87	0,00	0,00	5,38	Dalam pelaksanaan anggaran, Pemerintah Provinsi Bali mengedepankan efisiensi penggunaan anggaran dan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat
Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023		%	APBD Tahun Anggaran 2024		%	APBD Tahun Anggaran 2025																																																																																							
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		Target (Rp)	Realisasi (Per 1 Agustus 2025) (Rp)	%																																																																																					
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9	10=9:8																																																																																					
Pembiayaan Daerah	683.933.187.191	66.746.644.320	9,76	919.665.537.204	92.185.725.294	10,02	799.660.691.490	323.711.326.985	40,48																																																																																					
Penerimaan Pembiayaan	1.079.721.253.120	408.963.390.625	37,88	1.175.582.550.556	342.650.323.382	29,15	1.201.125.499.578	623.732.459.203	51,93																																																																																					
Pengeluaran Pembiayaan	395.788.065.929	342.216.746.305	86,46	255.917.013.352	250.464.798.088	97,87	401.464.808.088	300.021.132.218	74,73																																																																																					
Uraian	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)	Rasio dari Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025 (%)	Rata-Rata Rasio (%)																																																																																								
1	11	12=11-8	13= (5-2):5	14= (8-5):8	15=(12:11)	16=(12+13):3																																																																																								
Pembiayaan Daerah	752.346.252.673	(47.314.438.816,60)	(13,05)	(5,92)	(6,29)	2,30																																																																																								
Penerimaan Pembiayaan	1.153.811.060.761	(47.314.438.816,60)	2,17	(3,94)	(4,10)	0,75																																																																																								
Pengeluaran Pembiayaan	401.464.808.088	0,00	56,87	0,00	0,00	5,38																																																																																								

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	2. Evaluasi Kinerja Program Mengukur dampak dari program yang didanai dengan anggaran daerah. Setiap program harus dievaluasi dari sisi <i>output</i> dan <i>outcome</i> untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang dihasilkan. E. Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 4, sebagai berikut:	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025																																										
	Tabel 4 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD <table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Penetapan/Peretujuan/Surat</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Nomor</th><th>Tanggal</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah yang telah direvisi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah</td><td>B.31.900/3752/PADFE/BPKAD</td><td>12 Juni 2025</td><td>Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)</td></tr><tr><td>2.</td><td>Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali</td><td>B.31.900/3753/PADFE/BPKAD</td><td>13 Juni 2025</td><td>Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)</td></tr><tr><td>3.</td><td>Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Bali</td><td><u>B.31.900/3969/PADFE/BPKAD</u> B.08.900/18168/KEU/SETWAN</td><td>20 Juni 2025</td><td>Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)</td></tr><tr><td>4.</td><td>Kesepakatan Rancangan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Bali</td><td><u>B.31.900/3970/PADFE/BPKAD</u> B.08.900/18169/KEU/SETWAN</td><td>20 Juni 2025</td><td>Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)</td></tr><tr><td>5.</td><td>Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Provinsi Bali</td><td>B.31.900/4485/PADFE/BPKAD</td><td>9 Juli 2025</td><td>Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)</td></tr><tr><td>6.</td><td>Peretujuan bersama DPRD Provinsi Bali dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD</td><td><u>B.31.900/5195/PADFE/BPKAD</u> B.08.900/22087/KEU/SETWAN</td><td>6 Agustus 2025</td><td>Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir)</td></tr><tr><td>7.</td><td>Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi</td><td>B.31.900/5239/PADFE/BPKAD</td><td>11 Agustus 2025 Dikampaikan ke Kementerian Dalam Negeri tanggal 11 Agustus 2025</td><td>Sesuai, (ditampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD)</td></tr></table>	No.	Uraian	Penetapan/Peretujuan/Surat		Keterangan	Nomor	Tanggal	1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah yang telah direvisi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah	B.31.900/3752/PADFE/BPKAD	12 Juni 2025	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)	2.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali	B.31.900/3753/PADFE/BPKAD	13 Juni 2025	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)	3.	Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Bali	<u>B.31.900/3969/PADFE/BPKAD</u> B.08.900/18168/KEU/SETWAN	20 Juni 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)	4.	Kesepakatan Rancangan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Bali	<u>B.31.900/3970/PADFE/BPKAD</u> B.08.900/18169/KEU/SETWAN	20 Juni 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)	5.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Provinsi Bali	B.31.900/4485/PADFE/BPKAD	9 Juli 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)	6.	Peretujuan bersama DPRD Provinsi Bali dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD	<u>B.31.900/5195/PADFE/BPKAD</u> B.08.900/22087/KEU/SETWAN	6 Agustus 2025	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir)	7.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi	B.31.900/5239/PADFE/BPKAD	11 Agustus 2025 Dikampaikan ke Kementerian Dalam Negeri tanggal 11 Agustus 2025	Sesuai, (ditampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD)	
No.	Uraian			Penetapan/Peretujuan/Surat			Keterangan																																					
		Nomor	Tanggal																																									
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah yang telah direvisi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah	B.31.900/3752/PADFE/BPKAD	12 Juni 2025	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)																																								
2.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali	B.31.900/3753/PADFE/BPKAD	13 Juni 2025	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)																																								
3.	Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Bali	<u>B.31.900/3969/PADFE/BPKAD</u> B.08.900/18168/KEU/SETWAN	20 Juni 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)																																								
4.	Kesepakatan Rancangan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Bali	<u>B.31.900/3970/PADFE/BPKAD</u> B.08.900/18169/KEU/SETWAN	20 Juni 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)																																								
5.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Provinsi Bali	B.31.900/4485/PADFE/BPKAD	9 Juli 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)																																								
6.	Peretujuan bersama DPRD Provinsi Bali dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD	<u>B.31.900/5195/PADFE/BPKAD</u> B.08.900/22087/KEU/SETWAN	6 Agustus 2025	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir)																																								
7.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi	B.31.900/5239/PADFE/BPKAD	11 Agustus 2025 Dikampaikan ke Kementerian Dalam Negeri tanggal 11 Agustus 2025	Sesuai, (ditampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD)																																								
	Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Bab																																											

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	III.A.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk selanjutnya agar secara terus menerus menjaga konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana maksud butir 4.1.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengambil langkah-langkah antara lain: 1. melakukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan kebijakan pemerintah	Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya untuk menjaga konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	pusat guna menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. mengelola belanja secara efektif, efisien dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai dengan kewenangan dan kemampuan pendapatan daerah; dan 4. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai dengan target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan; sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah disinkronisasikan dengan kebijakan pemerintah pusat guna menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas guna mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% melalui pengalokasian anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, mengelola belanja secara efektif, efisien serta meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
III.	SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH	
	A. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam menunjang Prioritas Nasional, sebagai berikut: 1. Alokasi Anggaran Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Penyediaan anggaran Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (weight faltering) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) pada anak balita semula Rp269.021.736.589,00 bertambah Rp10.325.433.910,00 menjadi Rp279.347.170.499,00 atau 3,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mewujudkan SDM yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Surat Edaran	Penyediaan anggaran pada sub kegiatan ini bersifat lintas sektor dan berfokus pada kegiatan fasilitasi, koordinasi, peningkatan kapasitas, pameran, dan event yang secara klasifikasi masuk kategori belanja penunjang. Sementara intervensi langsung seperti pemberian gizi, perbaikan sanitasi, dan pelayanan kesehatan telah dilaksanakan oleh OPD teknis sesuai tupoksi masing-masing. Sub kegiatan ini masuk dalam daftar pemetaan sebagai kegiatan dalam rangka mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat semula Rp2.527.840.286,00 bertambah Rp2.678.008.975,00 menjadi Rp5.205.849.261,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara semula Rp712.700.000,00 bertambah Rp2.395.800.000,00 menjadi Rp3.108.500.000,00 atau 59,71% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator,	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 2. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi Penyediaan anggaran Pengendalian Inflasi semula Rp148.906.764.400,00 bertambah Rp18.721.429.445,00 menjadi Rp167.628.193.845,00 atau 3,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan a. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian semula Rp5.203.591.720,00 bertambah Rp9.934.404.590,00 menjadi Rp15.137.996.310,00 pada SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; b. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan semula Rp2.260.455.456,00 bertambah Rp1.827.408.571,00 menjadi Rp4.087.864.027,00 pada SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; c. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan	Penambahan alokasi anggaran dimaksud diperuntukan untuk penambahan jumlah subsidi pupuk organik, pemberian bantuan benih Padi dan benih jagung dalam rangka peningkatan produktifitas guna mendukung pengendalian inflasi daerah dan hibah kepada kelompok ternak untuk peningkatan populasi ternak. Dalam pelaksanaannya akan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi semula Rp3.082.285.772,00 bertambah Rp811.168.360,00 menjadi Rp3.893.454.132,00 pada SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya. Selain itu, penyediaan anggaran Pengendalian Inflasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi semula Rp364.569.780,00 bertambah Rp686.093.547,00 menjadi Rp1.050.663.327,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp345.578.400,00 atau 32,89% dari total sub kegiatan;	Penyediaan anggaran alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya (spanduk, tas belanja), belanja sewa alat kantor (sewa meja, kursi, dan tenda) dan sewa peralatan audio (sound system) diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan direncanakan dilaksanakan sebanyak 36 kali. Sedangkan penyediaan anggaran bahan-bahan lainnya digunakan untuk pengadaan bahan kemasan beras 5 Kg, jasa pengemasan dan distribusi beras untuk penyaluran bantuan pangan ke daerah rawan pangan sesuai dengan peta kearawanan pangan provinsi.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	2) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp153.648.000,00 atau 14,62% dari total sub kegiatan; 3) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp247.724.880,00 berkurang Rp98.886.513,00 menjadi Rp148.838.367,00 atau 14,17% dari total sub kegiatan; 4) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula Rp29.240.000,00 bertambah Rp83.640.000,00 menjadi Rp112.880.000,00 atau 10,74% dari total sub kegiatan; 5) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp108.000.000,00 atau 10,28% dari total sub kegiatan; pada SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; b. Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji semula Rp662.854.730,00 bertambah Rp40.388.635,00 menjadi Rp703.243.365,00	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja 1) Belanja Jasa Tenaga Penangan Prasarana dan Sarana Umum semula Rp225.600.000,00 bertambah Rp40.000.000,00 menjadi Rp265.600.000,00 atau 37,77% dari total sub kegiatan; 2) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp402.552.930,00 berkurang Rp194.776.465,00 menjadi Rp207.776.465,00 atau 29,55% dari total sub kegiatan; pada SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; c. Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih semula Rp401.042.372,00 berkurang Rp27.558.640,00 menjadi Rp373.483.732,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Jasa Tenaga Administrasi semula Rp284.683.612,00 berkurang Rp119.862.440,00 menjadi Rp164.821.172,00 atau 44,13% dari total sub kegiatan; 2) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum semula Rp83.200.000,00 bertambah Rp56.000.000,00 menjadi	Uraian belanja sub kegiatan dimaksud telah disusun dengan mempertimpangkan prioritas belanja yang dibutuhkan guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud serta telah diperhitungkan dengan cermat dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riil. Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dan tenaga administrasi merupakan tenaga pelaksana yang tersedia saat ini yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan proses penyediaan benih bersertifikat perkebunan. Uraian belanja sub kegiatan dimaksud telah disusun dengan mempertimpangkan prioritas belanja yang dibutuhkan guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud serta telah diperhitungkan dengan cermat dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riil. Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dan tenaga administrasi merupakan tenaga pelaksana yang tersedia saat ini yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan proses penyediaan benih bersertifikat tanaman pangan.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp139.200.000,00 atau 37,27% dari total sub kegiatan; pada SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 3. Alokasi Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Penyediaan anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem semula Rp579.519.090.767,00 berkurang Rp631.473.051,00 menjadi Rp578.887.617.716,00	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	atau 7,81% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana maksud butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani semula Rp133.073.630,00 berkurang Rp61.793.115,00 menjadi Rp71.280.515,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp92.896.830,00 berkurang Rp44.948.415,00 menjadi Rp47.948.415,00 atau 67,27% dari total sub kegiatan;	Uraian belanja sub kegiatan dimaksud telah disusun dengan mempertimpangkan prioritas belanja yang dibutuhkan guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud serta telah diperhitungkan dengan cermat dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riil. Tenaga Administrasi yang ada tersebut merupakan tenaga pelaksana yang saat ini tersedia dalam membantu kegiatan penyuluhan ditengah terbatasnya tenaga PNS yang ada.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	b. Sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan semula Rp559.176.002,00 berkurang Rp220.832.181,00 menjadi Rp338.343.821,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp377.580.442,00 berkurang Rp122.859.001,00 menjadi Rp254.721.441,00 atau 75,28% dari total sub kegiatan; 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp96.986.000,00 berkurang Rp74.426.000,00 menjadi Rp22.560.000,00 atau 6,67% dari total sub kegiatan; pada SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada	Uraian belanja sub kegiatan dimaksud telah disusun dengan mempertimpangkan prioritas belanja yang dibutuhkan guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud Jasa tenaga ini sangat diperlukan dimana tenaga Dinas Koperasi, UKM tersebut mendukung pelaksanaan kegiatan menumbuhkan wirausaha dan pemberdayaan usaha UMKM melalui pendampingan usaha, pemberian bimtek, diklat, inkubasi usaha dengan tujuan UMKM bisa menghasilkan produk yg berkualitas serta difasilitasi permodalan dan pemasaran produknya dengan harapan bisa meningkatkan pendapatan UMKM. Sehingga percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem bisa tercapai.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4. Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat Penyediaan anggaran Sekolah Rakyat harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya, untuk mendukung program Sekolah Rakyat di wilayah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengambil langkah-langkah berupa penyiapan lahan, perizinan, penyiapan guru dan penyiapan tenaga pendidik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.	Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat di wilayah Provinsi Bali sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	5. Alokasi Anggaran Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda Penyediaan anggaran SMA Unggul Garuda harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendorong peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia melalui percepatan program pembangunan dan pengelolaan SMA Unggul Garuda dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran. 6. Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Penyediaan anggaran MBG harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung pelaksanaan MBG sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal alokasi anggaran MBG bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang mewajibkan kontribusi dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali	Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan SMA Unggul Garuda dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan. 8. Alokasi Anggaran Swasembada Energi Penyediaan anggaran Swasembada Energi harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna memenuhi kebutuhan energi melalui pemanfaatan potensi energi lokal yang ada. Selanjutnya, penganggaran Swasembada Energi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dari luar daerah atau negara lain serta mendorong penggunaan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian energi di tingkat daerah. 9. Alokasi Anggaran Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah Penyediaan anggaran Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna menunjang pencapaian Asta Cita, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden untuk melanjutkan pembangunan infrastuktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).	Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mendukung Program Pembangunan Tiga Juta Rumah serta pada telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.860.000.000 untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebanyak 128 unit rumah Untuk penghapusan BPHTB dan Retribusi PBG merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengambil langkah-langkah, antara lain: a. Menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai: 1) Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam mendukung Tiga Juta Rumah bagi MBR; dan 2) Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Tiga Juta Rumah bagi MBR; b. Mempercepat proses pelayanan penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Mensosialisasikan Penghapusan BPHTB, Penghapusan Retribusi PBG dan percepatan proses pelayanan Penerbitan PBG kepada masyarakat; dan d. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan hal dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Menteri	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Pekerjaan Umum melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah. Selanjutnya, penganggaran Program Pembangunan Tiga Juta Rumah dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada sub kegiatan sebagai berikut: - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha; - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	10. Alokasi Anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Rp1.855.360.968.384,00 atau 74,63% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan	Pemerintah Provinsi Bali dalam pengadaan barang/jasa berkomitmen mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan Belanja Produk Dalam Negeri melalui penyedia sebesar Rp1.621.831.691.230 (95,03%) dan melalui Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp1.146.763.642.140 (67,30 %).

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025																																								
	Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. B. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025, diuraikan sebagaimana Tabe 1. 5 sebagai berikut: Tabel 5 Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025 <table><tr><th>No.</th><th>Prioritas Daerah</th><th>Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)</th><th>Rasio terhadap Belanja Daerah (%)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, serta Kearifan Lokal</td><td>754.030.207.075,00</td><td>10,18</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan</td><td>2.993.697.912.837,00</td><td>40,41</td></tr><tr><td>3.</td><td>Ekonomi Kerthi Bali Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata</td><td>284.382.496.782,20</td><td>3,84</td></tr><tr><td>4.</td><td>Infrastruktur Darat, Laut, Udara dan Transportasi</td><td>799.735.276.433,40</td><td>10,79</td></tr><tr><td>5.</td><td>Lingkungan, Kehutanan dan Energi</td><td>70.865.992.202,00</td><td>0,96</td></tr><tr><td>6.</td><td>Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali</td><td>379.750.913.198,00</td><td>5,13</td></tr><tr><td>7.</td><td>Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi</td><td>2.126.115.185.432,00</td><td>28,70</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD</td><td>7.408.577.983.959,60</td><td>100,00</td></tr><tr><td></td><td>Total Belanja Daerah</td><td>7.408.577.983.959,60</td><td></td></tr></table>	No.	Prioritas Daerah	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)	1.	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, serta Kearifan Lokal	754.030.207.075,00	10,18	2.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	2.993.697.912.837,00	40,41	3.	Ekonomi Kerthi Bali Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata	284.382.496.782,20	3,84	4.	Infrastruktur Darat, Laut, Udara dan Transportasi	799.735.276.433,40	10,79	5.	Lingkungan, Kehutanan dan Energi	70.865.992.202,00	0,96	6.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali	379.750.913.198,00	5,13	7.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	2.126.115.185.432,00	28,70		Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	7.408.577.983.959,60	100,00		Total Belanja Daerah	7.408.577.983.959,60		
No.	Prioritas Daerah	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)																																							
1.	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, serta Kearifan Lokal	754.030.207.075,00	10,18																																							
2.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	2.993.697.912.837,00	40,41																																							
3.	Ekonomi Kerthi Bali Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata	284.382.496.782,20	3,84																																							
4.	Infrastruktur Darat, Laut, Udara dan Transportasi	799.735.276.433,40	10,79																																							
5.	Lingkungan, Kehutanan dan Energi	70.865.992.202,00	0,96																																							
6.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali	379.750.913.198,00	5,13																																							
7.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	2.126.115.185.432,00	28,70																																							
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	7.408.577.983.959,60	100,00																																							
	Total Belanja Daerah	7.408.577.983.959,60																																								

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	dasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi anggaran Prioritas Daerah Tahun 2025 dimaksud telah sesuai dengan Lampiran Tabel 3.3 KUA-Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan keselarasan tabel Prioritas Daerah Tahun 2025 tersebut dengan tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dalam SIPD RI dan mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan dokumen yang tercantum dalam SIPD RI. C. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mandatory Spending), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, sebagai berikut: 1. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Penyediaan anggaran Fungsi Pendidikan yang tercantum pada Rekapitulasi Belanja Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi Bali terus berupaya mempertahankan keselarasan tabel Prioritas Daerah Tahun 2025 tersebut dengan tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dalam SIPD RI dan mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan dokumen yang tercantum dalam SIPD RI

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Daerah Untuk Mandatory Spending Fungsi Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dalam SIPD RI semula Rp2.594.567.878.319,00 berkurang Rp17.699.576.183,00 menjadi Rp2.576.868.302.136,00 atau 34,78% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp9.731.599.800,00; b. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat semula Rp10.126.210.100,00 bertambah Rp1.816.542.950,00 menjadi Rp11.942.753.050,00; c. Sub Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat semula Rp465.670.107.876,00 bertambah Rp2.981.520.830,00 menjadi Rp468.651.628.706,00; telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah d alam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yang diprioritaskan penggunaannya untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Bali dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran Fungsi Pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Fungsi Pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun	Provinsi Bali telah secara konsisten dan berkesinambungan untuk mengalokasikan anggaran Fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemuatakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual semula Rp2.834.763.996,00 bertambah Rp13.657.047.340,00 menjadi Rp16.491.811.336,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula Rp1.952.000.000,00 bertambah Rp13.700.000.000,00 menjadi Rp15.652.000.000,00 atau 94,91% dari total sub kegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	b. Sub Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat semula Rp100.000.000,00 bertambah Rp127.375.200,00 menjadi Rp227.375.200,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula Rp66.400.000,00 bertambah Rp9.154.800,00 menjadi Rp75.554.800,00 atau 33,23% dari total sub kegiatan; 2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp39.700.000,00 atau 17,46% dari total sub kegiatan; 3) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp22.500.000,00 atau 9,90% dari total sub kegiatan; pada SKPD Dinas Kesehatan; c. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana semula Rp703.108.800,00 berkurang Rp171.379.700,00 menjadi	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp531.729.100,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp143.665.000,00 bertambah Rp6.300.000,00 menjadi Rp149.965.000,00 atau 28,20% dari total sub kegiatan; 2) Belanja Sewa Hotel semula Rp195.500.000,00 berkurang Rp51.000.000,00 menjadi Rp144.500.000,00 atau 27,18% dari total sub kegiatan; 3) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula Rp90.000.000,00 berkurang Rp27.000.000,00 menjadi Rp63.000.000,00 atau 11,85% dari total sub kegiatan; pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah d. Sub Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual semula Rp640.398.752,00 berkurang Rp86.118.000,00 menjadi Rp554.280.752,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp221.752.392,00 atau 40,01% dari total sub kegiatan; 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp171.738.000,00 berkurang	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp86.118.000,00 menjadi Rp85.620.000,00 atau 15,45% dari total sub kegiatan; 3) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp78.300.000,00 atau 14,13% dari total sub kegiatan; pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah e. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan semula Rp386.742.000,00 berkurang Rp140.958.000,00 menjadi Rp245.784.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp239.647.000,00 berkurang Rp125.658.000,00 menjadi Rp113.989.000,00 atau 46,38% dari total sub kegiatan; 2) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp75.060.000,00 berkurang Rp15.300.000,00 menjadi Rp59.760.000,00 atau 24,31% dari total sub kegiatan; pada SKPD Badan Riset dan Inovasi Daerah; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran untuk Fungsi Pendidikan.	Uraian belanja sub kegiatan dimaksud telah disusun dengan mempertimpangkan prioritas belanja yang dibutuhkan guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud serta telah diperhitungkan dengan cermat dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing sub kegiatan,

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 2. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik yang tercantum pada Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mandatory Spending Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dalam SIPD RI semula Rp1.929.530.207.134,00 bertambah Rp225.783.150.732,00 menjadi Rp2.155.313.357.866,00 atau 35,64% dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya semula Rp126.219.455.800,00 bertambah Rp129.144.900.000,00 menjadi Rp255.364.355.800,00; b. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) semula Rp41.269.710.452,00 bertambah Rp1.949.009.170,00 menjadi Rp43.218.719.622,00; c. Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya semula Rp5.310.000.000,00 bertambah Rp5.983.200.000,00 menjadi Rp11.293.200.000,00; belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau	Alokasi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2025 sebesar 35,64% tersebut telah mengalami peningkatan dari APBD Induk TA 2025 yang sebesar 32,62%. Pemerintah Provinsi Bali akan tetap berupaya untuk memenuhi alokasi belanja infrastuktur pelayanan publik dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun 2024 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan, sebagaimana maksud Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta butir 5.1.3.a dan butir 5.1.3.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana maksud butir 5.1.3.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.1.3.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota semula Rp825.581.870,00 berkurang Rp594.388.935,00 menjadi Rp231.192.935,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp216.759.270,00 berkurang Rp104.879.635,00 menjadi Rp111.879.635,00 atau 48,39% dari total sub kegiatan; 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp106.986.000,00 berkurang Rp53.630.000,00 menjadi Rp53.356.000,00 atau 23,08% dari total sub kegiatan; pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman; b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis semula Rp2.935.189.600,00 berkurang Rp346.650.000,00 menjadi	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp2.588.539.600,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara semula Rp1.000.000.000,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp1.200.000.000,00 atau 46,36% dari total sub kegiatan; 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp651.452.000,00 berkurang Rp341.650.000,00 menjadi Rp309.802.000,00 atau 11,97% dari total sub kegiatan; pada SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; c. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur semula Rp9.599.763.250,00 berkurang Rp3.955.747.450,00 menjadi Rp5.644.015.800,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp4.342.332.000,00 bertambah Rp1.245.054.000,00 menjadi Rp5.587.386.000,00 atau 99,00% dari total sub kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan	Uraian belanja sub kegiatan dimaksud telah disusun dengan mempertimpangkan prioritas belanja yang dibutuhkan guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud serta telah diperhitungkan dengan cermat dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing sub kegiatan,

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 3. Anggaran Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Penyediaan anggaran Belanja Pegawai semula Rp2.614.645.674.805,20 berkurang Rp87.771.397.459,60 menjadi Rp2.526.874.277.345,60 atau 34,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	TKD yang telah ditentukan penggunaannya Rp2.241.942.584.320,60 atau 30,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana maksud Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, butir 3.2.2.j dan butir 3.4.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4. Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang didanai Pendapatan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya	Masih tingginya alokasi belanja pegawai salah satunya disebabkan karena ada tambahan pegawai yakni pengangkatan PPPK yang jumlah nya cukup banyak. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Bali akan tetap mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran belanja pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	a. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Penyediaan anggaran atas Hasil Penerimaan PKB semula Rp137.179.761.599,00 bertambah Rp156.549.847.675,00 menjadi Rp293.729.609.274,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran atas hasil penerimaan PKB, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Hasil Penerimaan PKB dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sesuai	Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan Hasil Penerimaan PKB sebesar Rp293.729.609.274,00 atau 29,30% dari Total Penerimaan PKB sebesar Rp1.002.357.827.000,00 untuk kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar melakukan penyesuaian terhadap hasil penerimaan PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang mengalami perubahan sebagai akibat pemberian dan/atau pengurangan dasar pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan tidak memberatkan masyarakat, dengan berpedoman pada Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. b. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Rokok Penyediaan anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Rokok semula Rp112.119.430.963,00	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	bertambah Rp4.829.560.387,00 menjadi Rp116.948.991.350,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum, seperti: 1) penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan: a) penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. b) selain digunakan untuk kegiatan tersebut pada huruf a), Pajak Rokok digunakan untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Rokok bagian hak provinsi atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).	Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan penggunaan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian daerah provinsi atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	c) dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program JKN, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok tersebut diutamakan untuk digunakan dalam rangka kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran dan tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage (UHC), selain itu dapat digunakan untuk penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas III, penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dan tunggakannya serta kontribusi peserta PBI.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	2) penggunaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum digunakan untuk: a) minimal berupa: (1) sosialisasi ketentuan di bidang Cukai Hasil Tembakau; dan (2) operasi pemberantasan rokok illegal; diprioritaskan apabila Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud; b) penggunaan/pemanfaatan Pajak Rokok dalam bidang penegakan hukum termasuk kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman kerjasama pemanfaatan dana Pajak Rokok dalam pelaksanaan bidang penegakan hukum; sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Rokok, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	terhadap alokasi anggaran Hasil Penerimaan Pajak Rokok dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Alokasi Anggaran Belanja Bagi Hasil Penyediaan anggaran Belanja Bagi Hasil semula Rp437.204.710.166,00 bertambah Rp74.680.545.759,00 menjadi Rp511.885.255.925,00 atau 10,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat selisih lebih Rp67.797.945.758,70 dari yang seharusnya Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Rp444.087.310.166,30, dengan rincian sebagai berikut: 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp639.365.501.000,00 x 70% = Rp447.555.850.700,00; 2) Belanja Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp4.000.000.000,00 x 50% = Rp2.000.000.000,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	3) Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok $\text{Rp}354.875.391.691,00 \times 70\% = \text{Rp}248.412.774.183,70.$ Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota dimaksud sesuai dengan target Pajak Daerah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, besaran alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Bali ke pada kabupaten/kota yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 dan butir 3.4.4.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan Pajak Daerah sebagaimana maksud butir	Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan target Pajak Daerah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 serta kewajiban Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 sebagaimana hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	3.4.4.1.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target Pajak Daerah pada akhir Tahun Anggaran 2024 yang memengaruhi besaran Bagi Hasil Pajak Provinsi Bali, disalurkan kepada kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 3.4.4.1.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. D. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pemenuhan SPM, sebagai berikut: 1. SPM Pendidikan Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Pendidikan semula Rp219.595.162.498,00 berkurang Rp8.357.673.229,00 menjadi Rp211.237.489.269,00 atau 10,92% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp1.933.617.545.947,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: a. Angka Partisipasi Sekolah semula Rp117.008.068.000,00 bertambah	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp554.103.900,00 menjadi Rp117.562.171.900,00; b. Literasi dan Numerasi semula Rp50.424.841.998,00 berkurang Rp7.366.000.529,00 menjadi Rp43.058.841.469,00; c. Kekhususan SMK semula Rp51.058.070.200,00 berkurang Rp1.333.248.600,00 menjadi Rp49.724.821.600,00; d. Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas semula Rp1.104.182.300,00 berkurang Rp212.528.000,00 menjadi Rp891.654.300,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak	Telah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah Provinsi Bali serta sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.a.2) dan tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta butir 5.2.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemuatakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 2. SPM Kesehatan Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Kesehatan semula Rp409.068.380,00 berkurang Rp152.000.600,00 menjadi Rp257.067.780,00 atau 0,03% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp819.915.345.043,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	a. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi semula Rp267.525.580,00 berkurang Rp81.349.200,00 menjadi Rp186.176.380,00; b. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi semula Rp141.542.800,00 berkurang Rp70.651.400,00 menjadi Rp70.891.400,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Kesehatan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan	Penyediaan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, penyediaan anggaran kesehatan yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp263.330.315.443,00 atau 5,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain tercantum pada: a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi semula Rp33.535.926.174,00 bertambah Rp257.701.150,00 menjadi Rp 33.793.627.324,00; b. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi semula Rp76.076.471.555,00 bertambah Rp5.276.570.332,00 menjadi Rp81.353.041.887,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai sebagaimana maksud butir 5.3.3.a Lampiran	Penyediaan anggaran kesehatan pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam memberikan prioritas terhadap peningkatan layanan kesehatan.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam rangka mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengambil langkah-langkah antara lain: a. Program promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit; b. peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan Stunting: 1) peningkatan skrining anemia remaja putri; 2) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri; 3) pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care); 4) konsumsi TTD ibu hamil; 5) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK); 6) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set; 7) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan; 8) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta); 9) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (weight faltering, wasting dan Stunting);	Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik arahan terkait , antara lain: 1. Mengintegrasikan program promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit ke dalam kegiatan lintas sektor. 2. Berkoordinasi dan berkolaborasi lintas sektor/lintas program kab/kota dalam memperkuat intervensi kesehatan ibu, anak, dan stunting, melalui peningkatan cakupan layanan, penyediaan sarana prasarana serta memperluas jangkauan edukasi gizi dan kesehatan reproduksi remaja. 3. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV, malaria, dan penyakit menular lainnya) serta penyakit tidak menular (diabetes melitus, hipertensi, kanker, stroke, jantung, dan uronephrology) dengan memperkuat deteksi dini, tata laksana, serta layanan rujukan. 4. Mendorong Kab/Kota dalam memenuhi sarana dan prasarana layanan primer, termasuk Puskesmas, Posyandu Prima, ketersediaan obat esensial, dan BMHP, serta memperkuat jejaring layanan rujukan rumah sakit dan laboratorium kesehatan masyarakat maupun daerah. 5. Mendorong kab/kota dalam menguatkan SDM Kesehatan dengan memenuhi standar tenaga kesehatan di Puskesmas, Puskesmas pembantu, RSUD, dan Labkesda.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	10) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; dan 11) edukasi remaja putri, ibu hamil dan keluarga balita; c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama: 1) Tuberkulosis (TBC); 2) Human Immunodeficiency Virus (HIV); 3) Malaria; dan 4) Penyakit menular lainnya; d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama: 1) Diabetes Melitus; 2) Hipertensi; dan 3) Penyakit tidak menular lainnya; e. penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan: 1) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED); 2) sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Prima dan Posyandu; 3) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	4) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung dan uronephrology) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); dan 5) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). f. penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan: 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di Puskesmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi; 2) perawat dan bidan pada entitas Puskesmas pembantu; 3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung dan uronephrology); 4) tenaga kesehatan di Labkesda;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	5) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di Puskesmas; dan 6) peningkatan kapasitas dan insentif kader Posyandu. sebagaimana maksud butir 5.3.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024. 3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp90.581.519.113,00 bertambah Rp5.463.838.515,00 menjadi Rp96.045.357.628,00 atau 14,13% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp679.496.702.990,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota semula Rp72.704.109.161,00	Penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan telah mempedomani minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	bertambah Rp1.575.219.365,00 menjadi Rp74.279.328.526,00; b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional semula Rp17.877.409.952,00 bertambah Rp3.888.619.150,00 menjadi Rp21.766.029.102,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun	Telah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman semula Rp300.183.450,00 berkurang Rp99.952.525,00 menjadi Rp200.230.925,00 atau 2,13% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp9.413.522.655,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut hanya diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi Rp9.413.522.655,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 serta butir 5.2.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan	Telah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pementakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 5. SPM Sosial Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Sosial semula Rp7.792.996.100,00 bertambah Rp82.693.800,00 menjadi Rp7.875.689.900,00 atau 21,03% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp37.451.192.714,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut antara lain diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti semula Rp2.778.648.900,00 bertambah Rp54.977.900,00 menjadi Rp2.833.626.800,00; b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti semula Rp2.607.285.000,00	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	bertambah Rp149.144.500,00 menjadi Rp2.756.429.500,00; c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti semula Rp1.871.531.000,00 berkurang Rp106.548.600,00 menjadi Rp1.764.982.400,00; d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti semula Rp184.119.400,00 berkurang Rp5.280.000,00 menjadi Rp178.839.400,00; e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi semula Rp351.411.800,00 berkurang Rp9.600.000,00 menjadi Rp341.811.800,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Sosial, Pemerintah Daerah Provinsi	Telah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Bali harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Sosial dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemuatakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 6. SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat semula Rp20.850.028.685,00 berkurang Rp113.071.410,00 menjadi Rp20.736.957.275,00 atau 23,84% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp87.001.491.029,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut hanya diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi semula Rp20.850.028.685,00 berkurang Rp113.071.410,00 menjadi Rp20.736.957.275,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Provinsi Bali	Telah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Provinsi Bali sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pmutakhirannya	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berdasarkan uraian belanja yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana di atas, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan SPM. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 5.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. E. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun	Penyediaan Alokasi anggaran belanja untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar sudah mencukupi dan telah diperhitungkan sesuai kebutuhan nyata pada masing-masing sub kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Anggaran 2025 yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: 1. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan Penyediaan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Bali Rp35.944.174.832,00 atau 0,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut: a. Alokasi anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada SKPD Inspektorat Rp10.941.608.431,00 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; b. b. Alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada SKPD Inspektorat Rp15.047.642.040,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan pengawasan pada SKPD Inspektorat di luar Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN Rp9.954.924.361,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu semula Rp1.027.561.460,00 berkurang Rp461.995.135,00 menjadi Rp565.566.325,00; b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal semula Rp2.551.448.128,00 berkurang Rp1.082.049.083,00 menjadi Rp1.469.399.045,00; belum memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Bali paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Bali paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 5.3.33.d.1) dan butir	Pengalokasian anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan tersebut sudah sangat mencukupi dan telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan riil SKPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dan apabila dialokasikan secara berlebihan akan berdampak pada kurang efektifnya penyerapan

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi: a. kegiatan pengawasan, yaitu: 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja; 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD; 3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 4) Reviu Laporan Keuangan; 5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probit Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan 6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP; c. sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton; sebagaimana maksud butir 5.3.33.a, butir 5.3.33.b dan butir 5.3.33.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas yang tercantum pada SKPD Inspektorat Daerah semula Rp4.768.689.000,00 berkurang Rp2.034.099.000,00 menjadi Rp2.734.590.000,00 atau 7,61% dari total belanja pada SKPD Inspektorat Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.1) dan butir 3.4.1.2.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	2. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN Penyediaan anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp61.553.995.461,00 atau 0,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut: a. Alokasi anggaran Belanja Pegawai pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp29.316.361.161,00 atau 0,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; b. Alokasi anggaran Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp654.960.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Daerah Rp31.582.674.300,00 atau 0,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional semula Rp1.518.830.394,00 berkurang Rp351.363.705,00 menjadi Rp1.167.466.689,00; telah memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diarahkan hanya untuk berbagai program	Pemerintah Daerah Provinsi Bali akan terus berupaya konsisten dmengalokasikan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	pengembangan kompetensi dan uji kompetensi, sebagaimana maksud butir 5.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 3. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Penyediaan anggaran FKUB semula Rp1.049.045.322,00 berkurang Rp247.831.115,00 menjadi Rp801.214.207,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah semula Rp1.049.045.322,00 berkurang Rp247.831.115,00 menjadi Rp801.214.207,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, dengan berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, penyediaan anggaran FKUB dimaksud untuk disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung pelaksanaan FKUB dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 5.3.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4. Alokasi Anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Penyediaan anggaran pelaksanaan FORKOPIMDA Provinsi semula Rp999.999.700,00 berkurang Rp41.627.600,00 menjadi Rp958.372.100,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya	Penyediaan anggaran FKUB telah disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung pelaksanaan FKUB dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 5.3.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi semula Rp999.999.700,00 berkurang Rp41.627.600,00 menjadi Rp958.372.100,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Provinsi Bali sebagai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur Bali dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan butir 5.3.1.a.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 5. Alokasi Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Penyediaan anggaran TP-PKK semula Rp4.566.274.600,00 bertambah Rp2.292.446.337,00 menjadi Rp6.858.720.937,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Penyediaan anggaran pelaksanaan FORKOPIMDA digunakan untuk mendukung peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Provinsi Bali sebagai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur Bali dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan butir 5.3.1.a.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Hukum Adat semula Rp4.566.274.600,00 bertambah Rp2.292.446.337,00 menjadi Rp6.858.720.937,00. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi Bali melalui: - Upaya percepatan penurunan Stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; - Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti trafficking dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual; - Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian; - Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman dengan mendayagunakan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka Stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga; e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, Thermometer, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan Keluarga Berencana untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat; f. Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:	Penyediaan anggaran TP-PKK diarahkan untuk penerapan implementasi 10 Program Pokok PKK, antara lain : berupa kegiatan Aksi Sosial “Menyapa dan Berbagi” di 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota se-Bali berupa pemberian bantuan sosial dengan sasaran penerima yaitu, Lansia, Ibu Hamil, Disabilitas, Kader PKK dan Balita. Bantuan ini bersifat selektif dengan kriteria masyarakat yang kurang mampu, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan-kegiatan Aksi Sosial terus dilakukan secara berkelanjutan baik secara khusus oleh TP PKK Provinsi Bali maupun melalui kolaborasi dan sinergi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; 2) gotong royong; 3) pangan; 4) sandang; 5) perumahan dan tata laksana rumah tangga; 6) pendidikan dan keterampilan; 7) kesehatan; 8) pengembangan kehidupan berkoperasi; 9) kelestarian lingkungan hidup; dan 10) perencanaan sehat. g. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi Bali dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025; h. Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi Bali, serta kegiatan lainnya; dan i. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah; sebagaimana maksud butir 5.3.12.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 6. Alokasi Anggaran Penguatan Posyandu Penyediaan anggaran penguatan Posyandu semula Rp4.566.274.600,00 bertambah Rp2.292.446.337,00 menjadi Rp6.858.720.937,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Hukum Adat semula Rp4.566.274.600,00 bertambah Rp2.292.446.337,00 menjadi Rp6.858.720.937,00. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan Posyandu dan insentif Kader guna mendukung penyelenggaraan Posyandu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 serta pemuatahkirannya. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali melakukan penguatan Posyandu dengan mengambil langkah-langkah antara lain: a. optimalisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung Posyandu sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas: 1) melakukan pemberdayaan masyarakat desa; 2) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan 3) meningkatkan pelayanan masyarakat desa.	Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah melakukan penguatan Posyandu melalui beberapa langkah strategis, antara lain: 1. Melakukan pembinaan dan sosialisasi untuk implementasi posyandu dalam pelayanan 6 bidang SPM di 9 kabupaten/kota. 2. Peningkatan kapasitas untuk Pengurus TP Posyandu Kab/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan melalui daring Namun, pelaksanaan pemberian operasional, insentif, peningkatan kapasitas, dan sarana prasarana masih terbatas karena kemampuan keuangan daerah yang belum memadai

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	b. penyelarasan program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan 6 (enam) bidang SPM; dan c. memberikan dukungan operasional, insentif, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan; sebagaimana maksud butir 5.3.12.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 7. Alokasi Anggaran Perhutanan Sosial Penyediaan anggaran Perhutanan Sosial yang tercantum pada: a. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi semula Rp198.400.230,00 berkurang Rp94.835.115,00 menjadi Rp103.565.115,00; b. Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan semula Rp73.261.000,00 berkurang Rp33.220.000,00 menjadi Rp40.041.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung Pembangunan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan dan pembiayaan pengelolaan, dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan dan/atau melestarikan hutan di	Pelaksanaan Perhutanan Sosial telah dianggarkan dalam Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi serta Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan melalui pendampingan pemberian akses legal dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan pelestarian pemanfaatan hutan dengan skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	dalam dan di luar kawasan hutan sebagaimana maksud Pasal 124 dan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan butir 5.3.26.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 8. Alokasi Anggaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Penyediaan anggaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota semula Rp135.878.612,00 berkurang Rp44.555.410,00 menjadi Rp91.323.202,00; b. Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan semula Rp441.492.840,00 berkurang Rp112.582.820,00 menjadi Rp328.910.020,00; c. Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa semula Rp187.162.830,00 berkurang Rp91.658.115,00 menjadi Rp95.504.715,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada butir 5.3.34.i.19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Penyediaan dan Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan serta Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa telah mempedomani sebagaimana dimaksud pada pada butir 5.3.34.i.19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	9. Alokasi Anggaran Memajukan Kebudayaan Indonesia Penyediaan anggaran Memajukan Kebudayaan Indonesia yang antara lain tercantum pada: a. Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya semula Rp314.769.196,00 bertambah Rp11.318.469,00 menjadi Rp326.087.665,00; b. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi semula Rp240.753.230,00 berkurang Rp73.429.115,00 menjadi Rp167.324.115,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada butir 5.3.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 10. Alokasi Anggaran Bantuan Hukum Penyediaan anggaran Bantuan Hukum yang tercantum pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum semula Rp2.767.731.736,00 berkurang Rp305.522.181,00 menjadi Rp2.462.209.555,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana maksud butir 5.3.30.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Penyediaan dan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya dan Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi telah mempedomani butir 5.3.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Penyediaan anggaran bantuan hukum berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	11. Alokasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyediaan anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka semula Rp3.535.199.600,00 berkurang Rp87.104.300,00 Rp3.448.095.300,00 menjadi Rp3.448.095.300,00; b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah semula Rp676.176.212,00 bertambah Rp2.476.727.590,00 menjadi Rp3.152.903.802,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dengan berpedoman pada butir 5.3.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pengalokasian anggaran pada masing-masing sub kegiatan tersebut, sudah diperhitungkan secara cermat sesuai kebutuhan riil yang diperlukan dalam dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	12. Alokasi Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada: a. Belanja Pegawai BLUD semula Rp119.276.691.593,00 bertambah Rp13.475.300.000,00 menjadi Rp132.751.991.593,00; b. Belanja Barang dan Jasa BLUD semula Rp208.816.201.390,00 bertambah Rp40.134.453.017,00 menjadi Rp248.950.654.407,00; c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula Rp25.165.186.000,00 bertambah Rp10.910.905.000,00 menjadi Rp36.076.091.000,00; d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD semula Rp4.208.000.000,00 bertambah Rp1.667.263.000,00 menjadi Rp5.875.263.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir 5.2.7	Penganggaran belanja yang bersumber dari BLUD telah mempedomani sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.3.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
IV.	KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Jumlah dan besaran alokasi anggaran yang tercantum pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel. 6 sebagai berikut: Tabel. 6 Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI						TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025																																
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Perubahan RKPD Tahun 2025</th><th colspan="2">Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025</th><th colspan="2">Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025</th></tr> <tr> <th>Jumlah</th><th>Pagu (Rp)</th><th>Jumlah</th><th>Pagu (Rp)</th><th>Jumlah</th><th>Pagu (Rp)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Program</td><td>268</td><td rowspan="3">7.165.907.488.376</td><td>268</td><td rowspan="3">7.070.354.858.916</td><td>268</td><td rowspan="3">7.408.577.983.959</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Kegiatan</td><td>640</td><td>641</td><td>642</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Sub Kegiatan</td><td>1641</td><td>1644</td><td>1644</td></tr> </table> Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 belum seluruhnya berpedoman pada Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk selanjutnya agar secara terus menerus menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan berpedoman pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal						No	Uraian	Perubahan RKPD Tahun 2025		Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025		Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025		Jumlah	Pagu (Rp)	Jumlah	Pagu (Rp)	Jumlah	Pagu (Rp)	1	Program	268	7.165.907.488.376	268	7.070.354.858.916	268	7.408.577.983.959	2	Kegiatan	640	641	642	3	Sub Kegiatan	1641	1644	1644	Pemerintah Daerah Provinsi Bali terus berupaya secara konsisten menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD
No	Uraian	Perubahan RKPD Tahun 2025		Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025		Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025																																	
		Jumlah	Pagu (Rp)	Jumlah	Pagu (Rp)	Jumlah	Pagu (Rp)																																
1	Program	268	7.165.907.488.376	268	7.070.354.858.916	268	7.408.577.983.959																																
2	Kegiatan	640		641		642																																	
3	Sub Kegiatan	1641		1644		1644																																	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%	Penambahan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan dalam rangka mengakomodir: 1. belanja DAK Non Fisik untuk biaya operasional Penyuluh Pertanian 2. program prioritas daerah “Satu Keluarga Satu Sarjana. Penambahan ini juga telah disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Bali paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Bali	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
v.	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
	A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah 1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. 2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	3. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Provinsi Bali berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.11.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,	Terhadap penganggaran pendapatan bagian laba atas penyertaan modal akan diperhitungkan dengan besaran penambahan modal pada BUMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penambahan modal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendapatkan deviden yang lebih besar sesuai target yang telah ditetapkan pada masa tahun anggaran, manfaat ekonomi dari penyertaan modal bisa dirasakan dalam jangka waktu pendek jika perusahaan dapat langsung bisa memberikan deviden.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Bali kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (<i>performance based</i>), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain BOSP, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari Kementerian/Lembaga yang diterima perangkat	Terhadap kinerja BUMD yang belum memadai langkah yang dapat dilakukan yaitu bisa dilakukan dengan audit kinerja dan keuangan oleh auditor independen (Akuntan Publik) dan pengawas internal yaitu inspektorat untuk dapat menggali atau mengidentifikasi masalahnya apakah dari sisi manajemen, model bisnis, Oprsional atau Regulasi yang tujuannya untuk megetahui kondisi riil BUMD tersebut untuk dapat segera bisa mengambil kebijakan Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen dalam melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan dalam mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2024.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sebagaimana maksud butir 3.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 6. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), SKPD dan/atau BLUD sebagaimana maksud butir 3.2.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 7. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan Penyediaan anggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula Rp6.027.724.313.823,00 bertambah	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025																																																												
	Rp628.507.417.463,00 menjadi Rp6.656.231.731.286,00, sebagaimana Tabel. 7 sebagai berikut: Tabel 7 Postur Pendapatan Daerah <table><tr><th>URAIAN</th><th>APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)</th><th>Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)</th><th>Bertambah/ (Berkurang) (Rp)</th><th>%</th></tr><tr><td>PENDAPATAN DAERAH</td><td>6.027.724.313.823</td><td>6.656.231.731.286</td><td>628.507.417.463</td><td></td></tr><tr><td>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</td><td>3.581.371.604.823</td><td>4.211.871.128.917</td><td>630.499.524.094</td><td>63,28</td></tr><tr><td>Pajak Daerah</td><td>2.611.036.410.791</td><td>2.817.839.352.516</td><td>206.802.941.725</td><td>42,33</td></tr><tr><td>Retribusi Daerah</td><td>337.336.008.147</td><td>389.725.217.614</td><td>52.389.209.467</td><td>5,86</td></tr><tr><td>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</td><td>193.896.695.885</td><td>253.603.839.112</td><td>59.707.143.227</td><td>3,81</td></tr><tr><td>Lain-lain PAD yang Sah</td><td>439.102.490.000</td><td>750.702.719.675</td><td>311.600.229.675</td><td>11,28</td></tr><tr><td>PENDAPATAN TRANSFER</td><td>2.440.644.709.000</td><td>2.438.603.330.369</td><td>(2.041.378.631)</td><td>36,64</td></tr><tr><td>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</td><td>2.440.644.709.000</td><td>2.403.777.640.000</td><td>(36.867.069.000)</td><td>36,11</td></tr><tr><td>Pendapatan Transfer Antar Daerah</td><td>0</td><td>34.825.690.369</td><td>34.825.690.369</td><td>0,52</td></tr><tr><td>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</td><td>5.708.000.000</td><td>5.757.272.000</td><td>49.272.000</td><td>0,09</td></tr><tr><td>Pendapatan Hibah</td><td>5.708.000.000</td><td>5.757.272.000</td><td>49.272.000</td><td>0,09</td></tr></table> Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD semula Rp3.581.371.604.823,00 bertambah Rp630.499.524.094,00 menjadi	URAIAN	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	PENDAPATAN DAERAH	6.027.724.313.823	6.656.231.731.286	628.507.417.463		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.581.371.604.823	4.211.871.128.917	630.499.524.094	63,28	Pajak Daerah	2.611.036.410.791	2.817.839.352.516	206.802.941.725	42,33	Retribusi Daerah	337.336.008.147	389.725.217.614	52.389.209.467	5,86	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	193.896.695.885	253.603.839.112	59.707.143.227	3,81	Lain-lain PAD yang Sah	439.102.490.000	750.702.719.675	311.600.229.675	11,28	PENDAPATAN TRANSFER	2.440.644.709.000	2.438.603.330.369	(2.041.378.631)	36,64	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.440.644.709.000	2.403.777.640.000	(36.867.069.000)	36,11	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	34.825.690.369	34.825.690.369	0,52	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.708.000.000	5.757.272.000	49.272.000	0,09	Pendapatan Hibah	5.708.000.000	5.757.272.000	49.272.000	0,09	
URAIAN	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%																																																										
PENDAPATAN DAERAH	6.027.724.313.823	6.656.231.731.286	628.507.417.463																																																											
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.581.371.604.823	4.211.871.128.917	630.499.524.094	63,28																																																										
Pajak Daerah	2.611.036.410.791	2.817.839.352.516	206.802.941.725	42,33																																																										
Retribusi Daerah	337.336.008.147	389.725.217.614	52.389.209.467	5,86																																																										
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	193.896.695.885	253.603.839.112	59.707.143.227	3,81																																																										
Lain-lain PAD yang Sah	439.102.490.000	750.702.719.675	311.600.229.675	11,28																																																										
PENDAPATAN TRANSFER	2.440.644.709.000	2.438.603.330.369	(2.041.378.631)	36,64																																																										
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.440.644.709.000	2.403.777.640.000	(36.867.069.000)	36,11																																																										
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	34.825.690.369	34.825.690.369	0,52																																																										
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.708.000.000	5.757.272.000	49.272.000	0,09																																																										
Pendapatan Hibah	5.708.000.000	5.757.272.000	49.272.000	0,09																																																										

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp4.211.871.128.917,00 atau 63,28% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp3.686.371.604.823,00 atau 60,47% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp6.095.800.244.823,00, dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp4.590.033.889.600,00 atau 66,75% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp6.876.016.193.600,00 dan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.041.446.320.153,00 atau 69,55% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp7.248.953.175.947,00. Selain itu, tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikut: a. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025 Rp2.236.688.528.005,68 atau 60,67% dari total	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp3.686.371.604.823,00; b. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 Rp5.535.429.679.670,83 atau 120,60% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp4.590.033.889.600,00; c. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 Rp4.623.648.871.938,02 atau 91,71% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.041.446.320.153,00. Berdasarkan data tren realisasi PAD tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan perhitungan kembali atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam jenis pendapatan: a. Pajak Daerah Penyediaan anggaran target pendapatan Pajak Daerah Rp2.611.036.410.791,00 atau 43,32% dari	Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah melakukan perhitungan kembali atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan: 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semula Rp1.132.106.644.500,00 berkurang Rp129.748.817.500, menjadi Rp1.002.357.827.000,00; 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) semula Rp627.703.889.600,00 bertambah Rp170.366.743.225,00 menjadi Rp798.070.632.825,00; 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) semula Rp476.000.000.000,00 bertambah Rp163.365.501.000,00 menjadi Rp639.365.501.000,00; 4) Pajak Air Permukaan semula Rp1.150.485.000,00 bertambah Rp2.849.515.000,00 menjadi Rp4.000.000.000,00; 5) Pajak Rokok Rp354.875.391.691,00; 6) Pajak Alat Berat semula Rp120.000.000,00 berkurang Rp30.000.000,00 menjadi Rp90.000.000,00; 7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) Rp19.080.000.000,00. b. Retribusi Daerah Penyediaan anggaran target pendapatan Retribusi Daerah semula Rp337.336.008.147,00 bertambah Rp52.389.209.467,00 menjadi	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp389.725.217.614,00 atau 5,86% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan: 1) Retribusi Jasa Umum semula Rp311.749.308.983,00 bertambah Rp29.400.581.017,00 menjadi Rp341.149.890.000,00; 2) Retribusi Jasa Usaha semula Rp21.586.699.164,00 bertambah Rp21.588.628.450,00 menjadi Rp43.175.327.614,00; 3) Retribusi Perizinan Tertentu semula Rp4.000.000.000,00 bertambah Rp1.400.000.000,00 menjadi Rp5.400.000.000,00. Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi struktur ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.c Lampiran	Penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi struktur ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Selain itu, penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan: 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; 3) dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; 4) pemberian insentif Pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.1), butir 3.3.1.1.1.o.2), butir 3.3.1.1.1.o.3) dan butir 3.3.1.1.1.r Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk penggunaan PKB sebagaimana tercantum pada butir a.1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, untuk penggunaan Pajak Rokok sebagaimana tercantum dalam butir a.5) dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari hak Provinsi untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sebagaimana maksud Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir 3.3.1.1.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penganggaran target pendapatan Pajak Rokok Provinsi Bali telah disesuaikan dengan alokasi Pajak Rokok yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-49/PK/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Masing Provinsi Tahun Anggaran 2025 Rp354.875.391.691,00. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari Pajak Rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dalam rangka mendukung program JKN, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang merupakan bagian Provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan Pajak Rokok bagian hak Provinsi atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk pendanaan program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah	Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan penggunaan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian daerah provinsi atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir 3.3.1.1.2.c.1).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penyediaan anggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula Rp193.896.695.885,00 bertambah Rp59.707.143.227,00 menjadi Rp253.603.839.112,00 atau 3,81% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan ke dalam objek pendapatan: a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD semula Rp193.102.918.043,00 bertambah Rp60.279.838.647,00 menjadi Rp253.382.756.690,00 atau 3,81% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Perusahaan Milik Swasta semula Rp609.518.542,00 berkurang Rp388.436.120,00 menjadi Rp221.082.422,00 atau 0,003% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dimaksud, merupakan Hasil Penyertaan Modal antara lain dari: a. PT. BPD Bali Rp191.580.177.566,00 atau 29,71% dari total Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp644.912.000.000,00; b. PT. Asuransi Bangun Askrida Rp184.259.300,00 atau 16,02% dari total Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp1.150.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Bali sampai dengan Tahun Anggaran 2024.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain: 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah; 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah; dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir 3.3.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan	Terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bali yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based), akan dilakukan upaya-upaya pembenahan dengan harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD. Selanjutnya, terhadap hasil Penyertaan Modal pada: a. BUMD yang kinerjanya belum memadai (<i>performance based</i>) dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu: 1) PT. Puri Raharja Rp609.518.542,00 atau 6,98% dari total Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp8.736.000.000,00; 2) PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Rp1.522.740.477,00 atau 1,07% dari total Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp142.000.000.000,00. b. BUMD yang belum memberikan bagian laba dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu: 1) PT. Jasamarga Bali dari total Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp100.000.000.000,00; 2) Perusahaan Daerah Provinsi Bali dari total Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp5.282.769.658,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	agar melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penyediaan anggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula Rp439.102.490.000,00 bertambah Rp311.600.229.675,00 menjadi Rp750.702.719.675,00 atau 11,28% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut: a. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per tanggal 1 Agustus 2025 Rp352.950.188.347,92 atau 80,38% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp439.102.490.000,00; b. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 Rp479.362.542.101,08 atau 123,45% dari total Lain-lain Pendapatan Asli	Pemerintah Provinsi Bali saat ini masih fokus melakukan pengembangan usaha atau diversifikasi terhadap Perumda Provinsi Bali serta melakukan upaya peningkatan kinerja PT. Jasamarga Bali Tol, yang masih difokuskan pada percepatan pengembalian Break Even Poin (BEP) selama 37 Tahun, sehingga sampai dengan saat ini semua pemegang saham belum mendapatkan bagian laba atas penyertaan modal tersebut.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp388.297.696.494,00; c. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 Rp401.662.321.228,70 atau 42,69% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 Rp940.941.381.702,00. Berdasarkan data tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan: a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp390.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang	Pemerintah Provinsi Bali dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir 3.3.1.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. b. Hasil Kerja Sama Daerah semula Rp3.135.020.000,00 bertambah Rp3.089.760.000,00 menjadi Rp6.224.780.000,00 atau 0,09% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan butir 3.3.1.3.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. c. Jasa Giro semula Rp10.000.000.000,00 berkurang Rp730.581.219,00 menjadi Rp9.269.418.781,00 atau 0,14% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. d. Pendapatan Bunga semula Rp1.000.000.000,00 bertambah Rp1.645.833.333,00 menjadi Rp2.645.833.333,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah semula Rp1.000.000,00 bertambah Rp4.000.000,00 menjadi Rp5.000.000,00 atau 0,0001% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan semula Rp1.000.000,00 bertambah Rp125.144.212,00 menjadi Rp126.144.212,00 atau 0,002% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. g. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp50.500.100.000,00 atau 0,76% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah semula Rp600.000,00 bertambah Rp2.164.940,00 menjadi Rp2.764.940,00 atau 0,00004% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. i. Pendapatan dari Pengembalian semula Rp100.000.000,00 bertambah Rp94.896.528.409,00 menjadi Rp94.996.528.409,00 atau 1,43% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. j. Pendapatan BLUD semula Rp48.974.770.000,00 bertambah Rp37.567.380.000,00 menjadi Rp86.542.150.000,00 atau 1,30% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir 3.3.1.3.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. k. Pungutan bagi Wisatawan Asing semula Rp325.000.000.000,00 bertambah Rp175.000.000.000,00 menjadi Rp500.000.000.000,00 atau 7,51% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.24) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4. Pendapatan Transfer Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula Rp2.440.644.709.000,00 berkurang Rp2.041.378.631,00 menjadi Rp2.438.603.330.369,00 atau 36,64% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam jenis pendapatan: a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp2.440.644.709.000,00 berkurang Rp36.867.069.000,00 menjadi Rp2.403.777.640.000,00 atau 36,11% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan: 1) Transfer Ke Daerah (TKD) semula Rp2.440.644.709.000,00 berkurang Rp36.867.069.000,00 menjadi Rp2.403.777.640.000,00 atau 36,11% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan: 2) Insentif Fiskal Rp12.978.586.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025; 3) Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.401.748.162.000,00 sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025; 4) DAK Fisik semula Rp127.058.736.000,00 berkurang Rp36.924.069.000,00 menjadi Rp90.134.667.000,00 sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Penganggaran DAK Non Fisik sebesar Rp653.968.029.000,00 atau lebih besar Rp57.000.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 disebabkan karena adanya tambahan anggaran DAK Non Fisk Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 5) DAK Non Fisik semula Rp653.911.029.000,00 bertambah Rp57.000.000,00 menjadi Rp653.968.029.000,00 lebih besar Rp57.000.000,00 dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Rp653.911.029.000,00. b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp34.825.690.369,00 atau 0,52% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Bantuan Keuangan Rp34.825.690.369,00 atau 0,52% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Rp34.825.690.369,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Presiden Nomor 201 Tahun 2024 dan/atau Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, sebagaimana maksud butir 3.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, dalam hal selisih penganggaran Dana TKD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	merupakan penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) dari Rekening Umum Kas Negara ke RKUD, maka Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat menganggarkan penarikan dana TDF dimaksud pada kode rekening berkenaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i>. 5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah semula Rp5.708.000.000,00 bertambah Rp49.272.000,00 menjadi Rp5.757.272.000,00 atau 0,09% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Hibah semula Rp5.708.000.000,00 bertambah Rp49.272.000,00 menjadi Rp5.757.272.000,00 atau 0,09% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek pendapatan: a. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri semula Rp5.708.000.000,00 bertambah Rp45.232.000,00 menjadi Rp5.753.232.000,00; b. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp4.040.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan bersifat tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi sebagaimana maksud Pasal 47 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.3.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Penganggaran Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sudah mempedomani Pasal 47 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.3.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
VI.	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
	A. Kebijakan Umum Belanja Daerah 1. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menganggarkan Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana maksud butir 3.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 2. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana maksud butir 3.2.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja <i>Mandatory Spending</i> serta pemenuhan target SPM, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	sebagaimana maksud butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 3. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak <i>absurd</i> untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir 3.2.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah Provinsi Bali memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana maksud Pasal 4 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 5. Belanja Daerah untuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan, sedangkan belanja daerah selain Urusan Wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan sebagaimana maksud butir 3.2.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025																																																																																																					
	B. Urusan Pemerintah Daerah Ringkasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintah Daerah dan Jenis Belanja Daerah, diuraikan sebagaimana Tabel. 8 sebagai berikut: Tabel 8 Urusan Pemerintah Daerah <table><tr><th rowspan="2">Urusan Pemerintah Daerah</th><th colspan="5">Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025</th></tr><tr><th>Belanja Operasi (Rp)</th><th>Belanja Modal (Rp)</th><th>Belanja Tidak Terduga (Rp)</th><th>Belanja Transfer (Rp)</th><th>Jumlah (Rp)</th></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</td><td>2.907.231.156.882</td><td>659.664.643.496</td><td>0</td><td>0</td><td>3.566.895.800.378</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</td><td>1.694.500.679.311</td><td>239.116.866.636</td><td>0</td><td>0</td><td>1.933.617.545.947</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</td><td>710.901.655.218</td><td>109.013.689.825</td><td>0</td><td>0</td><td>819.915.345.043</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</td><td>382.430.744.093</td><td>297.065.958.897</td><td>0</td><td>0</td><td>679.496.702.990</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</td><td>8.687.995.075</td><td>725.527.580</td><td>0</td><td>0</td><td>9.413.522.655</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</td><td>78.548.534.936</td><td>8.452.956.093</td><td>0</td><td>0</td><td>87.001.491.029</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</td><td>32.161.548.249</td><td>5.289.644.465</td><td>0</td><td>0</td><td>37.451.192.714</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</td><td>1.004.058.738.725,40</td><td>195.579.848.394</td><td>0</td><td>0</td><td>1.199.638.587.119,40</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</td><td>38.501.407.334</td><td>152.010.960</td><td>0</td><td>0</td><td>38.653.418.294</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</td><td>1.922.753.273</td><td>4.241.522.900</td><td>0</td><td>0</td><td>6.164.276.173</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</td><td>2.479.303.149</td><td>16.771.460</td><td>0</td><td>0</td><td>2.496.074.609</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</td><td>6.113.479.700</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>6.113.479.700</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</td><td>16.897.238.254</td><td>9.272.835.643</td><td>0</td><td>0</td><td>26.170.073.897</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</td><td>326.704.025</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>326.704.025</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</td><td>21.650.095.608</td><td>147.276.800</td><td>0</td><td>0</td><td>21.797.372.408</td></tr></table>	Urusan Pemerintah Daerah	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025					Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah (Rp)	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.907.231.156.882	659.664.643.496	0	0	3.566.895.800.378	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.694.500.679.311	239.116.866.636	0	0	1.933.617.545.947	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	710.901.655.218	109.013.689.825	0	0	819.915.345.043	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	382.430.744.093	297.065.958.897	0	0	679.496.702.990	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.687.995.075	725.527.580	0	0	9.413.522.655	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	78.548.534.936	8.452.956.093	0	0	87.001.491.029	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	32.161.548.249	5.289.644.465	0	0	37.451.192.714	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.004.058.738.725,40	195.579.848.394	0	0	1.199.638.587.119,40	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	38.501.407.334	152.010.960	0	0	38.653.418.294	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.922.753.273	4.241.522.900	0	0	6.164.276.173	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.479.303.149	16.771.460	0	0	2.496.074.609	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	6.113.479.700	0	0	0	6.113.479.700	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	16.897.238.254	9.272.835.643	0	0	26.170.073.897	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	326.704.025	0	0	0	326.704.025	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.650.095.608	147.276.800	0	0	21.797.372.408	
Urusan Pemerintah Daerah	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025																																																																																																						
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah (Rp)																																																																																																		
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.907.231.156.882	659.664.643.496	0	0	3.566.895.800.378																																																																																																		
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.694.500.679.311	239.116.866.636	0	0	1.933.617.545.947																																																																																																		
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	710.901.655.218	109.013.689.825	0	0	819.915.345.043																																																																																																		
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	382.430.744.093	297.065.958.897	0	0	679.496.702.990																																																																																																		
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.687.995.075	725.527.580	0	0	9.413.522.655																																																																																																		
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	78.548.534.936	8.452.956.093	0	0	87.001.491.029																																																																																																		
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	32.161.548.249	5.289.644.465	0	0	37.451.192.714																																																																																																		
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.004.058.738.725,40	195.579.848.394	0	0	1.199.638.587.119,40																																																																																																		
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	38.501.407.334	152.010.960	0	0	38.653.418.294																																																																																																		
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.922.753.273	4.241.522.900	0	0	6.164.276.173																																																																																																		
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.479.303.149	16.771.460	0	0	2.496.074.609																																																																																																		
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	6.113.479.700	0	0	0	6.113.479.700																																																																																																		
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	16.897.238.254	9.272.835.643	0	0	26.170.073.897																																																																																																		
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	326.704.025	0	0	0	326.704.025																																																																																																		
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.650.095.608	147.276.800	0	0	21.797.372.408																																																																																																		

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025																																																																																																																																																																																																																																																				
	<table><tr><th rowspan="2">Urusan Pemerintah Daerah</th><th colspan="5">Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025</th></tr><tr><th>Belanja Operasi (Rp)</th><th>Belanja Modal (Rp)</th><th>Belanja Tidak Terduga (Rp)</th><th>Belanja Transfer (Rp)</th><th>Jumlah (Rp)</th></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</td><td>474.711.630</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>474.711.630</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</td><td>103.031.141.028,40</td><td>1.680.430.060</td><td>0</td><td>0</td><td>104.711.571.088,40</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</td><td>81.726.821.896</td><td>163.341.665.778</td><td>0</td><td>0</td><td>245.068.487.674</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</td><td>22.074.885.383</td><td>955.055.300</td><td>0</td><td>0</td><td>23.029.940.683</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</td><td>17.908.676.989</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>17.908.676.989</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga</td><td>94.629.113.800</td><td>67.374.500</td><td>0</td><td>0</td><td>94.696.488.300</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</td><td>281.847.820</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>281.847.820</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</td><td>294.555.205</td><td>29.602.200</td><td>0</td><td>0</td><td>324.157.405</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</td><td>594.845.912.518</td><td>15.630.302.793</td><td>0</td><td>0</td><td>610.476.215.311</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan</td><td>323.970.632</td><td>45.000.000</td><td>0</td><td>0</td><td>368.970.632</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan</td><td>576.120.481</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>576.120.481</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Pilihan</td><td>230.371.556.776,20</td><td>5.706.753.520</td><td>0</td><td>0</td><td>236.078.310.296,20</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan</td><td>32.585.153.934,20</td><td>3.459.855.000</td><td>0</td><td>0</td><td>36.045.008.934,20</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</td><td>30.881.670.695</td><td>724.253.888</td><td>0</td><td>0</td><td>31.605.924.583</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</td><td>98.139.372.899</td><td>159.156.200</td><td>0</td><td>0</td><td>98.298.529.099</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan</td><td>44.173.575.493</td><td>446.257.312</td><td>0</td><td>0</td><td>44.619.832.805</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</td><td>76.085.500</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>76.085.500</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</td><td>18.870.104.197</td><td>505.981.360</td><td>0</td><td>0</td><td>19.376.085.557</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</td><td>5.620.709.258</td><td>411.249.760</td><td>0</td><td>0</td><td>6.031.959.018</td></tr><tr><td>Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi</td><td>24.884.800</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>24.884.800</td></tr><tr><td>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</td><td>513.666.805.529</td><td>77.436.957.524</td><td>0</td><td>0</td><td>591.103.763.053</td></tr></table> <table><tr><th rowspan="2">Urusan Pemerintah Daerah</th><th colspan="5">Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025</th></tr><tr><th>Belanja Operasi (Rp)</th><th>Belanja Modal (Rp)</th><th>Belanja Tidak Terduga (Rp)</th><th>Belanja Transfer (Rp)</th><th>Jumlah (Rp)</th></tr><tr><td>Sekretariat Daerah</td><td>259.542.594.700</td><td>38.859.182.776</td><td>0</td><td>0</td><td>298.401.777.476</td></tr><tr><td>Sekretariat DPRD</td><td>254.124.210.829</td><td>38.577.774.748</td><td>0</td><td>0</td><td>292.701.985.577</td></tr><tr><td>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</td><td>309.561.953.026</td><td>22.977.709.313</td><td>55.464.624.677</td><td>1.344.164.836.020</td><td>1.732.169.123.036</td></tr><tr><td>Perencanaan</td><td>22.781.383.637</td><td>3.052.141.105</td><td>0</td><td>0</td><td>25.833.524.742</td></tr><tr><td>Kuangan</td><td>193.767.760.717</td><td>13.478.962.003</td><td>55.464.624.677</td><td>1.344.164.836.020</td><td>1.606.876.183.417</td></tr><tr><td>Kepegawaian</td><td>56.728.145.772</td><td>3.658.383.000</td><td>0</td><td>0</td><td>60.386.528.772</td></tr><tr><td>Pendidikan dan Pelatihan</td><td>1.167.466.689</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1.167.466.689</td></tr><tr><td>Penelitian dan Pengembangan</td><td>24.972.788.562</td><td>1.914.807.540</td><td>0</td><td>0</td><td>26.887.596.102</td></tr><tr><td>Pengelolaan Penghubung</td><td>10.144.407.649</td><td>873.415.665</td><td>0</td><td>0</td><td>11.017.823.314</td></tr><tr><td>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</td><td>34.051.151.092</td><td>1.893.023.740</td><td>0</td><td>0</td><td>35.944.174.832</td></tr><tr><td>Inspektorat Daerah</td><td>34.051.151.092</td><td>1.893.023.740</td><td>0</td><td>0</td><td>35.944.174.832</td></tr><tr><td>Unsur Kewilayahan</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Kecamatan</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Unsur Pemerintahan Umum</td><td>45.814.918.705</td><td>933.306.540</td><td>0</td><td>0</td><td>46.748.225.245</td></tr><tr><td>Kesatuan Bangsa dan Politik</td><td>45.814.918.705</td><td>933.306.540</td><td>0</td><td>0</td><td>46.748.225.245</td></tr><tr><td>Total</td><td>5.044.756.280.735</td><td>964.192.242.527</td><td>55.464.624.677</td><td>1.344.164.836.020</td><td>7.408.577.983.959</td></tr></table> Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:	Urusan Pemerintah Daerah	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025					Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah (Rp)	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	474.711.630	0	0	0	474.711.630	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	103.031.141.028,40	1.680.430.060	0	0	104.711.571.088,40	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	81.726.821.896	163.341.665.778	0	0	245.068.487.674	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	22.074.885.383	955.055.300	0	0	23.029.940.683	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	17.908.676.989	0	0	0	17.908.676.989	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	94.629.113.800	67.374.500	0	0	94.696.488.300	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	281.847.820	0	0	0	281.847.820	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	294.555.205	29.602.200	0	0	324.157.405	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	594.845.912.518	15.630.302.793	0	0	610.476.215.311	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	323.970.632	45.000.000	0	0	368.970.632	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	576.120.481	0	0	0	576.120.481	Urusan Pemerintahan Pilihan	230.371.556.776,20	5.706.753.520	0	0	236.078.310.296,20	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	32.585.153.934,20	3.459.855.000	0	0	36.045.008.934,20	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	30.881.670.695	724.253.888	0	0	31.605.924.583	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	98.139.372.899	159.156.200	0	0	98.298.529.099	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	44.173.575.493	446.257.312	0	0	44.619.832.805	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	76.085.500	0	0	0	76.085.500	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	18.870.104.197	505.981.360	0	0	19.376.085.557	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	5.620.709.258	411.249.760	0	0	6.031.959.018	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	24.884.800	0	0	0	24.884.800	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	513.666.805.529	77.436.957.524	0	0	591.103.763.053	Urusan Pemerintah Daerah	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025					Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah (Rp)	Sekretariat Daerah	259.542.594.700	38.859.182.776	0	0	298.401.777.476	Sekretariat DPRD	254.124.210.829	38.577.774.748	0	0	292.701.985.577	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	309.561.953.026	22.977.709.313	55.464.624.677	1.344.164.836.020	1.732.169.123.036	Perencanaan	22.781.383.637	3.052.141.105	0	0	25.833.524.742	Kuangan	193.767.760.717	13.478.962.003	55.464.624.677	1.344.164.836.020	1.606.876.183.417	Kepegawaian	56.728.145.772	3.658.383.000	0	0	60.386.528.772	Pendidikan dan Pelatihan	1.167.466.689	0	0	0	1.167.466.689	Penelitian dan Pengembangan	24.972.788.562	1.914.807.540	0	0	26.887.596.102	Pengelolaan Penghubung	10.144.407.649	873.415.665	0	0	11.017.823.314	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	34.051.151.092	1.893.023.740	0	0	35.944.174.832	Inspektorat Daerah	34.051.151.092	1.893.023.740	0	0	35.944.174.832	Unsur Kewilayahan	0	0	0	0	0	Kecamatan	0	0	0	0	0	Unsur Pemerintahan Umum	45.814.918.705	933.306.540	0	0	46.748.225.245	Kesatuan Bangsa dan Politik	45.814.918.705	933.306.540	0	0	46.748.225.245	Total	5.044.756.280.735	964.192.242.527	55.464.624.677	1.344.164.836.020	7.408.577.983.959	
Urusan Pemerintah Daerah	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025																																																																																																																																																																																																																																																					
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																	
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	474.711.630	0	0	0	474.711.630																																																																																																																																																																																																																																																	
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	103.031.141.028,40	1.680.430.060	0	0	104.711.571.088,40																																																																																																																																																																																																																																																	
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	81.726.821.896	163.341.665.778	0	0	245.068.487.674																																																																																																																																																																																																																																																	
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	22.074.885.383	955.055.300	0	0	23.029.940.683																																																																																																																																																																																																																																																	
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	17.908.676.989	0	0	0	17.908.676.989																																																																																																																																																																																																																																																	
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	94.629.113.800	67.374.500	0	0	94.696.488.300																																																																																																																																																																																																																																																	
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	281.847.820	0	0	0	281.847.820																																																																																																																																																																																																																																																	
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	294.555.205	29.602.200	0	0	324.157.405																																																																																																																																																																																																																																																	
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	594.845.912.518	15.630.302.793	0	0	610.476.215.311																																																																																																																																																																																																																																																	
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	323.970.632	45.000.000	0	0	368.970.632																																																																																																																																																																																																																																																	
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	576.120.481	0	0	0	576.120.481																																																																																																																																																																																																																																																	
Urusan Pemerintahan Pilihan	230.371.556.776,20	5.706.753.520	0	0	236.078.310.296,20																																																																																																																																																																																																																																																	
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	32.585.153.934,20	3.459.855.000	0	0	36.045.008.934,20																																																																																																																																																																																																																																																	
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	30.881.670.695	724.253.888	0	0	31.605.924.583																																																																																																																																																																																																																																																	
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	98.139.372.899	159.156.200	0	0	98.298.529.099																																																																																																																																																																																																																																																	
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	44.173.575.493	446.257.312	0	0	44.619.832.805																																																																																																																																																																																																																																																	
Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	76.085.500	0	0	0	76.085.500																																																																																																																																																																																																																																																	
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	18.870.104.197	505.981.360	0	0	19.376.085.557																																																																																																																																																																																																																																																	
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	5.620.709.258	411.249.760	0	0	6.031.959.018																																																																																																																																																																																																																																																	
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	24.884.800	0	0	0	24.884.800																																																																																																																																																																																																																																																	
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	513.666.805.529	77.436.957.524	0	0	591.103.763.053																																																																																																																																																																																																																																																	
Urusan Pemerintah Daerah	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025																																																																																																																																																																																																																																																					
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																	
Sekretariat Daerah	259.542.594.700	38.859.182.776	0	0	298.401.777.476																																																																																																																																																																																																																																																	
Sekretariat DPRD	254.124.210.829	38.577.774.748	0	0	292.701.985.577																																																																																																																																																																																																																																																	
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	309.561.953.026	22.977.709.313	55.464.624.677	1.344.164.836.020	1.732.169.123.036																																																																																																																																																																																																																																																	
Perencanaan	22.781.383.637	3.052.141.105	0	0	25.833.524.742																																																																																																																																																																																																																																																	
Kuangan	193.767.760.717	13.478.962.003	55.464.624.677	1.344.164.836.020	1.606.876.183.417																																																																																																																																																																																																																																																	
Kepegawaian	56.728.145.772	3.658.383.000	0	0	60.386.528.772																																																																																																																																																																																																																																																	
Pendidikan dan Pelatihan	1.167.466.689	0	0	0	1.167.466.689																																																																																																																																																																																																																																																	
Penelitian dan Pengembangan	24.972.788.562	1.914.807.540	0	0	26.887.596.102																																																																																																																																																																																																																																																	
Pengelolaan Penghubung	10.144.407.649	873.415.665	0	0	11.017.823.314																																																																																																																																																																																																																																																	
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	34.051.151.092	1.893.023.740	0	0	35.944.174.832																																																																																																																																																																																																																																																	
Inspektorat Daerah	34.051.151.092	1.893.023.740	0	0	35.944.174.832																																																																																																																																																																																																																																																	
Unsur Kewilayahan	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																	
Kecamatan	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																	
Unsur Pemerintahan Umum	45.814.918.705	933.306.540	0	0	46.748.225.245																																																																																																																																																																																																																																																	
Kesatuan Bangsa dan Politik	45.814.918.705	933.306.540	0	0	46.748.225.245																																																																																																																																																																																																																																																	
Total	5.044.756.280.735	964.192.242.527	55.464.624.677	1.344.164.836.020	7.408.577.983.959																																																																																																																																																																																																																																																	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	1. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 2. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. C. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja Penyediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula Rp6.827.385.005.313,20 bertambah Rp581.192.978.646,40 menjadi Rp7.408.577.983.959,60, sebagaimana Tabel. 9 sebagai berikut:	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025																																																																																																				
	Tabel 9 Postur Belanja Daerah <table><tr><th>URAIAN</th><th>APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)</th><th>Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)</th><th>Bertambah/ (Berkurang) (Rp)</th><th>%</th></tr><tr><td>BELANJA DAERAH</td><td>6.827.385.005.313</td><td>7.408.577.983.959</td><td>581.192.978.646</td><td></td></tr><tr><td>BELANJA OPERASI</td><td>4.880.783.654.845</td><td>5.044.756.280.735</td><td>163.972.625.890</td><td>68,09</td></tr><tr><td>Belanja Pegawai</td><td>2.614.645.674.805</td><td>2.526.874.277.345</td><td>(87.771.397.459)</td><td>34,11</td></tr><tr><td>Belanja Barang dan Jasa</td><td>1.447.603.014.904</td><td>1.552.812.813.254</td><td>105.209.798.350</td><td>20,96</td></tr><tr><td>Belanja Subsidi</td><td>5.090.000.000</td><td>10.009.000.000</td><td>4.919.000.000</td><td>0,14</td></tr><tr><td>Belanja Hibah</td><td>813.294.965.136</td><td>954.948.590.136</td><td>141.653.625.000</td><td>12,89</td></tr><tr><td>Belanja Bantuan Sosial</td><td>150.000.000</td><td>111.600.000</td><td>(38.400.000)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>BELANJA MODAL</td><td>1.007.960.216.627</td><td>964.192.242.527</td><td>(43.767.974.100)</td><td>13,01</td></tr><tr><td>Belanja Modal Tanah</td><td>25.418.325.760</td><td>31.063.325.760</td><td>5.645.000.000</td><td>0,42</td></tr><tr><td>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</td><td>250.200.970.942</td><td>285.718.680.316</td><td>35.517.709.374</td><td>3,86</td></tr><tr><td>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</td><td>531.631.164.379</td><td>321.975.342.904</td><td>(209.655.821.475)</td><td>4,35</td></tr><tr><td>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</td><td>178.268.021.666</td><td>290.303.469.754</td><td>112.035.448.088</td><td>3,92</td></tr><tr><td>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</td><td>22.265.084.280</td><td>34.418.774.193</td><td>12.153.689.913</td><td>0,46</td></tr><tr><td>Belanja Modal Aset Lainnya</td><td>176.649.600</td><td>712.649.600</td><td>536.000.000</td><td>0,01</td></tr><tr><td>BELANJA TIDAK TERDUGA</td><td>151.187.931.213</td><td>55.464.624.677</td><td>(95.723.306.536)</td><td>0,75</td></tr><tr><td>Belanja Tidak Terduga</td><td>151.187.931.213</td><td>55.464.624.677</td><td>(95.723.306.536)</td><td>0,75</td></tr><tr><td>BELANJA TRANSFER</td><td>787.453.202.628</td><td>1.344.164.836.020</td><td>556.711.633.392</td><td>18,14</td></tr><tr><td>Belanja Bagi Hasil</td><td>582.188.016.684</td><td>1.018.848.956.716</td><td>436.660.940.032</td><td>13,75</td></tr><tr><td>Belanja Bantuan Keuangan</td><td>205.265.185.944</td><td>325.315.879.304</td><td>120.050.693.360</td><td>4,39</td></tr></table> Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah	URAIAN	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	BELANJA DAERAH	6.827.385.005.313	7.408.577.983.959	581.192.978.646		BELANJA OPERASI	4.880.783.654.845	5.044.756.280.735	163.972.625.890	68,09	Belanja Pegawai	2.614.645.674.805	2.526.874.277.345	(87.771.397.459)	34,11	Belanja Barang dan Jasa	1.447.603.014.904	1.552.812.813.254	105.209.798.350	20,96	Belanja Subsidi	5.090.000.000	10.009.000.000	4.919.000.000	0,14	Belanja Hibah	813.294.965.136	954.948.590.136	141.653.625.000	12,89	Belanja Bantuan Sosial	150.000.000	111.600.000	(38.400.000)	0,00	BELANJA MODAL	1.007.960.216.627	964.192.242.527	(43.767.974.100)	13,01	Belanja Modal Tanah	25.418.325.760	31.063.325.760	5.645.000.000	0,42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.200.970.942	285.718.680.316	35.517.709.374	3,86	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	531.631.164.379	321.975.342.904	(209.655.821.475)	4,35	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	178.268.021.666	290.303.469.754	112.035.448.088	3,92	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.265.084.280	34.418.774.193	12.153.689.913	0,46	Belanja Modal Aset Lainnya	176.649.600	712.649.600	536.000.000	0,01	BELANJA TIDAK TERDUGA	151.187.931.213	55.464.624.677	(95.723.306.536)	0,75	Belanja Tidak Terduga	151.187.931.213	55.464.624.677	(95.723.306.536)	0,75	BELANJA TRANSFER	787.453.202.628	1.344.164.836.020	556.711.633.392	18,14	Belanja Bagi Hasil	582.188.016.684	1.018.848.956.716	436.660.940.032	13,75	Belanja Bantuan Keuangan	205.265.185.944	325.315.879.304	120.050.693.360	4,39	
URAIAN	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%																																																																																																		
BELANJA DAERAH	6.827.385.005.313	7.408.577.983.959	581.192.978.646																																																																																																			
BELANJA OPERASI	4.880.783.654.845	5.044.756.280.735	163.972.625.890	68,09																																																																																																		
Belanja Pegawai	2.614.645.674.805	2.526.874.277.345	(87.771.397.459)	34,11																																																																																																		
Belanja Barang dan Jasa	1.447.603.014.904	1.552.812.813.254	105.209.798.350	20,96																																																																																																		
Belanja Subsidi	5.090.000.000	10.009.000.000	4.919.000.000	0,14																																																																																																		
Belanja Hibah	813.294.965.136	954.948.590.136	141.653.625.000	12,89																																																																																																		
Belanja Bantuan Sosial	150.000.000	111.600.000	(38.400.000)	0,00																																																																																																		
BELANJA MODAL	1.007.960.216.627	964.192.242.527	(43.767.974.100)	13,01																																																																																																		
Belanja Modal Tanah	25.418.325.760	31.063.325.760	5.645.000.000	0,42																																																																																																		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.200.970.942	285.718.680.316	35.517.709.374	3,86																																																																																																		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	531.631.164.379	321.975.342.904	(209.655.821.475)	4,35																																																																																																		
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	178.268.021.666	290.303.469.754	112.035.448.088	3,92																																																																																																		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.265.084.280	34.418.774.193	12.153.689.913	0,46																																																																																																		
Belanja Modal Aset Lainnya	176.649.600	712.649.600	536.000.000	0,01																																																																																																		
BELANJA TIDAK TERDUGA	151.187.931.213	55.464.624.677	(95.723.306.536)	0,75																																																																																																		
Belanja Tidak Terduga	151.187.931.213	55.464.624.677	(95.723.306.536)	0,75																																																																																																		
BELANJA TRANSFER	787.453.202.628	1.344.164.836.020	556.711.633.392	18,14																																																																																																		
Belanja Bagi Hasil	582.188.016.684	1.018.848.956.716	436.660.940.032	13,75																																																																																																		
Belanja Bantuan Keuangan	205.265.185.944	325.315.879.304	120.050.693.360	4,39																																																																																																		

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut: 1. Belanja Operasi Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp4.880.783.654.845,20 bertambah Rp163.972.625.890,40 menjadi Rp5.044.756.280.735,60 atau 68,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja operasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam jenis belanja: a. Belanja Pegawai Penyediaan anggaran Belanja Pegawai semula Rp2.614.645.674.805,20 berkurang Rp87.771.397.459,60 menjadi Rp2.526.874.277.345,60 atau 34,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Tahun Anggaran 2025 yang antara lain tercantum pada: 1) Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp1.277.571.164.761,60 berkurang Rp116.191.075.791,60 menjadi Rp1.161.380.088.970,00 atau 15,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2025, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan <i>acress</i> yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.1.a, butir	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	3.4.1.1.1.b dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) diuraikan sebagai berikut: (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN semula Rp82.614.792.774,00 berkurang Rp3.156.898.589,26 menjadi Rp79.457.894.184,74, yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN seharusnya Rp84.753.386.572,90 atau terdapat selisih kurang Rp5.295.492.388,16. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan untuk ASN dihitung berdasarkan batas paling tinggi Gaji atau Upah (Gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan) ASN per bulan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, yaitu sebesar Rp12.000.000,00 sehingga perhitungan alokasi anggaran iuran Jaminan Kesehatan untuk ASN telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD semula Rp191.281.200,00 berkurang Rp10.053.720,00 menjadi Rp181.227.480,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan DPRD seharusnya Rp191.281.200,00 atau terdapat selisih kurang Rp10.053.720,00. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pemerintah Provinsi Bali akan menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH semula Rp9.075.394,00 berkurang menjadi Rp2.222.594,00, yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH seharusnya Rp7.532.160,00 atau terdapat selisih kurang Rp679.360,00. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun	Penyediaan anggaran dimaksud sudah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan nyata riil untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH yang dibayarkan mulai dari bulan Maret 2025 atau 10 bulan, karena KDH/WKDH baru dilantik pada bulan Pebruari 2025

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, diuraikan sebagai berikut: (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada:	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula Rp2.213.637.105,00 berkurang Rp366.787.094,00 menjadi Rp1.846.850.011,00; (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula Rp6.039.040.305,00 berkurang Rp595.406.910,94 menjadi Rp5.443.633.394,06; belum memenuhi alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN seharusnya: (c) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok Rp810.864.866.826,42 yaitu Rp1.946.075.680,38, atau terdapat selisih kurang Rp99.225.669,38; (d) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok Rp810.864.866.826,42	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	yaitu Rp5.838.227.041,15, atau terdapat selisih kurang Rp394.593.647,09. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Penyediaan anggaran pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN akan disesuaikan kembali dengan tetap memperhitungkan kebutuhan nyata riil pembayaran iuran sampai dengan akhir Tahun 2025.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada: (a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp3.598.560,00; dan (b) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp10.795.680,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan	Penyediaan anggaran pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi DPRD akan disesuaikan kembali dengan tetap memperhitungkan kebutuhan nyata riil pembayaran iuran sampai dengan akhir Tahun 2025.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tercantum pada: (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH semula Rp155.520,00 berkurang Rp17.600,00 menjadi Rp137.920,00; (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH semula Rp466.560,00 berkurang Rp68.800,00 menjadi Rp397.760,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun	Penyediaan anggaran pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/WKDH akan disesuaikan kembali dengan tetap memperhitungkan kebutuhan nyata riil pembayaran iuran sampai dengan akhir Tahun 2025. Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/WKDH tahun 2025, baru dibayarkan mulai bulan Maret 2025, karena baru dilantik pada bulan Pebruari 2025.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. (c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa: i) Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali harus mengalokasikan anggaran belanja <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberikan kepada KDH/WKDH sebanyak 1	Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran belanja <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah, dengan berpedoman pada butir 3.4.1.2.2.b.10).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; dan ii) Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD yang tercantum pada Belanja <i>Medical Check Up</i> Rp121.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan RSUD terdekat, Rumah Sakit	Penyediaan anggaran <i>Medical Check Up</i> bagi Pimpinan dan Anggota DPRD (tidak termasuk istri/suami dan anak), telah dianggarkan melalui program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD dan akan dilaksanakan di Rumah Sakit Bali Mandara milik Pemerintah Provinsi Bali.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.10).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Penyediaan anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula Rp14.738.993.412,00 berkurang Rp6.455.407.070,75 menjadi Rp8.283.586.341,25 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.10 Lampiran Peraturan Menteri	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula Rp59.372.867.624,00 bertambah Rp3.193.946.280,00 menjadi Rp62.566.813.904,00 atau 0,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada: (1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.749.300.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp2.536.485.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi dengan berpedoman	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp251.343.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp9.900.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp2.475.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. (6) Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD semula Rp25.236.000.000,00 bertambah Rp1.980.000.000,00 menjadi Rp27.216.000.000,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD semula Rp14.688.000.000,00 bertambah Rp1.224.000.000,00 menjadi Rp15.912.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, penyediaan anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp360.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari sesuai	Penyediaan anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD telah berdasarkan hasil appraisal kajian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali sesuai Surat Pengantar dari KJPP Ni Made Tjandra Kasih Nomor 001/KJPP-TJK/LP/KJ/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 hal Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD Provinsi Bali.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan dalam penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. 5) Belanja Penerimaan Lainnya KDH/WKDH Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH semula Rp5.372.057.408,00 bertambah Rp945.749.286,00 menjadi Rp6.317.806.694,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus	Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH telah diperhitungkan berdasarkan target pendapatan asli daerah yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Rp4.211.871.128.917,00 yaitu Rp6.317.806.693,38. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. 6) Belanja TPP ASN Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula Rp1.149.704.583.908,60 bertambah Rp10.785.151.514,00 menjadi Rp1.160.489.735.422,60 atau 15,66% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula Rp590.497.836.223,60 berkurang Rp2.242.806.498,00 menjadi Rp588.255.029.725,60;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN semula Rp7.791.125.338,00 berkurang Rp434.757.079,00 menjadi Rp7.356.368.259,00; c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN semula Rp66.749.782.951,40 bertambah Rp4.797.046.185,60 menjadi Rp71.546.829.137,00; d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula Rp30.701.699,00 berkurang Rp6.014.629,00 menjadi Rp24.687.070,00; e) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN semula Rp140.606.922.421,60 bertambah Rp6.789.497.223,40 menjadi Rp147.396.419.645,00; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan diberikan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi dan transformatif sebagaimana maksud butir	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	3.4.1.1.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2025 dalam hal: a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024; b) terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024; dan c) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN; sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.g.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	program koordinasi dan supervisi KPK dengan berpedoman pada Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan butir 3.4.1.1.2.f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, kriteria pemberian TPP ASN atau tunjangan kinerja Tahun Anggaran 2025 diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pemberian TPP ASN dimaksud sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: a) Tambahan Penghasilan Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Guru) yang bersumber dari DAK Nonfisik, yang tercantum pada: (1) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula Rp280.872.927.000,00 bertambah Rp1.701.086.025,00 menjadi Rp282.574.013.025,00; (2) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD semula Rp2.084.180.000,00 bertambah Rp273.500.000,00 menjadi Rp2.357.680.000,00; b) Honorarium/insentif/tunjangan lainnya yang diterima ASN sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor semula Rp38.912.613.183,00 berkurang Rp3.502.027.700,00 menjadi Rp35.410.585.483,00; (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor semula Rp29.112.041.859,00 bertambah Rp2.893.127.127,00 menjadi Rp32.005.168.986,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan semula Rp123.098.196,00 bertambah Rp24.672.780,00 menjadi Rp147.770.976,00; (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan semula Rp5.100.000,00 bertambah Rp5.550.000,00 menjadi Rp10.650.000,00; (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah semula Rp346.096.215,00 bertambah Rp41.021.000,00 menjadi Rp387.117.215,00; (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Rp150.000.000,00; (7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp213.284.160,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	c) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp10.500.000,00; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 untuk Belanja Jasa Pengelolaan BMD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.e.6), butir 3.4.1.1.2.f.5) dan butir 3.4.1.1.2.f.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. b. Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula Rp1.447.603.014.904,00 bertambah Rp105.209.798.350,00 menjadi	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp188.836.169.453,00 bertambah Rp50.164.001.037,00 menjadi Rp239.000.170.490,00 atau 3,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi semula Rp6.524.437.400,00 bertambah Rp2.399.660.500,00 menjadi Rp8.924.097.900,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi semula Rp1.216.875.000,00 bertambah Rp2.396.661.000,00 menjadi Rp3.613.536.000,00 pada Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional pada SKPD Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup; (2) Belanja Bahan-Bahan Kimia semula Rp1.438.114.383,00 bertambah	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp757.544.917,00 menjadi Rp2.195.659.300,00; (3) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman semula Rp1.223.923.650,00 bertambah Rp1.909.037.053,00 menjadi Rp3.132.960.703,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.089.106.000,00 pada Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional pada SKPD Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup; (4) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula Rp860.090.440,00 bertambah Rp1.792.277.657,00 menjadi Rp2.652.368.097,00; (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula Rp4.274.172.700,00 bertambah Rp18.220.100,00 menjadi Rp4.292.392.800,00; (6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover semula Rp3.376.359.560,00 bertambah	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp158.864.870,00 menjadi Rp3.535.224.430,00; (7) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula Rp5.312.647.260,00 bertambah Rp864.915.200,00 menjadi Rp6.177.562.460,00; (8) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer semula Rp4.161.978.438,00 berkurang Rp83.223.800,00 menjadi Rp4.078.754.638,00; (9) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor semula Rp1.258.353.400,00 bertambah Rp106.482.600,00 menjadi Rp1.364.836.000,00; (10) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula Rp1.660.010.800,00 berkurang Rp121.424.600,00 menjadi Rp1.538.586.200,00; (11) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas semula Rp2.780.499.900,00 bertambah Rp62.752.500,00 menjadi Rp2.843.252.400,00; (12) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga semula Rp1.020.683.300,00	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	berkurang Rp15.963.000,00 menjadi Rp1.004.720.300,00; (13) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata semula Rp3.064.750.000,00 bertambah Rp825.940.000,00 menjadi Rp3.890.690.000,00; (14) Belanja Obat-Obatan-Obat semula Rp9.281.088.100,00 bertambah Rp3.037.999.284,00 menjadi Rp12.319.087.384,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Obat-Obatan-Obat semula Rp4.238.820.700,00 bertambah Rp2.809.283.700,00 menjadi Rp7.048.104.400,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan pada SKPD Dinas Kesehatan; (15) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya semula Rp259.918.500,00 bertambah Rp116.144.600,00 menjadi Rp376.063.100,00; (16) Belanja Natura dan Pakan-Natura semula Rp9.725.908.700,00 bertambah Rp82.584.890,00 menjadi Rp9.808.493.590,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(17) Belanja Natura dan Pakan-Pakan semula Rp1.067.104.000,00 bertambah Rp262.500.000,00 menjadi Rp1.329.604.000,00; (18) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan semula Rp753.285.000,00 bertambah Rp188.100.000,00 menjadi Rp941.385.000,00; (19) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula Rp7.999.535.000,00 bertambah Rp3.917.930.000,00 menjadi Rp11.917.465.000,00; (20) Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Rp350.000.000,00; (21) Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Rp1.244.312.500,00; (22) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) semula Rp422.889.700,00 bertambah Rp198.163.494,00 menjadi Rp621.053.194,00; (23) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Rp723.465.500,00; (24) Belanja Pakaian Adat Daerah semula Rp491.605.800,00 bertambah Rp114.324.000,00 menjadi Rp605.929.800,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	b) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi semula Rp2.164.917.530,00 bertambah Rp459.037.104,00 menjadi Rp2.623.954.634,00 atau 0,04% dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum semula Rp7.839.000,00 bertambah Rp273.194.900,00 menjadi Rp281.033.900,00; (2) Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp1.667.404.400,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran	Alokasi anggaran belanja-belanj dimaksud telah dihitung secara cermat berdasarkan kebutuhan nyata pada pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD berpedoman pada standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. c) Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula Rp29.815.006.214,00 bertambah Rp29.237.792,00 menjadi Rp29.844.244.006,00; (2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula Rp20.506.878.944,00 bertambah Rp13.462.291.000,00 menjadi Rp33.969.169.944,00; (3) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp42.458.110.000,00	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	berkurang Rp1.884.505.000,00 menjadi Rp40.573.605.000,00; (4) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula Rp11.875.812.564,00 bertambah Rp1.526.120.000,00 menjadi Rp13.401.932.564,00; untuk dirasionalkan besaran alokasi anggarannya dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor	Penyediaan alokasi anggaran belanja-belanja dimaksud telah dihitung secara cermat berdasarkan kebutuhan nyata pada pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD berpedoman pada standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dan dalam pelaksanaannya akan dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	12 Tahun 2019, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. d) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain yang tercantum pada: (1) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp10.435.927.400,00 bertambah Rp14.374.147.080,00 menjadi Rp24.810.074.480,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp1.500.000.000,00 bertambah Rp3.860.000.000,00 menjadi Rp5.360.000.000,00 pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; (b) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp145.992.000,00 bertambah Rp2.497.700.000,00 menjadi Rp2.643.692.000,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan pada SKPD Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan; (2) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula Rp137.000.000,00 bertambah Rp6.154.933.000,00 menjadi Rp6.291.933.000,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp5.837.298.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; (b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula Rp6.326.254.253,00 bertambah Rp57.534.848.197,00 menjadi Rp63.861.102.450,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pada SKPD Dinas Perhubungan; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang	Alokasi anggaran dimaksud telah dihitung berdasarkan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2024-2029 dan dijabarkan dalam Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam Perubahan RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pengadaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp44.926.069.253,00 bertambah Rp78.304.225.697,00 menjadi Rp123.230.294.950,00 atau 1,66% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp34.019.000.000,00 bertambah Rp10.823.000.000,00 menjadi Rp44.842.000.000,00 atau 0,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula Rp2.904.000.000,00 bertambah Rp898.000.000,00 menjadi Rp3.802.000.000,00; (b) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi semula Rp9.403.000.000,00 bertambah Rp250.000.000,00 menjadi Rp9.653.000.000,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(c) Belanja Beasiswa semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp9.675.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Beasiswa semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp9.675.000.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga; (d) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) Rp21.712.000.000,00; (2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp10.907.069.253,00 bertambah Rp67.481.225.697,00 menjadi Rp78.388.294.950,00 atau 1,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula Rp10.651.069.253,00 bertambah Rp67.181.225.697,00 menjadi Rp77.832.294.950,00; (b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat semula Rp256.000.000,00 bertambah Rp300.000.000,00 menjadi Rp556.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam Perubahan RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak	Alokasi anggaran dimaksud telah dihitung berdasarkan kebutuhan nyata pada pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2024-2029 dan dijabarkan dalam Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan serta Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain agar memperhatikan: a) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam Perubahan RKPD; b) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial; c) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD; dan d) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima; 2) Belanja Jasa Penyediaan anggaran Belanja Jasa semula Rp559.286.365.195,00 berkurang Rp36.062.995.115,00 menjadi Rp523.223.370.080,00 atau 7,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Jasa Kantor semula Rp444.519.484.143,00 berkurang Rp53.545.049.879,00 menjadi Rp390.974.434.264,00 atau 5,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan semula Rp1.486.800.000,00 bertambah Rp101.400.000,00 menjadi Rp1.588.200.000,00; (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia semula	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp8.516.650.000,00 berkurang Rp40.350.000,00 menjadi Rp8.476.300.000,00; (3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula Rp1.446.400.000,00 bertambah Rp116.110.000,00 menjadi Rp1.562.510.000,00; (4) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara Rp1.108.800.000,00; (5) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula Rp21.053.497.336,00 berkurang Rp9.705.494.720,00 menjadi Rp11.348.002.616,00; (6) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp851.400.000,00; (7) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula Rp10.445.984.440,00 berkurang Rp611.298.444,00 menjadi Rp9.834.685.996,00; (8) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula Rp31.440.402.800,00 berkurang Rp3.787.246.116,00 menjadi Rp27.653.156.684,00; (9) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum semula Rp12.891.452.104,00 berkurang	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp1.146.396.888,00 menjadi Rp11.745.055.216,00; (10) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana semula Rp1.820.483.372,00 berkurang Rp299.896.830,00 menjadi Rp1.520.586.542,00; (11) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Rp2.428.800.000,00; (12) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan semula Rp6.661.950.000,00 bertambah Rp5.339.050.000,00 menjadi Rp12.001.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan semula Rp3.956.900.000,00 bertambah Rp3.927.650.000,00 menjadi Rp7.884.550.000,00 pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya pada SKPD Dinas Kebudayaan; (13) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp151.545.441.938,00 berkurang Rp46.925.534.544,00 menjadi Rp104.619.907.394,00; (14) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula Rp9.741.977.446,00 bertambah Rp2.754.167.675,00 menjadi Rp12.496.145.121,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(15) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula Rp15.649.950.000,00 bertambah Rp1.469.900.000,00 menjadi Rp17.119.850.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Tenaga Ahli semula Rp3.993.500.000,00 bertambah Rp1.919.500.000,00 menjadi Rp5.913.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum pada SKPD Badan Riset dan Inovasi Daerah; (16) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula Rp33.744.288.835,00 bertambah Rp410.401.969,00 menjadi Rp34.154.690.804,00; (17) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula Rp30.914.058.105,00 berkurang Rp192.565.610,00 menjadi Rp30.721.492.495,00; (18) Belanja Jasa Tenaga Supir semula Rp11.776.748.182,00 berkurang Rp349.365.494,00 menjadi Rp11.427.382.688,00; (19) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik semula Rp1.536.000.000,00 bertambah	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp289.000.000,00 menjadi Rp1.825.000.000,00; (20) Belanja Jasa Audit/<i>Surveillance</i> ISO semula Rp248.500.000,00 bertambah Rp75.000.000,00 menjadi Rp323.500.000,00; (21) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan semula Rp2.797.900.000,00 bertambah Rp338.600.000,00 menjadi Rp3.136.500.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Juri Perlombaan/Per tandingan semula Rp1.829.600.000,00 bertambah Rp327.400.000,00 menjadi Rp2.157.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (22) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula Rp4.350.000.000,00 berkurang Rp507.750.000,00 menjadi Rp3.842.250.000,00; (23) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Rp2.027.233.633,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(24) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara semula Rp8.729.978.572,00 bertambah Rp1.232.258.333,00 menjadi Rp9.962.236.905,00; (25) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan semula Rp6.027.245.000,00 bertambah Rp4.811.375.000,00 menjadi Rp10.838.620.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp4.700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan pada SKPD Sekretariat Daerah; (26) Belanja Tagihan Telepon semula Rp2.167.111.195,00 bertambah Rp15.000.000,00 menjadi Rp2.182.111.195,00; (27) Belanja Tagihan Air semula Rp2.143.322.653,00 bertambah Rp241.745.200,00 menjadi Rp2.385.067.853,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(28) Belanja Tagihan Listrik semula Rp19.626.926.099,00 bertambah Rp1.000.440.000,00 menjadi Rp20.627.366.099,00; (29) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah semula Rp1.939.141.150,00 berkurang Rp161.230.600,00 menjadi Rp1.777.910.550,00; (30) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula Rp17.968.950.000,00 berkurang Rp201.500.000,00 menjadi Rp17.767.450.000,00; (31) Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan semula Rp2.130.551.093,00 bertambah Rp71.351.340,00 menjadi Rp2.201.902.433,00; (32) Belanja Pengolahan Air Limbah semula Rp2.265.680.000,00 berkurang Rp1.012.000.000,00 menjadi Rp1.253.680.000,00; (33) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula Rp11.839.800.000,00 berkurang Rp7.447.135.000,00 menjadi Rp4.392.665.000,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar membatasi penyediaan anggaran Belanja Honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium, serta membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/<i>forum group discussion</i>, dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam	Penyediaan alokasi anggaran belanja-belanja dimaksud telah dihitung secara cermat berdasarkan kebutuhan nyata dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Provinsi Bali sering kali ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan event skala nasional, maupun internasional, yang meminta/membutuhkan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Bali, seperti seringkali memberikan dukungan anggaran seperti penyediaan makan dan minum. tenda/sarana prasarana , pegelaran kesenian belanj dukungan lainnya.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Penganggaran Belanja Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.a.1) dan butir 3.4.1.2.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula Rp54.329.134.256,00 berkurang Rp10.616.206.308,00 menjadi Rp43.712.927.948,00 atau 0,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp24.647.993.600,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Menjamin Keberlangsungan dan Ketersediaan Pembiayaan Atas Jaminan Layanan Kesehatan sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengambil langkah-langkah antara lain: (a) menganggarkan pembayaran iuran bagi PBI jaminan kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	pada SKPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah Provinsi Bali; (b) menganggarkan pembayaran bantuan iuran pada SKPD untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III; dan (c) dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta PPU Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri pada tahun anggaran sebelumnya, maka	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk menganggarkan kewajiban tunjangan dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).a), butir 3.4.1.2.2.b.6).b), butir 3.4.1.2.2.b.6).c), butir 3.4.1.2.2.b.6).d), butir 3.4.1.2.2.b.6).e) dan butir 3.4.1.2.2.b.6).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total penduduk, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menganggarkan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dengan mengambil langkah-langkah antara lain: (a) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI; (b) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan (c) menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan; dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).g) Lampiran Peraturan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.7) dan butir 3.4.1.2.2.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, Hari Tua dan Kematian bagi Non ASN yang tercantum pada: (a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula Rp10.957.501.852,00 berkurang Rp2.848.158.196,00 menjadi Rp8.109.343.656,00; (b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula Rp622.875.076,00 berkurang	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp157.696.741,00 menjadi Rp465.178.335,00; (c) Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN semula Rp9.351.317.612,00 berkurang Rp2.421.061.669,00 menjadi Rp6.930.255.943,00; (d) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula Rp758.209.316,00 berkurang Rp196.104.552,00 menjadi Rp562.104.764,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.1), butir 3.4.1.2.2.b.11),	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	butir 3.4.1.2.2.b.12) dan butir 5.3.6.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. (3) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp500.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula Rp22.252.140.696,00 bertambah Rp21.179.347.400,00 menjadi Rp43.431.488.096,00 atau 0,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Sewa <i>Excavator</i> semula Rp1.764.500.000,00 bertambah Rp926.000.000,00 menjadi Rp2.690.500.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Sewa <i>Excavator</i> semula Rp1.764.500.000,00 bertambah Rp926.000.000,00 menjadi Rp2.690.500.000,00 pada Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional pada SKPD Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup; (b) Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya semula Rp1.392.500.000,00 bertambah Rp730.000.000,00 menjadi Rp2.122.500.000,00; (c) Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp450.000.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp550.000.000,00; (d) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp2.318.915.300,00 bertambah Rp520.821.100,00 menjadi Rp2.839.736.400,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(e) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya semula Rp7.633.765.200,00 bertambah Rp8.246.176.300,00 menjadi Rp15.879.941.500,00, yang antara lain tercantum pada: i) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya semula Rp1.676.538.000,00 bertambah Rp1.023.148.300,00 menjadi Rp2.699.686.300,00 Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya pada SKPD Dinas Kebudayaan; ii) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya semula Rp3.800.000.000,00 bertambah Rp5.500.000.000,00 menjadi Rp9.300.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada SKPD Sekretariat Daerah; (f) Belanja Sewa Alat Pendingin semula Rp525.000.000,00 bertambah Rp231.500.000,00 menjadi Rp756.500.000,00; (g) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>) semula Rp522.150.000,00 berkurang Rp116.400.000,00 menjadi Rp405.750.000,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(h) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio semula Rp3.246.030.000,00 bertambah Rp5.832.250.000,00 menjadi Rp9.078.280.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa Peralatan Studio Audio semula Rp1.800.000.000,00 bertambah Rp4.950.000.000,00 menjadi Rp6.750.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada SKPD Sekretariat Daerah; (i) Belanja Sewa <i>System/Power Supply</i> semula Rp391.800.000,00 bertambah Rp1.003.800.000,00 menjadi Rp1.395.600.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa <i>System/Power Supply</i> semula Rp350.000.000,00 bertambah Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp1.350.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada SKPD Sekretariat Daerah; (j) Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya semula Rp1.554.000.000,00 bertambah Rp3.400.000.000,00 menjadi Rp4.954.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Peralatan Komputer Lainnya semula Rp1.550.000.000,00 bertambah Rp3.400.000.000,00 menjadi Rp4.950.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada SKPD Sekretariat Daerah; (k) Belanja Sewa Alat Deteksi Lainnya Rp1.308.692.760,00; (l) Belanja Sewa Peralatan Permainan semula Rp320.300.000,00 berkurang Rp3.300.000,00 menjadi Rp317.000.000,00; (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula Rp14.992.055.000,00 berkurang Rp1.729.450.000,00 menjadi Rp13.262.605.000,00 atau 0,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor semula Rp855.000.000,00 berkurang Rp490.000.000,00 menjadi Rp365.000.000,00; (b) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp8.860.100.000,00 bertambah Rp198.950.000,00 menjadi Rp9.059.050.000,00; (c) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga semula Rp510.150.000,00 berkurang Rp9.500.000,00 menjadi Rp500.650.000,00; (d) Belanja Sewa Hotel semula Rp4.715.155.000,00 berkurang Rp1.451.300.000,00 menjadi Rp3.263.855.000,00; (3) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula Rp393.900.000,00 bertambah Rp74.300.000,00 menjadi Rp468.200.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian semula Rp295.700.000,00 bertambah Rp93.300.000,00 menjadi Rp389.000.000,00; (4) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud semula Rp3.689.041.100,00 bertambah Rp707.000.000,00 menjadi	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp4.396.041.100,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan <i>Franchise</i> semula Rp2.507.011.000,00 bertambah Rp608.000.000,00 menjadi Rp3.115.011.000,00; (b) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-<i>Software</i> semula Rp1.182.030.100,00 bertambah Rp99.000.000,00 menjadi Rp1.281.030.100,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) dan apabila tidak terdapat BMD terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta	Alokasi anggaran dimaksud telah dihitung berdasarkan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan Barang Milik Daerah (BMD).

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan ke dalam jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan BMD yang ada. Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp1.241.952.000,00 bertambah Rp903.858.000,00 menjadi Rp2.145.810.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural semula Rp5.400.000,00 bertambah Rp214.600.000,00 menjadi Rp220.000.000,00; (b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.150.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.150.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman dan Kawasan Permukiman; (c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah semula Rp349.500.000,00 berkurang Rp149.500.000,00 menjadi Rp200.000.000,00; (d) Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian semula Rp5.000.000,00 bertambah Rp232.264.000,00 menjadi Rp237.264.000,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula Rp10.272.046.000,00 bertambah Rp5.646.721.312,00 menjadi Rp15.918.767.312,00 atau 0,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan Rp100.000.000,00; (b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi semula Rp900.000.000,00 berkurang Rp550.000.000,00 menjadi Rp350.000.000,00; (c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp200.000.000,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(d) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei semula Rp3.265.046.000,00 bertambah Rp2.249.415.000,00 menjadi Rp5.514.461.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei semula Rp50.000.000,00 bertambah Rp2.600.000.000,00 menjadi Rp2.650.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; (e) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik semula Rp3.945.000.000,00 bertambah Rp2.891.250.000,00 menjadi Rp6.836.250.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik semula Rp150.000.000,00 bertambah	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp1.500.000.000,00 menjadi Rp1.650.000.000,00 pada Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan pada SKPD Badan Riset dan Inovasi Daerah; (f) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus semula Rp1.750.000.000,00 bertambah Rp678.056.312,00 menjadi Rp2.428.056.312,00; (3) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp2.000.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp2.000.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp2.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah pada SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selain itu, uraian tersebut di atas harus memperhatikan aspek urgensi dan	Penyediaan alokasi anggaran dimaksud telah diperhitungkan sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultasi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat, serta sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep <i>full costing</i> atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan belanja jasa ketersediaan layanan (<i>Availability Payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya	Penyediaan anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi telah alokasikan dengan mengikuti konsep <i>full costing</i> atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.d dan butir 3.4.1.2.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. e) Belanja Beasiswa Pendidikan ASN semula Rp583.000.000,00 bertambah Rp6.000.000,00 menjadi Rp589.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Rp99.000.000,00; (2) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 semula Rp325.000.000,00 bertambah Rp6.000.000,00 menjadi Rp331.000.000,00; (3) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 Rp159.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa sebagaimana maksud sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.2.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. f) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula Rp7.523.612.000,00 berkurang Rp704.415.640,00 menjadi Rp6.819.196.360,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula Rp5.935.330.000,00 berkurang Rp814.615.640,00 menjadi Rp5.120.714.360,00; (2) Belanja Bimbingan Teknis semula Rp242.100.000,00 bertambah Rp110.200.000,00 menjadi Rp352.300.000,00; (3) Belanja Diklat Kepemimpinan Rp1.346.182.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2), butir 3.4.1.2.2.f.3) dan butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula Rp17.683.881.420,00 berkurang Rp3.254.142.565,00 menjadi Rp14.429.738.855,00, dianggarkan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan butir 3.4.1.2.2.f.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar wilayah Provinsi Bali, harus dilakukan secara sangat selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana maksud butir	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	3.4.1.2.2.f.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara <i>virtual</i> maupun <i>hybrid</i>, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 3) Belanja Pemeliharaan Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan semula Rp50.559.850.133,00 bertambah Rp8.335.894.258,00 menjadi Rp58.895.744.391,00 atau 0,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula Rp24.436.837.340,00 bertambah Rp683.317.800,00 menjadi Rp25.120.155.140,00 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya Rp1.475.000.000,00; (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp10.828.700.000,00 bertambah Rp189.900.000,00 menjadi Rp11.018.600.000,00; (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp1.056.650.000,00 bertambah Rp50.000.000,00 menjadi Rp1.106.650.000,00; (4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula Rp1.640.800.000,00 bertambah Rp14.000.000,00 menjadi Rp1.654.800.000,00; (5) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya semula Rp1.176.105.000,00 berkurang	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp127.050.000,00 menjadi Rp1.049.055.000,00; (6) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin semula Rp1.568.150.000,00 berkurang Rp24.215.000,00 menjadi Rp1.543.935.000,00; (7) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-<i>Personal Computer</i> semula Rp1.507.450.000,00 bertambah Rp35.770.000,00 menjadi Rp1.543.220.000,00; (8) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya semula Rp983.500.000,00 berkurang Rp1.240.000,00 menjadi Rp982.260.000,00; (9) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp1.422.390.000,00; b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula Rp20.378.875.868,00 bertambah Rp6.399.446.948,00 menjadi Rp26.778.322.816,00 atau 0,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula Rp11.454.244.747,00 bertambah Rp2.856.408.547,00 menjadi Rp14.310.653.294,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula Rp1.831.363.000,00 bertambah Rp1.551.226.587,00 menjadi Rp3.382.589.587,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada SKPD Sekretariat Daerah; (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang semula Rp238.897.856,00 bertambah Rp256.102.144,00 menjadi Rp495.000.000,00; (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula Rp975.573.661,00	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	bertambah Rp1.251.230.852,00 menjadi Rp2.226.804.513,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.061.700.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada SKPD Dinas Kebudayaan; (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga semula Rp1.047.200.000,00 bertambah Rp180.000.000,00 menjadi Rp1.227.200.000,00; (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya semula Rp364.750.000,00 bertambah Rp520.750.455,00 menjadi Rp885.500.455,00; (6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman semula	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp3.261.428.017,00 bertambah Rp50.893.033,00 menjadi Rp3.312.321.050,00; (7) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II semula Rp170.000.000,00 bertambah Rp972.927.457,00 menjadi Rp1.142.927.457,00; (8) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama Rp1.293.000.000,00; c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi semula Rp5.466.926.925,00 bertambah Rp1.253.129.510,00 menjadi Rp6.720.056.435,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi semula Rp2.800.000.000,00 bertambah Rp1.266.480.500,00 menjadi Rp4.066.480.500,00; (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya Rp520.033.600,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Rp200.000.000,00; (4) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya semula Rp420.400.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp520.400.000,00; (5) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya semula Rp685.494.325,00 berkurang Rp114.350.990,00 menjadi Rp571.143.335,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan	Penyediaan anggaran pemeliharaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperuntukan untuk melakukan pemeliharaan terhadap BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang sesuai daftar kebutuhan pemeliharaan barang dengan tetap memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD. Selanjutnya dalam pelaksanaannya akan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada: a) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025. 4) Belanja Perjalanan Dinas Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas semula Rp196.527.382.750,00 berkurang Rp25.440.492.450,00 menjadi Rp171.086.890.300,00 atau 2,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp175.320.421.000,00 berkurang Rp26.303.565.000,00 menjadi Rp149.016.856.000,00 atau 2,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp169.660.061.000,00 berkurang Rp30.045.339.000,00 menjadi Rp139.614.722.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp9.514.988.000,00 bertambah Rp7.059.245.000,00 menjadi Rp16.574.233.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD pada SKPD Sekretariat DPRD; (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula Rp2.206.660.000,00 berkurang Rp667.380.000,00 menjadi Rp1.539.280.000,00; (3) Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota semula Rp3.307.900.000,00 bertambah Rp4.525.154.000,00 menjadi Rp7.833.054.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota semula Rp2.475.000.000,00 bertambah Rp3.712.500.000,00	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	menjadi Rp6.187.500.000,00 pada Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda pada SKPD Sekretariat DPRD; (4) Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota semula Rp145.800.000,00 berkurang Rp116.000.000,00 menjadi Rp29.800.000,00; b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula Rp21.206.961.750,00 bertambah Rp863.072.550,00 menjadi Rp22.070.034.300,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri semula Rp21.206.961.750,00 bertambah Rp863.072.550,00 menjadi Rp22.070.034.300,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp19.310.363.700,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Pelaksanaan Tugas DPRD pada SKPD Sekretariat DPRD; c) Selain itu, penyediaan anggaran perjalanan dinas pada: (1) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp19.812.344.050,00 berkurang Rp3.952.363.450,00 menjadi Rp15.859.980.600,00 atau 5,31% dari total belanja pada SKPD Sekretariat Daerah Rp298.401.777.476,00; (2) SKPD Sekretariat DPRD semula Rp103.187.036.700,00 bertambah Rp9.106.252.000,00 menjadi Rp112.293.288.700,00 atau 38,36% dari total belanja pada SKPD Sekretariat DPRD Rp292.701.985.577,00; harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajiban serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi	Alokasi anggaran perjalanan dinas telah dihitung secara berdasarkan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. Penyediaan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah tidak hanya digunakan untuk Pimpinan dan ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah, tetapi juga digunakan untuk membiayai pihak lain/masyarakat yang memohon bantuan atau fasilitasi perjalanan dinas dari Pemerintah Provinsi Bali. Selanjutnya dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Inspektorat Daerah Provinsi Bali paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Selanjutnya, penganggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dalam pelaksanaannya harus memenuhi kriteria: a) selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah; b) transparansi dan akuntabilitas; c) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali; d) efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran; e) kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan f) keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja Pemerintahan Daerah; sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan penghematan penggunaan anggaran negara, Belanja Perjalanan Dinas ke Luar	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Negeri harus dilakukan dengan sangat selektif hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan sepanjang pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak dan dalam jumlah yang sangat terbatas hanya untuk bidang tugas yang sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005. Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali melakukan penambahan alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, penambahan alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dianggarkan sepanjang Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memenuhi amanat Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025, dengan memperhatikan urgensi dan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harus diprioritaskan untuk kegiatan yang	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	memiliki <i>output</i> yang jelas dan terukur, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta tidak berbenturan dengan program prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Belanja Subsidi Penyediaan anggaran Belanja Subsidi semula Rp5.090.000.000,00 bertambah Rp4.919.000.000,00 menjadi Rp10.009.000.000,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat dengan tujuan agar harga jual produksi atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.4.a dan butir 3.4.1.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Berkaitan dengan hal tersebut, kepada Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.4.1.4.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal belanja subsidi ditujukan kepada BUMD penyelenggara Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dianggarkan dengan terlebih dahulu menetapkan Perkada mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apabila Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (<i>full cost recovery</i>), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas dengan berpedoman pada butir D.2.d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. d. Belanja Hibah Penyediaan anggaran Belanja Hibah semula Rp813.294.965.136,00 bertambah Rp141.653.625.000,00 menjadi Rp954.948.590.136,00 atau 12,89% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi Belanja Hibah Pemerintah Daerah Provinsi Bali selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel. 10, sebagai berikut:	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025																																				
	Tabel 10 Tren Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah <table><tr><th>Tahun Anggaran</th><th>Belanja Hibah (Rp)</th><th>Realisasi Hibah (Rp)</th><th>%</th><th>Total Belanja Daerah (Rp)</th><th>%</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4=3:2</td><td>5</td><td>6=2:5</td></tr><tr><td>APBD 2023</td><td>1.068.846.413.720</td><td>899.081.801.849</td><td>84,12</td><td>7.932.886.363.138</td><td>13,47</td></tr><tr><td>APBD 2024</td><td>1.185.973.472.396</td><td>1.169.523.956.546</td><td>98,61</td><td>7.795.681.730.804</td><td>15,21</td></tr><tr><td>APBD 2025</td><td>817.084.965.136</td><td>510.880.118.167</td><td>62,52</td><td>6.895.460.936.313</td><td>11,85</td></tr><tr><td>Rancangan Perubahan APBD 2025</td><td>954.948.590.136</td><td>0</td><td>0,00</td><td>7.408.577.983.959</td><td>12,89</td></tr></table> Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mengalokasikan Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp817.084.965.136,00 atau 11,85% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp6.895.460.936.313,00 mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.185.973.472.396,00 atau 15,21% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun	Tahun Anggaran	Belanja Hibah (Rp)	Realisasi Hibah (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%	1	2	3	4=3:2	5	6=2:5	APBD 2023	1.068.846.413.720	899.081.801.849	84,12	7.932.886.363.138	13,47	APBD 2024	1.185.973.472.396	1.169.523.956.546	98,61	7.795.681.730.804	15,21	APBD 2025	817.084.965.136	510.880.118.167	62,52	6.895.460.936.313	11,85	Rancangan Perubahan APBD 2025	954.948.590.136	0	0,00	7.408.577.983.959	12,89	
Tahun Anggaran	Belanja Hibah (Rp)	Realisasi Hibah (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%																																	
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5																																	
APBD 2023	1.068.846.413.720	899.081.801.849	84,12	7.932.886.363.138	13,47																																	
APBD 2024	1.185.973.472.396	1.169.523.956.546	98,61	7.795.681.730.804	15,21																																	
APBD 2025	817.084.965.136	510.880.118.167	62,52	6.895.460.936.313	11,85																																	
Rancangan Perubahan APBD 2025	954.948.590.136	0	0,00	7.408.577.983.959	12,89																																	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Anggaran 2024 Rp7.795.681.730.804,00 dan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.068.846.413.720,00 atau 13,47% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp7.932.886.363.138,00. Selain itu, tren realisasi Belanja Hibah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut: 1) Realisasi Belanja Hibah per tanggal 1 Agustus 2025 Rp510.880.118.167,00 atau 62,52% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp817.084.965.136,00; 2) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 Rp1.169.523.956.546,00 atau 98,61% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.185.973.472.396,00; 3) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 Rp899.081.801.849,00 atau 84,12% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.068.846.413.720,00.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah yang diuraikan ke dalam objek belanja: a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp6.859.625.000,00 atau 12,89% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: 1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp2.834.625.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp2.834.625.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp4.025.000.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp3.925.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp692.929.085.136,00 bertambah Rp132.890.000.000,00 menjadi Rp825.819.085.136,00 atau 11,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: 1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp155.100.000.000,00, yang antara lain tercantum pada: a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp527.178.335.136,00 bertambah Rp3.980.000.000,00 menjadi Rp531.158.335.136,00; b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp28.510.750.000,00 bertambah	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp2.350.000.000,00 menjadi Rp30.860.750.000,00; c) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp464.000.000.000,00 bertambah Rp3.580.000.000,00 menjadi Rp467.580.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat pada SKPD Dinas Pemajuan Masyarakat Adat; d) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp60.000.000.000,00 bertambah Rp400.000.000,00 menjadi Rp60.400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp134.940.000.000,00 bertambah	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp126.560.000.000,00 menjadi Rp261.500.000.000,00 atau 3,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp132.190.000.000,00 bertambah Rp126.160.000.000,00 menjadi Rp258.350.000.000,00, yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp9.685.000.000,00 bertambah Rp2.025.000.000,00 menjadi Rp11.710.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat pada SKPD Dinas Kebudayaan; (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	semula Rp22.043.750.000,00 bertambah Rp6.280.000.000,00 menjadi Rp28.323.750.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial pada SKPD Sekretariat Daerah; b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp2.750.000.000,00 bertambah Rp400.000.000,00 menjadi Rp3.150.000.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; 3) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp300.000.000,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Berbadan Hukum Indonesia Rp300.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk	Alokasi anggaran hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di dalamnya termasuk untuk hibah wajib yang diberikan kepada badan/lembaga seperti KONI, PMI, Pramuka, serta hibah kepada Desa Adat dan Bantuan Partai Politik.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja hibah harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita—dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Bali paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, penyediaan anggaran Belanja Hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Bali sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5.b dan butir 3.4.1.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan TAPD serta telah dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait, Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya sedangkan Belanja Hibah yang bukan menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.1.5.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Khusus untuk pagu anggaran Belanja Hibah juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp23.841.580.000,00 atau 0,32% dari total	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Keuangan Partai Politik dan butir 3.4.1.5.e.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. e. Belanja Bantuan Sosial Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial semula Rp150.000.000,00 berkurang Rp38.400.000,00 menjadi Rp111.600.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Bali selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel. 11, sebagai berikut:	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025																																				
	Tabel 11 Tren Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Daerah <table><tr><th>Tahun Anggaran</th><th>Belanja Bantuan Sosial (Rp)</th><th>Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Rp)</th><th>%</th><th>Total Belanja Daerah (Rp)</th><th>%</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4=3:2</td><td>5</td><td>6=2:5</td></tr><tr><td>APBD 2023</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>7.932.886.363.138</td><td>0,00</td></tr><tr><td>APBD 2024</td><td>250.000.000,00</td><td>250.000.000,00</td><td>100,00</td><td>7.795.681.730.804</td><td>0,003</td></tr><tr><td>APBD 2025</td><td>150.000.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>6.895.460.936.313</td><td>0,002</td></tr><tr><td>Rancangan Perubahan APBD 2025</td><td>111.600.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>7.408.577.983.959</td><td>0,002</td></tr></table> Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase sama dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp150.000.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp6.895.460.936.313,20 dan mengalami penurunan dibandingkan dengan Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp250.000.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam	Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%	1	2	3	4=3:2	5	6=2:5	APBD 2023	0,00	0,00	0,00	7.932.886.363.138	0,00	APBD 2024	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	7.795.681.730.804	0,003	APBD 2025	150.000.000,00	0,00	0,00	6.895.460.936.313	0,002	Rancangan Perubahan APBD 2025	111.600.000,00	0,00	0,00	7.408.577.983.959	0,002	
Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%																																	
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5																																	
APBD 2023	0,00	0,00	0,00	7.932.886.363.138	0,00																																	
APBD 2024	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	7.795.681.730.804	0,003																																	
APBD 2025	150.000.000,00	0,00	0,00	6.895.460.936.313	0,002																																	
Rancangan Perubahan APBD 2025	111.600.000,00	0,00	0,00	7.408.577.983.959	0,002																																	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp7.795.681.730.804,00. Selain itu, tren realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut: 1) Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 1 Agustus 2025 Rp0,00 atau 0,00% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp150.000.000,00; 2) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 Rp250.000.000,00 atau 100,00% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp250.000.000,00; 3) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 Rp0,00 atau 0,00% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp0,00. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) semula	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp150.000.000,00 berkurang Rp38.400.000,00 menjadi Rp111.600.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) semula Rp150.000.000,00 berkurang Rp38.400.000,00 menjadi Rp111.600.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Berkaitan dengan hal tersebut, dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) harus dirinci daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bantuan sosial berupa uang yang diterima, dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas)	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Bali paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, Belanja Bantuan Sosial dapat dianggarkan dan digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu berkelanjutan, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.6.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan TAPD serta telah dicantumkan dalam Perubahan RKPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Penganggaran Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait, sedangkan Belanja Bantuan Sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.1.6.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menganggarkan Belanja Bantuan Sosial yang	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat harus mencantumkan dengan jelas daftar nama penerima, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 4.1.5.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Khusus untuk pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui program bantuan sosial antara lain sebagai berikut: a) bantuan sosial reguler, seperti program keluarga harapan, program sembako dan bantuan beras;	Provinsi Bali dalam menganggarkan Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat telah dirinci dengan mencantumkan dengan jelas daftar nama penerima, alamat penerima dan besarnya sebagaimana tertuang pada Lampiran 4a dan 4b Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	b) bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, <i>top up</i> bantuan sosial reguler dan bantuan beras; dan c) bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemangku Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia); sebagaimana maksud butir 5.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 2. Belanja Modal Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp1.007.960.216.627,00 berkurang Rp43.767.974.100,00 menjadi Rp964.192.242.527,00 atau 13,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Penganggaran pengadaan BMD harus didasarkan pada: - perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada; dan - standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga; sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada: - Belanja Modal Tanah semula Rp25.418.325.760,00 bertambah Rp5.645.000.000,00 menjadi Rp31.063.325.760,00 atau 0,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah semula Rp25.418.325.760,00 bertambah Rp5.645.000.000,00 menjadi Rp31.063.325.760,00 atau 0,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tanah Persil semula Rp25.403.325.760,00 bertambah Rp5.645.000.000,00 menjadi Rp31.048.325.760,00 atau 0,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanah Persil Lainnya semula Rp25.403.325.760,00 bertambah Rp5.645.000.000,00 menjadi Rp31.048.325.760,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD dan butir 3.4.2.g	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp250.200.970.942,00 bertambah Rp35.517.709.374,00 menjadi Rp285.718.680.316,00 atau 3,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Modal Alat Besar semula Rp2.399.094.100,00 bertambah Rp2.449.459.234,00 menjadi Rp4.848.553.334,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Besar Darat Rp1.600.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal <i>Excavator</i> Rp1.200.000.000,00; (2) Belanja Modal <i>Asphalt Equipment</i> Rp400.000.000,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	b) Belanja Modal Alat Bantu semula Rp799.094.100,00 bertambah Rp2.449.459.234,00 menjadi Rp3.248.553.334,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal <i>Electric Generating Set</i> semula Rp720.000.000,00 bertambah Rp1.290.000.000,00 menjadi Rp2.010.000.000,00; (2) Belanja Modal Pompa semula Rp47.598.000,00 bertambah Rp1.161.540.334,00 menjadi Rp1.209.138.334,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Pompa semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.115.800.000,00 pada Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional pada SKPD Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	2) Belanja Modal Alat Angkutan semula Rp31.168.806.587,00 bertambah Rp1.537.085.999,00 menjadi Rp32.705.892.586,00 atau 0,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula Rp31.168.806.587,00 bertambah Rp1.537.085.999,00 menjadi Rp32.705.892.586,00 atau 0,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp24.707.127.825,00 bertambah Rp4.743.658.000,00 menjadi Rp29.450.785.825,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp24.707.127.825,00 bertambah Rp4.743.658.000,00 menjadi Rp29.450.785.825,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada SKPD Sekretariat Daerah;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang semula Rp5.553.513.925,00 berkurang Rp3.165.068.613,00 menjadi Rp2.388.445.312,00; c) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula Rp908.164.837,00 berkurang Rp41.503.388,00 menjadi Rp866.661.449,00; 3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur semula Rp1.135.725.400,00 bertambah Rp9.500.000,00 menjadi Rp1.145.225.400,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Ukur semula Rp1.027.632.000,00 bertambah Rp9.500.000,00 menjadi Rp1.037.132.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Ukur Lainnya Rp1.027.632.000,00; 4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula Rp23.462.613.820,00 bertambah Rp9.864.280.218,00 menjadi	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp33.326.894.038,00 atau 0,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Kantor semula Rp1.360.039.300,00 bertambah Rp583.564.358,00 menjadi Rp1.943.603.658,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor semula Rp162.432.800,00 bertambah Rp124.479.334,00 menjadi Rp286.912.134,00; (2) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya semula Rp1.197.606.500,00 bertambah Rp459.085.024,00 menjadi Rp1.656.691.524,00; b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula Rp21.548.397.920,00 bertambah Rp8.949.621.896,00 menjadi Rp30.498.019.816,00 atau 0,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Mebel semula Rp11.266.717.600,00 bertambah Rp2.534.586.552,00 menjadi Rp13.801.304.152,00; (2) Belanja Modal Alat Pendingin semula Rp5.783.971.120,00 bertambah Rp1.993.775.250,00 menjadi Rp7.777.746.370,00; (3) Belanja Modal Alat Dapur semula Rp406.500.000,00 bertambah Rp13.070.141,00 menjadi Rp419.570.141,00; (4) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>) semula Rp3.233.980.200,00 bertambah Rp3.887.250.373,00 menjadi Rp7.121.230.573,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>) semula Rp518.928.000,00 bertambah Rp2.125.267.236,00 menjadi Rp2.644.195.236,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada SKPD Sekretariat DPRD;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(5) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran semula Rp857.229.000,00 bertambah Rp400.293.400,00 menjadi Rp1.257.522.400,00; c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat semula Rp554.176.600,00 bertambah Rp331.093.964,00 menjadi Rp885.270.564,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Meja Rapat Pejabat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp235.470.735,00; (2) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat semula Rp554.176.600,00 bertambah Rp60.123.229,00 menjadi Rp614.299.829,00; 5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar semula Rp24.352.672.759,00 bertambah Rp491.220.970,00 menjadi Rp24.843.893.729,00 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Studio semula Rp11.552.183.750,00 bertambah Rp480.670.170,00 menjadi Rp12.032.853.920,00 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Peralatan Studio Audio semula Rp532.036.000,00 bertambah Rp1.455.198.842,00 menjadi Rp1.987.234.842,00; (2) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film semula Rp10.614.014.550,00 berkurang Rp936.198.572,00 menjadi Rp9.677.815.978,00; (3) Belanja Modal Alat Studio Lainnya semula Rp406.133.200,00 berkurang Rp38.330.100,00 menjadi Rp367.803.100,00; b) Belanja Modal Alat Komunikasi semula Rp3.827.046.769,00 bertambah Rp10.550.800,00 menjadi Rp3.837.597.569,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF Rp1.147.500.000,00; (2) Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus Rp1.807.940.069,00; (3) Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya semula Rp871.606.700,00 bertambah Rp10.550.800,00 menjadi Rp882.157.500,00; c) Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp8.973.442.240,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya Rp8.849.316.000,00; 6) Belanja Modal Komputer semula Rp28.111.637.556,00 bertambah Rp5.122.705.991,00 menjadi Rp33.234.343.547,00 atau 0,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Komputer Unit semula Rp16.319.018.100,00 bertambah Rp4.198.833.300,00 menjadi	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp20.517.851.400,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal <i>Personal Computer</i> semula Rp16.291.184.300,00 bertambah Rp3.916.713.300,00 menjadi Rp20.207.897.600,00; (2) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp282.120.000,00; b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula Rp11.792.619.456,00 bertambah Rp923.872.691,00 menjadi Rp12.716.492.147,00 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Peralatan <i>Personal Computer</i> semula Rp2.476.972.156,00 berkurang Rp351.339.769,00 menjadi Rp2.125.632.387,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(2) Belanja Modal Peralatan Jaringan semula Rp6.855.026.300,00 bertambah Rp380.514.900,00 menjadi Rp7.235.541.200,00; (3) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya semula Rp2.460.621.000,00 bertambah Rp894.697.560,00 menjadi Rp3.355.318.560,00; 7) Belanja Modal Alat Eksplorasi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp17.982.100,00 atau 0,0002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp17.982.100,00 atau 0,0002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Elektronik/ <i>Electric</i> Rp17.982.100,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	8) Belanja Modal Rambu-Rambu semula Rp695.443.200,00 bertambah Rp263.900.000,00 menjadi Rp959.343.200,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat semula Rp695.443.200,00 bertambah Rp263.900.000,00 menjadi Rp959.343.200,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Rambu Bersuar semula Rp448.000.000,00 bertambah Rp164.000.000,00 menjadi Rp612.000.000,00; b) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp247.443.200,00; c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp531.631.164.379,00 berkurang Rp209.655.821.475,00 menjadi Rp321.975.342.904,00 atau 4,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Modal Bangunan Gedung semula Rp519.387.636.799,00 berkurang Rp206.766.084.475,00 menjadi Rp312.621.552.324,00 atau 4,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp519.387.636.799,00 berkurang Rp206.791.084.475,00 menjadi Rp312.596.552.324,00 atau 4,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula Rp13.188.833.364,00 bertambah Rp4.351.786.480,00 menjadi Rp17.540.619.844,00; (2) Belanja Modal Bangunan Gudang semula Rp81.318.500,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp281.318.500,00; (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium semula Rp3.930.989.400,00 berkurang	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp3.498.225.400,00 menjadi Rp432.764.000,00; (4) Belanja Modal Bangunan Kesehatan semula Rp44.344.124.000,00 berkurang Rp1.350.000.000,00 menjadi Rp42.994.124.000,00; (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp200.000.000,00; (6) Belanja Modal Bangunan Gudang semula Rp3.222.000.000,00 berkurang Rp58.495.276,00 menjadi Rp3.163.504.724,00; (7) Belanja Modal Bangunan Kesehatan semula Rp19.593.211.570,00 bertambah Rp730.000.000,00 menjadi Rp20.323.211.570,00; (8) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah semula Rp10.019.809.301,00 bertambah Rp1.977.481.000,00 menjadi Rp11.997.290.301,00; (9) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula Rp1.807.921.951,00 bertambah Rp308.500.000,00 menjadi Rp2.116.421.951,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(10) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp115.351.116.400,00 bertambah Rp498.000.000,00 menjadi Rp115.849.116.400,00; (11) Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool Rp721.500.000,00; (12) Belanja Modal Bangunan Gedung Museum semula Rp78.624.394.433,00 berkurang Rp69.587.806.560,00 menjadi Rp9.036.587.873,00; (13) Belanja Modal Bangunan Tempat Persidangan Rp20.959.823.660,00; (14) Belanja Modal Bangunan Terbuka semula Rp335.171.000,00 bertambah Rp493.343.334,00 menjadi Rp828.514.334,00; (15) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum semula Rp255.347.855.120,00 berkurang Rp147.048.060.120,00 menjadi Rp108.299.795.000,00; (16) Belanja Modal Bangunan Parkir semula Rp166.000.000,00 bertambah Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp1.166.000.000,00; (17) Belanja Modal Taman semula Rp50.000.000,00 bertambah Rp319.666.667,00 menjadi Rp369.666.667,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti semula Rp3.250.527.580,00 bertambah Rp168.000.000,00 menjadi Rp3.418.527.580,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas semula Rp3.250.527.580,00 bertambah Rp168.000.000,00 menjadi Rp3.418.527.580,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Pagar semula Rp3.250.527.580,00 bertambah Rp163.000.000,00 menjadi Rp3.413.527.580,00; d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula Rp178.268.021.666,00 bertambah Rp112.035.448.088,00 menjadi Rp290.303.469.754,00 atau 3,92% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula Rp109.485.126.482,00 bertambah	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp100.713.550.588,00 menjadi Rp210.198.677.070,00 atau 2,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Jalan semula Rp108.695.126.482,00 bertambah Rp100.713.550.588,00 menjadi Rp209.408.677.070,00 atau 2,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Jalan Provinsi semula Rp104.960.377.482,00 bertambah Rp100.030.308.588,00 menjadi Rp204.990.686.070,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Modal Jalan Provinsi semula Rp14.711.201.205,00 bertambah Rp9.036.642.208,00 menjadi Rp23.747.843.413,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; (b) Belanja Modal Jalan Provinsi semula Rp16.416.193.732,00 bertambah	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp89.750.136.380,00 menjadi Rp106.166.330.112,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; (2) Belanja Modal Jalan Lainnya semula Rp3.734.749.000,00 bertambah Rp683.242.000,00 menjadi Rp4.417.991.000,00; b) Belanja Modal Jembatan Rp790.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi Rp790.000.000,00; 2) Belanja Modal Bangunan Air semula Rp24.739.970.272,00 berkurang Rp2.231.480.500,00 menjadi Rp22.508.489.772,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi semula Rp15.517.373.400,00 berkurang Rp5.406.480.500,00 menjadi Rp10.110.892.900,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi semula Rp15.517.373.400,00 berkurang Rp5.406.480.500,00 menjadi Rp10.110.892.900,00; b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam semula Rp5.921.348.420,00 bertambah Rp5.900.000.000,00 menjadi Rp11.821.348.420,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam semula Rp5.921.348.420,00 bertambah Rp5.900.000.000,00 menjadi Rp11.821.348.420,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam semula	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp5.270.000.000,00 bertambah Rp6.000.000.000,00 menjadi Rp11.270.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; c) Belanja Modal Bangunan Air Kotor semula Rp3.101.256.452,00 berkurang Rp2.725.000.000,00 menjadi Rp376.256.452,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor semula Rp3.101.256.452,00 berkurang Rp2.725.000.000,00 menjadi Rp376.256.452,00; 3) Belanja Modal Instalasi semula Rp13.037.374.757,00 bertambah Rp6.624.378.000,00 menjadi Rp19.661.752.757,00 atau 0,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	a) Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp11.627.374.757,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik Rp3.350.000.552,00; (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya Rp8.277.374.205,00; b) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp6.424.378.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp6.400.778.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp6.400.778.000,00 pada Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional pada SKPD Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup; c) Belanja Modal Instalasi Pengaman Rp800.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya Rp800.000.000,00; d) Belanja Modal Instalasi Lain semula Rp610.000.000,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp810.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Lain semula Rp610.000.000,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp810.000.000,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	4) Belanja Modal Jaringan semula Rp29.515.550.155,00 bertambah Rp5.294.000.000,00 menjadi Rp34.809.550.155,00 atau 0,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp29.515.550.155,00 atau 0,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya Rp29.515.550.155,00; b) Belanja Modal Jaringan Listrik semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp5.294.000.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya Rp5.294.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	(1) Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp3.616.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada SKPD Dinas Kebudayaan; (2) Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.100.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional pada SKPD Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup; e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula Rp22.265.084.280,00 bertambah Rp12.153.689.913,00 menjadi Rp34.418.774.193,00 atau 0,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp45.000.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp45.000.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Buku Umum Rp45.000.000,00; 2) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi semula Rp735.000.000,00 berkurang Rp435.000.000,00 menjadi Rp300.000.000,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi semula Rp735.000.000,00 berkurang Rp435.000.000,00 menjadi Rp300.000.000,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi semula Rp735.000.000,00 berkurang Rp435.000.000,00 menjadi Rp300.000.000,00; f. Belanja Modal Aset Lainnya semula Rp176.649.600,00 bertambah Rp536.000.000,00 menjadi Rp712.649.600,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp176.649.600,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp176.649.600,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-<i>Software</i> Rp116.649.600,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran Belanja Modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah	Penganggaran Belanja Modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan rencana kebutuhan BMD berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri serta memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 3.4.2.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025. Pengadaan BMD dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir 3.4.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada: a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula Rp45.986.939.400,00 bertambah Rp2.476.818.576,00 menjadi Rp48.463.757.976,00 atau 0,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: 1) Belanja Modal Alat Kedokteran semula Rp45.986.939.400,00 bertambah Rp1.571.299.476,00 menjadi Rp47.558.238.876,00 atau 0,64% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum semula Rp8.727.400,00 bertambah Rp1.024.166.130,00 menjadi Rp1.032.893.530,00; b) Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp475.878.046,00; c) Belanja Modal Alat Kedokteran Mata semula Rp1.561.541.000,00 bertambah Rp14.655.800,00 menjadi Rp1.576.196.800,00; d) Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam Rp298.671.000,00; e) Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir Rp44.118.000.000,00; 2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp905.519.100,00	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp905.519.100,00; b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula Rp26.946.633.100,00 bertambah Rp19.769.383,00 menjadi Rp26.966.402.483,00 atau 0,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: 1) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium semula Rp1.263.788.900,00 bertambah Rp15.354.500,00 menjadi Rp1.279.143.400,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi Rp678.000.000,00; b) Belanja Modal Alat Laboratorium Umum semula Rp461.026.000,00 bertambah Rp4.227.100,00 menjadi Rp465.253.100,00; 2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp25.674.719.000,00 atau 0,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp25.674.719.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp151.187.931.213,00 berkurang Rp95.723.306.536,00 menjadi Rp55.464.624.677,00 atau 0,75% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Pengadaan alat kedokteran dan alat laboratorium dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4. Belanja Transfer Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula Rp787.453.202.628,00 bertambah Rp556.711.633.392,00 menjadi Rp1.344.164.836.020,00 atau 18,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja: a. Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula Rp787.453.202.628,00 bertambah Rp556.711.633.392,00 menjadi Rp1.344.164.836.020,00 atau 18,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja: b. Belanja Bantuan Keuangan semula Rp205.265.185.944,00 bertambah	Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025																																				
	Rp120.050.693.360,00 menjadi Rp325.315.879.304,00 atau 4,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel 12, sebagai berikut: Tabel. 12 Tren Belanja Bantuan Keuangan terhadap Belanja Daerah <table><tr><th>Tahun Anggaran</th><th>Belanja Bantuan Keuangan (Rp)</th><th>Realisasi Belanja Bantuan Keuangan (Rp)</th><th>%</th><th>Total Belanja Daerah (Rp)</th><th>%</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4=3:2</td><td>5</td><td>6=2:5</td></tr><tr><td>APBD 2023</td><td>522.374.803.508</td><td>285.161.996.258</td><td>54,59</td><td>7.932.886.363.138</td><td>6,58</td></tr><tr><td>APBD 2024</td><td>366.931.922.273</td><td>355.860.433.998</td><td>96,98</td><td>7.795.681.730.804</td><td>4,71</td></tr><tr><td>APBD 2025</td><td>205.265.185.944</td><td>66.853.083.440</td><td>32,57</td><td>6.895.460.936.313</td><td>2,98</td></tr><tr><td>P-APBD 2025</td><td>325.315.879.304</td><td>0</td><td>0,00</td><td>7.408.577.983.959</td><td>4,39</td></tr></table> Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%	1	2	3	4=3:2	5	6=2:5	APBD 2023	522.374.803.508	285.161.996.258	54,59	7.932.886.363.138	6,58	APBD 2024	366.931.922.273	355.860.433.998	96,98	7.795.681.730.804	4,71	APBD 2025	205.265.185.944	66.853.083.440	32,57	6.895.460.936.313	2,98	P-APBD 2025	325.315.879.304	0	0,00	7.408.577.983.959	4,39	
Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%																																	
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5																																	
APBD 2023	522.374.803.508	285.161.996.258	54,59	7.932.886.363.138	6,58																																	
APBD 2024	366.931.922.273	355.860.433.998	96,98	7.795.681.730.804	4,71																																	
APBD 2025	205.265.185.944	66.853.083.440	32,57	6.895.460.936.313	2,98																																	
P-APBD 2025	325.315.879.304	0	0,00	7.408.577.983.959	4,39																																	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp205.265.185.944,00 atau 2,98% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp6.895.460.936.313,20, mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp366.931.922.273,00 atau 4,71% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp7.795.681.730.804,00, dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp522.374.803.508,00 atau 6,58% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp7.932.886.363.138,00. Selain itu, tren realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut: 1) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 per tanggal 1 Agustus 2025 Rp66.853.083.440,00 atau 32,57% dari total Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp205.265.185.944,00;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	2) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Rp355.860.433.998,00 atau 96,98% dari total Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp366.931.922.273,00; dan 3) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Rp285.161.996.258,00 atau 54,59% dari total Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp522.374.803.508,00. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan yang diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota semula Rp116.245.385.944,00 bertambah Rp120.050.693.360,00 menjadi Rp236.296.079.304,00; 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp89.019.800.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.4.2.a, butir 3.4.4.2.b dan butir 3.4.4.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek masing-masing kabupaten/kota penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Provinsi Bali tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Hasil dari penghematan penggunaan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Bali paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dilarang untuk menganggarkan kegiatan, sub kegiatan dan Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 4.7.2.t Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana maksud butir 3.4.4.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Analisis Belanja Pokok dan Penunjang Dalam Suatu Sub Kegiatan Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: 1. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi semula Rp141.542.800,00 berkurang Rp70.651.400,00 menjadi Rp70.891.400,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:	Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah dikomunikasikan terlebih dahulu secara intensif dengan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima bantuan terkait dengan kesiapan pelaksanaannya.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	a. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula Rp92.200.000,00 berkurang Rp20.500.000,00 menjadi Rp71.700.000,00 atau 38,51% dari total sub kegiatan; b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp2.250.000,00 berkurang Rp1.125.000,00 menjadi Rp1.125.000,00 atau 1,59% dari total sub kegiatan; c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp59.360.000,00 berkurang Rp30.560.000,00 menjadi Rp28.800.000,00 atau 40,63% dari total sub kegiatan; 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana semula Rp267.525.580,00 berkurang Rp81.349.200,00 menjadi Rp186.176.380,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula Rp92.200.000,00 berkurang Rp20.500.000,00 menjadi Rp71.700.000,00 atau 38,51% dari total sub kegiatan; b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp117.240.000,00 berkurang Rp59.160.000,00 menjadi Rp58.080.000,00 atau 31,20% dari total sub kegiatan; 3. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia semula Rp349.687.312,00 berkurang Rp113.071.410,00 menjadi Rp236.615.902,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp117.416.000,00 berkurang Rp64.616.000,00 menjadi Rp52.800.000,00 atau 22,31% dari total sub kegiatan; b. Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp98.889.952,00 berkurang Rp29.965.610,00 menjadi Rp68.924.342,00 atau 29,13% dari total sub kegiatan; 4. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi semula Rp2.615.568.416,00 bertambah Rp1.783.554.886,00 menjadi Rp4.399.123.302,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula Rp717.600.000,00 bertambah Rp842.400.000,00 menjadi Rp1.560.000.000,00 atau 35,46% dari total sub kegiatan; b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia semula Rp353.700.000,00 bertambah Rp419.400.000,00 menjadi Rp773.100.000,00 atau 17,57% dari total sub kegiatan;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	c. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan semula Rp228.150.000,00 bertambah Rp188.100.000,00 menjadi Rp416.250.000,00 atau 9,46% dari total sub kegiatan; pada SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 5. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa semula Rp2.955.825.000,00 berkurang Rp1.237.616.600,00 menjadi Rp1.718.208.400,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula Rp324.000.000,00 berkurang Rp5.500.000,00 menjadi Rp318.500.000,00 atau 18,54% dari total sub kegiatan; b. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp286.260.000,00 atau 16,66% dari total sub kegiatan; c. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Rp228.900.000,00 atau 13,32% dari total sub kegiatan; pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan.	Uraian belanja sub kegiatan dimaksud telah disusun dengan mempertimpangkan prioritas belanja yang dibutuhkan guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud serta telah diperhitungkan dengan cermat dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riil.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. E. Analisis Korelasi antara Capaian Sub Kegiatan dengan Uraian Belanja Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: 1. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan semula Rp5.393.781.500,00 bertambah Rp239.963.900,00 menjadi Rp5.633.745.400,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	2025 dianggarkan Rp181.744.000,00 atau 3,23% dari total sub kegiatan; b. Belanja Modal <i>Personal Computer</i> semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp295.164.000,00 atau 5,24% dari total sub kegiatan; c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula Rp108.875.800,00 bertambah Rp160.727.300,00 menjadi Rp269.603.100,00 atau 4,79% dari total sub kegiatan; 2. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan semula Rp492.402.740,00 berkurang Rp207.019.083,00 menjadi Rp285.383.657,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp433.518.540,00 berkurang Rp188.783.343,00 menjadi Rp244.735.197,00 atau 85,76% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 3. Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan semula Rp335.163.354,00 berkurang Rp114.903.935,00 menjadi Rp220.259.419,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Tenaga Administrasi semula Rp290.676.734,00 berkurang Rp104.879.635,00 menjadi Rp185.797.099,00 atau 84,35% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 4. Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional semula Rp483.986.700,00 bertambah Rp645.850.500,00 menjadi Rp1.129.837.200,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula Rp108.000.000,00 bertambah Rp303.000.000,00 menjadi Rp411.000.000,00; b. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara semula Rp1.500.000,00 bertambah Rp300.050.000,00 menjadi Rp301.550.000,00; pada SKPD Dinas Kebudayaan; 5. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus semula Rp3.533.566.200,00 berkurang Rp9.600.000,00 menjadi Rp3.523.966.200,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp3.346.200.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	6. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya semula Rp12.511.975.500,00 bertambah Rp3.187.033.336,00 menjadi Rp15.699.008.836,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film semula Rp9.476.170.000,00 berkurang Rp1.205.932.800,00 menjadi Rp8.270.237.200,00 pada SKPD Sekretariat DPRD; 7. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa semula Rp1.712.767.870,00 berkurang Rp240.233.935,00 menjadi Rp1.472.533.935,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi semula Rp599.450.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp699.450.000,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman; tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Bali paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
VII	KEBIJAKAN SURPLUS DAN DEFISIT	
	Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	surplus atau defisit APBD. Penyediaan perkiraan Defisit Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Rp752.346.252.673,60 melebihi batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah rendah sebesar 3,45% yaitu Rp229.639.994.729,00 dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 yaitu Rp6.656.231.731.286,00. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian perkiraan defisit sesuai dengan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan rasionalisasi atas program, kegiatan, dan sub	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	kegiatan serta belanja dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir 3.2.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
VIII	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
	A. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah 1. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 2. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	3. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir 3.2.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.6.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pembiayaan Penyediaan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025																																																		
	APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 13 sebagai berikut: Tabel 13 Postur Pembiayaan Daerah <table><tr><th>URAIAN</th><th>APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)</th><th>Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)</th><th>Bertambah/ (Berkurang) (Rp)</th><th>%</th></tr><tr><td>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</td><td>1.201.125.499.578</td><td>1.153.811.060.761</td><td>(47.314.438.816)</td><td>15,57</td></tr><tr><td>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</td><td>1.201.125.499.578</td><td>623.732.459.203</td><td>(577.393.040.374)</td><td>8,42</td></tr><tr><td>Penerimaan Pinjaman Daerah</td><td>0</td><td>530.078.601.558</td><td>530.078.601.558</td><td>7,15</td></tr><tr><td>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</td><td>1.201.125.499.578</td><td>1.153.811.060.761</td><td>(47.314.438.816)</td><td></td></tr><tr><td>Penyertaan Modal Daerah</td><td>158.000.000.000</td><td>158.000.000.000</td><td>0</td><td>2,13</td></tr><tr><td>Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo</td><td>243.464.808.088</td><td>243.464.808.088</td><td>0</td><td>3,29</td></tr><tr><td>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</td><td>401.464.808.088</td><td>401.464.808.088</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Pembiayaan Netto</td><td>799.660.691.490</td><td>752.346.252.673</td><td>(47.314.438.816)</td><td></td></tr><tr><td>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr></table> Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: 1. Penerimaan Pembiayaan Penyediaan anggaran Penerimaan Pembiayaan semula Rp1.201.125.499.578,20 berkurang Rp47.314.438.816,60 menjadi Rp1.153.811.060.761,60 atau 15,57% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam objek Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya semula Rp1.201.125.499.578,20 berkurang Rp577.393.040.374,88 menjadi Rp623.732.459.203,32 atau 8,42% dari total	URAIAN	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.201.125.499.578	1.153.811.060.761	(47.314.438.816)	15,57	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.201.125.499.578	623.732.459.203	(577.393.040.374)	8,42	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	530.078.601.558	530.078.601.558	7,15	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.201.125.499.578	1.153.811.060.761	(47.314.438.816)		Penyertaan Modal Daerah	158.000.000.000	158.000.000.000	0	2,13	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	243.464.808.088	243.464.808.088	0	3,29	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	401.464.808.088	401.464.808.088	0		Pembiayaan Netto	799.660.691.490	752.346.252.673	(47.314.438.816)		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0		
URAIAN	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%																																																
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.201.125.499.578	1.153.811.060.761	(47.314.438.816)	15,57																																																
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.201.125.499.578	623.732.459.203	(577.393.040.374)	8,42																																																
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	530.078.601.558	530.078.601.558	7,15																																																
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.201.125.499.578	1.153.811.060.761	(47.314.438.816)																																																	
Penyertaan Modal Daerah	158.000.000.000	158.000.000.000	0	2,13																																																
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	243.464.808.088	243.464.808.088	0	3,29																																																
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	401.464.808.088	401.464.808.088	0																																																	
Pembiayaan Netto	799.660.691.490	752.346.252.673	(47.314.438.816)																																																	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0																																																	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025																																				
	pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi SiLPA Pemerintah Daerah Provinsi Bali selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel. 14, sebagai berikut: Tabel 14 Tren SiLPA terhadap Belanja Daerah <table><tr><th>Tahun Anggaran</th><th>SiLPA (Rp)</th><th>Realisasi SiLPA (Rp)</th><th>%</th><th>Total Belanja Daerah (Rp)</th><th>%</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4=3:2</td><td>5</td><td>6=2:5</td></tr><tr><td>APBD 2023</td><td>1.079.721.253.120,00</td><td>408.963.390.625,37</td><td>37,88</td><td>7.932.886.363.138,00</td><td>13,61</td></tr><tr><td>APBD 2024</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>7.795.681.730.804,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>APBD 2025</td><td>1.201.125.499.578,20</td><td>623.732.459.203,32</td><td>51,93</td><td>6.895.460.936.313,20</td><td>17,42</td></tr><tr><td>Rancangan Perubahan APBD 2025</td><td>1.153.811.060.761,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>7.408.577.983.959,60</td><td>15,57</td></tr></table> Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mengalokasikan SiLPA dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp1.201.125.499.578,20 atau 17,42% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran	SiLPA (Rp)	Realisasi SiLPA (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%	1	2	3	4=3:2	5	6=2:5	APBD 2023	1.079.721.253.120,00	408.963.390.625,37	37,88	7.932.886.363.138,00	13,61	APBD 2024	0,00	0,00	0,00	7.795.681.730.804,00	0,00	APBD 2025	1.201.125.499.578,20	623.732.459.203,32	51,93	6.895.460.936.313,20	17,42	Rancangan Perubahan APBD 2025	1.153.811.060.761,60	0,00	0,00	7.408.577.983.959,60	15,57	
Tahun Anggaran	SiLPA (Rp)	Realisasi SiLPA (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%																																	
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5																																	
APBD 2023	1.079.721.253.120,00	408.963.390.625,37	37,88	7.932.886.363.138,00	13,61																																	
APBD 2024	0,00	0,00	0,00	7.795.681.730.804,00	0,00																																	
APBD 2025	1.201.125.499.578,20	623.732.459.203,32	51,93	6.895.460.936.313,20	17,42																																	
Rancangan Perubahan APBD 2025	1.153.811.060.761,60	0,00	0,00	7.408.577.983.959,60	15,57																																	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Rp6.895.460.936.313,20 dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.079.721.253.120,00 atau 13,61% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp7.932.886.363.138,00. Selain itu, tren realisasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut: - Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2025 per tanggal 1 Agustus 2025 Rp623.732.459.203,32 atau 51,93% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp1.201.125.499.578,20; - Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2024 Rp0,00 atau 0,00% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp0,00; - Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 Rp408.963.390.625,37 atau 37,88% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.079.721.253.120,00. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA Tahun	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Pinjaman Daerah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp530.078.601.558,28 atau 7,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp530.078.601.558,28 atau 7,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir 3.5.1.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Besaran alokasi SiLPA yang dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sudah merupakan hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	3. Penyertaan Modal Daerah Penyertaan Modal Daerah Rp158.000.000.000,00 atau 2,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Gubernur Bali dan DPRD Provinsi Bali atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.5.2.2.b dan butir 3.5.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir 3.5.2.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Penganggaran Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Bali mengenai Penyertaan Modal Daerah yang sebelumnya telah ditetapkan.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Bali tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp243.464.808.088,00 atau 3,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana maksud Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.5.2.3.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Penganggaran pembayaran cicilan pokok utang dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk membayar cicilan utang Pemerintah Provinsi Bali kepada PT. SNI.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Selanjutnya, pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang harus dianggarkan dalam Perubahan APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, sebagaimana maksud butir 3.5.2.3.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
IX	REKOMENDASI	
	Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut: A. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut: 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; 4. Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; 7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. B. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut: 1. Swasembada pangan, energi, dan air; 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara; 3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi; 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi; 5. Pemberantasan kemiskinan;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba; 7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat; 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi; 9. Penguatan pertanahan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif; 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas; 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup; 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani; 13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan; 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi; 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah dan perawatan rumah ibadah; dan 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	C. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, yaitu antara lain sebagai berikut: 1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu <i>source of growth</i>; 2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD; 3. Menurunkan nilai <i>Incremental Capital-Output Ratio</i> (ICOR) yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas; dan 4. Menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi dan program upskilling dan <i>reskilling</i> tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Provinsi Bali. D. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Tahun 2019 dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. E. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemuatakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD RI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir 3.1.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD RI dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemuatakhirannya.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	F. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana maksud butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. G. Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. H. Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta	Pemerintah Provinsi Bali telah berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, dengan menyediakan anggaran yang memadai baik melalui program kegiatan pada Perangkat Daerah maupun Belanja Tidak Terduga. Penetapan penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah berdasarkan peraturan daerah yang mengatur tentang pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. I. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. J. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan dan penggunaan alokasi pagu belanja yang tidak sesuai standar harga satuan dan analisis standar belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Bali paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. K. Dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Provinsi Bali melakukan identifikasi atas efisiensi belanja dengan memperhatikan: 1. aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen); 2. kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai dengan target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan; 3. batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	minimal, penurunan <i>stunting</i>, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan serta nomenklatur yang telah dilakukan penandaan dalam SIPD RI; 4. belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga. Selanjutnya, hasil efisiensi dimaksud dialihkan untuk digunakan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025. L. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penataan pegawai Non ASN melalui seleksi pengadaan PPPK, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengambil langkah-langkah antara lain: 1. menganggarkan gaji bagi pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024 hingga diangkat menjadi ASN; dan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	2. apabila jumlah pegawai Non ASN yang telah mengikuti seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai Non ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu dengan menganggarkan gaji bagi PPPK Paruh Waktu yang disediakan di luar Belanja Pegawai; sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 Hal Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Non ASN. M. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (<i>value for money</i>), Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Pemerintah Provinsi Bali melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: 1. Penguatan Perencanaan PBJ 2. Pelaksanaan Pengadaan Dini (Early Procurement) 3. Pengendalian Kontrak, Monitoring dan Evaluasi PBJ

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	N. Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dengan meningkatkan penggunaan aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) sebagai bahan tambah, bahan substitusi dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan dan butir 5.2.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. O. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain: 1. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi; 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (<i>roadmap</i>) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten dan terukur; 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	4. Untuk melakukan asistensi dan Monitoring terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya; dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. P. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu: 1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah; 2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>); 3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi	1. Sesuai dengan Instruksi Gubernur Bali Nomor 11/DISHUB/Tahun 2021 tentang Pengadaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, serta sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan / atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, saat ini Pemerintah Provinsi Bali sedang menyusun peraturan daerah tentang pengadaan dan alokasi anggaran untuk penggunaan KBLBB sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan” 2. Saat ini pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>) di Provinsi Bali dimudahkan dengan mendapatkan keringanan dalam Pajak Kendaraan Bermotor. PKB kendaraan listrik di Bali tarifnya rendah karena ada insentif pengurangan yang signifikan hingga 50% dari tarif normal kendaraan konvensional

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Pemerintahan Daerah di Daerah masing-masing; dan 4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir 5.3.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Q. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: 1. Keadaan darurat meliputi: - Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	2. Keperluan mendesak meliputi: a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau masyarakat; sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. R. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk: 1. Mendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangan yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	2. Mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing dan relevansi sebagaimana maksud butir 5.2.9.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 3. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di Provinsi Bali kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI. 4. Mendukung pelayanan kegiatan haji berupa transportasi, biaya akomodasi, konsumsi jemaah haji reguler dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal, serta biaya operasional petugas haji daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana maksud butir 5.2.19.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 5. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Bali antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana maksud butir 5.2.19.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 6. Mendukung pelaksanaan BAZNAS Provinsi Bali dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. S. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit: 1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau 2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat: 1. nama kegiatan; 2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	3. jumlah anggaran; dan 4. alokasi anggaran per tahun. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.2.v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. T. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakkan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali sesuai dengan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah antara lain: 1. pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah; 2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat provinsi maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya; sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 Hal Permohonan Dukungan APBD Untuk Kompetisi Amatir dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2/3883/SJ tentang Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Kompetisi Sepak Bola Amatir yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	U. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengambil langkah-langkah antara lain: 1. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON; 2. mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON; 3. membentuk Tim Koordinasi Provinsi dalam menyelenggarakan DBON di tingkat provinsi; 4. menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; 5. menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran <i>Sport Development Index</i> (SDI) di daerah; 6. menyediakan pendanaan dan melaksanakan pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) dan sentra pembinaan olahraga prestasi lainnya; 7. menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON; dan 8. menyediakan pendanaan dan menyelenggarakan pelatihan pelatih olahraga cabang olahraga unggulan DBON;	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan butir 5.3.18.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. V. Dalam rangka pengelolaan BMD untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan Monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengambil langkah-langkah antara lain: 1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali; 2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri; 3. menganggarkan sensus BMD bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun; 4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah; 5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran pelaksanaan inventarisasi BMD; sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. W. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. X. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	TANGGAPAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2025
	Y. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Bali.	

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 12 September 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI
KETUA,



DEWA MADE MAHAYADNYA, S.H.

WAKIL KETUA

IDA GEDE KOMANG KRESNA BUDI, S.A.P.

WAKIL KETUA

I WAYAN DISEL ASTAWA, S.E.

WAKIL KETUA

I KOMANG NOVA SEWI PUTRA, S.E.

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI BALI NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025**



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, serta keadaan darurat dan mendesak, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

- 28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp7.228.849.813.401,20 (tujuh triliun dua ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus satu rupiah dua puluh sen) bertambah sebesar Rp585.585.272.670,40 (lima ratus delapan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah empat puluh sen) sehingga menjadi Rp7.814.435.086.071,60 (tujuh triliun delapan ratus empat belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah enam puluh sen) yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan daerah
 - 1. semula Rp6.027.724.313.823,00
 - 2. bertambah Rp632.899.711.487,00
- jumlah pendapatan daerah
- setelah perubahan Rp6.660.624.025.310,00

- b. belanja daerah
 1. semula Rp6.827.385.005.313,20
 2. bertambah Rp585.585.272.670,40
 - jumlah belanja daerah
setelah perubahan Rp7.412.970.277.983,60
 - c. pembiayaan daerah
 1. penerimaan pembiayaan
 - a) semula Rp1.201.125.499.578,20
 - b) berkurang Rp47.314.438.816,60
 - jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp1.153.811.060.761,60
 2. pengeluaran pembiayaan
 - a) semula Rp401.464.808.088,00
 - b) bertambah Rp0,00
 - jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp401.464.808.088,00
 3. jumlah pembiayaan netto
 - a) semula Rp799.660.691.490,20
 - b) berkurang Rp47.314.438.816,60
 - setelah perubahan Rp752.346.252.673,60
- sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 0,00
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah
 1. semula Rp3.581.371.604.823,00
 2. bertambah Rp634.891.818.118,00
 - jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan Rp4.216.263.422.941,00
- b. pendapatan transfer
 1. semula Rp2.440.644.709.000,00
 2. berkurang Rp2.041.378.631,00
 - jumlah pendapatan transfer
setelah perubahan Rp2.438.603.330.369,00
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah
 1. semula Rp5.708.000.000,00
 2. bertambah Rp49.272.000,00
 - jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
setelah perubahan Rp5.757.272.000,00

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. pajak daerah
 - 1. semula Rp2.611.036.410.791,00
 - 2. bertambah Rp156.802.941.725,00
 - jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp2.767.839.352.516,00
- b. retribusi daerah
 - 1. semula Rp337.336.008.147,00
 - 2. bertambah Rp102.131.609.467,00
 - jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp439.467.617.614,00
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1. semula Rp193.896.695.885,00
 - 2. bertambah Rp59.707.143.227,00
 - jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp253.603.839.112,00
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1. semula Rp439.102.490.000,00
 - 2. bertambah Rp316.250.123.699,00
 - jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp755.352.613.699,00

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat
 - 1. semula Rp2.440.644.709.000,00
 - 2. berkurang Rp36.867.069.000,00
 - jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp2.403.777.640.000,00
- b. pendapatan transfer antar daerah
 - 1. semula Rp0,00
 - 2. bertambah Rp34.825.690.369,00
 - jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp34.825.690.369,00

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari pendapatan hibah yaitu:

a. semula	Rp5.708.000.000,00
b. bertambah	<u>Rp49.272.000,00</u>
jumlah pendapatan hibah	
setelah perubahan	Rp5.757.272.000,00

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. belanja operasi	
1. semula	Rp4.880.783.654.845,20
2. bertambah	<u>Rp167.859.839.480,40</u>
jumlah belanja operasi	
setelah perubahan	Rp5.048.643.494.325,60
b. belanja modal	
1. semula	Rp1.007.960.216.627,00
2. berkurang	<u>Rp43.722.207.933,00</u>
jumlah belanja modal	
setelah perubahan	Rp964.238.008.694,00
c. belanja tidak terduga	
1. semula	Rp151.187.931.213,00
2. berkurang	<u>Rp95.263.992.269,00</u>
jumlah belanja tidak terduga	
setelah perubahan	Rp55.923.938.944,00
d. belanja transfer	
1. semula	Rp787.453.202.628,00
2. bertambah	<u>Rp556.711.633.392,00</u>
jumlah belanja transfer	
setelah perubahan	Rp1.344.164.836.020,00

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai	
1. semula	Rp2.614.645.674.805,20
2. berkurang	<u>Rp87.771.397.459,60</u>
jumlah belanja pegawai	
setelah perubahan	Rp2.526.874.277.345,60

- b. belanja barang dan jasa
 1. semula Rp1.447.603.014.904,00
 2. bertambah Rp110.583.716.940,00
 jumlah belanja barang dan jasa
 setelah perubahan Rp1.558.186.731.844,00
 - c. belanja subsidi
 1. semula Rp5.090.000.000,00
 2. bertambah Rp4.919.000.000,00
 jumlah belanja subsidi
 setelah perubahan Rp10.009.000.000,00
 - d. belanja hibah
 1. semula Rp813.294.965.136,00
 2. bertambah Rp140.166.920.000,00
 jumlah belanja hibah
 setelah perubahan Rp953.461.885.136,00
 - e. belanja bantuan sosial
 1. semula Rp150.000.000,00
 2. berkurang Rp38.400.000,00
 jumlah belanja bantuan sosial
 setelah perubahan Rp111.600.000,00
8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja modal tanah
 1. semula Rp25.418.325.760,0
 2. bertambah Rp5.645.000.000,00
 jumlah belanja modal tanah
 setelah perubahan Rp31.063.325.760,00
- b. belanja modal peralatan dan mesin
 1. semula Rp250.200.970.942,00
 2. bertambah Rp35.361.475.541,00
 jumlah belanja modal peralatan dan mesin
 setelah perubahan Rp285.562.446.483,00
- c. belanja modal gedung dan bangunan
 1. semula Rp531.631.164.379,00
 2. berkurang Rp209.510.821.475,00
 jumlah modal belanja gedung dan bangunan
 setelah perubahan Rp322.120.342.904,00
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
 1. semula Rp178.268.021.666,00
 2. bertambah Rp112.092.448.088,00
 jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
 setelah perubahan Rp290.360.469.754,00

- e. belanja modal aset tetap lainnya
 - 1. semula Rp22.265.084.280,00
 - 2. bertambah Rp12.153.689.913,00
 - jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp34.418.774.193,00
- f. belanja modal aset lainnya
 - 1. semula Rp176.649.600,00
 - 2. bertambah Rp536.000.000,00
 - jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp712.649.600,00

9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- a. semula Rp151.187.931.213,00
- b. berkurang Rp95.263.992.269,00
- jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp55.923.938.944,00

10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil
 - 1. semula Rp582.188.016.684,00
 - 2. bertambah Rp436.660.940.032,00
 - jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp1.018.848.956.716,00
- b. belanja bantuan keuangan
 - 1. semula Rp205.265.185.944,00
 - 2. bertambah Rp120.050.693.360,00
 - jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp325.315.879.304,00

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan
 - 1. semula Rp1.201.125.499.578,20
 - 2. berkurang Rp47.314.438.816,60
 - jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp1.153.811.060.761,60
- b. pengeluaran pembiayaan
 - 1. semula Rp401.464.808.088,00
 - 2. bertambah Rp0,00
 - jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp401.464.808.088,00

12. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1. semula Rp1.201.125.499.578,20
 - 2) berkurang Rp577.393.040.374,88
 - jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp623.732.459.203,32
- b. penerimaan pinjaman daerah
 - 1. semula Rp0,00
 - 2. bertambah Rp530.078.601.558,28
 - jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp530.078.601.558,28

13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

- a. penyertaan modal daerah
 - 1. semula Rp158.000.000.000,00
 - 2. bertambah Rp0,00
 - jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp158.000.000.000,00

- b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - 1. semula Rp243.464.808.088,00
 - 2. bertambah Rp0,00
 jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 setelah perubahan Rp243.464.808.088,00

14. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Defisit
 - a. semula Rp799.660.691.490,20
 - b. berkurang Rp47.314.438.816,60
 defisit setelah perubahan Rp752.346.252.673,60
- (2) Pembiayaan Netto
 - a. semula Rp799.660.691.490,20
 - b. berkurang Rp47.314.438.816,60
 pembiayaan netto
 setelah perubahan Rp752.346.252.673,60

15. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2025;

- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2025;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2025;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2025;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2025;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2025;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan Tahun Anggaran 2025;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2025; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 September 2025

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (6-142/2025)

LAMPIRAN I

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN



PROVINSI BALI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.581.371.604.823,00	4.216.263.422.941,00	634.891.818.118,00
4.1.01	Pajak Daerah	2.611.036.410.791,00	2.767.839.352.516,00	156.802.941.725,00
4.1.02	Retribusi Daerah	337.336.008.147,00	439.467.617.614,00	102.131.609.467,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	193.896.695.885,00	253.603.839.112,00	59.707.143.227,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	439.102.490.000,00	755.352.613.699,00	316.250.123.699,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.440.644.709.000,00	2.438.603.330.369,00	-2.041.378.631,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.440.644.709.000,00	2.403.777.640.000,00	-36.867.069.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	34.825.690.369,00	34.825.690.369,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.708.000.000,00	5.757.272.000,00	49.272.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.708.000.000,00	5.757.272.000,00	49.272.000,00
	Jumlah Pendapatan	6.027.724.313.823,00	6.660.624.025.310,00	632.899.711.487,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	4.880.783.654.845,20	5.048.643.494.325,60	167.859.839.480,40
5.1.01	Belanja Pegawai	2.614.645.674.805,20	2.526.874.277.345,60	-87.771.397.459,60
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.447.603.014.904,00	1.558.186.731.844,00	110.583.716.940,00
5.1.04	Belanja Subsidi	5.090.000.000,00	10.009.000.000,00	4.919.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	813.294.965.136,00	953.461.885.136,00	140.166.920.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	150.000.000,00	111.600.000,00	-38.400.000,00
5.2	BELANJA MODAL	1.007.960.216.627,00	964.238.008.694,00	-43.722.207.933,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	25.418.325.760,00	31.063.325.760,00	5.645.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.200.970.942,00	285.562.446.483,00	35.361.475.541,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	531.631.164.379,00	322.120.342.904,00	-209.510.821.475,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	178.268.021.666,00	290.360.469.754,00	112.092.448.088,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.265.084.280,00	34.418.774.193,00	12.153.689.913,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	176.649.600,00	712.649.600,00	536.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	151.187.931.213,00	55.923.938.944,00	-95.263.992.269,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	151.187.931.213,00	55.923.938.944,00	-95.263.992.269,00
5.4	BELANJA TRANSFER	787.453.202.628,00	1.344.164.836.020,00	556.711.633.392,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	582.188.016.684,00	1.018.848.956.716,00	436.660.940.032,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	205.265.185.944,00	325.315.879.304,00	120.050.693.360,00
	Jumlah Belanja	6.827.385.005.313,20	7.412.970.277.983,60	585.585.272.670,40
	Total Surplus/(Defisit)	-799.660.691.490,20	-752.346.252.673,60	47.314.438.816,60
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.201.125.499.578,20	1.153.811.060.761,60	-47.314.438.816,60

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.201.125.499.578,20	623.732.459.203,32	-577.393.040.374,88
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	530.078.601.558,28	530.078.601.558,28
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	401.464.808.088,00	401.464.808.088,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	158.000.000.000,00	158.000.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	243.464.808.088,00	243.464.808.088,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	401.464.808.088,00	401.464.808.088,00	0,00
	Pembiayaan Netto	799.660.691.490,20	752.346.252.673,60	-47.314.438.816,60
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

LAMPIRAN II

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI



PROVINSI BALI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja									Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer					
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	356.739.830.983,00	416.872.037.624,00	2.814.140.998.740,20	2.860.179.337.506,00	523.483.745.373,00	659.664.643.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337.624.744.113,20	3.519.843.981.002,00	182.219.236.888,80	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.350.000.000,00	2.502.000.000,00	1.744.585.938.825,00	1.694.500.679.311,00	223.201.423.600,00	239.116.866.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.787.362.425,00	1.933.617.545.947,00	-34.169.816.478,00	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.350.000.000,00	2.502.000.000,00	1.741.443.382.717,00	1.691.875.652.811,00	223.112.617.000,00	239.007.138.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.555.999.717,00	1.930.882.791.147,00	-33.673.208.570,00	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	0,00	0,00	2.256.477.766,00	1.887.839.765,00	88.806.600,00	109.728.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.284.366,00	1.997.568.065,00	-347.716.301,00	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	0,00	0,00	886.078.342,00	737.186.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.078.342,00	737.186.735,00	-148.891.607,00	
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	305.219.038.983,00	355.577.845.624,00	685.251.957.040,00	715.291.540.842,00	96.267.544.015,00	109.013.689.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.519.501.055,00	824.305.230.667,00	42.785.729.612,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	305.219.038.983,00	355.577.845.624,00	339.077.224.972,00	327.744.235.157,00	808.482.700,00	876.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.885.707.672,00	328.620.964.157,00	-11.264.743.515,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	0,00	0,00	4.636.845.646,00	5.441.792.301,00	371.968.400,00	355.295.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008.814.046,00	5.797.088.101,00	788.274.055,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa	0,00	0,00	8.826.600.489,00	7.841.525.316,00	1.007.141.200,00	1.841.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833.741.689,00	9.683.150.316,00	-150.591.373,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	0,00	0,00	5.286.213.670,00	4.714.838.579,00	1.282.741.720,00	4.252.340.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568.955.390,00	8.967.179.509,00	2.398.224.119,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Bali Mandara	0,00	0,00	200.686.107.309,00	213.786.906.414,00	64.255.586.205,00	65.870.349.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.941.693.514,00	279.657.255.619,00	14.715.562.105,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama	0,00	0,00	35.978.343.308,00	34.504.611.113,00	18.603.149.570,00	20.401.649.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.581.492.878,00	54.906.260.683,00	324.767.805,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	0,00	0,00	81.218.160.000,00	81.854.455.000,00	8.781.840.000,00	11.145.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000.000,00	93.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	0,00	0,00	9.542.461.646,00	8.823.817.446,00	1.156.634.220,00	1.250.780.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.699.095.866,00	10.074.597.466,00	-624.498.400,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya	0,00	0,00	0,00	30.579.359.516,00	0,00	3.019.375.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.598.734.816,00	33.598.734.816,00	

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	49.161.432.000,00	58.782.832.000,00	262.560.901.088,20	339.677.034.168,00	192.061.398.089,00	297.791.486.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.622.299.177,20	637.468.520.645,00	182.846.221.467,80
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	0,00	0,00	1.878.843.640,00	1.490.574.327,00	2.139.137.200,00	2.132.255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017.980.840,00	3.622.829.827,00	-395.151.013,00
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0002	UPTD Pengelolaan Air Minum	0,00	0,00	33.763.210.452,00	31.712.219.622,00	7.506.500.000,00	11.506.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.269.710.452,00	43.218.719.622,00	1.949.009.170,00
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0003	UPTD Pengelolaan Air Limbah	0,00	0,00	12.076.373.000,00	13.855.072.150,00	2.360.000.000,00	4.485.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436.373.000,00	18.340.072.150,00	3.903.699.150,00
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	49.161.432.000,00	58.782.832.000,00	210.143.525.146,20	283.931.172.994,00	178.920.233.309,00	278.942.203.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.063.758.455,20	562.873.376.391,00	173.809.617.935,80
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	4.698.948.850,00	8.687.995.075,00	1.135.527.580,00	725.527.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834.476.430,00	9.413.522.655,00	3.579.046.225,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	0,00	87.021.414.122,00	78.548.534.936,00	8.419.333.069,00	8.452.956.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.440.747.191,00	87.001.491.029,00	-8.439.256.162,00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	58.197.198.468,00	53.625.717.692,00	602.619.100,00	595.472.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.799.817.568,00	54.221.190.392,00	-4.578.627.176,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	24.962.548.950,00	21.665.320.770,00	3.419.873.100,00	3.460.675.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.382.422.050,00	25.125.996.194,00	-3.256.425.856,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	0,00	0,00	3.861.666.704,00	3.257.496.474,00	4.396.840.869,00	4.396.807.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.258.507.573,00	7.654.304.443,00	-604.203.130,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	9.360.000,00	9.360.000,00	34.720.787.665,00	32.161.548.249,00	3.534.046.600,00	5.289.644.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.254.834.265,00	37.451.192.714,00	-803.641.551,00
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.360.000,00	9.360.000,00	29.126.957.807,00	27.057.807.508,00	79.649.600,00	1.836.219.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.206.607.407,00	28.894.026.973,00	-312.580.434,00
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	UPTD Pelayanan Sosial	0,00	0,00	5.593.829.858,00	5.103.740.741,00	3.454.397.000,00	3.453.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048.226.858,00	8.557.165.741,00	-491.061.117,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.497.024.000,00	11.655.554.800,00	972.600.463.229,00	1.028.399.243.725,40	393.317.824.159,00	195.518.512.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.918.287.388,00	1.223.917.756.519,40	-142.000.530.868,60
2	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	87.810.156.532,00	94.989.113.800,00	67.374.500,00	67.374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.877.531.032,00	95.056.488.300,00	7.178.957.268,00
2	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	87.810.156.532,00	94.989.113.800,00	67.374.500,00	67.374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.877.531.032,00	95.056.488.300,00	7.178.957.268,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	0,00	382.727.700,00	6.113.479.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.727.700,00	6.113.479.700,00	5.730.752.000,00		
2	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	382.727.700,00	6.113.479.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.727.700,00	6.113.479.700,00	5.730.752.000,00		
2	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	2.196.103.186,00	1.922.753.273,00	4.141.522.900,00	4.241.522.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337.626.086,00	6.164.276.173,00	-173.349.913,00		
2	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	1.133.215.300,00	1.004.276.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.215.300,00	1.004.276.700,00	-128.938.600,00		
2	06	1.06.2.08.0.00.06.0002	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	1.062.887.886,00	918.476.573,00	4.141.522.900,00	4.241.522.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204.410.786,00	5.159.999.473,00	-44.411.313,00		
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.704.320.000,00	6.104.320.000,00	43.143.666.758,00	38.501.407.334,00	144.064.000,00	152.010.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.287.730.758,00	38.653.418.294,00	-4.634.312.464,00		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	0,00	0,00	907.284.461,00	838.411.068,00	28.000.000,00	45.734.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.284.461,00	884.145.328,00	-51.139.133,00		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	0,00	0,00	975.605.160,00	949.836.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.605.160,00	949.836.654,00	-25.768.506,00		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	4.704.320.000,00	6.104.320.000,00	41.260.777.137,00	36.713.159.612,00	116.064.000,00	106.276.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.376.841.137,00	36.819.436.312,00	-4.557.404.825,00		
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	22.984.549.537,00	26.197.678.263,00	0,00	66.263.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.984.549.537,00	26.263.941.863,00	3.279.392.326,00		
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	589.682.750,00	326.704.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.682.750,00	326.704.025,00	-262.978.725,00		
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	21.716.072.927,00	25.396.262.608,00	0,00	66.263.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.716.072.927,00	25.462.526.208,00	3.746.453.281,00		
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	678.793.860,00	474.711.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.793.860,00	474.711.630,00	-204.082.230,00		
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	268.064.000,00	3.425.664.000,00	47.647.534.243,00	103.833.283.028,40	2.055.257.416,00	1.700.107.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.702.791.659,00	105.533.390.688,40	55.830.599.029,40		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	268.064.000,00	3.425.664.000,00	32.812.983.126,00	33.078.650.834,40	783.049.940,00	423.576.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.596.033.066,00	33.502.227.534,40	-93.805.531,60		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	0,00	0,00	2.570.482.710,00	1.905.922.085,00	443.228.800,00	361.063.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013.711.510,00	2.266.985.285,00	-746.726.225,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	0,00	0,00	8.487.511.611,00	65.496.957.773,00	144.834.520,00	144.834.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.632.346.131,00	65.641.792.293,00	57.009.446.162,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD Perlengkapan Jalan	0,00	0,00	3.153.930.752,00	2.949.098.522,00	596.094.000,00	719.897.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.024.752,00	3.668.995.802,00	-81.028.950,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	0,00	0,00	622.626.044,00	402.653.814,00	88.050.156,00	50.735.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.676.200,00	453.389.774,00	-257.286.426,00		
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	0,00	88.130.200.495,00	83.798.224.921,00	303.433.486.350,00	163.371.267.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.563.686.845,00	247.169.492.899,00	-144.394.193.946,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	410.712.320,00	294.555.205,00	0,00	29.602.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.712.320,00	324.157.405,00	-86.554.915,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	431.471.640,00	281.847.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.471.640,00	281.847.820,00	-149.623.820,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	65.414.224.541,00	63.783.775.204,00	299.021.725.810,00	158.138.812.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.435.950.351,00	221.922.588.034,00	-142.513.362.317,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0001	UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital	0,00	0,00	7.248.885.100,00	6.849.600.100,00	894.220.390,00	664.220.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143.105.490,00	7.513.820.490,00	-629.285.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0002	UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali	0,00	0,00	14.624.906.894,00	12.588.446.592,00	3.517.540.150,00	4.538.632.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.142.447.044,00	17.127.079.150,00	-1.015.367.894,00		
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	0,00	23.835.263.248,00	22.074.885.383,00	972.452.200,00	955.055.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.807.715.448,00	23.029.940.683,00	-1.777.774.765,00		
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	20.741.885.838,00	17.197.953.087,00	972.452.200,00	955.055.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.714.338.038,00	18.153.008.387,00	-3.561.329.651,00		
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	0,00	0,00	3.093.377.410,00	4.876.932.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093.377.410,00	4.876.932.296,00	1.783.554.886,00		
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.040.000,00	5.048.400,00	20.171.142.940,00	17.908.672.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.171.142.940,00	17.908.672.989,00	-2.262.469.951,00		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.040.000,00	5.048.400,00	20.171.142.940,00	17.908.672.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.171.142.940,00	17.908.672.989,00	-2.262.469.951,00		
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.519.600.000,00	2.120.522.400,00	621.938.026.463,00	611.460.912.518,00	79.498.402.333,00	15.630.302.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.436.428.796,00	627.091.215.311,00	-74.345.213.485,00		
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	2.519.600.000,00	2.120.522.400,00	121.781.939.541,00	106.562.513.372,00	331.754.660,00	1.680.007.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.113.694.201,00	108.242.520.599,00	-13.871.173.602,00		
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	UPTD Taman Budaya	0,00	0,00	6.400.906.550,00	6.884.481.935,00	0,00	3.690.777.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.906.550,00	10.575.259.885,00	4.174.353.335,00		
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	UPTD Museum Bali	0,00	0,00	4.933.259.756,00	4.628.107.986,00	78.744.953.433,00	9.840.368.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.678.213.189,00	14.468.476.759,00	-69.209.736.430,00		
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	0,00	0,00	6.744.494.148,00	6.583.280.819,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779.494.148,00	6.618.280.819,00	-161.213.329,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	0,00	0,00	482.077.426.468,00	486.802.528.406,00	386.694.240,00	384.148.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.464.120.708,00	487.186.677.249,00	4.722.556.541,00		
2	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	0,00	2.183.889.374,00	3.801.503.149,00	17.648.960,00	16.771.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.538.334,00	3.818.274.609,00	1.616.736.275,00		
2	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	1.151.509.932,00	2.826.680.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.509.932,00	2.826.680.199,00	1.675.170.267,00		
2	27	3.27.2.09.0.00.01.0009	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	0,00	0,00	1.032.379.442,00	974.822.950,00	17.648.960,00	16.771.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.028.402,00	991.594.410,00	-58.433.992,00		
2	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	10.860.001.299,00	16.897.238.254,00	2.942.615.500,00	9.272.835.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.802.616.799,00	26.170.073.897,00	12.367.457.098,00		
2	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	1.831.465.450,00	1.513.408.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.465.450,00	1.513.408.925,00	-318.056.525,00		
2	28	3.28.2.11.0.00.01.0006	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	370.828.985,00	382.450.847,00	17.615.500,00	48.441.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.444.485,00	430.892.490,00	42.448.005,00		
2	28	3.28.2.11.0.00.01.0007	UPTD Pengelolaan Sampah	0,00	0,00	8.657.706.864,00	15.001.378.482,00	2.925.000.000,00	9.224.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.582.706.864,00	24.225.772.482,00	12.643.065.618,00		
2	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	0,00	1.317.201.454,00	900.091.113,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.201.454,00	945.091.113,00	-417.110.341,00		
2	01	4.01.2.23.2.24.01.0003	Biro Umum	0,00	0,00	751.603.126,00	576.120.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.603.126,00	576.120.481,00	-175.482.645,00		
2	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	Biro Organisasi	0,00	0,00	565.598.328,00	323.970.632,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.598.328,00	368.970.632,00	-241.627.696,00		
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	332.916.560.014,00	505.364.640.554,00	222.597.142.977,00	238.769.356.776,20	4.388.871.160,00	5.694.753.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.986.014.137,00	244.464.110.296,20	17.478.096.159,20		
3	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	0,00	140.384.300,00	100.970.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.384.300,00	100.970.300,00	-39.414.000,00		
3	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	24.884.800,00	24.884.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.884.800,00	24.884.800,00	0,00		
3	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	115.499.500,00	76.085.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.499.500,00	76.085.500,00	-39.414.000,00		
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.824.750.000,00	3.162.272.000,00	32.715.053.553,00	32.647.153.934,20	3.459.855.000,00	3.447.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.174.908.553,00	36.095.008.934,20	-79.899.618,80		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.824.750.000,00	3.162.272.000,00	28.886.075.579,00	29.064.942.925,20	3.263.523.520,00	3.251.523.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.149.599.099,00	32.316.466.445,20	166.867.346,20		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	0,00	0,00	1.432.062.464,00	1.399.507.054,00	38.554.200,00	38.554.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.616.664,00	1.438.061.254,00	-32.555.410,00		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	0,00	0,00	1.010.924.488,00	1.020.273.678,00	137.332.080,00	137.332.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.256.568,00	1.157.605.758,00	9.349.190,00		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	0,00	0,00	1.073.004.792,00	899.566.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.004.792,00	899.566.752,00	-173.438.040,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pelabuhan Perikanan	0,00	0,00	312.986.230,00	262.863.525,00	20.445.200,00	20.445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.431.430,00	283.308.725,00	-50.122.705,00		
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	325.005.275.200,00	500.005.275.200,00	24.164.188.168,00	30.881.670.695,00	274.162.200,00	724.253.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.438.350.368,00	31.605.924.583,00	7.167.574.215,00		
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	325.005.275.200,00	500.005.275.200,00	24.164.188.168,00	30.881.670.695,00	274.162.200,00	724.253.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.438.350.368,00	31.605.924.583,00	7.167.574.215,00		
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	843.394.814,00	936.135.194,00	94.877.981.875,00	106.425.172.899,00	167.607.800,00	159.156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.045.589.675,00	106.584.329.099,00	11.538.739.424,00		
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	843.394.814,00	936.135.194,00	85.409.872.694,00	97.877.823.096,00	167.607.800,00	159.156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.577.480.494,00	98.036.979.296,00	12.459.498.802,00		
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0009	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	0,00	0,00	532.326.060,00	364.550.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.326.060,00	364.550.840,00	-167.775.220,00		
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	0,00	2.505.052.380,00	1.988.513.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.052.380,00	1.988.513.777,00	-516.538.603,00		
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0,00	0,00	2.928.792.646,00	2.908.218.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.792.646,00	2.908.218.025,00	-20.574.621,00		
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0014	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,00	0,00	1.071.483.154,00	836.234.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.483.154,00	836.234.367,00	-235.248.787,00		
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0015	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	0,00	2.430.454.941,00	2.449.832.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.454.941,00	2.449.832.794,00	19.377.853,00		
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1.219.380.000,00	1.235.183.760,00	47.181.527.728,00	44.173.575.493,00	0,00	446.257.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.181.527.728,00	44.619.832.805,00	-2.561.694.923,00		
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.219.380.000,00	1.235.183.760,00	43.276.515.538,00	40.870.675.033,00	0,00	314.442.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.276.515.538,00	41.185.117.345,00	-2.091.398.193,00		
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	0,00	0,00	943.845.756,00	708.446.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.845.756,00	708.446.804,00	-235.398.952,00		
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	0,00	0,00	615.450.489,00	548.684.259,00	0,00	131.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.450.489,00	680.499.259,00	65.048.770,00		
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	0,00	0,00	401.538.504,00	368.983.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.538.504,00	368.983.094,00	-32.555.410,00		
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	0,00	0,00	341.539.476,00	341.539.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.539.476,00	341.539.476,00	0,00		
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	0,00	0,00	1.602.637.965,00	1.335.246.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.637.965,00	1.335.246.827,00	-267.391.138,00		
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	23.760.000,00	25.774.400,00	23.518.007.353,00	24.540.813.455,00	487.246.160,00	917.231.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.005.253.513,00	25.458.044.575,00	1.452.791.062,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	20.033.307.619,00	18.344.389.856,00	476.633.000,00	446.309.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.509.940.619,00	18.790.699.056,00	-1.719.241.563,00		
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.760.000,00	25.774.400,00	1.888.308.686,00	4.685.549.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.308.686,00	4.685.549.661,00	2.797.240.975,00		
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	UPTD Rumah Kreatif	0,00	0,00	1.011.984.802,00	985.159.597,00	10.613.160,00	411.249.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.597.962,00	1.396.409.357,00	373.811.395,00		
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0002	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	0,00	0,00	584.406.246,00	525.714.341,00	0,00	59.672.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.406.246,00	585.386.501,00	980.255,00		
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	194.046.695.885,00	253.753.839.112,00	459.237.279.674,00	531.372.372.495,00	68.706.946.479,00	77.478.363.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.944.226.153,00	608.850.735.686,00	80.906.509.533,00		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	194.046.695.885,00	253.753.839.112,00	214.918.807.698,00	277.409.302.866,00	34.883.686.067,00	38.911.259.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.802.493.765,00	316.320.561.909,00	66.518.068.144,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	Biro Hukum	0,00	0,00	6.229.730.688,00	5.197.481.142,00	683.947.240,00	674.657.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.913.677.928,00	5.872.138.462,00	-1.041.539.466,00		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	Sekretariat Daerah	194.046.695.885,00	253.753.839.112,00	81.731.654.004,00	79.617.296.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.731.654.004,00	79.617.296.271,00	-2.114.357.733,00		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0001	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	33.557.655.890,00	70.248.613.565,00	398.256.320,00	392.180.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.955.912.210,00	70.640.793.885,00	36.684.881.675,00		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0003	Biro Umum	0,00	0,00	87.026.794.480,00	7.346.122.091,00	2.121.288.292,00	908.100.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.148.082.772,00	8.254.222.331,00	-80.893.860.441,00		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0003	Biro Umum	0,00	0,00	0,00	102.791.682.352,00	0,00	3.822.264.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.613.947.191,00	106.613.947.191,00		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	Biro Organisasi	0,00	0,00	2.588.922.900,00	1.975.996.152,00	175.493.140,00	432.515.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764.416.040,00	2.408.511.471,00	-355.904.569,00		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	0,00	0,00	3.784.049.736,00	3.122.077.993,00	31.504.701.075,00	32.681.541.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.288.750.811,00	35.803.618.998,00	514.868.187,00		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0008	Biro Humas dan Protokol	0,00	0,00	0,00	7.110.033.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110.033.300,00	7.110.033.300,00		
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	244.318.471.976,00	253.963.069.629,00	33.823.260.412,00	38.567.104.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.141.732.388,00	292.530.173.777,00	14.388.441.389,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	244.318.471.976,00	253.963.069.629,00	33.823.260.412,00	38.567.104.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.141.732.388,00	292.530.173.777,00	14.388.441.389,00		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.136.524.202.941,0	5.472.977.953.220,0	329.973.076.189,00	309.557.114.026,00	15.524.807.876,00	23.055.405.413,00	151.187.931.213,0	55.923.938.944,0	787.453.202.628,0	1.344.164.836.020,0	1.284.139.017.906,0	1.732.701.294.403,0	448.562.276.497,00		
5	01		PERENCANAAN	0,00	0,00	26.336.104.087,00	22.778.497.637,00	2.720.347.240,00	3.129.837.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056.451.327,00	25.908.334.842,00	-3.148.116.485,00		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	26.336.104.087,00	22.778.497.637,00	2.720.347.240,00	3.129.837.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056.451.327,00	25.908.334.842,00	-3.148.116.485,00		
5	02		KEUANGAN	5.126.774.182.941,0	5.450.595.698.220,0	222.167.260.604,00	193.765.807.717,00	9.565.211.589,00	13.478.962.003,00	151.187.931.213,0	55.923.938.944,0	787.453.202.628,0	1.344.164.836.020,0	1.170.373.606.034,0	1.607.333.544.684,0	436.959.938.650,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.464.954.781.000,0	2.631.978.390.704,0	40.347.795.099,00	33.624.662.237,00	1.114.714.640,00	2.734.345.860,00	151.187.931.213,0	55.923.938.944,0	787.453.202.628,0	1.344.164.836.020,0	980.103.643.580,00	1.436.447.783.061,0	456.344.139.481,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,00	0,00	3.418.829.044,00	3.400.024.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418.829.044,00	3.400.024.044,00	-18.805.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	2.661.819.401.941,0	2.818.617.307.516,0	148.013.938.529,00	132.191.801.329,00	8.450.496.949,00	10.744.616.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.464.435.478,00	142.936.417.472,00	-13.528.018.006,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng	0,00	0,00	5.169.318.004,00	4.001.267.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169.318.004,00	4.001.267.704,00	-1.168.050.300,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana	0,00	0,00	2.288.059.950,00	1.907.274.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.059.950,00	1.907.274.153,00	-380.785.797,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan	0,00	0,00	2.469.136.604,00	2.048.052.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469.136.604,00	2.048.052.169,00	-421.084.435,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung	0,00	0,00	4.774.948.404,00	3.547.988.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774.948.404,00	3.547.988.881,00	-1.226.959.523,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar	0,00	0,00	5.388.790.817,00	4.724.906.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388.790.817,00	4.724.906.077,00	-663.884.740,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar	0,00	0,00	3.412.562.020,00	2.684.865.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412.562.020,00	2.684.865.828,00	-727.696.192,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli	0,00	0,00	2.320.580.743,00	1.822.952.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.580.743,00	1.822.952.970,00	-497.627.773,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung	0,00	0,00	2.449.028.982,00	1.988.585.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449.028.982,00	1.988.585.947,00	-460.443.035,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem	0,00	0,00	2.114.272.408,00	1.823.426.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.272.408,00	1.823.426.378,00	-290.846.030,00		
5	03		KEPEGAWAIAN	9.690.020.000,00	22.322.255.000,00	49.933.283.983,00	57.895.612.461,00	1.601.183.000,00	3.658.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.534.466.983,00	61.553.995.461,00	10.019.528.478,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.690.020.000,00	22.322.255.000,00	39.432.851.037,00	36.178.124.450,00	575.633.000,00	575.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.008.484.037,00	36.753.757.450,00	-3.254.726.587,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	1.518.830.394,00	1.232.466.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.830.394,00	1.232.466.689,00	-286.363.705,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	0,00	0,00	1.981.602.552,00	1.842.221.322,00	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.152.552,00	1.867.771.322,00	-139.381.230,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0002	UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	7.000.000.000,00	18.642.800.000,00	1.000.000.000,00	3.057.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00	21.700.000.000,00	13.700.000.000,00		
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	22.163.525.639,00	24.972.788.562,00	1.121.764.840,00	1.914.807.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.285.290.479,00	26.887.596.102,00	3.602.305.623,00		
5	05	5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00	22.163.525.639,00	24.972.788.562,00	1.121.764.840,00	1.914.807.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.285.290.479,00	26.887.596.102,00	3.602.305.623,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG	60.000.000,00	60.000.000,00	9.372.901.876,00	10.144.407.649,00	516.301.207,00	873.415.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889.203.083,00	11.017.823.314,00	1.128.620.231,00		
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung	60.000.000,00	60.000.000,00	9.372.901.876,00	10.144.407.649,00	516.301.207,00	873.415.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889.203.083,00	11.017.823.314,00	1.128.620.231,00		
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	36.954.528.203,00	34.051.151.092,00	1.709.720.040,00	1.893.023.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.664.248.243,00	35.944.174.832,00	-2.720.073.411,00		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	36.954.528.203,00	34.051.151.092,00	1.709.720.040,00	1.893.023.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.664.248.243,00	35.944.174.832,00	-2.720.073.411,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	0,00	0,00	36.954.528.203,00	34.051.151.092,00	1.709.720.040,00	1.893.023.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.664.248.243,00	35.944.174.832,00	-2.720.073.411,00		
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	45.280.165.833,00	46.314.918.705,00	828.301.540,00	933.306.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.108.467.373,00	47.248.225.245,00	1.139.757.872,00		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	45.280.165.833,00	46.314.918.705,00	828.301.540,00	933.306.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.108.467.373,00	47.248.225.245,00	1.139.757.872,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	45.280.165.833,00	46.314.918.705,00	828.301.540,00	933.306.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.108.467.373,00	47.248.225.245,00	1.139.757.872,00		
			TOTAL	6.027.724.313.823,00	6.660.624.025.310,00	4.880.783.654.845,20	5.048.643.494.325,60	1.007.960.216.627,00	964.238.008.694,00	151.187.931.213,00	55.923.938.944,00	787.453.202.628,00	1.344.164.836.020,00	6.827.385.005.313,20	7.412.970.277.983,60	585.585.272.670,40		



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN III

**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**



PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
4	PENDAPATAN DAERAH	6.027.724.313.823,00	6.660.624.025.310,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.581.371.604.823,00	4.216.263.422.941,00	
4.1.01	Pajak Daerah	2.611.036.410.791,00	2.767.839.352.516,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	337.336.008.147,00	439.467.617.614,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	193.896.695.885,00	253.603.839.112,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	439.102.490.000,00	755.352.613.699,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.440.644.709.000,00	2.438.603.330.369,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.440.644.709.000,00	2.403.777.640.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	34.825.690.369,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.708.000.000,00	5.757.272.000,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.708.000.000,00	5.757.272.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.331.500,00	77.429.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.524.400,00	107.771.400,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.317.702.881.213,0 0	1.291.832.286.219,0 0	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.284.575.800,00	1.284.575.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.856.500,00	145.430.500,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	766.145.000,00	766.145.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.193.400,00	68.193.400,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.771.880,00	211.303.160,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.943.680,00	405.529.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	95.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.840.000,00	10.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.526.250,00	31.526.250,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	608.350.000,00	375.246.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	978.222.150,00	978.222.150,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.869.139.322,00	7.531.089.807,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	954.685.000,00	954.685.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.677.200.000,00	1.677.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.530.000,00	268.530.000,00	
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
Indikator Hasil	: Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16 - 18 tahun			
Kegiatan	: 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
Indikator Keluaran	: Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.000.000.000,00	68.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0012 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	382.366.000,00	382.366.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.704.150.000,00	4.704.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.782.735.000,00	2.768.028.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.956.434.118,00	27.034.056.126,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	77.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.820.000,00	125.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.809.198.792,00	102.268.721.247,00	
5.1.05	Belanja Hibah	22.025.950.000,00	22.924.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.877.341.478,00	21.723.850.114,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.978.639.730,00	18.509.398.587,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.409.900,00	57.409.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.899.900,00	76.299.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.690.000,00	44.690.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.871.116.400,00	8.871.116.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.996.800,00	86.942.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.312.128.200,00	8.166.313.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.715.508.800,00	2.715.508.800,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
Indikator Keluaran	: Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.212.384.000,00	22.612.384.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.150.616.000,00	11.150.616.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.022.700,00	7.022.700,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.907.903.200,00	3.907.903.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.712.000.000,00	21.712.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.658.185.000,00	25.658.185.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.393.781.500,00	5.338.581.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	295.164.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.955.825.000,00	1.718.208.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.272.868.244,00	16.854.550.194,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	88.862.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.432.000,00	460.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.285.344.318,00	75.446.089.730,00	
5.1.05	Belanja Hibah	73.788.630.000,00	74.694.380.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.029.567.802,00	19.700.121.909,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.426.307.880,00	12.438.960.231,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	51.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.800.000,00	37.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.160.000,00	68.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.012.000.000,00	4.012.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.189.441.560,00	2.189.441.560,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.022.098.320,00	7.022.098.320,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.628.200,00	86.574.200,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus			
Indikator Keluaran	: Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.533.566.200,00	3.523.966.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.593.966.000,00	1.322.189.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.649.915.980,00	3.487.687.843,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.611.500,00	157.959.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	594.364.800,00	594.364.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.391.516.090,00	7.925.003.025,00	
5.1.05	Belanja Hibah	709.720.000,00	809.720.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.627.137.240,00	1.464.156.400,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.136.670,00	1.065.415.375,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.547.600,00	15.547.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.370.000,00	90.910.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.171.600,00	16.171.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	758.000.000,00	600.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.220.000.000,00	1.318.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.880.000,00	362.880.000,00	
Program	: 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Indikator Hasil	: Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan minimal baik			
Kegiatan	: 1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi			
Indikator Keluaran	: Rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal			
Sub Kegiatan	: 1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.999.400,00	26.079.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.999.700,00	34.239.700,00	
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			

Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0001 UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan			
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.355.900,00	29.355.900,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.806.600,00	109.728.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.499.600,00	3.499.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.994.000,00	27.218.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	755.752.266,00	556.164.265,00	

Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	98.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
Indikator Hasil	: Persentase Sekolah yang Menerapkan Pembelajaran Berbasis TIK			
Kegiatan	: 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
Indikator Keluaran	: Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.970.000,00	94.290.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.774.000,00	14.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.908.000,00	31.636.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	562.961.000,00	545.681.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
Indikator Keluaran	: Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	77.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0051 Pengembangan konten digital untuk pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.386.000,00	13.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.646.000,00	31.374.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.991.000,00	354.631.000,00	
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0002 UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan			
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.613.000,00	8.613.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.547.600,00	6.547.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.946.000,00	17.280.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah			

Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.397.642,00	452.498.035,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.810.000,00	90.810.000,00	
Program	: 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
Indikator Hasil	: Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal			
Kegiatan	: 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah			
Sub Kegiatan	: 1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.100.800,00	67.654.800,00	
Kegiatan	: 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus			
Indikator Keluaran	: Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan			
Sub Kegiatan	: 1.01.03.1.02.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.663.300,00	34.643.300,00	
Program	: 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
Indikator Hasil	: Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan			

Kegiatan	: 1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali			
Sub Kegiatan	: 1.01.06.1.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	59.140.000,00	
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.158.900,00	51.666.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.876.110,00	29.457.705,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi keuangan sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	298.345.834.158,00	289.098.297.773,00	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.800.000,00	182.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.282.014,00	265.898.899,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.583.700,00	8.583.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.268.500,00	285.122.700,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	791.833.100,00	760.079.400,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	16.649.600,00	16.649.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.968.394,00	273.968.394,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.170.300,00	90.081.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.318.000,00	232.757.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	484.500.000,00	484.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.894.558.346,00	5.582.328.921,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP			

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.400.000,00	515.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.769.500,00	141.169.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	893.602.000,00	659.602.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	100.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase Faskes yang Terakreditasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Desa UCI Cakupan Kepesertaan JKN			
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Masyarakat yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Minimal			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.525.580,00	186.176.380,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			

Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.542.800,00	70.891.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.757.730,00	149.964.615,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.231.520,00	137.301.520,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.631.520,00	204.191.520,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.072.600,00	90.493.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.026.492,00	134.356.492,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.813.727.362,00	1.545.954.817,00	
5.1.05	Belanja Hibah	722.335.136,00	722.335.136,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.127.000,00	53.127.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.665.908.700,00	24.657.838.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.280.000,00	112.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.771.520,00	399.741.520,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.867.600,00	58.533.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0025 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	37.500.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan e-Kesehatan melalui Komunikasi Data Terintegrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.464.110,00	73.251.405,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.356.540,00	101.876.540,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.759.680,00	94.839.680,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi Sesuai Kebutuhan			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.448.460,00	156.328.860,00	
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.590.000,00	11.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.400,00	44.313.900,00	
Program	: 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
Indikator Hasil	: Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial			
Kegiatan	: 1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK			
Indikator Keluaran	: Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.153.570,00	168.145.865,00	
Kegiatan	: 1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakan lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.106.400,00	65.603.200,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Kabupaten/Kota yang Mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri			
Kegiatan	: 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya dukungan kerjasama mitra potensial/lintas sektor			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	535.451.330,00	308.484.615,00	
Kegiatan	: 1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah kabupaten/kota yang 80% Rumah Tangganya melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.1.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	227.375.200,00	
Kegiatan	: 1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 80% posyandu aktif			

Sub Kegiatan	: 1.02.05.1.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	21.125.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.924.000,00	17.924.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.316.000,00	1.316.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.268.400,00	110.595.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.458.100,00	155.458.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.134.000,00	6.134.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	11.250.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.900.000,00	363.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	810.685.512,00	745.574.692,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.175.000,00	39.175.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.520.000,00	52.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Bapelkesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.755.300.000,00	2.755.300.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	244.700.000,00	244.700.000,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase peserta pelatihan yang lulus sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.183.034,00	242.840.509,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.900.000,00	45.900.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.995.200,00	21.479.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.045.300,00	410.045.300,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	644.000.000,00	644.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.102.835.086,00	875.547.216,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.100.000,00	108.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.270.000,00	146.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	93.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.782.431.593,00	1.932.431.593,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.203.501.390,00	3.447.422.407,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	970.146.000,00	1.820.146.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase tersedianya pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0007 Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.517.120,00	139.008.800,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.015.500,00	5.015.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.703.300,00	74.127.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	587.076.720,00	1.495.273.114,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.695.800,00	202.695.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.790.800,00	19.790.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.358.000,00	21.798.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.500.000,00	98.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	988.375.510,00	939.542.395,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP			

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.900.000,00	263.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.690.000,00	52.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.839.940,00	68.100.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	660.665.000,00	1.091.404.940,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	223.600.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olah raga			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.080.400,00	64.996.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.690.210,00	98.034.105,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.017.847.192,00	805.928.172,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	5.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.794.227.018,00	1.998.420.007,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	1.376.262.876,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0004 RSUD Bali Mandara			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.686.107.309,00	25.401.669.414,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Bali Mandara			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			

Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	72.000.000.000,00	80.000.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000.000,00	108.385.237.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	1.114.763.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	1.500.000.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Laporan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.978.212.000,00	45.978.212.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.277.374.205,00	8.277.374.205,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0005 Rumah Sakit Jiwa			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.114.110.402,00	1.114.110.402,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.790.288.206,00	9.132.336.611,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Jiwa			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.032.800.000,00	7.768.100.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.967.200.000,00	16.433.400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.600.000.000,00	2.596.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	1.202.500.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Laporan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.944.700,00	56.664.100,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.578.149.570,00	15.578.149.570,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0006 Rumah Sakit Mata Bali Mandara			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di BLUD			
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Mata Bali Mandara			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	36.451.800.000,00	35.251.800.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.766.360.000,00	46.602.655.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.623.840.000,00	8.431.545.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.458.000.000,00	1.318.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	700.000.000,00	800.000.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	60.000.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	536.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.575.400,00	11.575.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.279.580,00	33.799.580,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.009.720,00	221.592.620,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.786.200,00	408.786.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.970.300,00	3.720.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.836.000,00	4.320.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintah Daerah sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.126.200,00	56.126.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	850.000.000,00	950.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.082.000,00	5.082.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.000.000,00	780.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.113.439.612,00	983.217.972,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	57.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.441.100,00	389.841.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.000.000,00	492.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Laporan pengadaan sediaan farmasi, bahan laboratorium, dan alkes yang diadakan			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.783.000,00	360.783.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.490.490.960,00	4.392.453.430,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah produk obat dan bahan obat tradisional yang diproduksi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.277.494,00	860.438.464,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.498.300,00	23.061.200,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0008 Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrai umum sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	320.930.850,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	885.688.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	71.116.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	96.970.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	120.895.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	325.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	586.753.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	174.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	271.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	380.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	900.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Indeks Kepuasan Masyarakat di RSU Dharma Yadnya			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	7.790.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	16.074.885.624,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Laporan Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	831.470.482,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	1.112.792.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.601.134.200,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti pelatihan			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	55.199.360,00	

Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0001 UPTD Balai Peralatan dan Pengujian			
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Peralatan			
Kegiatan	: 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.782.000,00	11.782.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.930.200,00	20.930.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	32.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.638.700,00	4.638.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.446.000,00	4.446.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	5.760.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.010.800,00	66.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.126.400,00	47.615.500,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.193.200,00	1.193.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	140.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.075.880,00	263.965.060,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.960.000,00	23.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.521.050,00	290.921.312,00	
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
Indikator Hasil	: Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat			
Kegiatan	: 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang- undangan jasa konstruksi			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	855.776.610,00	596.977.855,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.018.000.000,00	2.018.000.000,00	
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0002 UPTD Pengelolaan Air Minum			
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Indikator Hasil	: Persentase cakupan layanan Air Minum Layak			
Kegiatan	: 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan			
Sub Kegiatan	: 1.03.03.1.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.763.210.452,00	31.712.219.622,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.016.500.000,00	10.016.500.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	700.000.000,00	700.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	790.000.000,00	790.000.000,00	
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0003 UPTD Pengelolaan Air Limbah			

Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
Indikator Hasil	: Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah			
Kegiatan	: 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara			
Sub Kegiatan	: 1.03.05.1.01.0018 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	9.660.000,00	9.660.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.066.713.000,00	13.845.412.150,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.010.000.000,00	3.910.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	540.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	35.000.000,00	
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.006.372,00	242.784.732,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.358.232,00	208.609.412,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi keuangan			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	49.809.216.070,20	41.161.692.915,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.800.000,00	271.800.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.172.600,00	22.172.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.485.000,00	57.485.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.820.120,00	50.820.120,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.734.000,00	66.734.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.816.000,00	15.816.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.250.000,00	52.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.880.000,00	863.563.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.638.800,00	82.638.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.960.000,00	12.960.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	449.282.500,00	449.282.500,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.190.600,00	7.190.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.600.000,00	436.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.770.000,00	49.770.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.895.440,00	548.895.440,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.568.132.460,00	1.527.199.476,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.696.230,00	143.863.115,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	756.208.704,00	479.487.719,00	
Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang tertangani			
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0009 Pembangunan Tanggul Sungai			
Indikator Keluaran	: Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0082 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
Indikator Keluaran	: Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.593.500,00	216.563.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0096 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
Indikator Keluaran	: Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	23.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.270.000.000,00	11.270.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.833.300,00	295.353.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0120 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.004.200,00	9.224.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.992.000,00	199.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.429.800,00	19.389.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	651.348.420,00	551.348.420,00	
Kegiatan	: 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya			
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.707.430,00	115.642.315,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.917.923.400,00	9.411.442.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.827.973.634,00	3.354.753.009,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.113.317.870,00	773.083.935,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	599.450.000,00	699.450.000,00	
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Indikator Hasil	: Persentase cakupan layanan Air Minum Layak			
Kegiatan	: 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kapasitas layanan SPAM			
Sub Kegiatan	: 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.868.839.454,00	1.517.285.649,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.009.100,00	27.773.100,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.515.550.155,00	29.515.550.155,00	
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
Indikator Hasil	: Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak			
Kegiatan	: 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat			
Sub Kegiatan	: 1.03.05.1.01.0013 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat			
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.090.000,00	17.010.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.150.000.552,00	3.150.000.552,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.946.400,00	58.946.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	200.000.000,00	
Program	: 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
Indikator Hasil	: Persentase cakupan pelayanan air minum layak			
Kegiatan	: 1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional			

Sub Kegiatan	: 1.03.07.1.01.0031 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.074.300,00	12.994.300,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	
Program	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
Indikator Hasil	: Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.035.800,00	124.935.800,00	
5.1.05	Belanja Hibah	112.025.750.000,00	193.369.045.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	750.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.018.670.000,00	9.678.670.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.468.500,00	2.676.786.500,00	
5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	1.500.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	2.300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.1.01.0010 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
Indikator Hasil	: Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap			
Kegiatan	: 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap			
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.646.000,00	79.206.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	28.800.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.711.201.205,00	23.747.843.413,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direkonstruksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.369.753.120,00	58.369.753.120,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.950.874.776,00	23.848.378.226,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.416.193.732,00	106.166.330.112,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0040 Pelebaran Jalan Menuju Standar			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.505.182,00	332.163.837,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.784.229.425,00	15.767.471.425,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.632.830.000,00	2.691.772.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	99.900.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	5.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.169.000.000,00	6.112.530.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.839.949.608,00	1.655.604.788,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0044 Pengelolaan Leger Jalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	907.982.222,00	770.597.107,00	
Kegiatan	: 1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Infomasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan rapat pembahasan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.619.540,00	131.915.802,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0008 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.276.150,00	259.557.625,00	
Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
Indikator Hasil	: Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang			
Kegiatan	: 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.01.0005 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah publikasi informasi penataan ruang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.705.400,00	36.792.100,00	
Kegiatan	: 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Raperda RTRW/RRTR Kabupaten/Kota yang dievaluasi			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.02.0006 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.581.870,00	231.192.935,00	

Kegiatan	: 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.03.0004 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.466.750,00	114.918.425,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.510.600,00	39.332.600,00	
Kegiatan	: 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.04.0007 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan			
Indikator Keluaran	: Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.250.300,00	140.220.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.04.0014 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK			
Indikator Keluaran	: Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.261.632,00	385.439.812,00	
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi			
Kegiatan	: 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.1.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.149.750,00	88.481.225,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.1.01.0008 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.033.700,00	111.749.700,00	
Kegiatan	: 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah rumah layak huni kewenangan provinsi yang dibangun			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.1.03.0006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	421.690.350,00	340.301.825,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	40.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	360.527.580,00	385.527.580,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	735.000.000,00	300.000.000,00	
Program	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
Indikator Hasil	: Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh			
Kegiatan	: 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
Indikator Keluaran	: Tertanganinya luas kawasan kumuh kewenangan provinsi			
Sub Kegiatan	: 1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.579.678.300,00	5.552.140.100,00	

Sub Kegiatan	: 1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
Indikator Keluaran	: Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.026.320.000,00	991.436.000,00	
Program	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
Indikator Hasil	: Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU			
Kegiatan	: 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			
Indikator Keluaran	: Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman			
Sub Kegiatan	: 1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.718.400,00	358.918.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.301.363.350,00	1.173.894.825,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.995.000,00	71.073.000,00	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja			
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	24.932.928.311,00	22.947.873.585,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.400.000,00	56.400.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.706.800,00	40.706.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.802.800,00	52.802.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	498.633.800,00	491.487.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.033.390,00	106.033.390,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.301.900,00	12.301.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.505.000,00	160.391.000,00	

Kegiatan	: 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.985.300,00	103.985.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.998.700,00	2.998.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	165.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.720.000,00	48.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	923.397.642,00	679.232.067,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.841.523.590,00	2.839.245.885,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	199.000.000,00	

Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti			
Kegiatan	: 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0006 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.554.610,00	42.720.905,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.900,00	29.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.450.348.273,00	20.450.348.273,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.849.300,00	81.949.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.993.200,00	19.993.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.555.110,00	87.277.405,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.955.245.872,00	3.648.199.507,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.687.312,00	236.615.902,00	
Kegiatan	: 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			
Indikator Keluaran	: Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.900,00	12.181.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.742.662.038,00	1.233.056.463,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.984.820,00	304.669.410,00	
Kegiatan	: 1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	72.000.000,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPBD)			
Kegiatan	: 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.051.000,00	34.621.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.041.000,00	54.301.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	15.605.845.478,00	14.437.060.948,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.100.000,00	53.700.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur dengan kelengkapan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.104.200,00	73.504.200,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.982.800,00	9.982.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.047.800,00	116.047.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.229.424,00	86.229.424,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.258.600,00	20.258.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.742.000,00	181.071.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah yang terpelihara			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.687.400,00	20.687.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	848.681.700,00	847.979.300,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.000.000,00	258.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.186.386.448,00	1.037.609.398,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah yang terpelihara			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.287.969.800,00	2.287.969.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.380.000,00	22.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.272.000.000,00	2.313.504.724,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.810.000,00	82.210.000,00	
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
Indikator Hasil	: Persentase penanganan darurat bencana Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana			
Kegiatan	: 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.668.000,00	109.275.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			

Indikator Keluaran	: Persentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.354.500,00	380.586.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0023 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.690.300,00	8.175.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0024 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.643.000,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0025 Penyusunan Rencana Kontinjensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.436.900,00	21.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0027 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.594.200,00	283.594.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0028 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana			

Indikator Keluaran	: Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.960.000,00	40.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.191.400,00	299.191.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0030 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.898.900,00	322.469.200,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.03.0028 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	752.027.200,00	752.027.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.03.0030 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.156.000,00	248.042.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.076.400,00	154.667.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0010 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.980.000,00	28.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0013 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.802.000,00	103.478.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang dilegalkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.317.500,00	208.097.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.490.000,00	13.590.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.818.100,00	89.756.100,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0001 UPTD Pengendalian Bencana Daerah			
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPBD)			
Kegiatan	: 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.846.800,00	16.846.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.992.300,00	25.992.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah yang terpelihara			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.829.200,00	24.829.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.623.900.800,00	1.623.867.900,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	240.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.124.078.904,00	799.108.674,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah yang terpelihara			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.800.000,00	140.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	110.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.657.600,00	312.657.600,00	
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
Indikator Hasil	: Persentase penanganan darurat bencana Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana			
Kegiatan	: 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
Indikator Keluaran	: Persentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0029 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
Indikator Keluaran	: Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalikan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	953.192.000,00	751.322.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0030 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.209.900,00	209.259.900,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0022 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	677.060.000,00	602.680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.772.940.069,00	2.772.940.069,00	
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			

Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase layanan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.907.600,00	5.717.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.952.200,00	4.952.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.004.800,00	24.234.800,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	20.603.009.121,00	18.896.105.419,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.900.000,00	63.850.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia			

Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.508.200,00	7.508.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.649.600,00	140.288.640,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.022.700,00	96.022.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.647.200,00	5.647.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	11.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.163.000,00	87.505.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.462.484,00	488.462.484,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.175.080.364,00	1.189.080.364,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	50.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	1.695.930.825,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.155.808.038,00	787.709.741,00	
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PMKS			
Kegiatan	: 1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase lembaga yang meningkat pemahamannya mengenai kebijakan pengelolaan sumber dana sosial			
Sub Kegiatan	: 1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.484.600,00	3.484.600,00	
Kegiatan	: 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah masyarakat dan lembaga yang memberikan pendampingan dan bantuan sosial			
Sub Kegiatan	: 1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.148.500,00	78.398.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	41.310.000,00	
Program	: 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
Indikator Hasil	: Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani			

Kegiatan	: 1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.06.03.1.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.175.000,00	0,00	
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya			
Kegiatan	: 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.624.600,00	57.784.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.024.300,00	120.325.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			

Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	43.916.600,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	150.000.000,00	111.600.000,00	
Kegiatan	: 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			
Indikator Keluaran	: Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.782.600,00	600.647.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.941.200,00	226.861.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.120.000,00	12.960.000,00	
Kegiatan	: 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			
Indikator Keluaran	: Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.812.500,00	151.012.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.500.800,00	14.352.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.970.600,00	30.570.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.890.100,00	260.890.100,00	
Kegiatan	: 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			
Indikator Keluaran	: Jumlah gelandangan dan pengemis dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.400,00	19.999.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.120.000,00	158.840.000,00	
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			

Indikator Hasil	: Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan			
Kegiatan	: 1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengangkatan anak yang diproses sesuai prosedur			
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.136.600,00	17.136.600,00	
Kegiatan	: 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin			
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.791.100,00	29.142.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	9.480.000,00	
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
Indikator Hasil	: Persentase korban bencana yang tertangani			
Kegiatan	: 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah korban bencana yang terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	3.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	3.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.931.800,00	335.331.800,00	
Program	: 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
Indikator Hasil	: Persentase Penanganan TMP sesuai standar			
Kegiatan	: 1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara			
Sub Kegiatan	: 1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.258.400,00	329.238.400,00	
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0001 UPTD Pelayanan Sosial			
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.813.400,00	9.813.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	169.028.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.941.800,00	159.941.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.415.000,00	3.015.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.100.000,00	216.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.221.344,00	337.221.344,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.322.984,00	263.322.984,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.454.397.000,00	3.284.397.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.136.217.130,00	690.208.013,00	
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya			
Kegiatan	: 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			
Indikator Keluaran	: Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.401.500,00	91.401.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.478.250.000,00	1.478.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.750.000,00	89.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.680.300,00	21.680.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.759.400,00	125.759.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	9.120.000,00	
Kegiatan	: 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			
Indikator Keluaran	: Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	996.450.000,00	996.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.987.000,00	164.987.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.920.000,00	6.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
Unit Organisasi	: 2.07.3.29.0.00.01.0001 UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata			
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)			
Kegiatan	: 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.252.600,00	3.252.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.117.700,00	6.117.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.899.394,00	12.899.394,00	

Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	986.500,00	986.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.298.000,00	6.280.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.000.000,00	45.734.260,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.728.560,00	233.489.192,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.770.000,00	62.770.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.131.673,00	35.131.673,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.550.034,00	192.161.509,00	
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			
Kegiatan	: 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			

Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.350.000,00	260.122.500,00	
Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
Unit Organisasi	: 2.07.3.29.0.00.01.0002 UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja			
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja)			
Kegiatan	: 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.980.300,00	4.980.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.896.400,00	7.896.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.944.274,00	14.944.274,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.884.000,00	2.884.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	957.700,00	957.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.839.896,00	119.220.212,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.559.904,00	129.566.492,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.692.636,00	236.137.226,00	
Program	: 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3			
Kegiatan	: 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku			
Sub Kegiatan	: 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.850.050,00	406.250.050,00	
Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
Unit Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)			
Kegiatan	: 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselesaikan Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	30.837.309.502,00	31.865.452.568,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.680.000,00	64.500.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.992.900,00	14.992.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.179.800,00	41.179.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.133.994,00	65.133.994,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.124.600,00	15.124.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.614.000,00	8.614.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	10.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.104.000,00	85.758.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.064.000,00	106.276.700,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.873.100,00	2.873.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.000.000,00	394.053.040,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	626.571.323,00	741.404.467,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	741.917.508,00	755.917.508,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.265.968,00	213.265.968,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	933.971.742,00	540.229.117,00	
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi			
Kegiatan	: 2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.997.600,00	30.997.600,00	
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: Persentase Penyerapan Tenaga Kerja			
Kegiatan	: 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitas bekerja/ berwirausaha			
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.663.300,00	65.223.300,00	
Kegiatan	: 2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya			
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			
Indikator Keluaran	: Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.313.800,00	33.913.800,00	
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
Indikator Hasil	: Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan			
Kegiatan	: 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Perkara Perselisihan yang terselesaikan			
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.566.000,00	5.566.000,00	
Kegiatan	: 2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan Jumlah rohaniwan yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan			
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penetapan UMP			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.775.000,00	25.775.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.03.0003 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah penetapan UMK			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.03.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.927.573.000,00	1.711.034.850,00	
Program	: 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos			
Kegiatan	: 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja			
Sub Kegiatan	: 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.300.000,00	20.300.000,00	
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG			
Kegiatan	: 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)			
Sub Kegiatan	: 2.08.02.1.01.0008 Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi			

Indikator Keluaran	: Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.634.200,00	37.085.800,00	
Kegiatan	: 2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga yang mendapatkan sosialisasi, advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuanBidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			
Sub Kegiatan	: 2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengelola organisasi masyarakat/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.333.500,00	132.283.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
Indikator Hasil	: Rasio Perempuan korban kekerasan			
Kegiatan	: 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan			
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.546.100,00	27.906.100,00	
Kegiatan	: 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen advokasi, pendampingan, dan penguatan jejaring antar lembaga			
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.03.0004 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	0,00	
Program	: 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Keluarga			
Kegiatan	: 2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga yang mendapat advokasi dan pendampingan			
Sub Kegiatan	: 2.08.04.1.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.878.600,00	9.958.600,00	
Program	: 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
Indikator Hasil	: Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah			
Kegiatan	: 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Data Gender dan Anak yang valid dan dimanfaatkan			
Sub Kegiatan	: 2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.996.400,00	2.732.700,00	
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
Indikator Hasil	: Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)			
Kegiatan	: 2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA			
Sub Kegiatan	: 2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.325.700,00	36.674.800,00	

Kegiatan	: 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi, KIE, dan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak			
Sub Kegiatan	: 2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.611.600,00	648.691.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.145.600,00	95.200.000,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
Indikator Hasil	: Rasio anak korban kekerasan			
Kegiatan	: 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga			
Sub Kegiatan	: 2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.743.600,00	13.743.600,00	
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0002 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak			
Program	: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD PPA)			
Kegiatan	: 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.528.800,00	1.528.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.266.900,00	26.266.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.340.000,00	19.932.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.131.492,00	129.131.492,00	

Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.345.692,00	83.510.884,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.381.702,00	230.933.197,00	
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
Indikator Hasil	: Rasio Perempuan korban kekerasan			
Kegiatan	: 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan			
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.407.200,00	127.407.200,00	
Kegiatan	: 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah tahun layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	3.360.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.556.000,00	246.556.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.115.256.000,00	4.115.256.000,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
Indikator Hasil	: Rasio anak korban kekerasan			
Kegiatan	: 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga			
Sub Kegiatan	: 2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.499.000,00	2.099.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.018.000,00	69.018.000,00	
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase Informasi Harga Pangan Yang Terpublikasi			
Kegiatan	: 2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang menerapkan SOP mutu pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian			
Sub Kegiatan	: 2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			

Indikator Keluaran	: Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	493.326.192,00	1.417.709.142,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	200.000.000,00	
Program	: 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
Indikator Hasil	: Angka Kecukupan Energi (AKE)			
Kegiatan	: 2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen ketersediaan pangan			
Sub Kegiatan	: 2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.245.830,00	73.772.715,00	
Kegiatan	: 2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina			
Sub Kegiatan	: 2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.569.780,00	1.050.663.327,00	
Program	: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi			
Kegiatan	: 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diuji			
Sub Kegiatan	: 2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.368.130,00	84.535.015,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0009 UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan			
Program	: 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.927.800,00	3.927.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.930.900,00	14.930.900,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.648.960,00	16.771.460,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	32.500.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.230.000,00	127.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.721.230,00	124.254.476,00	
Kegiatan	: 2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.908.820,00	185.930.984,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.110.820,00	85.132.984,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.060.000,00	42.060.000,00	
Program	: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase Produk Bersertifikat Organik Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi			
Kegiatan	: 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk yang Bersertifikat Organik			
Sub Kegiatan	: 2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan			

Indikator Keluaran	: Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.812.760,00	246.234.104,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.177.112,00	112.621.702,00	
Bidang Urusan	: 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Program	: 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
Indikator Hasil	: Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan			
Kegiatan	: 2.10.05.1.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan			
Sub Kegiatan	: 2.10.05.1.01.0003 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.876.000,00	5.882.758.000,00	
Program	: 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
Indikator Hasil	: Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi			
Kegiatan	: 2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen redistribusi tanah yang terinventarisasi			
Sub Kegiatan	: 2.10.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.847.700,00	23.521.700,00	
Program	: 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
Indikator Hasil	: Persentase data informasi pertanahan yang handal			
Kegiatan	: 2.10.10.1.01 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.10.10.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.004.000,00	207.200.000,00	
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Program	: 2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik			
Kegiatan	: 2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.999.800,00	101.639.800,00	
Kegiatan	: 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.11.02.1.02.0006 Pemantauan dan Evaluasi KLHS			
Indikator Keluaran	: Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.110.820,00	52.227.410,00	
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			

Indikator Hasil	: Persentase Penurunan Emisi GRK Indeks kualitas air Indeks kualitas air laut Indeks kualitas udara			
Kegiatan	: 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.493.600,00	70.333.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.960.000,00	25.080.000,00	
Program	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
Indikator Hasil	: Persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)			
Kegiatan	: 2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.11.04.1.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			
Indikator Keluaran	: Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.261.000,00	40.041.000,00	
Program	: 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
Indikator Hasil	: Persentase perusahaan yang difasilitasi pemenuhan ijin pengumpulan limbah B3			
Kegiatan	: 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.11.05.1.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.056.300,00	37.816.300,00	
Program	: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
Indikator Hasil	: Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan			
Kegiatan	: 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH			
Sub Kegiatan	: 2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.700,00	10.399.700,00	
Program	: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga			
Kegiatan	: 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa Adat/Desa/Kelurahan yang dibina dan dimonitoring dalam pengelolaan sampah berbasis sumber dan dalam tata laksana pengelolaan limbah B3			
Sub Kegiatan	: 2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.117.590.230,00	1.131.077.115,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Program	: 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			
Kegiatan	: 2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan penilaian masyarakat/lembaga/pendidikan dalam PPLH			
Sub Kegiatan	: 2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			

Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.999.700,00	34.399.700,00	
Program	: 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan			
Kegiatan	: 2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang teregistrasi			
Sub Kegiatan	: 2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.994.300,00	10.394.300,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0006 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup			
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)			
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Laboratorium LH			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.866.500,00	4.866.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	935.500,00	935.500,00	

Kegiatan	: 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.299.040,00	27.046.545,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.615.500,00	48.441.643,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.970.820,00	65.415.410,00	
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan			
Kegiatan	: 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Kompetensi Laboratorium Menuju Akreditasi			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.757.125,00	284.186.892,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0007 UPTD Pengelolaan Sampah			
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Pengelolaan Sampah)			
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Pengelolaan Sampah			

Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.229.000,00	5.229.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.701.300,00	11.701.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.917.000,00	3.917.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.930.974,00	225.753.662,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.270.000,00	118.270.000,00	
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional			
Kegiatan	: 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			
Indikator Keluaran	: Persentase Penanganan Sampah di TPA Regional yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.143.408.590,00	14.592.257.520,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	1.517.156.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	206.460.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.725.000.000,00	7.500.778.000,00	
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Organisasi	: 2.13.2.12.2.14.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Unit Organisasi	: 2.13.2.12.2.14.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
Indikator Hasil	: Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target			
Kegiatan	: 2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk			
Sub Kegiatan	: 2.12.02.1.01.0004 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.619.030,00	204.017.715,00	
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
Indikator Hasil	: Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target			
Kegiatan	: 2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil			
Sub Kegiatan	: 2.12.03.1.01.0004 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.063.720,00	122.686.310,00	
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.455.000,00	15.715.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.205.012,00	157.209.602,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi keuangan			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	12.755.423.571,00	11.544.283.540,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	34.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.066.130,00	104.433.015,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.992.400,00	5.992.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.523.100,00	25.523.100,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	56.263.600,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.738.750,00	75.738.750,00	

Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.048.100,00	6.048.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.626.600,00	4.626.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	3.510.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.624.000,00	122.264.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah yang terselesaikan			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.439.600,00	6.439.600,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.800.000,00	174.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.870.594,00	434.482.069,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah yang terselesaikan			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.098.383.428,00	1.151.383.428,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.810.000,00	108.810.000,00	
Program	: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
Indikator Hasil	: Jumlah desa yang mengalami peningkatan PADesa			
Kegiatan	: 2.13.03.1.01 Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan			
Sub Kegiatan	: 2.13.03.1.01.0001 Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.878.612,00	91.323.202,00	
Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase desa cepat berkembang			
Kegiatan	: 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa			
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.162.830,00	95.504.715,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0008 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.492.840,00	328.910.020,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0016 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.595.700,00	16.280.700,00	
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
Indikator Hasil	: Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif			
Kegiatan	: 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif			
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.746.520,00	1.968.805.710,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.354.940,00	99.284.120,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	585.557.120,00	265.604.710,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.244.528.080,00	3.709.090.227,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.180.000.000,00	4.796.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
Program	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
Indikator Hasil	: Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan keluarga berencana			
Kegiatan	: 2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
Indikator Keluaran	: Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.1.01.0010 Fasilitas Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana			

Indikator Keluaran	: Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.955.000,00	199.955.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.1.01.0013 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.838.860,00	274.756.630,00	
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan			
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.236.000,00	12.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.643.000,00	25.967.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	24.527.125.316,00	25.755.672.215,40	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.100.000,00	46.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.514.000,00	42.964.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.993.800,00	6.993.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.258.300,00	388.743.994,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	614.776.540,00	350.727.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	75.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.253.700,00	9.253.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	938.788.000,00	461.086.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	1.922.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.273.400,00	72.849.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.710.000,00	4.710.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.000.000,00	295.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.775.436,00	342.775.436,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	904.767.984,00	918.767.984,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.770.000,00	73.770.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.130.374.168,00	921.086.298,00	
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Indikator Hasil	: Rasio konektivitas layanan angkutan darat			
Kegiatan	: 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.703.542,00	216.395.017,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.844.000,00	22.500.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.972.000,00	66.726.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.06.0004 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.880.000,00	7.200.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.10 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.10.0003 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.664.400,00	70.876.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.13.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.437.370,00	363.091.435,00	
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
Indikator Hasil	: Persentase Aksesibilitas Pelayaran			
Kegiatan	: 2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			
Indikator Keluaran	: Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Sangsit			
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.08.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	644.638.650,00	527.945.725,00	
Program	: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			
Indikator Hasil	: Persentase lintasan kereta api yang terbangun			
Kegiatan	: 2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pra Studi Kelayakan Angkutan Umum Massal Berbasis Kereta Api Lintasan Canggü-Mengwi			
Sub Kegiatan	: 2.15.05.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.933.460,00	501.276.230,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pusat Pengendalian LLAJ			
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.244.400,00	4.244.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.924.500,00	9.924.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.228.800,00	61.063.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.164.000,00	114.346.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.193.200,00	1.193.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.660.000,00	57.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.765.792,00	42.765.792,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.299.600,00	167.299.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.480.000,00	18.480.000,00	
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Indikator Hasil	: Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional			
Kegiatan	: 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596.800.000,00	596.800.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.0001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.299.151.218,00	892.208.593,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	200.000.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita			
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan yang tersedia Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia Jumlah Komponen instalasi Listrik yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas yang tersedia			

Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.400,00	915.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.440.440,00	27.440.440,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.149.520,00	121.149.520,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.324.588,00	20.324.588,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.876.000,00	9.876.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.491.000,00	31.633.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah gedung kantor yang tersedia Jumlah mebel yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.685.000,00	23.685.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia Jumlah jasa pelayanan umum kantor (jasa kebersihan) yang tersedia Jumlah jasa surat menyurat berupa materai yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.000,00	471.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.300.000,00	33.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.910.892,00	40.910.892,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pemeliharaan AC, Laptop, PC dan printer yang tersedia Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas, tenaga administrasi, tenaga supir, pajak kendaraan yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.638.132,00	248.677.312,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.140.000,00	18.140.000,00	
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Indikator Hasil	: Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita			
Kegiatan	: 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.938.004.159,00	65.065.269.141,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD Perlengkapan Jalan			
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.276.800,00	5.276.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.066.400,00	16.966.400,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.650.800,00	60.454.080,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.654.492,00	150.654.492,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.160.000,00	9.050.000,00	
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Indikator Hasil	: Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah perlengkapan jalan di jalan provinsi yang tersedia Jumlah perlengkapan jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.008.551.820,00	1.926.738.410,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	495.443.200,00	659.443.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	944.221.240,00	840.412.420,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan			
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang tersedia Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Yang Tersedia Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.401.700,00	6.401.700,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.919.356,00	50.735.960,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.320.000,00	2.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.493.444,00	210.479.214,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Tersedia Jumlah Sarana Prasarana Pendukung yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.130.800,00	0,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.700,00	486.700,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara Jumlah Sarana Prasarana Pendukung yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.984.000,00	120.984.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM			
Kegiatan	: 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.09.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.540.200,00	56.582.200,00	
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DISKOMINFOS)			
Kegiatan	: 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.685.700,00	18.173.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.290.300,00	13.890.300,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	25.339.726.517,00	24.161.727.824,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.600.000,00	93.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.051.700,00	119.071.700,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.396.250.000,00	2.891.250.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.443.000,00	15.443.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.914.800,00	42.914.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000,00	87.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.670.400,00	13.670.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.522.600,00	31.522.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.630.000,00	12.630.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	683.978.000,00	289.346.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.761.000,00	199.037.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	580.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	697.980.340,00	688.390.980,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.998.700,00	2.998.700,00	

Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.000.000,00	418.943.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.151.128.888,00	2.153.928.888,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.490.000,00	99.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.164.773.120,00	781.886.036,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.180.000,00	86.180.000,00	
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase informasi yang disebarluaskan			
Kegiatan	: 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi			
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten			
Indikator Keluaran	: Jumlah Konten Informasi Publik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.256.984.130,00	882.999.015,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.658.650,00	124.658.650,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi			
Indikator Keluaran	: Persentase khalayak yang terpapar informasi publik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.255.049.782,00	626.898.437,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	228.951.500,00	228.951.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.687.524.460,00	1.618.158.099,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.117.170,00	195.669.235,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.357.171.032,00	1.223.294.212,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.520.420,00	271.679.010,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.936.233.828,00	2.902.153.548,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.862.200,00	46.862.200,00	
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
Indikator Hasil	: Persentase Layanan Teknologi Informatika			
Kegiatan	: 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi			

Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0025 Koordinasi penyusunan proses bisnis			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.935.189.600,00	2.588.539.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0029 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.338.598.202,00	3.533.566.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	25.403.325.760,00	30.298.325.760,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.556.674.240,00	17.556.674.240,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	251.748.512.120,00	105.100.452.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0030 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.911.602.192,00	16.423.350.100,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.555.000.000,00	1.855.460.000,00	
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0001 UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital			
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0014 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.963.388.200,00	3.769.568.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	329.830.050,00	329.830.050,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0016 Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.285.496.900,00	3.080.031.900,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	334.390.340,00	334.390.340,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	230.000.000,00	0,00	
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0002 UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali			
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0018 Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Provinsi Cerdas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.514.213.894,00	10.003.000.592,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0019 Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.110.693.000,00	2.585.446.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.117.540.150,00	3.288.632.558,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.400.000.000,00	1.000.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	250.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)			
Kegiatan	: 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.177.312,00	102.343.902,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.184.900,00	8.264.900,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	16.368.269.734,00	13.114.769.179,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00	50.400.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.997.800,00	10.997.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.405.800,00	48.405.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.071.194,00	76.071.194,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	21.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.753.000,00	49.573.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	700.452.200,00	683.055.300,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.993.900,00	1.993.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.000.000,00	246.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	895.259.256,00	700.216.668,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	797.265.444,00	788.476.657,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.920.000,00	49.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.938.368,00	197.538.368,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	272.000.000,00	272.000.000,00	
Program	: 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
Indikator Hasil	: Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP			
Kegiatan	: 2.17.02.1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan			
Sub Kegiatan	: 2.17.02.1.01.0002 Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.686.994,00	770.890.289,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	90.000.000,00	9.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.02.1.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan			

Sub Kegiatan	: 2.17.02.1.02.0003 Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.600,00	9.919.600,00	
Program	: 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
Indikator Hasil	: Persentase koperasi berkualitas			
Kegiatan	: 2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi			
Sub Kegiatan	: 2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.934.000,00	26.908.000,00	
Kegiatan	: 2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi			
Sub Kegiatan	: 2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.498.810,00	50.489.105,00	
Program	: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
Indikator Hasil	: Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta			
Kegiatan	: 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.110.620,00	61.553.210,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.600,00	26.149.600,00	
Program	: 2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
Indikator Hasil	: Persentase pertumbuhan wirausaha			
Kegiatan	: 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			
Sub Kegiatan	: 2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.176.002,00	338.343.821,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.400.000,00	65.840.000,00	
Program	: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			
Sub Kegiatan	: 2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.843.804,00	174.608.394,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.08.1.01.0005 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan			
Indikator Keluaran	: Wirausaha yang Difasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.700,00	97.119.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.08.1.01.0006 Fasilitas Inkubator Usaha Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	46.160.000,00	
Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah			
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)			
Kegiatan	: 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	699.600,00	699.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.146.100,00	13.146.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.904.050,00	56.904.050,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.700,00	999.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	990.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	1.920.000,00	

Kegiatan	: 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	989.100,00	989.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.500.000,00	48.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.265.968,00	160.265.968,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.191.492,00	101.191.492,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.070.000,00	2.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.132.984,00	90.132.984,00	
Program	: 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
Indikator Hasil	: Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi			
Kegiatan	: 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			
Sub Kegiatan	: 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.615.568.416,00	4.399.123.302,00	
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	15.130.595.620,00	13.871.356.811,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.073.400,00	5.073.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.134.300,00	73.134.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.516.200,00	24.133.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.386.000,00	550.606.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.846.500,00	3.846.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.000.000,00	152.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.319.974.430,00	1.105.108.724,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.336.436.050,00	926.700.460,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.307.900,00	252.887.900,00	
Program	: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)			
Kegiatan	: 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kajian Peta Potensi dan Peluang Investasi Berbasis Jenis Usaha			

Sub Kegiatan	: 2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.186.230,00	140.433.115,00	
Program	: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Investor Yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali			
Kegiatan	: 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi Promosi Penanaman Modal			
Sub Kegiatan	: 2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.553.520,00	103.638.110,00	
Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku			
Kegiatan	: 2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang Terbit sesuai Kewenangan Provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.18.04.1.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	667.234.100,00	358.765.837,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.1.01.0008 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.501.640,00	76.310.820,00	
Program	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Nilai Investasi			

Kegiatan	: 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pemenuhan Komitmen Penanaman Modal			
Sub Kegiatan	: 2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.560.000,00	17.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.146.230,00	100.101.902,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.900.000,00	38.900.000,00	
Program	: 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Persentase Data Informasi Penanaman Modal yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan			
Kegiatan	: 2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.790.820,00	38.395.410,00	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			

Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan			
Kegiatan	: 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah pemuda yang berprestasi			
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.731.599.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0010 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda			
Indikator Keluaran	: Jumlah yang menerima penghargaan pemuda			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	648.324.000,00	36.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.900,00	148.051.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.900.000,00	192.831.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi			

Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	788.299.500,00	778.887.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.475.000,00	98.707.500,00	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi			
Kegiatan	: 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.818.328.500,00	14.305.184.700,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.268.000,00	5.268.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.190.429.632,00	7.120.620.900,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.106.500,00	62.106.500,00	
Kegiatan	: 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional, regional dan internasional			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.03.0008 Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi			

Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.400.000,00	316.840.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000.000,00	60.760.000.000,00	
Program	: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan			
Kegiatan	: 2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			
Indikator Keluaran	: Persentase anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka			
Sub Kegiatan	: 2.19.04.1.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
Indikator Hasil	: Indeks Pembangunan Statistik			
Kegiatan	: 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi			
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			
Indikator Keluaran	: Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.351.510,00	92.437.805,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0008 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral			
Indikator Keluaran	: Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.417.110,00	98.217.405,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0011 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.703.020,00	91.192.610,00	
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
Indikator Hasil	: Indeks Evalaksan			
Kegiatan	: 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan			
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.024.900,00	34.024.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.677.410,00	121.620.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	29.602.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.312.800,00	10.312.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.312.000,00	64.495.000,00	
Kegiatan	: 2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun			
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.385.210,00	64.102.505,00	
Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan			
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.022.340,00	90.191.520,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.374.500,00	4.174.500,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi Keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	59.283.471.111,00	42.363.697.777,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	58.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.678.506,00	492.508.571,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.085.500,00	27.085.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	331.754.660,00	1.562.007.227,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	105.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.915.200,00	22.915.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.750.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.488.000,00	46.240.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.495.000,00	5.495.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000.000,00	720.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.950.000,00	24.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.104.242.068,00	926.732.698,00	

Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	834.287.460,00	885.787.460,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.950.000,00	14.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	743.912.888,00	1.621.790.788,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	118.000.000,00	
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Tradisi dan Warisan Budaya yang terfasilitasi dan berkembang secara berkelanjutan			
Kegiatan	: 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Terkelolanya Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.509.552,00	1.267.700.522,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.865.155.064,00	13.355.731.504,00	
Kegiatan	: 2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.948.586.970,00	15.400.739.935,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.349.881.206,00	1.341.511.591,00	
Kegiatan	: 2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.210.100,00	232.753.050,00	
5.1.05	Belanja Hibah	9.685.000.000,00	25.235.000.000,00	
Program	: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
Indikator Hasil	: Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan			
Kegiatan	: 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.986.700,00	1.129.837.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.312.370,00	331.594.665,00	
Program	: 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi			
Kegiatan	: 2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.453.000,00	144.883.000,00	
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
Indikator Hasil	: Persentase Cagar Budaya dan Permuseuman yang teregistrasi, terkelola, dan difungsikan			
Kegiatan	: 2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.753.230,00	167.324.115,00	
Kegiatan	: 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya yang diinventarisasi			
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.761.876,00	274.241.876,00	
5.1.05	Belanja Hibah	10.000.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.388.700,00	52.108.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.107.300,00	114.107.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.610.900,00	90.610.900,00	
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0001 UPTD Taman Budaya			
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah pada UPTD Taman Budaya			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.997.000,00	69.997.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.998.700,00	49.998.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.340.000,00	8.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.994.000,00	24.994.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.470.000,00	42.470.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	199.777.950,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	985.600.000,00	985.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.930.000,00	14.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.147.368.058,00	772.980.843,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.480.000,00	28.480.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	3.491.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.066.728.792,00	2.128.428.792,00	
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Taman Budaya			
Kegiatan	: 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memadai			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.529.984.000,00	2.317.246.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.516.000,00	370.516.000,00	
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0002 UPTD Museum Bali			
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.517.500,00	61.517.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	105.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.472.000,00	8.301.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.402.000,00	5.402.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.713.000,00	5.175.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.698.300,00	5.698.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.388.000,00	423.609.900,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.386.400,00	2.386.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.000.000,00	256.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.264.840,00	19.264.840,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.002.640.136,00	762.752.266,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.600.000,00	101.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.080.000,00	32.080.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	125.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	722.444.080,00	727.560.080,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.665.521.933,00	9.227.715.373,00	
Program	: 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Museum Bali			
Kegiatan	: 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum Bali sebagai tempat informasi Budaya Bali			
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	909.890.300,00	879.170.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.609.445.400,00	1.551.494.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.705.800,00	104.705.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.043.500,00	64.043.500,00	
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0003 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali			
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.995.300,00	29.995.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.057.000,00	53.057.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.593.100,00	51.593.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.777.400,00	6.777.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	4.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.278.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	35.000.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.491.500,00	1.491.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.930.000,00	42.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	946.852.824,00	842.220.495,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.975.000,00	123.975.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.970.000,00	14.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.002.328.024,00	2.002.328.024,00	
Program	: 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali			
Kegiatan	: 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengelolaan Museum Provinsi yang memadai			
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	756.260.200,00	756.260.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.087.713.200,00	2.038.410.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.832.600,00	264.832.600,00	
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.05.0000 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat			
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.05.0000 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat			
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.904.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.892.400,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di proses			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	12.042.395.722,00	10.916.832.800,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.400.000,00	36.000.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang di Proses			

Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.934.200,00	10.934.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.145.200,00	36.145.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.243.700,00	19.243.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.430.000,00	276.192.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.609.840,00	9.609.840,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	257.994.240,00	255.448.843,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.179.734,00	562.166.834,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	566.441.852,00	566.441.852,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.617.147.396,00	1.571.631.166,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.700.000,00	128.700.000,00	
Program	: 2.22.09 PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI			
Indikator Hasil	: Indeks Membangun Desa Adat			
Kegiatan	: 2.22.09.8.01 Pembinaan Kelembagaan Desa Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Desa Adat yang dibina			
Sub Kegiatan	: 2.22.09.8.01.0001 Pembinaan Pemerintahan Desa Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.670.107.876,00	1.071.628.706,00	
5.1.05	Belanja Hibah	464.000.000.000,00	470.670.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.09.8.01.0002 Fasilitas Produk Hukum Desa Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Desa Adat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.177.312,00	187.054.302,00	
Kegiatan	: 2.22.09.8.02 Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses			
Sub Kegiatan	: 2.22.09.8.02.0001 Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	65.165.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.09.8.02.0002 Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.865.706,00	463.272.491,00	
Kegiatan	: 2.22.09.8.03 Penyelenggaraan Desa Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan			
Sub Kegiatan	: 2.22.09.8.03.0003 Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.347.930,00	303.412.115,00	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			

Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0005 Biro Organisasi			
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik			
Kegiatan	: 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik			
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.066.492,00	32.877.705,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.066.392,00	32.277.605,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0016 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan informasi Perpustakaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.132.984,00	65.458.710,00	
Kegiatan	: 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca			
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.066.492,00	41.177.005,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.132.984,00	76.875.410,00	
Program	: 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
Indikator Hasil	: Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun			
Kegiatan	: 2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun			
Sub Kegiatan	: 2.23.03.1.01.0001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.132.984,00	75.304.197,00	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0003 Biro Umum dan Protokol			
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
Indikator Hasil	: - Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang tertib arsip - Nilai Evaluasi Kearsipan			
Kegiatan	: 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Penataan Arsip			
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.01.0006 Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Arsip Dinamis			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.965.866,00	318.729.951,00	
Kegiatan	: 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi			
Indikator Keluaran	: Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik			
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.757.500,00	49.957.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.879.760,00	207.433.030,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan			
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan			
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)			
Kegiatan	: 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.748.000,00	36.018.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	25.341.415.889,00	25.619.548.375,20	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.200.000,00	82.800.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.459.500,00	7.459.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	728.957.900,00	728.957.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.642.400,00	189.642.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.923.500,00	18.923.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.820.000,00	93.950.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	279.565.620,00	267.565.620,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.611.000,00	3.611.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.050.000,00	158.050.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	950.364.936,00	964.364.936,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	573.924.074,00	483.415.344,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.255.000.000,00	2.255.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.230.000,00	75.230.000,00	
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
Indikator Hasil	: Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil			
Kegiatan	: 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.495.000,00	17.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0013 Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	170.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan			
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.101.492,00	55.796.492,00	

Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap			
Kegiatan	: 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			
Indikator Keluaran	: Jumlah produksi perikanan tangkap			
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.850.902,00	66.024.197,00	
5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	350.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan			
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.09.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
Indikator Keluaran	: Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.723.000,00	16.861.500,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya			
Kegiatan	: 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.427.500,00	159.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.620.000,00	16.100.000,00	
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Indikator Hasil	: Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku			
Kegiatan	: 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil			
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.268.900,00	20.708.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			
Indikator Keluaran	: Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.240.984,00	130.082.984,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
Indikator Hasil	: Persentase produksi olahan hasil perikanan Tingkat Konsumsi Ikan			
Kegiatan	: 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina			
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			
Indikator Keluaran	: Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.958.502,00	329.160.797,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan			
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut			
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)			
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.664.000,00	4.664.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.117.200,00	7.117.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	32.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.996.000,00	1.996.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.554.200,00	38.554.200,00	

Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.000,00	471.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.599.200,00	128.599.200,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.497.984,00	166.497.984,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.346.476,00	265.346.476,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya			
Kegiatan	: 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat			
Indikator Keluaran	: Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas			
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	824.870.604,00	792.315.194,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan			
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan			
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)			
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.433.000,00	8.433.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	32.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.072.080,00	37.072.080,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.500,00	1.020.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.000.000,00	117.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.232.000,00	92.232.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.457.188,00	316.901.778,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.780.000,00	14.780.000,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan			
Kegiatan	: 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan			
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0003 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.241.000,00	46.041.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			
Indikator Keluaran	: Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitas, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.260.800,00	390.365.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.260.000,00	100.260.000,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan			
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali			
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)			
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.366.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.848.100,00	8.286.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	41.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.804.200,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: 0			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	596.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	16.500.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.510.000,00	133.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	784.146.692,00	633.953.052,00	
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
Indikator Hasil	: Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi persen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah			
Kegiatan	: 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan			
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			
Indikator Keluaran	: Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	44.960.000,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan			
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pelabuhan Perikanan			
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)			
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.835.900,00	26.835.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	32.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.750.000,00	16.750.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.445.200,00	20.445.200,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.800.000,00	127.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.401.330,00	23.123.625,00	
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap			
Kegiatan	: 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan			
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan			
Indikator Keluaran	: Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.699.000,00	23.854.000,00	
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
Organisasi	: 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata			
Unit Organisasi	: 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata			
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISPAR)			
Kegiatan	: 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.996.812,00	90.441.402,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	13.105.970.608,00	12.549.424.810,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	54.000.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.216.600,00	7.216.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.551.900,00	57.491.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	274.162.200,00	564.253.888,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.617.494,00	69.617.494,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.882.600,00	9.882.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.997.000,00	104.877.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.008.200,00	182.008.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.312.719.880,00	10.332.496.300,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.217.000,00	577.947.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.400.000,00	341.680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	160.000.000,00	
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
Indikator Hasil	: Persentase Destinasi Pariwisata yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
Kegiatan	: 3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Daya Tarik Wisata yang berdaya saing			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.935.516,00	274.174.696,00	
Kegiatan	: 3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Berbasis Komunitas Lokal			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.02.0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
Indikator Keluaran	: 1 Laporan			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.795.900,00	149.195.900,00	
Kegiatan	: 3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Pariwisata yang memperoleh standar			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.04.0009 Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.672.510,00	55.594.805,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.04.0013 Kesiadaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata			
Indikator Keluaran	: Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.116.230,00	144.883.115,00	
Program	: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan			
Kegiatan	: 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata			
Sub Kegiatan	: 3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.544.020,00	244.390.610,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.1.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.793.804,00	289.838.394,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.1.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.242.262.312,00	4.360.345.902,00	
Program	: 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
Indikator Hasil	: Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			
Kegiatan	: 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			
Sub Kegiatan	: 3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.881.384,00	97.601.384,00	
Kegiatan	: 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
Sub Kegiatan	: 3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.486.700,00	42.486.700,00	
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
Indikator Hasil	: Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan			
Kegiatan	: 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			
Indikator Keluaran	: Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan			
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0004 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.630.092,00	267.634.092,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.069.504,00	217.836.094,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.422.102,00	360.606.397,00	
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.849.162,00	296.633.227,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.514.152,00	188.487.922,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	59.017.237.822,00	51.553.930.982,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.100.000,00	114.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.899.180,00	245.687.540,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.263.000,00	19.263.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.274.500,00	53.274.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	167.607.800,00	159.156.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.003.400,00	67.003.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.125.000,00	19.125.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.840.000,00	67.008.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.000.000,00	417.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.109.662,00	341.687.236,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.845.842.822,00	1.952.286.888,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	742.110.364,00	593.655.609,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.800.000,00	210.800.000,00	
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian			
Kegiatan	: 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.591.720,00	5.077.996.310,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000,00	60.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			
Indikator Keluaran	: Peningkatan Mutu dan Baku Areal Komoditas Pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan			

Indikator Keluaran	: Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.928.862.604,00	3.877.951.568,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	48.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya angka kelahiran ternak unggulan daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.285.772,00	638.454.132,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.610.000.000,00	11.405.000.000,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian			
Kegiatan	: 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penataan Prasarana Pendukung Pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	977.248.752,00	543.948.422,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.560.140,00	930.261.800,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	80.000.000,00	
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			

Indikator Hasil	: Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis			
Kegiatan	: 3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah HPR Yang Mendapatkan Pelayanan Vaksinasi Jumlah Kontrol Populasi HPR			
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.791.667.602,00	8.882.272.553,00	
Kegiatan	: 3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengawasan Ante Mortem dan Post Mortem			
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.613.410,00	65.364.492,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Kelembagaan Petani Berbasis Kawasan dan Produk Unggulan			
Kegiatan	: 3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyuluh Pertanian Yang Terfasilitasi Dari Dana Insentif			
Sub Kegiatan	: 3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	57.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah BPP dan Kelompok Tani Yang Terbina			
Sub Kegiatan	: 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.073.630,00	71.280.515,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0009 UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan			
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
Indikator Hasil	: Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis			
Kegiatan	: 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha PAH dan PSAT yang diuji Jumlah Unit Usaha PAH dan PSAT yang diuji			
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit			
Indikator Keluaran	: Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.221.240,00	150.623.335,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.104.820,00	213.927.505,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0012 UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.900,00	599.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.056.000,00	5.056.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.520.000,00	220.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.320.332,00	204.364.660,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.277.312,00	245.299.476,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	561.897.642,00	408.887.215,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Terkendalnya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)			
Kegiatan	: 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			
Indikator Keluaran	: Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)			
Sub Kegiatan	: 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.615.100,00	342.943.450,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.402.740,00	285.383.657,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.05.1.01.0005 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.163.354,00	220.259.419,00	

Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0013 UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.095.200,00	6.095.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.126.500,00	11.126.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	32.500.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	66.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.970.816,00	289.015.144,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.971.640,00	265.015.968,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.943.280,00	282.454.362,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.870.000,00	4.870.000,00	
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Populasi Ternak			
Kegiatan	: 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.030.315.210,00	1.951.140.851,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0014 UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.197.300,00	3.197.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.269.200,00	7.269.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	32.500.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.109.000,00	135.109.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.074.020,00	85.096.184,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.155.410,00	133.666.492,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.950.000,00	19.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	11.850.000,00	
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan			
Kegiatan	: 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			
Indikator Keluaran	: Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sertifikat Benih			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.785.372,00	197.683.732,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.592.852,00	209.912.459,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0015 UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.996.900,00	1.996.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.998.100,00	5.998.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.912.191,00	117.912.191,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.999.312,00	121.021.476,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.570.410,00	92.081.492,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.566.492,00	42.566.492,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	2.920.000,00	
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura			
Kegiatan	: 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			
Indikator Keluaran	: Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0007 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang			
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	554.830.310,00	584.166.955,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0011 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji			
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	662.854.730,00	703.243.365,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0013 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.042.372,00	373.483.732,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0014 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi			
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.569.924,00	322.247.891,00	
Kegiatan	: 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usaha			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme			

Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.194.200,00	47.194.200,00	
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup)			
Kegiatan	: 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.694.200,00	37.694.200,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	39.982.439.046,00	38.018.717.214,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.480.000,00	95.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.679.800,00	102.479.800,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.097.000,00	17.097.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.975.000,00	47.975.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	314.442.312,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000,00	97.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	10.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	19.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.922.000,00	294.640.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.560.000,00	208.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	413.283.344,00	413.283.344,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.290.360,00	836.290.360,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.289.248,00	390.056.395,00	
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
Indikator Hasil	: Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan			
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.400.230,00	103.565.115,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan kelas kelompok			
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.500,00	16.520.500,00	
Program	: 3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Lahan Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan			
Kegiatan	: 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Sub Kegiatan	: 3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.554.810,00	161.666.105,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0001 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara			
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Utara)			
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Utara			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.205.900,00	3.205.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.025.900,00	10.025.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.650.000,00	34.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.920.000,00	13.920.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	31.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.753.592,00	43.753.592,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.705.410,00	133.427.705,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	657.084.954,00	437.963.707,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0002 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur			
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Timur			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.129.800,00	3.129.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.443.900,00	13.443.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	37.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.698.100,00	3.698.100,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.050.000,00	21.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.434.092,00	72.334.092,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.554.597,00	390.888.367,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.140.000,00	7.140.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	131.815.000,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0003 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan			
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Selatan			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.373.700,00	1.373.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.355.700,00	11.355.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.707.300,00	1.707.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000,00	10.560.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.397.312,00	77.841.902,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.154.492,00	223.154.492,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	9.990.000,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0004 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat			
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Barat			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.137.000,00	3.137.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.811.900,00	10.811.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	34.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.502.800,00	2.502.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.960.000,00	12.960.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.940.000,00	23.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.379.792,00	44.379.792,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.425.000,00	123.425.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.382.984,00	86.382.984,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0005 UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai			
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD Tahura Ngurah Rai			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.530.500,00	2.530.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.920.800,00	6.920.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.598.700,00	0,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.000.000,00	324.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.354.292,00	243.354.292,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.130.000,00	112.130.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	884.133.673,00	619.341.235,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.970.000,00	11.970.000,00	
Bidang Urusan	: 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
Unit Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
Program	: 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan			
Kegiatan	: 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan			
Sub Kegiatan	: 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	4.160.000,00	
Program	: 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
Indikator Hasil	: Persentase pengusaha sumber daya mineral yang sesuai ketentuan			
Kegiatan	: 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan			
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	10.100.000,00	
Program	: 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			
Indikator Hasil	: Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan			
Kegiatan	: 3.29.05.1.08 Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.08.0005 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.999.500,00	61.825.500,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Program	: 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)			
Kegiatan	: 3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.082.800,00	41.290.800,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.01	Belanja Pegawai	15.598.486.223,00	14.524.042.945,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	54.900.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.267.000,00	18.267.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.454.400,00	111.454.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	476.633.000,00	446.309.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.483.394,00	67.483.394,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.840.000,00	14.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.424.000,00	6.424.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.901.000,00	193.047.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.000.000,00	340.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.131.150,00	429.631.805,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.194.900,00	227.194.900,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	834.042.460,00	848.042.460,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.553.984,00	164.153.984,00	
Program	: 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
Kegiatan	: 3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal			
Sub Kegiatan	: 3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.955.644,00	198.569.414,00	
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
Indikator Hasil	: Jumlah Pasar ber SNI			
Kegiatan	: 3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pasar yang dibina Jumlah Toko Swalayan yang dibina			

Sub Kegiatan	: 3.30.03.1.01.0002 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.968.600,00	13.442.800,00	
Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING			
Indikator Hasil	: Persentase stabilitas harga barang Pokok			
Kegiatan	: 3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah			
Sub Kegiatan	: 3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.576.100,00	147.180.600,00	
Program	: 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
Indikator Hasil	: Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif			
Kegiatan	: 3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pameran			
Sub Kegiatan	: 3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.600,00	48.499.200,00	
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
Indikator Hasil	: Indeks Keberdayaan Konsumen			
Kegiatan	: 3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengaduan Konsumen yang Diproses			
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen			
Indikator Keluaran	: Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	456.000.000,00	456.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.01.0002 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.992.200,00	5.672.200,00	
Kegiatan	: 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaku usaha yang menerapkan Tertib Niaga Persentase Produk yang sesuai dengan ketentuan			
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.621.202,00	86.223.497,00	
Program	: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
Indikator Hasil	: Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali			
Kegiatan	: 3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang memasarkan produk lokal Bali			
Sub Kegiatan	: 3.30.07.1.03.0005 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.832.962,00	273.029.457,00	
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0002 UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang			
Program	: 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)			
Kegiatan	: 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.455.700,00	1.455.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.887.400,00	17.779.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	59.672.160,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.038.040,00	16.038.040,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000,00	0,00	

Kegiatan	: 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.274.886,00	141.577.181,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.969.044,00	120.969.044,00	
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
Indikator Hasil	: Indeks Keberdayaan Konsumen			
Kegiatan	: 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah sertifikat hasil pengujian yang di terbitkan			
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.401.176,00	213.795.176,00	
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan			

Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Program	: 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
Indikator Hasil	: Persentase industri kreatif yang tumbuh			
Kegiatan	: 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Industri yang dibina			
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.682.000,00	126.162.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.626.786,00	4.482.427.761,00	
Program	: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
Indikator Hasil	: Persentase Ketersediaan Data Industri			
Kegiatan	: 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
Indikator Keluaran	: Persentase Data Industri yang terkumpul			
Sub Kegiatan	: 3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.900,00	26.959.900,00	
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0001 UPTD Rumah Kreatif			
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Rumah Kreatif)			
Kegiatan	: 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.821.900,00	121.821.900,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.613.160,00	411.249.760,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.450.500,00	1.225.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.212.000,00	3.212.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	3.840.000,00	
Kegiatan	: 3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.555.410,00	27.587.705,00	
Kegiatan	: 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.051.492,00	104.051.492,00	
Program	: 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
Indikator Hasil	: Persentase industri kreatif yang tumbuh			
Kegiatan	: 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Industri yang dibina			
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	827.213.500,00	723.421.500,00	
Bidang Urusan	: 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
Unit Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
Program	: 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
Indikator Hasil	: Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD			
Kegiatan	: 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target			
Sub Kegiatan	: 3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.884.800,00	24.884.800,00	
BELANJA DAERAH				

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Hukum			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.606.100,00	13.740.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.377.294,00	99.465.594,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	683.947.240,00	674.657.320,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.990.900,00	10.990.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.491.000,00	86.631.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.823.394,00	466.545.689,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	766.752.790,00	555.142.625,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.290.000,00	56.290.000,00	
Program	: 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			
Indikator Hasil	: Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum			
Kegiatan	: 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum			
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	936.594.722,00	896.217.607,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0002 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.709.540,00	96.598.720,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.300.042,00	181.669.517,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0004 Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	443.463.170,00	270.479.235,00	
Kegiatan	: 4.01.05.1.02 Fasilitas Bantuan Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.02.0001 Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.504.028.296,00	2.267.456.935,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.02.0002 Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.703.440,00	194.652.620,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali			
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	78.458.344.494,00	76.301.055.509,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.000.000,00	308.400.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.988.309.510,00	3.007.840.762,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0001 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.213.362,00	218.269.427,00	

Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.976.600,00	15.976.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.026.000,00	18.026.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	398.256.320,00	392.180.320,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.727.000,00	31.727.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.429.000,00	170.675.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tertata			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	905.956.492,00	919.956.492,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.160.000,00	86.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	12.800.000,00	
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali			
Kegiatan	: 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Persentase Kebijakan dan Regulasi yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.157.990,00	361.982.075,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.862.600,00	111.372.400,00	
Kegiatan	: 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti			

Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0001 Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.993.300,00	262.095.300,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.999.500,00	111.019.500,00	
Kegiatan	: 4.01.03.1.03 Fasilitas Kerja Sama Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.909.422,00	208.208.307,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	948.670.200,00	682.153.700,00	
Program	: 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Indikator Hasil	: Persentase Tindakanjnt Kebijakan Strategis yang mendukung Pengembangan Budaya Spiritual			
Kegiatan	: 4.01.04.1.01 Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengembangan Mental Spiritual			
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.834.763.996,00	16.491.811.336,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.398.752,00	554.280.752,00	
Kegiatan	: 4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0003 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.821.861.676,00	3.749.349.676,00	
5.1.05	Belanja Hibah	22.043.750.000,00	46.242.750.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0003 Biro Umum dan Protokol			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali			
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.866.748,00	413.080.028,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.879.744,00	473.686.464,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.620.172,00	262.467.532,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.221.040,00	580.110.220,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.916.800,00	39.916.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.952.676.318,00	1.535.310.143,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	694.995.040,00	868.183.440,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.336.554.462,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.862.833.477,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.194.377.134,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.692.607.347,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.540.874,00	351.252.742,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.069.469.360,00	2.069.469.360,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.176.844.128,00	0,00	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.565.733.308,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.529.123.017,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.891.296.300,00	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.876.182.652,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.375.876.952,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.917.241.188,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.950.111.774,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	235.460.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	142.363.800,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	346.256.452,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	346.256.452,00	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	6.317.806.694,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	5.372.057.408,00	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	18.637.264.857,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.956.114.296,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	1.565.036.576,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	584.072.000,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	146.550.001,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.893.195.512,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.554.975.848,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	1.228.598.010,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	456.048.000,00	0,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	158.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.497.098,00	404.497.098,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.13 Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan			

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.13.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.115.000,00	224.717.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.14 Fasilitas Keprotokolan			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Fasilitas Keprotokolan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.079.394.124,00	1.031.531.504,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0005 Biro Organisasi			
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.976.000,00	4.976.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.900,00	16.460.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.559.188,00	181.430.088,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.493.140,00	432.515.319,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.342.000,00	160.476.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik.			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	789.308.052,00	738.230.478,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.450.000,00	80.450.000,00	
Program	: 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
Indikator Hasil	: Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik			
Kegiatan	: 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	85.315.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.01.0002 Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	80.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.065.792,00	180.677.005,00	
Kegiatan	: 4.01.02.1.02 Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.055.892,00	136.243.892,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.037.392,00	116.325.392,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.997.000,00	14.997.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.065.492,00	101.993.492,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0005 Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.066.192,00	77.721.405,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0007 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali			
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	13.950.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.386.246.936,00	985.769.693,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	629.246.900,00	610.249.580,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.464.000,00	35.000.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.960.000,00	146.692.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.480.000,00	557.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.950.000,00	91.300.000,00	
Program	: 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indikator Hasil	: Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Ditindaklanjuti			
Kegiatan	: 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku			
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.987.000,00	230.804.000,00	
Kegiatan	: 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.865.000,00	130.124.000,00	
Kegiatan	: 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.007.800,00	544.400.800,00	
Program	: 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
Indikator Hasil	: Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa			
Kegiatan	: 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.970.000,00	21.330.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.852.000,00	48.404.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.875.454.175,00	32.071.291.425,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.985.000,00	42.465.000,00	
Kegiatan	: 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik			
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.981.000,00	51.105.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	47.894.000,00	
Kegiatan	: 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.996.000,00	73.676.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.995.000,00	10.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.560.000,00	29.728.000,00	
Program	: 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
Indikator Hasil	: Persentase Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku			
Kegiatan	: 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku			
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	30.030.000,00	
Kegiatan	: 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	31.785.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0008 Biro Humas dan Protokol			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	77.440.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.13 Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	278.165.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.13.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.319.816.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	403.256.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.14 Fasilitas Keprotokolan			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Fasilitas Keprotokolan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.14.0002 Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	388.398.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	642.957.700,00	
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD			
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD			
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD			
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (SETWAN)			
Kegiatan	: 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Kesesuaian Perencanaan Terhadap Penganggaran Belanja OPD			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	491.165.710,00	495.356.005,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.463.410,00	287.448.605,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	13.761.340.678,00	11.422.970.707,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.140.000,00	60.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.478.410,00	185.100.705,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.841.510,00	135.563.805,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Selesai Dengan Baik dan Di Sampaikan Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.070.300,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.016.000,00	498.521.386,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.834.120.446,00	1.941.833.246,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.631.600,00	141.209.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.075.320.000,00	1.096.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.802.329.336,00	10.048.362.956,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.600.000,00	77.600.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.234.375.500,00	15.265.738.236,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pelayanan Penunjang Kantor Yang Selesai Dengan Baik Dan Berkualitas			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	15.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000,00	950.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.677.324.042,00	2.005.449.087,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.756.238,00	3.915.956.238,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.015.661.300,00	3.115.236.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.388.884.912,00	23.101.365.912,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	643.040.000,00	1.143.040.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Keuangan Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	59.732.867.624,00	62.926.813.904,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.694.242.500,00	1.785.578.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.618.510,00	304.365.805,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.16.0002 Fasilitas Fraksi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.444.240,00	119.333.420,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	932.320.400,00	1.285.361.400,00	
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
Indikator Hasil	: Presentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD (SETWAN)			
Kegiatan	: 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			
Indikator Keluaran	: Persentase Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.931.295.420,00	1.896.054.110,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.090.198.230,00	17.458.355.002,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	926.795.510,00	1.060.156.305,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran			
Indikator Keluaran	: Persentase Terbentuknya Kebijakan Anggaran Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Fungsi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.765.207.192,00	75.911.892,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.685.902.010,00	64.867.710,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.839.257.410,00	4.865.797.405,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.702.591.710,00	855.896.705,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.812.628.310,00	862.044.305,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.602.197.714,00	7.947.975.299,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.599.763.250,00	5.644.015.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.786.622.980,00	5.457.067.715,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.684.155.020,00	5.995.348.410,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.665.224.500,00	731.792.200,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.285.481.230,00	3.638.481.115,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.872.166.400,00	4.467.166.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	730.186.800,00	670.186.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.477.743.520,00	1.441.278.410,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.318.303.470,00	4.212.626.130,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Persentase Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.810.849.012,00	3.305.126.902,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	886.076.800,00	2.905.029.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.222.107.320,00	35.186.696.210,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	862.378.564,00	853.546.910,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.648.671.930,00	36.254.544.515,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.423.720,00	468.679.410,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.688.751.700,00	3.686.402.800,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN			
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.981.114,00	155.075.999,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.474.400,00	11.474.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.444.900,00	11.444.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.221.600,00	4.869.600,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	16.307.950.481,00	15.251.820.418,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.900.000,00	24.125.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.934.150,00	118.820.625,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.225.512,00	95.670.102,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.000.810,00	47.723.105,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.046.592,00	87.046.592,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	643.741.640,00	784.249.440,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.063.004,00	129.063.004,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.119.210,00	40.205.505,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.183.410,00	46.905.705,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.255.410,00	43.527.705,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	734.696.410,00	387.076.705,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	361.989.600,00	361.989.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.155.092,00	49.155.092,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.616.910,00	20.339.205,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.266.492,00	197.266.492,00	

Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	726.775.182,00	710.497.477,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	771.388.362,00	729.044.165,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.660.410,00	186.882.705,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.066.492,00	352.066.492,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.714.616.000,00	1.926.598.165,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	57.000.000,00	
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku			
Kegiatan	: 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.497.500,00	15.570.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.767.400,00	93.767.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.558.970.642,00	1.114.761.117,00	
Kegiatan	: 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.329.832,00	363.016.812,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.02.0004 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.109.200,00	17.089.900,00	
Kegiatan	: 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.355.700,00	95.827.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	582.461.632,00	418.498.812,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.03.0004 Fasilitas/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.556.800,00	156.066.800,00	
Kegiatan	: 5.01.02.1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data SIPD			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.369.700,00	44.481.300,00	
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah			
Kegiatan	: 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.314.520,00	69.671.910,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.194.510,00	84.909.605,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.847.622,00	411.747.307,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.219.112,00	176.782.102,00	
Kegiatan	: 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.081.022,00	171.803.907,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.211.812,00	170.370.402,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.873.110,00	66.715.405,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.409.620,00	132.648.210,00	
Kegiatan	: 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infratraktur dan Kewilayahan			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.252.960,00	198.104.730,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.929.700,00	50.477.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.012.150,00	174.897.625,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.913.600,00	51.187.600,00	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN			
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPKAD)			
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.487.200,00	44.873.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	20.152.321.982,00	21.428.130.146,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.628.432.002,00	975.110.697,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.204.900,00	12.020.700,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	5.004.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.110.820,00	34.555.410,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	973.168.040,00	2.689.341.860,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.675.840,00	239.052.922,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.587.800,00	11.930.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.999.900,00	7.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.305.410,00	111.027.705,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	544.586.000,00	185.083.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.710.000,00	4.710.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.300.000,00	285.300.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	844.089.830,00	771.551.076,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.520.000,00	6.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.456.710,00	158.637.005,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.043.777.914,00	1.278.264.193,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.546.600,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	0,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000,00	30.000.000,00	
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			

Indikator Hasil	: Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu			
Kegiatan	: 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.287.100,00	47.133.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.110.300,00	34.356.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.764.500,00	34.764.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.456.000,00	20.456.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.089.801.740,00	891.146.920,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	674.584.700,00	667.382.700,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen SK Gubernur tentang evaluasi kabupaten/kota disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.119.200,00	109.226.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.846.700,00	80.274.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.127.400,00	63.616.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.972.400,00	194.972.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0008 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.929.000,00	65.936.500,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase laporan perbendaharaan disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	609.999.800,00	651.859.800,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	628.600.306,00	722.799.306,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.404.400,00	73.052.400,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.026.843.633,00	2.026.843.633,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	205.265.185.944,00	325.315.879.304,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	151.187.931.213,00	55.923.938.944,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	582.188.016.684,00	1.018.848.956.716,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase laporan pelaksanaan implementasi SIPD			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.903.500,00	65.933.500,00	
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah			
Kegiatan	: 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase laporan Barang Milik Daerah disusun tepat waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Harga yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.872.300,00	121.715.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	22.166.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.449.000,00	214.630.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.295.156.812,00	1.961.750.124,00	

Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPKAD)			
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.748.500,00	43.748.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.449.100,00	9.449.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.485.000,00	10.485.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.271.000,00	93.962.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	57.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.525.000,00	154.525.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.260.000,00	15.260.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	629.690.444,00	907.690.444,00	
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah			
Kegiatan	: 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase laporan Barang Milik Daerah disusun tepat waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000.000,00	2.102.504.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.721.100,00	20.336.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.941.200,00	24.941.200,00	

Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	140.528.140.151,00	125.104.927.196,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.600.000,00	276.600.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.039.000,00	10.556.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.006.500,00	318.006.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.575.894,00	101.575.894,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.960.300,00	324.960.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.428.800,00	2.428.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.325.000,00	483.325.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	226.733.625,00	218.777.440,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	970.874.300,00	1.390.847.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.636.000,00	14.636.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	410.159.660,00	1.827.306.689,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.095.522.864,00	6.345.522.864,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.749.000,00	44.749.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.148.700,00	6.147.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.433.104,00	387.433.104,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.453.373,00	434.453.373,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.469.592,00	124.469.592,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.434.609.652,00	1.434.609.652,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	839.934.430,00	465.547.215,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	571.794.960,00	748.794.960,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	712.457.500,00	917.412.250,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.213.538.973,00	1.135.206.543,00	
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			
Kegiatan	: 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0001 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.008.900,00	0,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase capaian PAD terhadap target PAD			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.541.400,00	128.726.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.290.600,00	93.709.600,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.625.200,00	142.974.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.095.700,00	308.975.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.120.000,00	34.960.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja			
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.259.300,00	5.259.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.216.140,00	192.580.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.239.200,00	10.239.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.854.500,00	4.854.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	6.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.400.000,00	63.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.789.800,00	1.789.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.000.000,00	261.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	270.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	47.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.714.492,00	175.714.492,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.180.000,00	21.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	643.353.314,00	529.409.379,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.723.800,00	16.723.800,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.753.359.942,00	1.151.015.939,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.715.377.516,00	1.219.650.694,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja			
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.664.700,00	3.664.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.248.420,00	129.410.120,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.691.900,00	4.691.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.775.000,00	4.775.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00	44.580.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.491.500,00	1.491.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.000.000,00	181.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	190.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.703.000,00	46.703.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.708.392,00	154.708.392,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.020.000,00	41.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.385.464,00	326.376.788,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.625.800,00	13.435.800,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			

Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.859.772,00	240.708.132,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	671.186.002,00	499.708.821,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja			
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.949.800,00	6.949.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.866.890,00	142.850.490,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.783.700,00	6.783.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	3.375.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.285.000,00	21.285.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.978.200,00	1.978.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	184.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.000.000,00	294.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.855.000,00	45.855.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.937.992,00	225.937.992,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.460.000,00	21.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	533.098.428,00	435.432.198,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	16.250.000,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.620.592,00	286.723.542,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.676.002,00	328.171.247,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja			
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.037.600,00	8.924.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.993.390,00	174.516.890,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.186.050,00	17.186.050,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.840.000,00	4.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.575.000,00	10.575.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.120.000,00	16.065.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.978.200,00	1.978.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.000.000,00	378.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.230.947,00	437.230.947,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.265.000,00	36.265.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.338.992,00	188.338.992,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.920.000,00	19.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	664.194.297,00	750.945.024,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.840.000,00	27.840.000,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.140.725.352,00	990.567.152,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	665.703.576,00	459.796.526,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja			
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.435.800,00	4.435.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.920.870,00	404.759.830,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.122.194,00	57.122.194,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.536.700,00	65.536.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.424.000,00	6.424.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.875.000,00	20.875.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.365.000,00	13.365.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.491.500,00	1.491.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.550.000,00	474.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.923.894,00	391.923.894,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.895.800,00	51.270.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.989.104,00	226.489.104,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.040.000,00	17.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	751.906.893,00	945.518.368,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.026.900,00	48.644.600,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.609.200.078,00	1.513.483.023,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.087.084,00	481.976.264,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0006 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja			
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.931.000,00	16.931.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.966.580,00	145.966.580,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.718.634,00	56.718.634,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.463.600,00	22.463.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.212.500,00	8.212.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.375.000,00	15.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.040.000,00	18.120.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.826.000,00	2.826.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.000.000,00	337.094.457,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	49.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.497.500,00	147.497.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.300.000,00	38.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.731.412,00	463.096.668,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.020.000,00	35.020.000,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			

Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.154.773.644,00	731.553.314,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.206.150,00	345.965.575,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0007 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja			
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.009.700,00	7.009.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.788.300,00	116.788.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	29.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.399.700,00	3.399.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.250.800,00	3.250.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.975.000,00	2.975.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.789.800,00	1.789.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	130.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.849.487,00	359.849.487,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.995.000,00	47.995.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.518.700,00	104.518.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	14.290.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.176.002,00	330.787.477,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.099.200,00	8.099.200,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.786.822,00	303.965.444,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	594.342.232,00	349.734.362,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0008 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung			

Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja			
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.660.400,00	2.660.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.050.400,00	110.050.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.280.000,00	30.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.674.000,00	3.674.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	2.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.325.000,00	4.325.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.900.000,00	26.454.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.193.200,00	1.193.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	210.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	218.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.835.000,00	42.835.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.991.500,00	152.991.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.390.000,00	16.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	707.464.134,00	560.964.789,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.560.000,00	17.560.000,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.509.592,00	270.503.542,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	463.615.756,00	318.124.116,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0009 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja			
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.827.100,00	3.827.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.245.980,00	122.245.980,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.837.000,00	27.837.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.182.900,00	5.182.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	2.175.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	3.575.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.410.000,00	61.650.000,00	

Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.193.200,00	1.193.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	165.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.000.000,00	237.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.490.000,00	52.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.835.592,00	123.835.592,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	21.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.843.542,00	352.455.017,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.020.500,00	15.304.800,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	491.616.002,00	317.121.247,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.820.592,00	311.143.542,00	
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN			
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.646.000,00	10.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.074.600,00	37.042.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.020.000,00	51.540.000,00	

Kegiatan	: 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	31.255.280.353,00	29.316.361.161,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.800.000,00	134.100.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.762.400,00	17.762.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.768.400,00	153.768.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.079.034,00	85.079.034,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.503.400,00	10.280.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.137.000,00	4.137.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.593.000,00	197.985.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	575.633.000,00	575.633.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.386.400,00	2.386.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.600.000,00	253.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	867.129.578,00	720.630.233,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	996.648.320,00	1.010.648.320,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.731.000,00	316.731.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.700.000,00	136.900.000,00	
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			

Indikator Hasil	: Indeks Profesionalitas ASN Instansi			
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.830.000,00	41.856.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	890.904.000,00	788.914.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.584.000,00	39.368.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.033.410,00	97.385.705,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.750.500,00	154.596.500,00	

Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.203.012,00	132.931.602,00	
Kegiatan	: 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis layanan mutasi promosi ASN terlaksana baik			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.793.110,00	34.097.405,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.543.410,00	116.113.705,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.454.410,00	90.184.705,00	
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pengembangan karier jabatan fungsional yang terlaksana sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.730.492,00	73.996.492,00	

Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.587.606.492,00	1.492.206.492,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.248.000,00	18.608.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.244.000,00	195.266.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.600.410,00	62.366.705,00	
Kegiatan	: 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.185.902,00	93.996.197,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.577.100,00	59.545.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.870.702,00	122.816.997,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.347.902,00	84.056.197,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.684.700,00	17.066.700,00	
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0001 UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai			
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.361.800,00	3.176.400,00	

Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.298.000,00	23.338.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pengadaan barang milih daerah penunjang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.550.000,00	25.550.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.398.952,00	143.732.722,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.656.500,00	78.656.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.660.000,00	9.660.000,00	
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Indeks Profesionalitas ASN Instansi			
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.598.227.300,00	1.583.657.700,00	
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0002 UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia			
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manaemen Kinerja			
Kegiatan	: 5.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000.000,00	18.642.800.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	700.000.000,00	2.057.200.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	1.000.000.000,00	
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
Indikator Hasil	: Persentase ASN yang lulus Pengembangan SDM berbasis Kompetensi			
Kegiatan	: 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang dilaksanakan			

Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.191.492,00	267.709.492,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.898.000,00	204.089.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.545.492,00	531.056.492,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.566.500,00	116.684.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.950.910,00	69.561.205,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.678.000,00	43.366.000,00	
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah			
Unit Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah			
Program	: 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	23.789.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	35.162.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	11.225.206.527,00	10.687.667.860,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.800.000,00	48.300.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.938.000,00	21.938.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.905.500,00	205.509.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.436.400,00	107.436.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.180.200,00	24.180.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.998.700,00	14.998.700,00	

Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	568.024.000,00	201.969.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	419.204.600,00	607.456.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	465.615.240,00	1.070.406.340,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.992.600,00	11.162.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.200.000,00	167.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.506.444,00	341.506.444,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	795.794.806,00	784.032.101,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	10.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.582.562,00	758.750.757,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	236.945.000,00	236.945.000,00	
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan			
Kegiatan	: 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
Indikator Keluaran	: Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000.000,00	6.274.365.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0008 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	292.539.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.742.000,00	245.784.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.852.000,00	1.693.920.000,00	
Kegiatan	: 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	394.398.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	231.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	975.000.000,00	894.682.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.000.000,00	234.732.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.000.000,00	218.611.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	668.500.000,00	
Kegiatan	: 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	167.232.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.365.900,00	61.661.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	150.760.000,00	
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG			
Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung			
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung			
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Badan Penghubung)			
Kegiatan	: 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat			
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.300,00	4.999.300,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan			
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.056.488.696,00	3.109.813.101,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.550.000,00	58.250.000,00	

Kegiatan	: 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor			
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.989.400,00	14.989.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.981.200,00	60.977.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	6.716.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.499.300,00	6.090.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.171.000,00	99.764.000,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	29.091.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.503.420,00	515.139.256,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintah pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.989.100,00	8.989.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.800.000,00	306.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.159.107.136,00	1.213.956.466,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Meningkatnya kualitas barang milik daerah			
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.332.537.868,00	1.581.337.868,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.164.000,00	317.796.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	220.179.000,00	220.179.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.769.196,00	151.625.796,00	
Program	: 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta			
Kegiatan	: 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			
Indikator Keluaran	: Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung			
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.309.700,00	48.717.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.618.787,00	66.618.787,00	

Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.769.196,00	326.087.665,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.485.776.784,00	2.715.122.253,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	64.762.622,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH			
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat			
Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat			
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.800,00	18.521.800,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	24.137.200,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	26.261.979.033,00	25.989.250.471,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.700.000,00	50.700.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi yang terpenuhi			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.400,00	49.999.400,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.800,00	99.997.800,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.109.394,00	158.109.394,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.070.300,00	40.070.300,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.140.800,00	44.140.800,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.960.000,00	39.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	849.995.000,00	647.514.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.709.720.040,00	1.681.023.740,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	13.000.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang yang terpenuhi			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.092.900,00	5.092.900,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.500.000,00	318.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.560.560,00	309.560.560,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah yang terpelihara			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.621.453.428,00	1.617.453.428,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.952.212,00	142.752.212,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	199.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.762.984,00	155.155.410,00	
Program	: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			
Kegiatan	: 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
Indikator Keluaran	: Persentase hasil pembinaan dan Pengawasan Internal			
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.768.384,00	92.116.810,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.791.784,00	159.626.210,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.999.500,00	48.013.500,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.391.492,00	142.605.705,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	904.768.184,00	547.158.610,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.960.300,00	283.700.300,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.768.484,00	196.177.910,00	
Kegiatan	: 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
Indikator Keluaran	: Persentase Hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu			
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.768.684,00	50.875.110,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	912.792.776,00	514.691.215,00	
Program	: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
Indikator Hasil	: Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan			
Kegiatan	: 6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.509.276,00	299.286.015,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.664.241.952,00	1.291.866.617,00	
Kegiatan	: 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi			
Indikator Keluaran	: Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.141.676,00	211.249.315,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.988.800,00	141.882.800,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.364.900,00	283.068.900,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.996.400,00	77.916.400,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.164.000,00	57.956.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	22.640.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	9.939.115.243,00	9.014.553.924,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.900.000,00	61.200.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.921.500,00	14.921.500,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.140.000,00	18.140.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221.977.300,00	221.977.300,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.229.424,00	77.229.424,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.880.500,00	35.880.500,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.996.100,00	4.996.100,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.759.000,00	228.215.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	189.401.500,00	294.406.500,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	416.922.740,00	416.922.740,00	

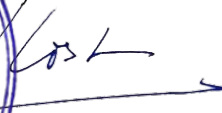
Kegiatan	: 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.994.800,00	11.994.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	139.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	916.019.544,00	830.659.070,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan barang milik daerah terpelihara			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	790.100.000,00	804.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.960.000,00	19.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.981.800,00	181.981.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.880.000,00	37.680.000,00	
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila			
Kegiatan	: 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.196.846.794,00	1.223.475.089,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paskibraka			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.535.199.600,00	3.448.095.300,00	
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik			
Kegiatan	: 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	533.187.294,00	337.753.089,00	
5.1.05	Belanja Hibah	23.841.580.000,00	23.841.580.000,00	
Program	: 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Ormas yang terdata			
Kegiatan	: 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.089.000,00	190.317.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	800.000.000,00	
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
Indikator Hasil	: Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah			
Kegiatan	: 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.045.322,00	301.214.207,00	

5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial			
Kegiatan	: 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	676.176.212,00	318.278.802,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	2.834.625.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.999.700,00	958.372.100,00	
PEMBIAYAAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.201.125.499.578,20	1.153.811.060.761,60	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.201.125.499.578,20	623.732.459.203,32	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	530.078.601.558,28	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	401.464.808.088,00	401.464.808.088,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	158.000.000.000,00	158.000.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	243.464.808.088,00	243.464.808.088,00	

GUBERNUR BALI,


WAYAN KOSTER

LAMPIRAN IV

**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**



REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN
BESERTA KELUARAN PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.75 Nilai											
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu	8 Dokumen											
1	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	150.331.500,00	77.429.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.331.500,00	77.429.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	169.524.400,00	107.771.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.524.400,00	107.771.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	59 Laporan											
3	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10680 Orang/ Bulan	1.317.702.881.213,00	1.291.832.286.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.702.881.213,00	1.291.832.286.219,00	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	1.284.575.800,00	1.284.575.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.575.800,00	1.284.575.800,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 Dokumen	249.856.500,00	145.430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.856.500,00	145.430.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	4 Jenis											
6	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	766.145.000,00	766.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.145.000,00	766.145.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik	100 Persen											
7	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	68.193.400,00	68.193.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.193.400,00	68.193.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen											
8	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47 Paket	280.771.880,00	211.303.160,00	186.943.680,00	405.529.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.715.560,00	616.832.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
9	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.840.000,00	10.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840.000,00	10.840.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
11	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	31.526.250,00	31.526.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.526.250,00	31.526.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
12	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	608.350.000,00	375.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.350.000,00	375.246.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 Persen											
13	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	978.222.150,00	978.222.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.222.150,00	978.222.150,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
14	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.869.139.322,00	7.531.089.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.869.139.322,00	7.531.089.807,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	100 Persen											
15	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	954.685.000,00	954.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.685.000,00	954.685.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
16	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.677.200.000,00	1.677.200.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.200.000,00	1.977.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
17	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	268.530.000,00	268.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.530.000,00	268.530.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16 - 18 tahun	86.24 Persen											
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	93.50 Indeks 98.50 Indeks 88.50 Indeks 75.00 Nilai 60.75 Nilai											
18	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)													
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	8 Unit	0,00	0,00	68.000.000.000,00	68.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000.000,00	68.000.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
19	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula													
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
20	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah													
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	0,00	0,00	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
21	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	0,00	0,00	382.366.000,00	382.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.366.000,00	382.366.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
22	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas													
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta didik	4.704.150.000,00	4.704.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704.150.000,00	4.704.150.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
23	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	950 Peserta Didik	2.782.735.000,00	2.768.028.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782.735.000,00	2.768.028.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
24	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1249 Orang	31.956.434.118,00	27.034.056.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.956.434.118,00	27.034.056.126,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
25	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	105.000.000,00	77.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	77.120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
26	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas													
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	155 Satuan Pendidikan	162.820.000,00	125.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.820.000,00	125.380.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
27	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas													
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	156 Satuan Pendidikan	128.835.148.792,00	125.192.921.247,00	32.855.981.208,00	40.233.248.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.691.130.000,00	165.426.169.948,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Reguler
28	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas													
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	90 Orang	57.409.900,00	57.409.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.409.900,00	57.409.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
29	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	85.899.900,00	76.299.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.899.900,00	76.299.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
30	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	44.690.000,00	44.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.690.000,00	44.690.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
31	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	14 Ruang	0,00	0,00	8.871.116.400,00	8.871.116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871.116.400,00	8.871.116.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
32	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	900 Orang	104.996.800,00	86.942.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.996.800,00	86.942.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
33	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	90 Satuan Pendidikan	9.312.128.200,00	8.166.313.800,00	2.715.508.800,00	2.715.508.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.027.637.000,00	10.881.822.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	93.00 Indeks 97.00 Indeks 85.50 Indeks 69.55 Nilai 56.85 Nilai 79.50 Persen 90.85 Persen											
34	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)													
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	0,00	0,00	22.212.384.000,00	22.612.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.212.384.000,00	22.612.384.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
35	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	0,00	0,00	11.150.616.000,00	11.150.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150.616.000,00	11.150.616.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
36	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah													
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket	7.022.700,00	7.022.700,00	3.907.903.200,00	3.907.903.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.925.900,00	3.914.925.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
37	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	32 Paket	21.712.000.000,00	21.712.000.000,00	25.658.185.000,00	25.658.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.370.185.000,00	47.370.185.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
38	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan													
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	360 Peserta didik	5.393.781.500,00	5.338.581.400,00	0,00	295.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393.781.500,00	5.633.745.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
39	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	680 Peserta Didik	2.955.825.000,00	1.718.208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955.825.000,00	1.718.208.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
40	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1325 Orang	20.272.868.244,00	16.854.550.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.272.868.244,00	16.854.550.194,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
41	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	105.000.000,00	88.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	88.862.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
42	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	172 Satuan Pendidikan	522.432.000,00	460.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.432.000,00	460.992.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
43	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan													
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	175 Satuan Pendidikan	155.073.974.318,00	150.140.469.730,00	25.455.875.682,00	32.139.082.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.529.850.000,00	182.279.551.870,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Reguler
44	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan													
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	172 Orang	64.000.000,00	51.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000.000,00	51.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
45	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	56.800.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800.000,00	37.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
46	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	112.160.000,00	68.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.160.000,00	68.960.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
47	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Ruang	0,00	0,00	4.012.000.000,00	4.012.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012.000.000,00	4.012.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
48	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	58 Satuan Pendidikan	2.189.441.560,00	2.189.441.560,00	7.022.098.320,00	7.022.098.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211.539.880,00	9.211.539.880,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
49	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	900 Orang	104.628.200,00	86.574.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.628.200,00	86.574.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Indeks 93.50 Indeks 93.25 Indeks 93.50 Indeks 98.50 Indeks 93.25 Indeks 88.70 Indeks 92.50 Indeks 98.50 Indeks 89.50 Indeks 73.50 Nilai Rerata kompetensi Numerasi 77.50 Nilai SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi 62.00 Nilai SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Indeks 67.00 Nilai	93.50 Indeks 93.25 Indeks 93.50 Indeks 98.50 Indeks 93.25 Indeks 88.70 Indeks 92.50 Indeks 98.50 Indeks 89.50 Indeks 73.50 Nilai Rerata kompetensi Numerasi 77.50 Nilai 77.75 Nilai 62.00 Nilai 70.00 Nilai 67.00 Nilai											
50	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	0,00	0,00	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
51	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus													
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2337 Peserta Didik	3.533.566.200,00	3.523.966.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533.566.200,00	3.523.966.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
52	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	1.593.966.000,00	1.322.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.966.000,00	1.322.189.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
53	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	149 Orang	4.649.915.980,00	3.487.687.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649.915.980,00	3.487.687.843,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
54	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus													
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan dalam Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	306.611.500,00	157.959.500,00	594.364.800,00	594.364.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.976.300,00	752.324.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
55	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus													
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	14 Satuan Pendidikan	9.101.236.090,00	8.734.723.025,00	1.707.273.910,00	2.529.571.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808.510.000,00	11.264.294.800,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Reguler
56	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus													
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	60 Orang	15.547.600,00	15.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.547.600,00	15.547.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
57	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14 Dokumen	138.370.000,00	90.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.370.000,00	90.910.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
58	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	14 Dokumen	16.171.600,00	16.171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.171.600,00	16.171.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
59	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	758.000.000,00	600.000.000,00	1.220.000.000,00	1.318.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.000.000,00	1.918.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
60	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	14 Satuan Pendidikan	362.880.000,00	362.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.880.000,00	362.880.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan minimal baik	100 Persen											
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal	66.5 Persen											
61	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus													
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Dokumen	39.999.400,00	26.079.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999.400,00	26.079.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
62	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3 Laporan	39.999.700,00	34.239.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999.700,00	34.239.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan	72 Persen											
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang berprestasi	91 Orang											
63	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1450 Orang	0,00	9.731.599.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731.599.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
64	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda													
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	75 Orang	648.324.000,00	36.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.324.000,00	36.390.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
65	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi													
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	1 Dokumen	199.999.900,00	148.051.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.999.900,00	148.051.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
66	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi													
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	100 Persentase	199.900.000,00	192.831.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.900.000,00	192.831.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
67	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi													
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	90 Orang	788.299.500,00	778.887.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.299.500,00	778.887.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
68	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi													
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	90 Orang	113.475.000,00	98.707.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.475.000,00	98.707.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	50.50 Persen											
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	5 Kejuaraan											
69	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga													
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	250 Orang	15.818.328.500,00	14.305.184.700,00	5.268.000,00	5.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.823.596.500,00	14.310.452.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
70	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi													
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	5 Kegiatan	8.190.429.632,00	7.120.620.900,00	62.106.500,00	62.106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252.536.132,00	7.182.727.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional, regional dan internasional	180 Orang											
71	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi													
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	351.400.000,00	316.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.400.000,00	316.840.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan	59 Organisasi											
72	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait													
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	5 Dokumen	60.000.000.000,00	60.760.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000.000,00	60.760.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan	53 Persen											
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka	53 Persen											
73	2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi													
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 Laporan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.75 Nilai											
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen											
74	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	51.355.900,00	29.355.900,00	88.806.600,00	109.728.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.162.500,00	139.084.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
75	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.499.600,00	3.499.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.600,00	3.499.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
76	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	49.994.000,00	27.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.994.000,00	27.218.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 Persen											
77	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	755.752.266,00	556.164.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.752.266,00	556.164.265,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	100 Persen											
78	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400.000,00	98.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
79	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
80	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang Menerapkan Pembelajaran Berbasis TIK	80.00 Persen											
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK	90 Sekolah											
81	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	720 Orang	101.970.000,00	94.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.970.000,00	94.290.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
82	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan													
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	12 Konten Digital	52.774.000,00	14.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.774.000,00	14.040.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
83	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan													
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	130 Orang	37.908.000,00	31.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.908.000,00	31.636.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
84	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	91 Satuan Pendidikan	562.961.000,00	545.681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.961.000,00	545.681.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK	58 Sekolah											
85	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	600 Orang	84.000.000,00	77.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	77.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan													
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten Digital	40.386.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.386.000,00	13.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
87	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan													
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	120 Orang	37.646.000,00	31.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.646.000,00	31.374.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
88	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	59 Satuan Pendidikan	369.991.000,00	354.631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.991.000,00	354.631.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.75 Nilai											
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu	100 Persen											
89	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.613.000,00	8.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613.000,00	8.613.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
90	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.547.600,00	6.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547.600,00	6.547.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
91	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	26.946.000,00	17.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.946.000,00	17.280.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen											
92	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	541.397.642,00	452.498.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.397.642,00	452.498.035,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu	100 Persen											
93	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	90.810.000,00	90.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.810.000,00	90.810.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	60,25 Persen											
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	1 Kurikulum											
94	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah													
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	72 Orang	87.100.800,00	67.654.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100.800,00	67.654.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan	1 Kurikulum											
95	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus													
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	20 Orang	39.663.300,00	34.643.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.663.300,00	34.643.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan	70.60 Nilai											
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali	87.30 Persen											
96	1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	225 Peserta Didik	85.000.000,00	59.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	59.140.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kesehatan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai											
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	7 Dokumen											
97	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	205.158.900,00	51.666.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.158.900,00	51.666.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
98	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	130.876.110,00	29.457.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.876.110,00	29.457.705,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100 Persen											
99	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1705 Orang/ Bulan	298.716.634.158,00	289.281.147.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.716.634.158,00	289.281.147.773,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
100	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	194.282.014,00	265.898.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.282.014,00	265.898.899,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 Persen											
101	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.583.700,00	8.583.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.583.700,00	8.583.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
102	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	261.268.500,00	285.122.700,00	808.482.700,00	776.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.751.200,00	1.061.851.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
103	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	273.968.394,00	273.968.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.968.394,00	273.968.394,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
104	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	77.170.300,00	90.081.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.170.300,00	90.081.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
105	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	22.500.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
106	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	188.318.000,00	232.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.318.000,00	232.757.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100 Persen											
107	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	484.500.000,00	484.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.500.000,00	484.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
108	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.894.558.346,00	5.582.328.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894.558.346,00	5.582.328.921,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP	100 Persen											
109	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	44 Unit	515.400.000,00	515.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.400.000,00	515.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
110	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	81.769.500,00	141.169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.769.500,00	141.169.500,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
111	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	893.602.000,00	659.602.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.602.000,00	759.602.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Faskes yang Terakreditasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Desa UCI Cakupan Kepesertaan JKN	100 Persen 89 Nilai 96 Persen 97 Persen 98,3 Persen											
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Masyarakat yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Minimal	100 Persen											
112	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana													
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	4380824 Orang	267.525.580,00	186.176.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.525.580,00	186.176.380,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pajak Rokok Pajak Rokok
113	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130000 Orang	141.542.800,00	70.891.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.542.800,00	70.891.400,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pajak Rokok Pajak Rokok
114	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	288.757.730,00	149.964.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.757.730,00	149.964.615,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi Pajak Rokok DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi Pajak Rokok
115	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	174.231.520,00	137.301.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.231.520,00	137.301.520,00	Pajak Rokok Pajak Rokok

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
116	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	270.631.520,00	204.191.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.631.520,00	204.191.520,00	Pajak Rokok Pajak Rokok
117	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	138.072.600,00	90.493.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.072.600,00	90.493.200,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pajak Rokok Pajak Rokok
118	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	140.026.492,00	134.356.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.026.492,00	134.356.492,00	Pajak Rokok Pajak Rokok
119	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen	2.536.062.498,00	2.268.289.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536.062.498,00	2.268.289.953,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi Pajak Rokok DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi Pajak Rokok
120	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	53.127.000,00	53.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.127.000,00	53.127.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi
121	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	24.665.908.700,00	24.657.838.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.665.908.700,00	24.657.838.700,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pajak Rokok
122	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	112.280.000,00	112.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.280.000,00	112.280.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi
123	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	322.771.520,00	399.741.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.771.520,00	399.741.520,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi Pajak Rokok DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi Pajak Rokok
124	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	115.867.600,00	58.533.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.867.600,00	58.533.800,00	Pajak Rokok Pajak Rokok

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
125	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional													
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	150 Paket	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pajak Rokok
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan e-Kesehatan melalui Komunikasi Data Terintegrasi	77 persen											
126	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	105.464.110,00	73.251.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.464.110,00	73.251.405,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	100 Persen											
127	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	25 Unit	150.356.540,00	101.876.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.356.540,00	101.876.540,00	Pajak Rokok Pajak Rokok
128	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	196 Unit	147.759.680,00	94.839.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.759.680,00	94.839.680,00	Pajak Rokok Pajak Rokok
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan	76 Persen											
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi Sesuai Kebutuhan	100 persen											
129	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	29000 Orang	201.448.460,00	156.328.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.448.460,00	156.328.860,00	Pajak Rokok Pajak Rokok
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi	90 persen											
130	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	200 Orang	84.590.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.590.000,00	11.520.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pajak Rokok Pajak Rokok
131	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	99.999.400,00	44.313.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999.400,00	44.313.900,00	Pajak Rokok Pajak Rokok
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	86 Persen											
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	100 persen											
132	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK													
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Perizinan	40 Sarana	250.153.570,00	168.145.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.153.570,00	168.145.865,00	Pajak Rokok Pajak Rokok
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	100 Persen											
133	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional													
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	20 Sarana	139.106.400,00	65.603.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.106.400,00	65.603.200,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pajak Rokok
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	66,67 Persen											
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya dukungan kerjasama mitra potensial/lintas sektor	1 Mitra Potensial											
134	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	535.451.330,00	308.484.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.451.330,00	308.484.615,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pajak Rokok Pajak Rokok
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang 80% Rumah Tangganya melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7 Kabupate n/Kota											
135	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat													
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	100.000.000,00	227.375.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	227.375.200,00	Pajak Rokok Pajak Rokok
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 80% posyandu aktif	77,78 Persen											
136	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	50.000.000,00	21.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	21.125.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pajak Rokok Pajak Rokok
		UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai											
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 Persen											
137	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.924.000,00	17.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.924.000,00	17.924.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
138	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.316.000,00	1.316.000,00	127.268.400,00	110.595.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.584.400,00	111.911.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
139	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	155.458.100,00	155.458.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.458.100,00	155.458.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
140	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.134.000,00	6.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.134.000,00	6.134.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
141	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100 persen											
142	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	363.900.000,00	363.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.900.000,00	363.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
143	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	810.685.512,00	745.574.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.685.512,00	745.574.692,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100 Persen											
144	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	39.175.000,00	39.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.175.000,00	39.175.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
145	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	56.520.000,00	52.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.520.000,00	52.920.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
146	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Bapelkesmas	82 Nilai											
147	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.755.300.000,00	2.755.300.000,00	244.700.000,00	244.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan	100 persen											
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peserta pelatihan yang lulus sesuai standar	100 persen											
148	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	150 Orang	369.183.034,00	242.840.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.183.034,00	242.840.509,00	Pajak Rokok Pajak Rokok
		UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai											
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 Persen											
149	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	45.900.000,00	45.900.000,00	36.995.200,00	21.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.895.200,00	67.379.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
150	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	410.045.300,00	410.045.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.045.300,00	410.045.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100 persen											
151	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	644.000.000,00	644.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000.000,00	644.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
152	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	1.102.835.086,00	875.547.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.835.086,00	875.547.216,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100 persen											
153	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	108.100.000,00	108.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.100.000,00	108.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
154	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	144.270.000,00	146.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.270.000,00	146.070.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
155	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali	82 Nilai											
156	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5.985.932.983,00	5.379.854.000,00	970.146.000,00	1.820.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956.078.983,00	7.200.000.000,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	89 Nilai											
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase tersedianya pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar	70 Persen											
157	1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center													
			Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	292.517.120,00	139.008.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.517.120,00	139.008.800,00	Pajak Rokok Pajak Rokok
		UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 persen											
158	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.015.500,00	5.015.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015.500,00	5.015.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
159	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	29.703.300,00	74.127.400,00	622.076.720,00	1.555.273.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.780.020,00	1.629.400.514,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
160	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	202.695.800,00	202.695.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.695.800,00	202.695.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
161	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	19.790.800,00	19.790.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.790.800,00	19.790.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
162	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
163	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	34.358.000,00	21.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.358.000,00	21.798.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100 Persen											
164	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	98.500.000,00	98.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500.000,00	98.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
165	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	988.375.510,00	939.542.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.375.510,00	939.542.395,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100 persen											
166	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	263.900.000,00	263.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.900.000,00	263.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
167	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	50.690.000,00	52.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.690.000,00	52.490.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
168	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	498.839.940,00	68.100.000,00	660.665.000,00	1.315.004.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.504.940,00	1.383.104.940,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	89 Nilai											
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olah raga	3 persen											
169	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	122.080.400,00	64.996.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.080.400,00	64.996.400,00	Pajak Rokok Pajak Rokok
170	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	158.690.210,00	98.034.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.690.210,00	98.034.105,00	Pajak Rokok Pajak Rokok
171	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1.017.847.192,00	805.928.172,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.847.192,00	811.728.172,00	Pajak Rokok Pajak Rokok
172	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)													
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1.794.227.018,00	1.998.420.007,00	0,00	1.376.262.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.227.018,00	3.374.682.883,00	Pajak Rokok Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		RSUD Bali Mandara													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai											
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100 Persen											
173	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.686.107.309,00	25.401.669.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.686.107.309,00	25.401.669.414,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Bali Mandara	82 Nilai											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
174	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	170.000.000.000,00	188.385.237.000,00	10.000.000.000,00	11.614.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000.000,00	200.000.000.000,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	89 Nilai											
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit	1 Laporan											
175	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	45.978.212.000,00	45.978.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.978.212.000,00	45.978.212.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan Pajak Rokok DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan Pajak Rokok
176	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit													
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	0,00	0,00	8.277.374.205,00	8.277.374.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277.374.205,00	8.277.374.205,00	Pajak Rokok Pajak Rokok
		Rumah Sakit Jiwa													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai											
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100 Persen											
177	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.114.110.402,00	1.114.110.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.110.402,00	1.114.110.402,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
178	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.790.288.206,00	9.132.336.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.790.288.206,00	9.132.336.611,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Jiwa	82 Nilai											
179	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	24.000.000.000,00	24.201.500.000,00	2.000.000.000,00	3.798.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000.000,00	28.000.000.000,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	89 Nilai											
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit	1 Laporan											
180	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit													
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	73.944.700,00	56.664.100,00	16.603.149.570,00	16.603.149.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.677.094.270,00	16.659.813.670,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan Pajak Rokok DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan Pajak Rokok
		Rumah Sakit Mata Bali Mandara													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di BLUD	82 Nilai											
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Mata Bali Mandara	82 Nilai											
181	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	81.218.160.000,00	81.854.455.000,00	8.781.840.000,00	11.145.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000.000,00	93.000.000.000,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
		UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai											
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 persen											
182	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.575.400,00	11.575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.575.400,00	11.575.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
183	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	40.279.580,00	33.799.580,00	212.009.720,00	221.592.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.289.300,00	255.392.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
184	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	408.786.200,00	408.786.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.786.200,00	408.786.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
185	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.970.300,00	3.720.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970.300,00	3.720.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
186	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
187	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	53.836.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836.000,00	4.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai SOP	100 Persen											
188	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	56.126.200,00	56.126.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.126.200,00	56.126.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
189	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	850.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100 persen											
190	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.082.000,00	5.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082.000,00	5.082.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
191	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	780.000.000,00	780.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000.000,00	780.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
192	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.113.439.612,00	983.217.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.439.612,00	983.217.972,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100 persen											
193	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800.000,00	40.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
194	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	59 Unit	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
195	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108 Unit	532.441.100,00	389.841.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.441.100,00	389.841.100,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
196	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	492.000.000,00	492.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000.000,00	492.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	89 Nilai											
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan pengadaan sediaan farmasi, bahan laboratorium, dan alkes yang diadakan	1 Laporan											
197	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen	360.783.000,00	360.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.783.000,00	360.783.000,00	Pajak Rokok Pajak Rokok
198	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	4.490.490.960,00	4.392.453.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.490.960,00	4.392.453.430,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi Pajak Rokok DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi Pajak Rokok
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah produk obat dan bahan obat tradisional yang diproduksi	9 Produk											
199	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2 Dokumen	1.140.277.494,00	860.438.464,00	38.498.300,00	23.061.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.775.794,00	883.499.664,00	Pajak Rokok Pajak Rokok
		Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai											
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrai umum sesuai SOP	100 persen											
200	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0,00	320.930.850,00	0,00	885.688.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.619.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	71.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai SOP	100 persen											
202	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
203	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	0,00	96.970.000,00	0,00	120.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.865.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
204	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100 persen											
205	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0,00	325.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
206	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	586.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.753.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP	100 persen											
207	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	0,00	174.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
208	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	127 Unit	0,00	271.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
209	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	0,00	380.000.000,00	0,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSU Dharma Yadnya	80 Nilai											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
210	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0,00	23.864.885.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.864.885.624,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	89 Nilai											
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit	1 Laporan											
211	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	38 Unit	0,00	831.470.482,00	0,00	1.112.792.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.262.582,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
212	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	0,00	3.601.134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601.134.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan	76 persen											
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti pelatihan	100 %											
213	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	4 Orang	0,00	55.199.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.199.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Peralatan dan Pengujian													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Peralatan	85 Nilai											
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-											
214	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.782.000,00	11.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.782.000,00	11.782.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
215	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	20.930.200,00	20.930.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.930.200,00	20.930.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
216	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
217	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.638.700,00	4.638.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638.700,00	4.638.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
218	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.446.000,00	4.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446.000,00	4.446.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
219	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
220	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	11.520.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520.000,00	5.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan											
221	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	65 Paket	0,00	0,00	70.010.800,00	66.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.010.800,00	66.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
222	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	51.126.400,00	47.615.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.126.400,00	47.615.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	1 Tahun											
223	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.193.200,00	1.193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.200,00	1.193.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
224	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
225	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	1 Tahun											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
226	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	329.075.880,00	263.965.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.075.880,00	263.965.060,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
227	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	23.960.000,00	23.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960.000,00	23.960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
228	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	349.521.050,00	290.921.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.521.050,00	290.921.312,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat	25.9 Persen											
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang- undangan jasa konstruksi	4 Kegiatan											
229	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota													
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	12 Paket Pekerjaan	855.776.610,00	596.977.855,00	2.018.000.000,00	2.018.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.776.610,00	2.614.977.855,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengelolaan Air Minum													
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak	95.5 %											
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan	5 Unit											
230	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	5 Unit	33.763.210.452,00	31.712.219.622,00	7.506.500.000,00	11.506.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.269.710.452,00	43.218.719.622,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD
		UPTD Pengelolaan Air Limbah													
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah	100 %											
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	1 SPALD											
231	1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara	1 Unit	12.076.373.000,00	13.855.072.150,00	2.360.000.000,00	4.485.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436.373.000,00	18.340.072.150,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85 Nilai											
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	14 Dokumen											
232	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	373.006.372,00	242.784.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.006.372,00	242.784.732,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
233	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	354.358.232,00	208.609.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.358.232,00	208.609.412,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %											
234	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	178 Orang/ Bulan	50.066.016.070,20	41.433.492.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.066.016.070,20	41.433.492.915,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 % 100 %											
235	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.172.600,00	22.172.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.172.600,00	22.172.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
236	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	57.485.000,00	57.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.485.000,00	57.485.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
237	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.820.120,00	50.820.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820.120,00	50.820.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
238	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	66.734.000,00	66.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.734.000,00	66.734.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
239	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	15.816.000,00	15.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.816.000,00	15.816.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
240	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	52.250.000,00	52.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250.000,00	52.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
241	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	458.880.000,00	863.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.880.000,00	863.563.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan											
242	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	82.638.800,00	82.638.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.638.800,00	82.638.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
243	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	12.960.000,00	12.960.000,00	449.282.500,00	449.282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.242.500,00	462.242.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	4 Layanan											
244	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.190.600,00	7.190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190.600,00	7.190.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
245	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	436.600.000,00	436.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.600.000,00	436.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
246	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Laporan	49.770.000,00	49.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.770.000,00	49.770.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
247	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	548.895.440,00	548.895.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.895.440,00	548.895.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	3 Layanan											
248	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	1.568.132.460,00	1.527.199.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.132.460,00	1.527.199.476,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
249	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	119 Unit	192.696.230,00	143.863.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.696.230,00	143.863.115,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
250	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	756.208.704,00	479.487.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.208.704,00	479.487.719,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	48.74 %											
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang tertangani	6 Unit											
251	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai													
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
252	1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya													
			Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.215 KM	228.593.500,00	216.563.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.593.500,00	216.563.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
253	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya													
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,16 KM	40.000.000,00	23.200.000,00	5.270.000.000,00	11.270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310.000.000,00	11.293.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
254	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya													
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	319.833.300,00	295.353.300,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.833.300,00	310.353.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
255	1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya													
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
256	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya													
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen	16.004.200,00	9.224.200,00	199.992.000,00	199.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.996.200,00	209.216.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
257	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	5 Dokumen	33.429.800,00	19.389.800,00	651.348.420,00	551.348.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.778.220,00	570.738.220,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya	14 D.I											
258	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4,981 KM	259.707.430,00	115.642.315,00	14.917.923.400,00	9.411.442.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177.630.830,00	9.527.085.215,00	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
259	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	172.972 KM	3.827.973.634,00	3.354.753.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827.973.634,00	3.354.753.009,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
260	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa													
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	9 Dokumen	1.113.317.870,00	773.083.935,00	599.450.000,00	699.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.767.870,00	1.472.533.935,00	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak	95,5 %											
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas layanan SPAM	5 SPAM											
261	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	3 Dokumen	1.868.839.454,00	1.517.285.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.839.454,00	1.517.285.649,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
262	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota													
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	15 Liter/Detik	50.009.100,00	27.773.100,00	29.515.550.155,00	29.515.550.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.565.559.255,00	29.543.323.255,00	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	92 %											
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah DomestikTerpusat	300 Rumah Tangga											
263	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	300 Rumah Tangga M ² /Hari	32.090.000,00	17.010.000,00	3.150.000.552,00	3.150.000.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182.090.552,00	3.167.010.552,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
264	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	58.946.400,00	58.946.400,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.946.400,00	258.946.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan air minum layak	75 %											
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	285 SR											
265	1.03.07.1.01.0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi													
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	285 SR	2.778.074.300,00	2.762.994.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778.074.300,00	2.762.994.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	76 %											
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik	8 Kawasan											
266	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya													
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	6 Kawasan	112.200.785.800,00	193.493.980.800,00	14.018.670.000,00	10.428.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.219.455.800,00	203.922.650.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
267	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	387.468.500,00	4.176.786.500,00	0,00	2.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.468.500,00	6.476.786.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
268	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya													
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	82.65 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	649,89 Km											
269	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi													
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
270	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan													
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	805.35 KM	140.646.000,00	79.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.646.000,00	79.206.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
271	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan													
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1,921 KM	50.400.000,00	28.800.000,00	14.711.201.205,00	23.747.843.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.761.601.205,00	23.776.643.413,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
272	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan													
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	11,35 KM	0,00	0,00	58.369.753.120,00	58.369.753.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.369.753.120,00	58.369.753.120,00	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
273	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan													
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	789,32 KM	23.950.874.776,00	23.848.378.226,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.350.874.776,00	24.248.378.226,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
274	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan													
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2,68 KM	3.600.000,00	3.600.000,00	16.416.193.732,00	106.166.330.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.419.793.732,00	106.169.930.112,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
275	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar													
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	6,23 KM	555.505.182,00	332.163.837,00	14.784.229.425,00	15.767.471.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.339.734.607,00	16.099.635.262,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
276	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	28 Dokumen	1.632.830.000,00	2.691.772.000,00	5.169.000.000,00	6.217.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801.830.000,00	8.909.202.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
277	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan													
			Panjang Jalan yang Dibangun	- KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
278	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan													
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	805.35 KM	1.839.949.608,00	1.655.604.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.949.608,00	1.655.604.788,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
279	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan													
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-											
280	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli													
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	280 Orang	907.982.222,00	770.597.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.982.222,00	770.597.107,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	0 Kegiatan											
281	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi													
			Jumlah Dokumen Data dan Infomasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan rapat pembahasan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi	5 Kegiatan											
282	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota													
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	15 Paket Pekerjaan	241.619.540,00	131.915.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.619.540,00	131.915.802,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
283	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi													
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	277.276.150,00	259.557.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.276.150,00	259.557.625,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang	94.34 %											
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	1 Perda											
284	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang													
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	90.705.400,00	36.792.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.705.400,00	36.792.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Raperda RTRW/RRTR Kabupaten/Kota yang dievaluasi	9 Dokumen											
285	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	9 Dokumen	825.581.870,00	231.192.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.581.870,00	231.192.935,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi	1 Dokumen											
286	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Laporan	370.466.750,00	114.918.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.466.750,00	114.918.425,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
287	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang													
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	165.510.600,00	39.332.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.510.600,00	39.332.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali	2 Dokumen											
288	1.03.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan													
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen	371.250.300,00	140.220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.250.300,00	140.220.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
289	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK													
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	314.261.632,00	385.439.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.261.632,00	385.439.812,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	100 %											
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan	1 Paket											
290	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus													
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	175.149.750,00	88.481.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.149.750,00	88.481.225,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
291	1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi													
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	125.033.700,00	111.749.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.033.700,00	111.749.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni kewenangan provinsi yang dibangun	1 Paket											
292	1.04.02.1.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi													
			Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1 Unit Rumah	421.690.350,00	340.301.825,00	1.135.527.580,00	725.527.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.217.930,00	1.065.829.405,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	4.89 %											
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tertanganinya luas kawasan kumuh kewenangan provinsi	6.77 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
293	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha													
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	30 Unit Rumah	1.579.678.300,00	5.552.140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.678.300,00	5.552.140.100,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
294	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha													
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	1.98 Ha	1.026.320.000,00	991.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.320.000,00	991.436.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU	71 %											
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman	7.82 %											
295	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen	15.718.400,00	358.918.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.718.400,00	358.918.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
296	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman													
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	1 Lokasi	1.301.363.350,00	1.173.894.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.363.350,00	1.173.894.825,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
297	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan	53.995.000,00	71.073.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.995.000,00	71.073.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan	1.23 Ha											
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan											
298	2.10.05.1.01.0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi													
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan	75.876.000,00	5.882.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.876.000,00	5.882.758.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen redistribusi tanah yang terinventarisasi	1 Dokumen											
299	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	1 Berita Acara	86.847.700,00	23.521.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.847.700,00	23.521.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase data informasi pertanahan yang handal	50 %											
	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi	1 Dokumen											
300	2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah													
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	220.004.000,00	207.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.004.000,00	207.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Satuan Polisi Pamong Praja													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.6 Nilai											
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen											
301	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
302	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen											
303	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	24.998.328.311,00	23.004.273.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998.328.311,00	23.004.273.585,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
304	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis											
305	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.706.800,00	40.706.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.706.800,00	40.706.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
306	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	52.802.800,00	52.802.800,00	498.633.800,00	491.487.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.436.600,00	544.290.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
307	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	106.033.390,00	106.033.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.033.390,00	106.033.390,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
308	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.301.900,00	12.301.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.301.900,00	12.301.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
309	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	147.505.000,00	160.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.505.000,00	160.391.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket											
310	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
311	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0,00	0,00	103.985.300,00	103.985.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.985.300,00	103.985.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
312	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan											
313	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.998.700,00	2.998.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998.700,00	2.998.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
314	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
315	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	48.720.000,00	48.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.720.000,00	48.720.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
316	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	923.397.642,00	679.232.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.397.642,00	679.232.067,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan											
317	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	49 Unit	2.841.523.590,00	2.839.245.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841.523.590,00	2.839.245.885,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
318	1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
319	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	190.000.000,00	199.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	199.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	100 persen											
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	170 Pelangg aran											
320	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	73.554.610,00	42.720.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.554.610,00	42.720.905,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
321	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat													
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	29.999.900,00	29.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999.900,00	29.999.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
322	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	50 Unit	20.450.348.273,00	20.450.348.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450.348.273,00	20.450.348.273,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
323	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	367.849.300,00	81.949.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.849.300,00	81.949.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
324	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	19.993.200,00	19.993.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.993.200,00	19.993.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
325	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	103.555.110,00	87.277.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.555.110,00	87.277.405,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
326	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan													
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	36 laporan	4.955.245.872,00	3.648.199.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955.245.872,00	3.648.199.507,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
327	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia													
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	192 Orang	349.687.312,00	236.615.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.687.312,00	236.615.902,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindakanjuti secara yustisi dan non yustisi	195 Kasus											
328	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	99.999.900,00	12.181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999.900,00	12.181.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
329	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	1.742.662.038,00	1.233.056.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.662.038,00	1.233.056.463,00	Pungutan bagi Wisatawan Asing Pungutan bagi Wisatawan Asing
330	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan	378.984.820,00	304.669.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.984.820,00	304.669.410,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pajak Rokok
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	2 Orang											
331	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	2 Laporan	0,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPBD)	83.85 Persen											
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	100 Persen											
332	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	97.051.000,00	34.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.051.000,00	34.621.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
333	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	107.041.000,00	54.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.041.000,00	54.301.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen											
334	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	15.676.945.478,00	14.490.760.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.676.945.478,00	14.490.760.948,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur dengan kelengkapan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	1 Paket											
335	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	168.104.200,00	73.504.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.104.200,00	73.504.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen											
336	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.982.800,00	9.982.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982.800,00	9.982.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
337	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	116.047.800,00	116.047.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.047.800,00	116.047.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
338	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	86.229.424,00	86.229.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.229.424,00	86.229.424,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
339	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20.258.600,00	20.258.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.258.600,00	20.258.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
340	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
341	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	415.742.000,00	181.071.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.742.000,00	181.071.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun											
342	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	29 Unit	20.687.400,00	20.687.400,00	848.681.700,00	847.979.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.369.100,00	868.666.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen											
343	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	258.000.000,00	258.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000.000,00	258.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
344	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.186.386.448,00	1.037.609.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.386.448,00	1.037.609.398,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun											
345	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	2.287.969.800,00	2.287.969.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.969.800,00	2.287.969.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
346	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	22.380.000,00	22.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.380.000,00	22.380.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
347	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	2.272.000.000,00	2.313.504.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.000.000,00	2.413.504.724,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
348	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
349	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	79 Unit	64.810.000,00	82.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.810.000,00	82.210.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan darurat bencana Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana	100 Persen 3 Persen											
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	9 Kabupate n/Kota											
350	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)													
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturn di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	600 Orang	181.668.000,00	109.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.668.000,00	109.275.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	100 Persen											
351	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana													
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	441.354.500,00	380.586.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.354.500,00	380.586.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
352	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat dalam kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	70 Orang	69.690.300,00	8.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.690.300,00	8.175.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
353	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi													
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	184.643.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.643.000,00	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
354	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi													
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	158.436.900,00	21.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.436.900,00	21.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
355	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana													
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	80 Orang	283.594.200,00	283.594.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.594.200,00	283.594.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
356	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana													
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	145 Keluarga	100.960.000,00	40.000.000,00	299.191.400,00	299.191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.151.400,00	339.191.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
357	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana													
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahannya dalam mitigasi bencana	145 Orang	490.898.900,00	322.469.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.898.900,00	322.469.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran	9 Kabupaten/Kota											
358	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana													
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	900 Orang	752.027.200,00	752.027.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.027.200,00	752.027.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
359	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	462.156.000,00	248.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.156.000,00	248.042.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	5 Jenis											
360	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	277.076.400,00	154.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.076.400,00	154.667.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
361	1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi													
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	4 Lembaga	28.980.000,00	28.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.980.000,00	28.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
362	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi													
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	30 Orang	180.802.000,00	103.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.802.000,00	103.478.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
363	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah													
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	438.317.500,00	208.097.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.317.500,00	208.097.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
364	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana													
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	76.490.000,00	13.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.490.000,00	13.590.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
365	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	9 kabupaten /kota	176.818.100,00	89.756.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.818.100,00	89.756.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengendalian Bencana Daerah													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPBD)	83,85 Persen											
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
366	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.846.800,00	16.846.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.846.800,00	16.846.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
367	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	25.992.300,00	25.992.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.992.300,00	25.992.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
368	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun											
369	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	106 Unit	24.829.200,00	24.829.200,00	1.623.900.800,00	1.623.867.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.730.000,00	1.648.697.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen											
370	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
371	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.124.078.904,00	799.108.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.078.904,00	799.108.674,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun											
372	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	140.800.000,00	140.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800.000,00	140.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
373	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
374	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	118 Unit	312.657.600,00	312.657.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.657.600,00	312.657.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan darurat bencana Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana	100 Persen 3 Persen											
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	100 Persen											
375	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	953.192.000,00	751.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.192.000,00	751.322.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
376	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana													
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	70 Orang	212.209.900,00	209.259.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.209.900,00	209.259.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	5 Jenis											
377	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan													
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	677.060.000,00	602.680.000,00	2.772.940.069,00	2.772.940.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000.069,00	3.375.620.069,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A Nilai											
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase layanan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100 persen											
378	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	27.907.600,00	5.717.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.907.600,00	5.717.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
379	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.952.200,00	4.952.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952.200,00	4.952.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
380	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.004.800,00	24.234.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.004.800,00	24.234.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 persen											
381	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148 Orang/Bulan	20.681.909.121,00	18.959.955.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.681.909.121,00	18.959.955.419,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia	100 persen											
382	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.508.200,00	7.508.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508.200,00	7.508.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
383	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	0,00	79.649.600,00	140.288.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.649.600,00	140.288.640,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
384	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	96.022.700,00	96.022.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.022.700,00	96.022.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
385	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.647.200,00	5.647.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.647.200,00	5.647.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
386	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.660.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00	11.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
387	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	172.163.000,00	87.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.163.000,00	87.505.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia	100 persen											
388	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
389	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	488.462.484,00	488.462.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.462.484,00	488.462.484,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 persen											
390	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	1.175.080.364,00	1.189.080.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.080.364,00	1.189.080.364,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
391	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	50.000.000,00	0,00	1.695.930.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.930.825,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
392	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	1.155.808.038,00	787.709.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.808.038,00	787.709.741,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PMKS	5.45 Persen											
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase lembaga yang meningkat pemahamannya mengenai kebijakan pengelolaan sumber dana sosial	100 persen											
393	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 Dokumen	3.484.600,00	3.484.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484.600,00	3.484.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah masyarakat dan lembaga yang memberikan pendampingan dan bantuan sosial	57 Orang											
394	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	57 Orang	112.148.500,00	78.398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.148.500,00	78.398.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
395	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1 Lembaga	0,00	41.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.310.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100 persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	15 Orang											
396	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal													
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	19.65 persen											
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	868 Orang											
397	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	55 Orang	28.624.600,00	57.784.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.624.600,00	57.784.600,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
398	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	20 Orang	30.024.300,00	120.325.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.024.300,00	120.325.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
399	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	30 Orang	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
400	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial													
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	580 Orang	220.000.000,00	155.516.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	155.516.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	837 Orang											
401	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	722 Orang	403.782.600,00	600.647.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.782.600,00	600.647.100,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
402	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial													
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40 Orang	236.941.200,00	226.861.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.941.200,00	226.861.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
403	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	30 Orang	38.120.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.120.000,00	12.960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	731 Orang											
404	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	321 Orang	203.812.500,00	151.012.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.812.500,00	151.012.500,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
405	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial													
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	260 Orang	24.500.800,00	14.352.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.800,00	14.352.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
406	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang	44.970.600,00	30.570.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.970.600,00	30.570.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
407	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan													
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	30 Orang	272.890.100,00	260.890.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.890.100,00	260.890.100,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	430 Orang											
408	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	430 Orang	19.999.400,00	19.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999.400,00	19.999.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
409	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal													
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	430 Orang	164.120.000,00	158.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.120.000,00	158.840.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	0.04 persen											
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah pengangkatan anak yang diproses sesuai prosedur	20 orang											
410	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI													
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	20 Orang	17.136.600,00	17.136.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136.600,00	17.136.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin	292 keluarga											
411	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	192 Keluarga	119.791.100,00	29.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.791.100,00	29.142.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
412	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	100 Keluarga	5.640.000,00	9.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640.000,00	9.480.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100 persen											
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana yang terfasilitasi	720 Orang											
413	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi													
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	2 Unit	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
414	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 Orang	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
415	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial													
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	620 Orang	344.931.800,00	335.331.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.931.800,00	335.331.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Penanganan TMP sesuai standar	100 Persen											
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1 TMP											
416	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi													
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	898 Makam	309.258.400,00	329.238.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.258.400,00	329.238.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG	100 Persen											
	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	40 Lembaga											
417	2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi													
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	100 Orang	37.634.200,00	37.085.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.634.200,00	37.085.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapatkan sosialisasi, advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuanBidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	47 Lembaga											
418	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi													
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	250 Orang	77.333.500,00	132.283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.333.500,00	132.283.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan korban kekerasan	11.89 Nilai											
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan	4 Dokumen											
419	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	59.546.100,00	27.906.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.546.100,00	27.906.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen advokasi, pendampingan, dan penguatan jejaring antar lembaga	1 Dokumen											
420	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	73.14 Nilai											
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapat advokasi dan pendampingan	5 Lembaga											
421	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	45 Orang	11.878.600,00	9.958.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.878.600,00	9.958.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah	35 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Data Gender dan Anak yang valid dan dimanfaatkan	2 Dokumen											
422	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi													
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	9.996.400,00	2.732.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996.400,00	2.732.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)	76.20 Nilai											
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA	20 Lembaga											
423	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi													
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	20 perangkat daerah	45.325.700,00	36.674.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.325.700,00	36.674.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi, KIE, dan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	2 Dokumen											
424	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi													
			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	200 Orang	650.611.600,00	648.691.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.611.600,00	648.691.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
425	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota													
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	4 Kegiatan	121.145.600,00	95.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.145.600,00	95.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan	1.28 Nilai											
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga	1 Laporan											
426	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi													
			Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	19.743.600,00	13.743.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.743.600,00	13.743.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Sosial													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A Nilai											
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia	100 persen											
427	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.813.400,00	9.813.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813.400,00	9.813.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
428	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	169.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.028.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
429	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	159.941.800,00	159.941.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.941.800,00	159.941.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
430	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	17.415.000,00	3.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.415.000,00	3.015.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia	100 persen											
431	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	201.100.000,00	216.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.100.000,00	216.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
432	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	337.221.344,00	337.221.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.221.344,00	337.221.344,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia	100 persen											
433	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	278.322.984,00	263.322.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.322.984,00	263.322.984,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
434	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	3.454.397.000,00	3.284.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654.397.000,00	3.484.397.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
435	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.136.217.130,00	690.208.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.217.130,00	690.208.013,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	19.65 persen											
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	827 Orang											
436	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan													
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	45 Orang	91.401.500,00	91.401.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.401.500,00	91.401.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
437	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	45 Orang	1.478.250.000,00	1.478.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.250.000,00	1.478.250.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
438	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang													
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	45 Orang	89.750.000,00	89.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.750.000,00	89.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
439	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	45 Orang	21.680.300,00	21.680.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680.300,00	21.680.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
440	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari													
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	45 Orang	125.759.400,00	125.759.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.759.400,00	125.759.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
441	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	45 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
442	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Orang	21.600.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00	9.120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	731 Orang											
443	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	70 Orang	996.450.000,00	996.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.450.000,00	996.450.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
444	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang													
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	70 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
445	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	70 Orang	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
446	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari													
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	70 Orang	164.987.000,00	164.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.987.000,00	164.987.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
447	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	13.920.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920.000,00	6.720.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
448	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan													
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
		UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD PPA)	A Nilai											
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia	100 persen											
449	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.528.800,00	1.528.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.800,00	1.528.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
450	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	0,00	26.266.900,00	26.266.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.266.900,00	26.266.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
451	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	43.340.000,00	19.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.340.000,00	19.932.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia	100 persen											
452	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
453	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	129.131.492,00	129.131.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.131.492,00	129.131.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
454	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	41.345.692,00	83.510.884,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.345.692,00	183.510.884,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
455	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	387.381.702,00	230.933.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.381.702,00	230.933.197,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan korban kekerasan	11.89 Nilai											
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan	18 Dokumen											
456	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	18 Dokumen	127.407.200,00	127.407.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.407.200,00	127.407.200,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tahun layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar	1 Tahun											
457	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	80 Orang	7.680.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00	3.360.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
458	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	80 Layanan	246.556.000,00	246.556.000,00	4.115.256.000,00	4.115.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361.812.000,00	4.361.812.000,00	DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan	1.28 Nilai											
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga	4 Laporan											
459	2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	4.499.000,00	2.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.000,00	2.099.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
460	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan													
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	100 Orang	69.018.000,00	69.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.018.000,00	69.018.000,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
		UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD, Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)	86.82 Nilai											
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen											
461	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.252.600,00	3.252.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252.600,00	3.252.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
462	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.117.700,00	6.117.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117.700,00	6.117.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
463	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.899.394,00	12.899.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.899.394,00	12.899.394,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
464	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	986.500,00	986.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.500,00	986.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
465	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
466	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	12.298.000,00	6.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	6.280.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen											
467	2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	28.000.000,00	45.734.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	45.734.260,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen											
468	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
469	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.728.560,00	233.489.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.728.560,00	233.489.192,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen											
470	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	80.770.000,00	62.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.770.000,00	62.770.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
471	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	35.131.673,00	35.131.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.131.673,00	35.131.673,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
472	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	273.550.034,00	192.161.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.550.034,00	192.161.509,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	75 Persen											
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	32 Orang											
473	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	32 Orang	256.350.000,00	260.122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.350.000,00	260.122.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja)	86.82 Nilai											
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen											
474	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.980.300,00	4.980.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980.300,00	4.980.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
475	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.896.400,00	7.896.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.896.400,00	7.896.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
476	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.944.274,00	14.944.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.944.274,00	14.944.274,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
477	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.884.000,00	2.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884.000,00	2.884.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen											
478	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	957.700,00	957.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.700,00	957.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
479	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
480	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	102.839.896,00	119.220.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.839.896,00	119.220.212,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen											
481	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	129.559.904,00	129.566.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.559.904,00	129.566.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
482	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
483	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit	268.692.636,00	236.137.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.692.636,00	236.137.226,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3	100 Persen											
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	90 Perusahaan											
484	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan													
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	90 Perusahaan	415.850.050,00	406.250.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.850.050,00	406.250.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)	86.82 Nilai											
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tereleseaikan Tepat Waktu	100 Persen											
485	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang/ Bulan	30.920.989.502,00	31.929.952.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.920.989.502,00	31.929.952.568,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Retribusi Jasa Usaha Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Retribusi Jasa Usaha Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen											
486	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.992.900,00	14.992.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992.900,00	14.992.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
487	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	41.179.800,00	41.179.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.179.800,00	41.179.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
488	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.133.994,00	65.133.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.133.994,00	65.133.994,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
489	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.124.600,00	15.124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.124.600,00	15.124.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
490	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.614.000,00	8.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614.000,00	8.614.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
491	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
492	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	167.104.000,00	85.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.104.000,00	85.758.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen											
493	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	116.064.000,00	106.276.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.064.000,00	106.276.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen											
494	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.873.100,00	2.873.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.100,00	2.873.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
495	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	384.000.000,00	394.053.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000.000,00	394.053.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
496	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	626.571.323,00	741.404.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.571.323,00	741.404.467,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen											
497	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	741.917.508,00	755.917.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.917.508,00	755.917.508,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
498	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	213.265.968,00	213.265.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.265.968,00	213.265.968,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
499	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	82 Unit	933.971.742,00	540.229.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.971.742,00	540.229.117,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	34 Persen											
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	30 Orang											
500	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	30 Dokumen	30.997.600,00	30.997.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.997.600,00	30.997.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	34 Persen											
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitas bekerja/ berwirausaha	20 Orang											
501	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	66.663.300,00	65.223.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.663.300,00	65.223.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	270 Orang											
502	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)													
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	270 Orang	36.313.800,00	33.913.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.313.800,00	33.913.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	11.97 Persen											
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
503	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	9 Perkara	5.566.000,00	5.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566.000,00	5.566.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan Jumlah rohaniwan yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan	2 Kep Gub 32273 Orang											
504	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)													
			Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	25.775.000,00	25.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.775.000,00	25.775.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
505	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)													
			Jumlah penetapan UMK	1 Surat Keputusan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
506	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	32273 Orang	6.927.573.000,00	1.711.034.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.927.573.000,00	1.711.034.850,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos	100 Persen											
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja	40 Perusahaan											
507	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan													
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	40 Perusahaan	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL													
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	65.00 Persen											
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	65.00 Persen											
508	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	8.000.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	4.160.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	61.00 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan	15 Dokumen											
509	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut													
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	15 Dokumen	12.500.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	10.100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	75 MW											
	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah	4.8 Persen											
510	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi													
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	94.999.500,00	61.825.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.999.500,00	61.825.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD	100 Persen											
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target	100 Persen											
511	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi													
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	24.884.800,00	24.884.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.884.800,00	24.884.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target	100 Persen											
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	100 Persen											
512	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	1 Dokumen	353.619.030,00	204.017.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.619.030,00	204.017.715,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	100 Persen											
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	81 Persen											
513	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	236.063.720,00	122.686.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.063.720,00	122.686.310,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.85 Nilai											
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	0.12 Persen											
514	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	88.455.000,00	15.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.455.000,00	15.715.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
515	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	263.205.012,00	157.209.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.205.012,00	157.209.602,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 Persen											
516	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/ Bulan	12.823.823.571,00	11.578.483.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823.823.571,00	11.578.483.540,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
517	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	128.066.130,00	104.433.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.066.130,00	104.433.015,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum	12 Bulan											
518	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.992.400,00	5.992.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992.400,00	5.992.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
519	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.523.100,00	25.523.100,00	0,00	66.263.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.523.100,00	91.786.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
520	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	75.738.750,00	75.738.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.738.750,00	75.738.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
521	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.048.100,00	6.048.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048.100,00	6.048.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
522	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.626.600,00	4.626.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626.600,00	4.626.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
523	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.350.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	3.510.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
524	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	254.624.000,00	122.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.624.000,00	122.264.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100 Persen											
525	2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.439.600,00	6.439.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439.600,00	6.439.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan	100 Persen											
526	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	174.800.000,00	174.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.800.000,00	174.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
527	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	515.870.594,00	434.482.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.870.594,00	434.482.069,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100 Persen											
528	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	1.098.383.428,00	1.151.383.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.383.428,00	1.151.383.428,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
529	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	99.810.000,00	108.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.810.000,00	108.810.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah desa yang mengalami peningkatan PADesa	29 Desa											
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan	4.56 Persen											
530	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	135.878.612,00	91.323.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.878.612,00	91.323.202,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa cepat berkembang	93.87 Persen											
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa	93.87 Persen											
531	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	187.162.830,00	95.504.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.162.830,00	95.504.715,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
532	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	441.492.840,00	328.910.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.492.840,00	328.910.020,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
533	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	37.595.700,00	16.280.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.595.700,00	16.280.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	99.69 Persen											
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	100 Persen											
534	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1500 Unit	141.746.520,00	2.018.805.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.746.520,00	2.018.805.710,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
535	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	189.354.940,00	99.284.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.354.940,00	99.284.120,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
536	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	585.557.120,00	265.604.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.557.120,00	265.604.710,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
537	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	4.424.528.080,00	8.505.090.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424.528.080,00	8.505.090.227,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan keluarga berencana	4 Sektor											
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali	1351 Orang											
538	2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana													
			Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	9 Daerah	199.955.000,00	199.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.955.000,00	199.955.000,00	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
539	2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal													
			Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	1 Dokumen	478.838.860,00	274.756.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.838.860,00	274.756.630,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Perhubungan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,90 Nilai											
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen											
540	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	24.236.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.236.000,00	12.200.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
541	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	34.643.000,00	25.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.643.000,00	25.967.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen											
542	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/ Bulan	24.619.225.316,00	25.801.722.215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.619.225.316,00	25.801.722.215,40	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
543	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	15.514.000,00	42.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.514.000,00	42.964.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun											
544	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.993.800,00	6.993.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993.800,00	6.993.800,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
545	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	381.258.300,00	388.743.994,00	614.776.540,00	350.727.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.034.840,00	739.471.694,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
546	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600.000,00	75.600.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
547	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.253.700,00	9.253.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253.700,00	9.253.700,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
548	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	938.788.000,00	461.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.788.000,00	461.086.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun											
549	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.000.000.000,00	1.922.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.922.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
550	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	168.273.400,00	72.849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.273.400,00	72.849.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun											
551	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00	4.710.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
552	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
553	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	342.775.436,00	342.775.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.775.436,00	342.775.436,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun											
554	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	904.767.984,00	918.767.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.767.984,00	918.767.984,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
555	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	73.770.000,00	73.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.770.000,00	73.770.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
556	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1.130.374.168,00	921.086.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.374.168,00	921.086.298,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas layanan angkutan darat	0,88 Rasio											
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan 1 Laporan											
557	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi													
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	311.703.542,00	216.395.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.703.542,00	216.395.017,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
558	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi													
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	94.844.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.844.000,00	22.500.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan 1 Laporan											
559	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin													
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3 Laporan	529.972.000,00	66.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.972.000,00	66.726.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
560	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin													
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	3 Laporan	14.880.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880.000,00	7.200.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	1 Dokumen											
561	2.15.02.1.10.0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	301.664.400,00	70.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.664.400,00	70.876.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	380 Unit											
562	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	380 Unit	411.437.370,00	363.091.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.437.370,00	363.091.435,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Aksesibilitas Pelayaran	80 Persen											
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Sangsit	1 Laporan											
563	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional													
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	644.638.650,00	527.945.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.638.650,00	527.945.725,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase lintasan kereta api yang terbangun	35 Persen											
	2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Pra Studi Kelayakan Angkutan Umum Massal Berbasis Kereta Api Lintasan Canggü-Mengwi	1 Dokumen											
564	2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian													
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	646.933.460,00	501.276.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.933.460,00	501.276.230,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		UPTD Pusat Pengendalian LLAJ													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,90 Nilai											
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket											
565	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.244.400,00	4.244.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244.400,00	4.244.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
566	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.924.500,00	9.924.500,00	143.228.800,00	61.063.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.153.300,00	70.987.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
567	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
568	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	222.164.000,00	114.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.164.000,00	114.346.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan											
569	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.193.200,00	1.193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.200,00	1.193.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
570	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	207.660.000,00	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.660.000,00	57.860.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
571	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	42.765.792,00	42.765.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.765.792,00	42.765.792,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit 12 Unit											
572	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	167.299.600,00	167.299.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.299.600,00	167.299.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
573	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18.480.000,00	18.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480.000,00	18.480.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	66 Persen											
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit											
574	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit	596.800.000,00	596.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.800.000,00	596.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
575	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi													
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1.299.151.218,00	892.208.593,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.151.218,00	1.192.208.593,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,90 Nilai											
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan yang tersedia Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia Jumlah Komponen instalasi Listrik yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas yang tersedia	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun											
576	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	915.400,00	915.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.400,00	915.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
577	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.440.440,00	27.440.440,00	121.149.520,00	121.149.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.589.960,00	148.589.960,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
578	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.324.588,00	20.324.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.324.588,00	20.324.588,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
579	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.876.000,00	9.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876.000,00	9.876.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
580	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
581	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	54.491.000,00	31.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.491.000,00	31.633.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah gedung kantor yang tersedia Jumlah mebel yang tersedia	2 Unit 3 Paket											
582	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	0,00	0,00	23.685.000,00	23.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.685.000,00	23.685.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia Jumlah jasa pelayanan umum kantor (jasa kebersihan) yang tersedia Jumlah jasa surat menyurat berupa materai yang tersedia	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun											
583	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
584	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300.000,00	33.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
585	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40.910.892,00	40.910.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.910.892,00	40.910.892,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan AC, Laptop, PC dan printer yang tersedia Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas, tenaga administrasi, tenaga supir, pajak kendaraan yang tersedia	1 Tahun 1 Tahun											
586	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	343.638.132,00	248.677.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.638.132,00	248.677.312,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
587	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18.140.000,00	18.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140.000,00	18.140.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	83 Indeks											
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA	7332 RIT											
588	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	85 Unit	7.938.004.159,00	65.065.269.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938.004.159,00	65.065.269.141,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		UPTD Perlengkapan Jalan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,90 Nilai											
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan 1 Paket											
589	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.276.800,00	5.276.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276.800,00	5.276.800,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
590	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	34.066.400,00	16.966.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.066.400,00	16.966.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit											
591	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	100.650.800,00	60.454.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.650.800,00	60.454.080,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2 Unit 16 Unit											
592	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	150.654.492,00	150.654.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.654.492,00	150.654.492,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
593	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	11.160.000,00	9.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160.000,00	9.050.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik	43,75 Persen											
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah perlengkapan jalan di jalan provinsi yang tersedia Jumlah perlengkapan jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	450 Unit 700 Unit											
594	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi													
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	313 Unit	2.008.551.820,00	1.926.738.410,00	495.443.200,00	659.443.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.995.020,00	2.586.181.610,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
595	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	246 Unit	944.221.240,00	840.412.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.221.240,00	840.412.420,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,90 Nilai											
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang tersedia Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Yang Tersedia Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Paket 1 Paket 1 Tahun 1 Paket											
596	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.401.700,00	6.401.700,00	71.919.356,00	50.735.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.321.056,00	57.137.660,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
597	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
598	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	347.493.444,00	210.479.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.493.444,00	210.479.214,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel yang Tersedia Jumlah Sarana Prasarana Pendukung yang Tersedia	1 Paket 1 Paket											
599	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	16.130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.130.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan	1 Paket											
600	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	486.700,00	486.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.700,00	486.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara Jumlah Sarana Prasarana Pendukung yang Tersedia	2 Unit 1 Paket 1 Paket											
601	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	120.984.000,00	120.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.984.000,00	120.984.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
602	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50 Persen											
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional yang tersedia	19 Laporan											
603	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional													
			Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	19 Laporan	139.540.200,00	56.582.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.540.200,00	56.582.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DISKOMINFOS)	82.80 Nilai											
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	15 Dokumen											
604	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	67.685.700,00	18.173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.685.700,00	18.173.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
605	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	16.290.300,00	13.890.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290.300,00	13.890.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75 Dokumen											
606	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216 Orang/ Bulan	25.526.326.517,00	24.255.027.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.526.326.517,00	24.255.027.824,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
607	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	1.445.301.700,00	3.010.321.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.301.700,00	3.010.321.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 bulan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
608	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.443.000,00	15.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.443.000,00	15.443.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
609	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	42.914.800,00	42.914.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.914.800,00	42.914.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
610	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500.000,00	87.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
611	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.670.400,00	13.670.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670.400,00	13.670.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
612	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7649 Dokumen	31.522.600,00	31.522.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.522.600,00	31.522.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
613	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.630.000,00	12.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630.000,00	12.630.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
614	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	683.978.000,00	289.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.978.000,00	289.346.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	3 Paket											
615	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	0,00	0,00	199.761.000,00	199.037.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.761.000,00	199.037.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
616	2.16.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	580.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
617	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	29 Unit	0,00	0,00	697.980.340,00	688.390.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.980.340,00	688.390.980,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 bulan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
618	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.998.700,00	2.998.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998.700,00	2.998.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
619	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	385.000.000,00	418.943.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000.000,00	418.943.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
620	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	674 Unit											
621	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	2.151.128.888,00	2.153.928.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.128.888,00	2.153.928.888,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
622	2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	6.400.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	3.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
623	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	99.490.000,00	99.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.490.000,00	99.490.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
624	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1.164.773.120,00	781.886.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.773.120,00	781.886.036,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
625	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	87.180.000,00	86.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.180.000,00	86.180.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi yang disebarluaskan	94.10 persen											
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	83.00 Indeks											
626	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten													
			Jumlah Konten Informasi Publik	120 Konten	1.256.984.130,00	882.999.015,00	124.658.650,00	124.658.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.642.780,00	1.007.657.665,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
627	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi													
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	90 Persentase	1.255.049.782,00	626.898.437,00	228.951.500,00	228.951.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.001.282,00	855.849.937,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
628	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik													
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	1.687.524.460,00	1.618.158.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.524.460,00	1.618.158.099,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
629	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat													
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	6 Komunitas	2.373.117.170,00	2.195.669.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373.117.170,00	2.195.669.235,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
630	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik													
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	225 Permohonan	1.357.171.032,00	1.223.294.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.171.032,00	1.223.294.212,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
631	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik													
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	342.520.420,00	271.679.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.520.420,00	271.679.010,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
632	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik													
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	100 Media	3.936.233.828,00	2.902.153.548,00	46.862.200,00	46.862.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983.096.028,00	2.949.015.748,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Teknologi Informatika	93.10 %											
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	100 persen											
633	2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis													
			Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	2 Dokumen	2.935.189.600,00	2.588.539.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935.189.600,00	2.588.539.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
634	2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah													
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	2 Dokumen	1.338.598.202,00	3.533.566.500,00	296.168.512.120,00	154.415.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.507.110.322,00	157.949.018.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
635	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi													
			Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	29 perangkat daerah	16.911.602.192,00	16.423.350.100,00	1.555.000.000,00	1.855.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.466.602.192,00	18.278.810.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	4.20 Nilai											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi	11 Sektor											
636	2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral													
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 Orang	138.351.510,00	92.437.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.351.510,00	92.437.805,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
637	2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral													
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	142.417.110,00	98.217.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.417.110,00	98.217.405,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
638	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia													
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	2 Dokumen	150.703.020,00	91.192.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.703.020,00	91.192.610,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Evalaksan	76 Nilai											
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	29 OPD											
639	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi													
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dokumen	34.024.900,00	34.024.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.024.900,00	34.024.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
640	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi													
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	172.677.410,00	121.620.000,00	0,00	29.602.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.677.410,00	151.222.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
641	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	10.312.800,00	10.312.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.312.800,00	10.312.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
642	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	29 Perangkat Daerah	72.312.000,00	64.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.312.000,00	64.495.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	29 Perangkat Daerah											
643	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	29 Perangkat Daerah	121.385.210,00	64.102.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.385.210,00	64.102.505,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Teknologi Informatika	93.10 %											
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	100 persen											
644	2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	25 Aplikasi	3.963.388.200,00	3.769.568.200,00	329.830.050,00	329.830.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293.218.250,00	4.099.398.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
645	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda													
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2 Laporan	3.285.496.900,00	3.080.031.900,00	564.390.340,00	334.390.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849.887.240,00	3.414.422.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Teknologi Informatika	93.10 %											
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	100 Persen											
646	2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas													
			Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	9 unit	11.514.213.894,00	10.003.000.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.514.213.894,00	10.003.000.592,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
647	2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi													
			Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	9 kabupaten /kota	3.110.693.000,00	2.585.446.000,00	3.517.540.150,00	4.538.632.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628.233.150,00	7.124.078.558,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	82.38 Nilai											
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen											
648	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	142.177.312,00	102.343.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.177.312,00	102.343.902,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
649	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.184.900,00	8.264.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184.900,00	8.264.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen											
650	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/ Bulan	16.437.269.734,00	13.165.169.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.437.269.734,00	13.165.169.179,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen											
651	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen											
652	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.997.800,00	10.997.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.997.800,00	10.997.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
653	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	48.405.800,00	48.405.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.405.800,00	48.405.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
654	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	76.071.194,00	76.071.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.071.194,00	76.071.194,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
655	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
656	2.17.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
657	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	59.753.000,00	49.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.753.000,00	49.573.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
658	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	700.452.200,00	683.055.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.452.200,00	683.055.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen											
659	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.993.900,00	1.993.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.900,00	1.993.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
660	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	246.000.000,00	246.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000.000,00	246.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
661	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	895.259.256,00	700.216.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.259.256,00	700.216.668,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen											
662	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	797.265.444,00	788.476.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.265.444,00	788.476.657,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
663	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	49.920.000,00	49.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.920.000,00	49.920.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
664	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	184.938.368,00	197.538.368,00	272.000.000,00	272.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.938.368,00	469.538.368,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP	3.70 Persen											
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	10 Unit Usaha											
665	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	30 Unit Usaha	288.686.994,00	779.890.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.686.994,00	779.890.289,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	1 Unit Usaha											
666	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	1 Unit Usaha	19.999.600,00	9.919.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999.600,00	9.919.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	7.00 Persen											
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	90 Unit Usaha											
667	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi													
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	90 Unit Usaha	49.934.000,00	26.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.934.000,00	26.908.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	70 Unit Usaha											
668	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	70 Unit Usaha	133.498.810,00	50.489.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.498.810,00	50.489.105,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	3.30 Persen											
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	164 Unit Usaha											
669	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha													
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	84 Unit Usaha	142.110.620,00	61.553.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.110.620,00	61.553.210,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
670	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	80 Unit Usaha	49.999.600,00	26.149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999.600,00	26.149.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha	6.00 Persen											
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	205 Unit Usaha											
671	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan													
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	205 Unit Usaha	559.176.002,00	338.343.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.176.002,00	338.343.821,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
672	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan													
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	100 Orang	76.400.000,00	65.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400.000,00	65.840.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-											
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	145 Unit Usaha											
673	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi													
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	110 Unit Usaha	215.843.804,00	174.608.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.843.804,00	174.608.394,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
674	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM													
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	35 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
675	2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan													
			Wirausaha yang Difasilitasi	100 Orang	99.999.700,00	97.119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999.700,00	97.119.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
676	2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil													
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	10 Unit Usaha	50.000.000,00	46.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	46.160.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	82.38 Nilai											
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen											
677	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	699.600,00	699.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.600,00	699.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
678	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.146.100,00	13.146.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.146.100,00	13.146.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
679	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	56.904.050,00	56.904.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.904.050,00	56.904.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
680	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	999.700,00	999.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.700,00	999.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
681	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
682	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen											
683	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	989.100,00	989.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.100,00	989.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
684	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500.000,00	48.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
685	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	160.265.968,00	160.265.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.265.968,00	160.265.968,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
686	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	101.191.492,00	101.191.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.191.492,00	101.191.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
687	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
688	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	90.132.984,00	90.132.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.132.984,00	90.132.984,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi	25.00 Persen											
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	410 Orang											
689	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi													
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	710 Orang	2.615.568.416,00	4.399.123.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.568.416,00	4.399.123.302,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79 Nilai											
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	40 Dokumen											
690	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/ Bulan	15.130.595.620,00	13.871.356.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.130.595.620,00	13.871.356.811,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen											
691	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.073.400,00	5.073.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073.400,00	5.073.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
692	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	73.134.300,00	73.134.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.134.300,00	73.134.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
693	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
694	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.516.200,00	24.133.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.516.200,00	24.133.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
695	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	327.386.000,00	550.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.386.000,00	550.606.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen											
696	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.846.500,00	3.846.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846.500,00	3.846.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
697	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	152.000.000,00	152.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000.000,00	152.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
698	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.319.974.430,00	1.105.108.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.974.430,00	1.105.108.724,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	20 Unit											
699	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	1.336.436.050,00	926.700.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.436.050,00	926.700.460,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
700	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	243.307.900,00	252.887.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.307.900,00	252.887.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)	12650 Proyek											
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Kajian Peta Potensi dan Peluang Investasi Berbasis Jenis Usaha	2 Dokumen											
701	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi													
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	2 Dokumen	215.186.230,00	140.433.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.186.230,00	140.433.115,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor Yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali	33.5 Persen											
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Publikasi Promosi Penanaman Modal	2 Dokumen											
702	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	151.553.520,00	103.638.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.553.520,00	103.638.110,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 persen											
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang Terbit sesuai Kewenangan Provinsi	100 Persen											
703	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	400 Pelaku Usaha	667.234.100,00	358.765.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.234.100,00	358.765.837,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
704	2.18.04.1.01.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko													
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	151.501.640,00	76.310.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.501.640,00	76.310.820,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	12,3 Triliun											
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pemenuhan Komitmen Penanaman Modal	92 Persen											
705	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal													
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	18 Kegiatan usaha	34.560.000,00	17.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560.000,00	17.280.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
706	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	13 Kegiatan usaha	150.146.230,00	100.101.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.146.230,00	100.101.902,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
707	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	40 Pelaku Usaha	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900.000,00	38.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Informasi Penanaman Modal yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan	100 Persen											
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi	2 Dokumen											
708	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	74.790.820,00	38.395.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.790.820,00	38.395.410,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kebudayaan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Poin											
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen											
709	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	186.022.340,00	90.191.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.022.340,00	90.191.520,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
710	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	23.374.500,00	4.174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374.500,00	4.174.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Keuangan perangkat daerah	100 Persen											
711	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	849 Orang/ Bulan	59.409.471.111,00	42.422.197.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.409.471.111,00	42.422.197.777,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
712	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	559.678.506,00	492.508.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.678.506,00	492.508.571,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
713	2.22.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 Persen											
714	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26 Paket	27.085.500,00	27.085.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.085.500,00	27.085.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
715	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	0,00	331.754.660,00	1.562.007.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.754.660,00	1.562.007.227,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
716	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
717	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
718	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	22.915.200,00	22.915.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.915.200,00	22.915.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
719	2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
720	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	55.488.000,00	46.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.488.000,00	46.240.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen											
721	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.495.000,00	5.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495.000,00	5.495.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
722	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000.000,00	720.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
723	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950.000,00	24.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
724	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.104.242.068,00	926.732.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.242.068,00	926.732.698,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen											
725	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	834.287.460,00	885.787.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.287.460,00	885.787.460,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
726	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00	14.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
727	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	743.912.888,00	1.621.790.788,00	0,00	118.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.912.888,00	1.739.790.788,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Tradisi dan Warisan Budaya yang terfasilitasi dan berkembang secara berkelanjutan	5 Persen											
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2500 Orang											
728	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan													
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	20 Objek	750.509.552,00	1.267.700.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.509.552,00	1.267.700.522,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing
729	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan													
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2000 Orang	24.865.155.064,00	13.355.731.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.865.155.064,00	13.355.731.504,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	5 Persen											
730	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya													
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	320 Objek	8.948.586.970,00	15.400.739.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948.586.970,00	15.400.739.935,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing
731	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	23 Sertifikat	1.349.881.206,00	1.341.511.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.881.206,00	1.341.511.591,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	94 Lembaga											
732	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	227 Unit	10.126.210.100,00	25.467.753.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126.210.100,00	25.467.753.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5 Persen											
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	518 Lembaga											
733	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	153 Orang	483.986.700,00	1.129.837.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.986.700,00	1.129.837.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
734	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	200 Sertifikat	361.312.370,00	331.594.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.312.370,00	331.594.665,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	5 Persen											
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	2 Orang/Le mbaga											
735	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah													
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	2 Dokumen	185.453.000,00	144.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.453.000,00	144.883.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Permuseuman yang teregistrasi, terkelola, dan difungsikan	26,99 Persen											
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	3 Objek											
736	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	240.753.230,00	167.324.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.753.230,00	167.324.115,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya yang diinventarisasi	245 Objek											
737	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	11 Objek	10.355.761.876,00	274.241.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.355.761.876,00	274.241.876,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
738	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	58.388.700,00	52.108.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.388.700,00	52.108.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing
739	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	6 Objek	114.107.300,00	114.107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.107.300,00	114.107.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing
740	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya													
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	225 Orang	90.610.900,00	90.610.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.610.900,00	90.610.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Taman Budaya													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Poin											
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah pada UPTD Taman Budaya	100 Persen											
741	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	69.997.000,00	69.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.997.000,00	69.997.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
742	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	49.998.700,00	49.998.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998.700,00	49.998.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
743	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
744	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340.000,00	8.340.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
745	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	24.994.000,00	24.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.994.000,00	24.994.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen											
746	2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	42.470.000,00	42.470.000,00	0,00	199.777.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470.000,00	242.247.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen											
747	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	985.600.000,00	985.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.600.000,00	985.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
748	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	14.930.000,00	14.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930.000,00	14.930.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
749	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.147.368.058,00	772.980.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.368.058,00	772.980.843,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen											
750	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
751	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	19.480.000,00	28.480.000,00	0,00	3.491.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480.000,00	3.519.480.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
752	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	1.066.728.792,00	2.128.428.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.728.792,00	2.128.428.792,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Taman Budaya	76,61 Persen											
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memadai	2000 orang											
753	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan													
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2000 Orang	2.529.984.000,00	2.317.246.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529.984.000,00	2.317.246.600,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
754	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	4 Unit	370.516.000,00	370.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.516.000,00	370.516.000,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
		UPTD Museum Bali													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Poin											
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 Persen											
755	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	61.517.500,00	61.517.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.517.500,00	61.517.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
756	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
757	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25.472.000,00	8.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.472.000,00	8.301.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
758	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.402.000,00	5.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402.000,00	5.402.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
759	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	13.713.000,00	5.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.713.000,00	5.175.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen											
760	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	5.698.300,00	5.698.300,00	15.388.000,00	423.609.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.086.300,00	429.308.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen											
761	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.386.400,00	2.386.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386.400,00	2.386.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
762	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	206.000.000,00	256.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000.000,00	256.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
763	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	19.264.840,00	19.264.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.264.840,00	19.264.840,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
764	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.002.640.136,00	762.752.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.640.136,00	762.752.266,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen											
765	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	101.600.000,00	101.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600.000,00	101.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
766	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	38.080.000,00	32.080.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.080.000,00	157.080.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
767	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	722.444.080,00	727.560.080,00	78.665.521.933,00	9.227.715.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.387.966.013,00	9.955.275.453,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Museum Bali	76,61 Persen											
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum Bali sebagai tempat informasi Budaya Bali	25000 Orang											
768	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu													
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	700 Unit	909.890.300,00	879.170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.890.300,00	879.170.300,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
769	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum													
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10 Unit	1.609.445.400,00	1.551.494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.445.400,00	1.551.494.500,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
770	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	6 Unit	104.705.800,00	104.705.800,00	64.043.500,00	64.043.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.749.300,00	168.749.300,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Poin											
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 Persen											
771	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.995.300,00	29.995.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.995.300,00	29.995.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
772	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	53.057.000,00	53.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.057.000,00	53.057.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
773	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	51.593.100,00	51.593.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.593.100,00	51.593.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
774	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.777.400,00	6.777.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777.400,00	6.777.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
775	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
776	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen											
777	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen											
778	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.491.500,00	1.491.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.500,00	1.491.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
779	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
780	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	42.930.000,00	42.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.930.000,00	42.930.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
781	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	946.852.824,00	842.220.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.852.824,00	842.220.495,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen											
782	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	123.975.000,00	123.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.975.000,00	123.975.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
783	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	14.970.000,00	14.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970.000,00	14.970.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
784	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.002.328.024,00	2.002.328.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.328.024,00	2.002.328.024,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	78,5 Persen											
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Museum Provinsi yang memadai	51 Unit											
785	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu													
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	33 Unit	756.260.200,00	756.260.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.260.200,00	756.260.200,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
786	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10 Unit	2.087.713.200,00	2.038.410.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.713.200,00	2.038.410.200,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
787	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	8 Unit	264.832.600,00	264.832.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.832.600,00	264.832.600,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
		Dinas Pemajuan Masyarakat Adat													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-											
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen											
788	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	25.000.000,00	24.904.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	24.904.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
789	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	12.000.000,00	11.892.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.892.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di proses	44 Orang/Bulan											
790	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/Bulan	12.131.795.722,00	10.952.832.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131.795.722,00	10.952.832.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang di Proses	847 Dokumen											
791	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.934.200,00	10.934.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934.200,00	10.934.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
792	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.145.200,00	36.145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.145.200,00	36.145.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
793	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	19.243.700,00	19.243.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.243.700,00	19.243.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
794	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	414.430.000,00	276.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.430.000,00	276.192.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai	15 Unit											
795	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	9.609.840,00	9.609.840,00	257.994.240,00	255.448.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.604.080,00	265.058.683,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai	35 Laporan											
796	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	548.179.734,00	562.166.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.179.734,00	562.166.834,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	12 Laporan											
797	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	566.441.852,00	566.441.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.441.852,00	566.441.852,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
798	2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	1.617.147.396,00	1.571.631.166,00	128.700.000,00	128.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.847.396,00	1.700.331.166,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.09	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Indeks Membangun Desa Adat	0,8025 Nilai											
	2.22.09.8.01	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah Kelembagaan Desa Adat yang dibina	600 Desa Adat											
799	2.22.09.8.01.0001	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat													
			Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya	300 Desa	465.670.107.876,00	471.741.628.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.670.107.876,00	471.741.628.706,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
800	2.22.09.8.01.0002	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Produk Hukum Desa Adat	300 Dokumen	257.177.312,00	187.054.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.177.312,00	187.054.302,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.09.8.02	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	75 Desa Adat											
801	2.22.09.8.02.0001	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat													
			Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	30 Desa	100.000.000,00	65.165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	65.165.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
802	2.22.09.8.02.0002	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat													
			Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	45 Desa	270.865.706,00	463.272.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.865.706,00	463.272.491,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.09.8.03	Penyelenggaraan Desa Adat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan	6 Dokumen											
803	2.22.09.8.03.0003	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	6 Laporan	388.347.930,00	303.412.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.347.930,00	303.412.115,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kelautan dan Perikanan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	82 Nilai											
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen											
804	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	76.748.000,00	36.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.748.000,00	36.018.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	60 Dokumen											
805	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1610 Orang/ Bulan	25.447.615.889,00	25.702.348.375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.447.615.889,00	25.702.348.375,20	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Retribusi Jasa Usaha Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Retribusi Jasa Usaha
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen											
806	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.459.500,00	7.459.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.459.500,00	7.459.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
807	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	0,00	0,00	728.957.900,00	728.957.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.957.900,00	728.957.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
808	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	189.642.400,00	189.642.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.642.400,00	189.642.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
809	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	18.923.500,00	18.923.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.923.500,00	18.923.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
810	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	162.820.000,00	93.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.820.000,00	93.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen											
811	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	279.565.620,00	267.565.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.565.620,00	267.565.620,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen											
812	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.611.000,00	3.611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611.000,00	3.611.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
813	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	131.050.000,00	158.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.050.000,00	158.050.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen											
814	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	950.364.936,00	964.364.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.364.936,00	964.364.936,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
815	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	573.924.074,00	483.415.344,00	2.255.000.000,00	2.255.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.924.074,00	2.738.415.344,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
816	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	90.230.000,00	75.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.230.000,00	75.230.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	46 Persen											
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	102575.33 Ha											
817	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru													
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	12 Pelaku Usaha	34.495.000,00	17.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.495.000,00	17.475.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
818	3.25.02.1.01.0013	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi													
			Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	1 Dokumen	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	5 Kelompok											
819	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil													
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	70.101.492,00	55.796.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.101.492,00	55.796.492,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 Persen											
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	105770.02 Ton											
820	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap													
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Unit	390.850.902,00	416.024.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.850.902,00	416.024.197,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan	8500 Ton											
821	3.25.03.1.09.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT													
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	30 Dokumen	33.723.000,00	16.861.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.723.000,00	16.861.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 Persen											
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	33297.90 Ton											
822	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut													
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	171.427.500,00	159.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.427.500,00	159.720.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
823	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	27.620.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.620.000,00	16.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	3 Persen											
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	32 Pelaku Usaha											
824	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi													
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	30 Pelaku Usaha	31.268.900,00	20.708.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.268.900,00	20.708.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
825	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)													
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	40 Kelompok Masyarakat	150.240.984,00	130.082.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.240.984,00	130.082.984,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi olahan hasil perikanan Tingkat Konsumsi Ikan	2 Persen 49.65 Kg/Ka pita/Tahun											
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina	30 Unit Usaha											
826	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar													
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	30 Kegiatan	323.958.502,00	329.160.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.958.502,00	329.160.797,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	82 Nilai											
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen											
827	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.664.000,00	4.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664.000,00	4.664.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
828	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.117.200,00	7.117.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117.200,00	7.117.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
829	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
830	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.996.000,00	1.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.000,00	1.996.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen											
831	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	38.554.200,00	38.554.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.554.200,00	38.554.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen											
832	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
833	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	128.599.200,00	128.599.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.599.200,00	128.599.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen											
834	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	166.497.984,00	166.497.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.497.984,00	166.497.984,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
835	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	265.346.476,00	265.346.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.346.476,00	265.346.476,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 Persen											
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	1300000 Ekor											
836	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	824.870.604,00	792.315.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.870.604,00	792.315.194,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	82 Nilai											
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen											
837	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.433.000,00	8.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433.000,00	8.433.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
838	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
839	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen											
840	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	37.072.080,00	37.072.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.072.080,00	37.072.080,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen											
841	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.020.500,00	1.020.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.500,00	1.020.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
842	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000.000,00	117.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen											
843	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	92.232.000,00	92.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.232.000,00	92.232.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
844	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	349.457.188,00	316.901.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.457.188,00	316.901.778,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
845	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	14.780.000,00	14.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.780.000,00	14.780.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2 Persen											
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	2600 Reko mendasi											
846	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi, dan Berdaya Saing													
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	7 Kegiatan	53.241.000,00	46.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.241.000,00	46.041.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
847	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar													
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	7 Kegiatan	341.260.800,00	390.365.400,00	100.260.000,00	100.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.520.800,00	490.625.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	82 Nilai											
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen											
848	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	4.366.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
849	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.848.100,00	8.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.848.100,00	8.286.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
850	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500.000,00	41.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
851	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0,00	15.804.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.804.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen											
852	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			0	0 0	0,00	596.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
853	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen											
854	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	172.510.000,00	133.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.510.000,00	133.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
855	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	784.146.692,00	633.953.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.146.692,00	633.953.052,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi persen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	73 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	5 Kawasan											
856	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat													
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	46,838.10 Ha	50.000.000,00	44.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	44.960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelabuhan Perikanan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	82 Nilai											
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen											
857	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	26.835.900,00	26.835.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.835.900,00	26.835.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
858	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
859	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	26.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750.000,00	16.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen											
860	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	20.445.200,00	20.445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445.200,00	20.445.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen											
861	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen											
862	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	127.800.000,00	127.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.800.000,00	127.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
863	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	39.401.330,00	23.123.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.401.330,00	23.123.625,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 Persen											
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	8500 Ton											
864	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan													
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Layanan	47.699.000,00	23.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.699.000,00	23.854.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pariwisata													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISPAR)	85 Persen											
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	23 Dokumen											
865	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	122.996.812,00	90.441.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.996.812,00	90.441.402,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan	86 Dokumen											
866	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/ Bulan	13.168.970.608,00	12.603.424.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.168.970.608,00	12.603.424.810,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis											
867	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.216.600,00	7.216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216.600,00	7.216.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
868	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	53.551.900,00	57.491.200,00	274.162.200,00	564.253.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.714.100,00	621.745.088,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
869	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	69.617.494,00	69.617.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.617.494,00	69.617.494,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
870	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.882.600,00	9.882.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882.600,00	9.882.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
871	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	179.997.000,00	104.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.997.000,00	104.877.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	3 Jenis											
872	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	182.008.200,00	182.008.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.008.200,00	182.008.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
873	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	1.312.719.880,00	10.332.496.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.719.880,00	10.332.496.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3 Jenis											
874	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	551.217.000,00	577.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.217.000,00	577.947.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
875	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	313.400.000,00	341.680.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.400.000,00	501.680.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Berkualitas dan Berdaya Saing	14 Persentase											
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata yang berdaya saing	90 DTW											
876	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi													
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1 Laporan	391.935.516,00	274.174.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.935.516,00	274.174.696,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Berbasis Komunitas Lokal	1 Laporan											
877	3.26.02.1.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	1 Dokumen											
878	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi													
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	15 Lokasi	278.795.900,00	149.195.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.795.900,00	149.195.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang memperoleh standar	30 Usaha											
879	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)													
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	20 Unit Usaha	100.672.510,00	55.594.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.672.510,00	55.594.805,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
880	3.26.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata													
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	9 Laporan	280.116.230,00	144.883.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.116.230,00	144.883.115,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	16.67 Persen											
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata	23.00 Persentase											
881	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	305.544.020,00	244.390.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.544.020,00	244.390.610,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing
882	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata													
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	372.793.804,00	289.838.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.793.804,00	289.838.394,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing
883	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	5.242.262.312,00	4.360.345.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242.262.312,00	4.360.345.902,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	3 Persentase											
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Pembinaan dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	9 Kabupate n/Kota											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
884	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	24 Laporan	114.881.384,00	97.601.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.881.384,00	97.601.384,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen											
885	3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah													
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	1 Dokumen	42.486.700,00	42.486.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.486.700,00	42.486.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan	47 Persentase											
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan	235 Orang											
886	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	95 Orang	288.630.092,00	267.634.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.630.092,00	267.634.092,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing
887	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata													
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	220 Orang	301.069.504,00	217.836.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.069.504,00	217.836.094,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
888	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif													
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	62 Orang	473.422.102,00	360.606.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.422.102,00	360.606.397,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Informasi Harga Pangan Yang Terpublikasi	92 Persen											
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelompok yang menerapkan SOP mutu pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	18 Kelompok											
889	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3 Laporan	493.326.192,00	1.617.709.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.326.192,00	1.617.709.142,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2.680 Kkl/ka pita/hari											
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen ketersediaan pangan	1 Dokumen											
890	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota													
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	148.245.830,00	73.772.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.245.830,00	73.772.715,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina	166 Ton 9 LPM											
891	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	364.569.780,00	1.050.663.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.569.780,00	1.050.663.327,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	95,9 Persen											
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diuji	1 Dokumen											
892	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan													
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	145.368.130,00	84.535.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.368.130,00	84.535.015,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,60 Nilai											
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen											
893	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	469.849.162,00	296.633.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.849.162,00	296.633.227,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
894	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	301.514.152,00	188.487.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.514.152,00	188.487.922,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen											
895	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	293 Orang/ Bulan	59.247.337.822,00	51.668.380.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.247.337.822,00	51.668.380.982,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
896	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	295.899.180,00	245.687.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.899.180,00	245.687.540,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun											
897	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.263.000,00	19.263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.263.000,00	19.263.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
898	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.274.500,00	53.274.500,00	167.607.800,00	159.156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.882.300,00	212.430.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
899	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	67.003.400,00	67.003.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.003.400,00	67.003.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
900	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	19.125.000,00	19.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125.000,00	19.125.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
901	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	107.840.000,00	67.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.840.000,00	67.008.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
902	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	417.000.000,00	417.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000.000,00	417.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
903	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	296.109.662,00	341.687.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.109.662,00	341.687.236,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
904	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	58 Unit	1.845.842.822,00	1.952.286.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.842.822,00	1.952.286.888,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
905	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	742.110.364,00	593.655.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.110.364,00	593.655.609,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
906	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	314 Unit	180.800.000,00	210.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.800.000,00	210.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Penyuluran Sarana Pertanian	90 Persen											
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3 Laporan											
907	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian													
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	5.203.591.720,00	15.137.996.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203.591.720,00	15.137.996.310,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Peningkatan Mutu dan Baku Areal Komoditas Pertanian	80 Persen											
908	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan													
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	3 laporan	1.928.862.604,00	3.925.951.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.862.604,00	3.925.951.568,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya angka kelahiran ternak unggulan daerah	6000 Ekor											
909	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	3.082.285.772,00	12.043.454.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082.285.772,00	12.043.454.132,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian	15 Persen											
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Penataan Prasarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen											
910	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian													
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	977.248.752,00	543.948.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.248.752,00	543.948.422,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
911	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya													
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	153.560.140,00	1.010.261.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.560.140,00	1.010.261.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	5 Persen											
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah HPR Yang Mendapatkan Pelayanan Vaksinasi Jumlah Kontrol Populasi HPR	200720 Ekor 30000 Ekor											
912	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	9.791.667.602,00	8.882.272.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.791.667.602,00	8.882.272.553,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah pengawasan Ante Mortem dan Post Mortem	8 RPH											
913	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya													
			Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	3 Kasus	76.613.410,00	65.364.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.613.410,00	65.364.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani Berbasis Kawasan dan Produk Unggulan	60 Persen											
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian Yang Terfasilitasi Dari Dana Insentif	9 Kabupate n/Kota											
914	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian													
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	0,00	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP dan Kelompok Tani Yang Terbina	102 Kelompok/Unit											
915	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani													
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	102 Kelompok	133.073.630,00	71.280.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.073.630,00	71.280.515,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,60 Nilai											
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun											
916	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.927.800,00	3.927.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927.800,00	3.927.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
917	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.930.900,00	14.930.900,00	17.648.960,00	16.771.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.579.860,00	31.702.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
918	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
919	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	127.230.000,00	127.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.230.000,00	127.230.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
920	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	104.721.230,00	124.254.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.721.230,00	124.254.476,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
921	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	172.908.820,00	185.930.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.908.820,00	185.930.984,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
922	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	72.110.820,00	85.132.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.110.820,00	85.132.984,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
923	2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 Unit	42.060.000,00	42.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.060.000,00	42.060.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Produk Bersertifikat Organik Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	1,10 Persen 95,9 Persen											
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang Bersertifikat Organik	3 Sertifikat											
924	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan													
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5 Sertifikat	316.812.760,00	246.234.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.812.760,00	246.234.104,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
925	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	12 Dokumen	145.177.112,00	112.621.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.177.112,00	112.621.702,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	5 Persen											
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha PAH dan PSAT yang diuji Jumlah Unit Usaha PAH dan PSAT yang diuji	1000 Unit 75 Dokumen											
926	3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit													
			Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1000 Unit	233.221.240,00	150.623.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.221.240,00	150.623.335,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
927	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner													
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	75 Dokumen	299.104.820,00	213.927.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.104.820,00	213.927.505,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,60 Nilai											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun											
928	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	599.900,00	599.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.900,00	599.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
929	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.056.000,00	5.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056.000,00	5.056.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
930	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
931	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	220.520.000,00	220.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.520.000,00	220.520.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
932	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	178.320.332,00	204.364.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.320.332,00	204.364.660,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
933	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	78 Unit	232.277.312,00	245.299.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.277.312,00	245.299.476,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
934	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	561.897.642,00	408.887.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.897.642,00	408.887.215,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
935	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	148 Unit	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Terkendalinya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	82,91 Persen											
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	9 Kabupate n/Kota											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
936	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	4 Ha	423.615.100,00	342.943.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.615.100,00	342.943.450,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
937	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2 Ha	492.402.740,00	285.383.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.402.740,00	285.383.657,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
938	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan													
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	335.163.354,00	220.259.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.163.354,00	220.259.419,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,60 Nilai											
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-											
939	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.095.200,00	6.095.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095.200,00	6.095.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
940	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.126.500,00	11.126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.126.500,00	11.126.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
941	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
942	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
943	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	262.970.816,00	289.015.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.970.816,00	289.015.144,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
944	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	238.971.640,00	265.015.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.971.640,00	265.015.968,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
945	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	275.943.280,00	282.454.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.943.280,00	282.454.362,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
946	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	4.870.000,00	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870.000,00	4.870.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	0,82 Persen											
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3 Laporan											
947	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi													
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 laporan	2.030.315.210,00	1.951.140.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.315.210,00	1.951.140.851,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,60 Nilai											
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket											
948	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.197.300,00	3.197.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.300,00	3.197.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
949	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.269.200,00	7.269.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269.200,00	7.269.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
950	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
951	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135.109.000,00	135.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.109.000,00	135.109.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
952	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	72.074.020,00	85.096.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.074.020,00	85.096.184,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
953	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23 Unit	127.155.410,00	133.666.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.155.410,00	133.666.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
954	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950.000,00	19.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
955	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850.000,00	11.850.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	0,70 Persen											
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3 Jenis											
956	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih													
			Jumlah Sertifikat Benih	75 Sertifikat	330.785.372,00	197.683.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.785.372,00	197.683.732,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
957	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	120 laporan	331.592.852,00	209.912.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.592.852,00	209.912.459,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,60 Nilai											
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket											
958	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.996.900,00	1.996.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.900,00	1.996.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
959	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.998.100,00	5.998.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998.100,00	5.998.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
960	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
961	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	117.912.191,00	117.912.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.912.191,00	117.912.191,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
962	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	107.999.312,00	121.021.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.999.312,00	121.021.476,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
963	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	85.570.410,00	92.081.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.570.410,00	92.081.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
964	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	42.566.492,00	42.566.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.566.492,00	42.566.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
965	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	0,70 Persen											
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 Laporan											
966	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang													
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	37500 Batang	554.830.310,00	584.166.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.830.310,00	584.166.955,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
967	3.27.02.1.02.0011	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji													
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	5000000 Gram	662.854.730,00	703.243.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.854.730,00	703.243.365,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
968	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih													
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	3 Ton	401.042.372,00	373.483.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.042.372,00	373.483.732,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
969	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi													
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	0,75 Ton	364.569.924,00	322.247.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.569.924,00	322.247.891,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada	1 Laporan											
970	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme													
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	47.194.200,00	47.194.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.194.200,00	47.194.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik	100 Persen											
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi yang dilaksanakan	100 Persen											
971	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	104.999.800,00	101.639.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.999.800,00	101.639.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi yang dilaksanakan	100 Persen											
972	2.11.02.1.02.0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS													
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1 Dokumen	112.110.820,00	52.227.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.110.820,00	52.227.410,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan Emisi GRK Indeks kualitas air Indeks kualitas air laut Indeks kualitas udara	13.26 Persen 63.10 Nilai 69.95 Nilai 88.65 Nilai											
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	100 Persen											
973	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	157.493.600,00	70.333.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.493.600,00	70.333.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
974	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	109.960.000,00	25.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.960.000,00	25.080.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100 Persen											
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dilaksanakan	100 Persen											
975	2.11.04.1.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan													
			Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Unit	73.261.000,00	40.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.261.000,00	40.041.000,00	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase perusahaan yang difasilitasi pemenuhan ijin pengumpulan limbah B3	100 Persen											
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan	100 Persen											
976	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	58.056.300,00	37.816.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.056.300,00	37.816.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan	70 Persen											
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	100 Persen											
977	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10 Badan Usaha	19.999.700,00	10.399.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999.700,00	10.399.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	30 Persen 70 Persen											
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa Adat/Desa/Kelurahan yang dibina dan dimonitoring dalam pengelolaan sampah berbasis sumber dan dalam tata laksana pengelolaan limbah B3	9 Kab/Kota											
978	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup													
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1.117.590.230,00	1.131.077.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.590.230,00	1.131.077.115,00	Pungutan bagi Wisatawan Asing PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	35 Persen											
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan penilaian masyarakat/lembaga/pendidikan dalam PPLH	100 Persen											
979	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	20 Entitas	57.999.700,00	34.399.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.999.700,00	34.399.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan	100 Persen											
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang teregistrasi	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
980	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi													
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	1 Pengaduan	19.994.300,00	10.394.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.994.300,00	10.394.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup)	A Nilai											
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disuasn dan disampaikan tepat waktu	100 Persen											
981	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	37.694.200,00	37.694.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.694.200,00	37.694.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100 Persen											
982	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	249 Orang/ Bulan	40.168.919.046,00	38.113.997.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.168.919.046,00	38.113.997.214,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
983	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	43.679.800,00	102.479.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.679.800,00	102.479.800,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100 Persen											
984	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.097.000,00	17.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.097.000,00	17.097.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
985	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.975.000,00	47.975.000,00	0,00	314.442.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.975.000,00	362.417.312,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
986	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000.000,00	97.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
987	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350.000,00	10.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
988	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
989	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	593.922.000,00	294.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.922.000,00	294.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan	100 Persen											
990	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	196.560.000,00	208.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.560.000,00	208.560.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
991	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	413.283.344,00	413.283.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.283.344,00	413.283.344,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100 Persen											
992	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	840.290.360,00	836.290.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.290.360,00	836.290.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
993	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	44 Unit	472.289.248,00	390.056.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.289.248,00	390.056.395,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	3.16 Persen											
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	100 Persen											
994	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan													
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	198.400.230,00	103.565.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.400.230,00	103.565.115,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan kelas kelompok	4.23 Persen											
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	100 Persen											
995	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan													
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	25 Orang	30.000.500,00	16.520.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.500,00	16.520.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Indeks Kualitas Lahan Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	42.16 Nilai 6.82 Persen											
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Persen											
996	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS													
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen	89.554.810,00	161.666.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.554.810,00	161.666.105,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Utara)	A Nilai											
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Utara	100 Persen											
997	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.205.900,00	3.205.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.900,00	3.205.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
998	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.025.900,00	10.025.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025.900,00	10.025.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
999	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.650.000,00	34.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650.000,00	34.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1000	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920.000,00	13.920.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara	100 Persen											
1001	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1002	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	43.753.592,00	43.753.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.753.592,00	43.753.592,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara	100 Persen											
1003	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	149.705.410,00	133.427.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.705.410,00	133.427.705,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1004	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	657.084.954,00	437.963.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.084.954,00	437.963.707,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Timur)	A Nilai											
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen											
1005	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.129.800,00	3.129.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129.800,00	3.129.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1006	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.443.900,00	13.443.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.443.900,00	13.443.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1007	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1008	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.698.100,00	3.698.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698.100,00	3.698.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen											
1009	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	18.050.000,00	21.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.050.000,00	21.050.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1010	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	44.434.092,00	72.334.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.434.092,00	72.334.092,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen											
1011	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	488.554.597,00	390.888.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.554.597,00	390.888.367,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1012	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	131.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140.000,00	138.955.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Selatan)	A Nilai											
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen											
1013	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.373.700,00	1.373.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.700,00	1.373.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1014	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.355.700,00	11.355.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355.700,00	11.355.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1015	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1016	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.707.300,00	1.707.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.300,00	1.707.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1017	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen											
1018	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1019	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	110.397.312,00	77.841.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.397.312,00	77.841.902,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen											
1020	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	223.154.492,00	223.154.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.154.492,00	223.154.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1021	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	9.990.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Barat)	A Nilai											
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen											
1022	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.137.000,00	3.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.000,00	3.137.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1023	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.811.900,00	10.811.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.811.900,00	10.811.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1024	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1025	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.502.800,00	2.502.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.800,00	2.502.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1026	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960.000,00	12.960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen											
1027	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940.000,00	23.940.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1028	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	44.379.792,00	44.379.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.379.792,00	44.379.792,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen											
1029	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	123.425.000,00	123.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.425.000,00	123.425.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1030	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	86.382.984,00	86.382.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.382.984,00	86.382.984,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Tahura Ngurah Rai)	A Nilai											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD Tahura Ngurah Rai	100 Persen											
1031	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.530.500,00	2.530.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.500,00	2.530.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1032	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.920.800,00	6.920.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920.800,00	6.920.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1033	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1034	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.598.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.700,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai	100 Persen											
1035	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000.000,00	324.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1036	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	243.354.292,00	243.354.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.354.292,00	243.354.292,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai	100 Persen											
1037	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	112.130.000,00	112.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.130.000,00	112.130.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1038	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	884.133.673,00	619.341.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.133.673,00	619.341.235,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1039	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	11.970.000,00	11.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970.000,00	11.970.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)	A Nilai											
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Laboratorium LH	100 Persen											
1040	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.866.500,00	4.866.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866.500,00	4.866.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1041	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	935.500,00	935.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.500,00	935.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH	100 Persen											
1042	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.299.040,00	27.046.545,00	17.615.500,00	48.441.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.914.540,00	75.488.188,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH	100 Persen											
1043	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	97.970.820,00	65.415.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.970.820,00	65.415.410,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	94,85 Persen											
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Peningkatan Kompetensi Laboratorium Menuju Akreditasi	27 Persen											
1044	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi													
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	252.757.125,00	284.186.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.757.125,00	284.186.892,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengelolaan Sampah													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Pengelolaan Sampah)	A Nilai											
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Pengelolaan Sampah	100 Persen											
1045	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.229.000,00	5.229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229.000,00	5.229.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1046	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.701.300,00	11.701.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701.300,00	11.701.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1047	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1048	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.917.000,00	3.917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917.000,00	3.917.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1049	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah	100 Persen											
1050	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	330.930.974,00	225.753.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.930.974,00	225.753.662,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1051	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit	118.270.000,00	118.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.270.000,00	118.270.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100 Persen											
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Penanganan Sampah di TPA Regional yang terlaksana	100 Persen											
1052	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional													
			Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	1 Unit	8.143.408.590,00	14.592.257.520,00	2.925.000.000,00	9.224.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068.408.590,00	23.816.651.520,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing Pungutan bagi Wisatawan Asing
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)	82,50											
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen											
1053	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	66.082.800,00	41.290.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.082.800,00	41.290.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan											
1054	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/ Bulan	15.665.986.223,00	14.578.942.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.665.986.223,00	14.578.942.945,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Sub Kegiatan 100 %											
1055	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	6 Sub Kegiatan											
1056	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.267.000,00	18.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.267.000,00	18.267.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1057	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	111.454.400,00	111.454.400,00	476.633.000,00	446.309.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.087.400,00	557.763.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1058	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	67.483.394,00	67.483.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.483.394,00	67.483.394,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1059	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.840.000,00	14.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840.000,00	14.840.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1060	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	6.424.000,00	6.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424.000,00	6.424.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1061	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	316.901.000,00	193.047.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.901.000,00	193.047.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Sub Kegiatan											
1062	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1063	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	576.131.150,00	429.631.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.131.150,00	429.631.805,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1064	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	227.194.900,00	227.194.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.194.900,00	227.194.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Sub Kegiatan											
1065	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	834.042.460,00	848.042.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.042.460,00	848.042.460,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1066	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	151.553.984,00	164.153.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.553.984,00	164.153.984,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00 Indeks											
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	14000 Dokumen											
1067	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	14000 Dokumen	302.955.644,00	198.569.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.955.644,00	198.569.414,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	1 Pasar											
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar yang dibina Jumlah Toko Swalayan yang dibina	18 Pasar 18 Toko Swalayan											
1068	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	36 Laporan	24.968.600,00	13.442.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.968.600,00	13.442.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang Pokok	<7 Persen											
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	18 Kali											
1069	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	5 Laporan	243.576.100,00	147.180.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.576.100,00	147.180.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	55 Persen											
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pameran	4 Pelaku Usaha											
1070	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor													
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	50 Produk	99.999.600,00	48.499.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999.600,00	48.499.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	49,72 Indeks											
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Konsumen yang Diproses	100 %											
1071	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen													
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	456.000.000,00	456.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000.000,00	456.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1072	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	3 LPKSM	9.992.200,00	5.672.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992.200,00	5.672.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku usaha yang menerapkan Tertib Niaga Persentase Produk yang sesuai dengan ketentuan	100 % 100 %											
1073	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	100 Laporan	123.621.202,00	86.223.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.621.202,00	86.223.497,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	30 Persen											
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang memasarkan produk lokal Bali	35 Pelaku Usaha											
1074	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi													
			Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	5 Laporan	300.832.962,00	273.029.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.832.962,00	273.029.457,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	1,5 Persen											
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	1.5 %											
1075	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	9 Dokumen	137.682.000,00	176.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.682.000,00	176.162.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1076	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	1.700.626.786,00	4.482.427.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.626.786,00	4.482.427.761,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Data Industri	100 Persen											
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Data Industri yang terkumpul	100 %											
1077	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	150 Dokumen	49.999.900,00	26.959.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999.900,00	26.959.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Rumah Kreatif													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Rumah Kreatif)	82,50											
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Sub Kegiatan											
1078	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	22.821.900,00	121.821.900,00	10.613.160,00	411.249.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.435.060,00	533.071.660,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1079	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.450.500,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.500,00	1.225.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1080	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.212.000,00	3.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212.000,00	3.212.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1081	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7.680.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00	3.840.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan											
1082	3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	44.555.410,00	27.587.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.555.410,00	27.587.705,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Sub Kegiatan											
1083	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	104.051.492,00	104.051.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.051.492,00	104.051.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	1,5 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	1.5 %											
1084	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	827.213.500,00	723.421.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.213.500,00	723.421.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	82.50											
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Sub Kegiatan											
1085	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.455.700,00	1.455.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.700,00	1.455.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1086	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	21.887.400,00	17.779.200,00	0,00	59.672.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.887.400,00	77.451.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1087	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.038.040,00	16.038.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.038.040,00	16.038.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1088	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1089	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	2 Sub Kegiatan											
1090	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1091	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	159.274.886,00	141.577.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.274.886,00	141.577.181,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Sub Kegiatan											
1092	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	120.969.044,00	120.969.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.969.044,00	120.969.044,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	49,72 Indeks											
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat hasil pengujian yang di terbitkan	45 Sertifikat											
1093	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian													
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	45 laporan	244.401.176,00	213.795.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.401.176,00	213.795.176,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Hukum													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Nilai											
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	5 Paket											
1094	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.606.100,00	13.740.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.606.100,00	13.740.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1095	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	97.377.294,00	99.465.594,00	683.947.240,00	674.657.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.324.534,00	774.122.914,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1096	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.990.900,00	10.990.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.990.900,00	10.990.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1097	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	229.491.000,00	86.631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.491.000,00	86.631.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	117 Unit											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1098	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	468.823.394,00	466.545.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.823.394,00	466.545.689,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1099	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	766.752.790,00	555.142.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.752.790,00	555.142.625,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1100	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1101	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	58.290.000,00	56.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.290.000,00	56.290.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum	100 %											
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum	1220 Dokumen											
1102	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan													
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45 Dokumen	936.594.722,00	896.217.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.594.722,00	896.217.607,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1103	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan													
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000 Dokumen	161.709.540,00	96.598.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.709.540,00	96.598.720,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1104	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya													
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50 Dokumen	269.300.042,00	181.669.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.300.042,00	181.669.517,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1105	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota													
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	125 Dokumen	443.463.170,00	270.479.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.463.170,00	270.479.235,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan	65 Kasus											
1106	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum													
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	33 Kasus	2.504.028.296,00	2.267.456.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.028.296,00	2.267.456.935,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1107	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM													
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	24 Kasus	263.703.440,00	194.652.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.703.440,00	194.652.620,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Sekretariat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	83 Nilai											
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen											
1108	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	262 Orang/Bulan	78.743.344.494,00	76.609.455.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.743.344.494,00	76.609.455.509,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100 Persen											
1109	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2.988.309.510,00	3.007.840.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988.309.510,00	3.007.840.762,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Air Permukaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Air Permukaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Nilai											
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
1110	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	332.213.362,00	218.269.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.213.362,00	218.269.427,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100 %											
1111	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.976.600,00	15.976.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.976.600,00	15.976.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1112	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	18.026.000,00	18.026.000,00	398.256.320,00	392.180.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.282.320,00	410.206.320,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1113	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	31.727.000,00	31.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.727.000,00	31.727.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1114	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	339.429.000,00	170.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.429.000,00	170.675.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertata	100 %											
1115	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	905.956.492,00	919.956.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.956.492,00	919.956.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1116	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 Unit	86.160.000,00	86.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.160.000,00	86.160.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1117	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	160 Unit	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali	75 %											
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kebijakan dan Regulasi yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %											
1118	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	3 Dokumen	451.157.990,00	361.982.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.157.990,00	361.982.075,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1119	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen	184.862.600,00	111.372.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.862.600,00	111.372.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100 %											
1120	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen	399.993.300,00	262.095.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.993.300,00	262.095.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1121	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	149.999.500,00	111.019.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999.500,00	111.019.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	100 %											
1122	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah													
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	339.909.422,00	208.208.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.909.422,00	208.208.307,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1123	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama													
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	948.670.200,00	682.153.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.670.200,00	682.153.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Tindaklanjut Kebijakan Strategis yang mendukung Pengembangan Budaya Spiritual	100 %											
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Pengembangan Mental Spiritual	100 %											
1124	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	300 Unit	2.834.763.996,00	16.491.811.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834.763.996,00	16.491.811.336,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1125	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual													
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	6 Lembaga	640.398.752,00	554.280.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.398.752,00	554.280.752,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100 %											
1126	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	25.865.611.676,00	49.992.099.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.865.611.676,00	49.992.099.676,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Umum dan Protokol													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	- Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang tertib arsip - Nilai Evaluasi Kearsipan	100 Persentase 64 Nilai											
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terwujudnya Penataan Arsip	100 Persen											
1127	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis													
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis	1000 Arsip	372.965.866,00	318.729.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.965.866,00	318.729.951,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	22 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1128	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN													
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	150 Pengguna	60.757.500,00	49.957.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.757.500,00	49.957.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1129	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi													
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	45 Laporan	317.879.760,00	207.433.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.879.760,00	207.433.030,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	83 Nilai											
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen											
1130	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	538.866.748,00	413.080.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.866.748,00	413.080.028,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen											
1131	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	645.879.744,00	473.686.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.879.744,00	473.686.464,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen											
1132	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	320.620.172,00	262.467.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.620.172,00	262.467.532,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen											
1133	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	645.221.040,00	580.110.220,00	39.916.800,00	39.916.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.137.840,00	620.027.020,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1134	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.952.676.318,00	1.535.310.143,00	694.995.040,00	868.183.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647.671.358,00	2.403.493.583,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1135	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	11.862.833.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862.833.477,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1136	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.336.554.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336.554.462,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1137	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00	7.692.607.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692.607.347,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1138	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.194.377.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194.377.134,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1139	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	520.540.874,00	351.252.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.540.874,00	351.252.742,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen											
1140	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.069.469.360,00	2.069.469.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.469.360,00	2.069.469.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1141	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	25.565.733.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.565.733.308,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1142	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.176.844.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.176.844.128,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1143	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	106 Laporan	0,00	5.529.123.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529.123.017,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1144	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	106 Laporan	5.891.296.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891.296.300,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen											
1145	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	136 Unit	0,00	7.375.876.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375.876.952,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1146	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	136 Unit	6.876.182.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876.182.652,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1147	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	0,00	8.917.241.188,00	0,00	724.080.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641.321.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1148	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	5.950.111.774,00	0,00	346.256.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296.368.226,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100 Persen											
1149	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	0,00	6.317.806.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317.806.694,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1150	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	5.372.057.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372.057.408,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen											
1151	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47 Paket	0,00	18.637.264.857,00	0,00	1.711.586.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.348.851.434,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1152	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47 Paket	15.956.114.296,00	0,00	584.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.540.186.296,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1153	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	0,00	10.893.195.512,00	0,00	1.386.598.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.279.793.522,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1154	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	9.554.975.848,00	0,00	456.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.011.023.848,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1155	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	404.497.098,00	404.497.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.497.098,00	404.497.098,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 Persen											
1156	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	541.115.000,00	224.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.115.000,00	224.717.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya Fasilitasi Keprotokolan	100 Persen											
1157	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan													
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	2.079.394.124,00	1.031.531.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.394.124,00	1.031.531.504,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Organisasi													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	58 persen											
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	22.35 persen											
1158	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan													
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan	70.066.492,00	32.877.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.066.492,00	32.877.705,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1159	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka													
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	55.066.392,00	32.277.605,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.066.392,00	77.277.605,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1160	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan													
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	130.132.984,00	65.458.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.132.984,00	65.458.710,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	39 %											
1161	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	3 Lokus	70.066.492,00	41.177.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.066.492,00	41.177.005,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1162	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial													
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	15 Perpustakaan	130.132.984,00	76.875.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.132.984,00	76.875.410,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	4.20 %											
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun	300 Eksemplar											
1163	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam													
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	300 Eksemplar	110.132.984,00	75.304.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.132.984,00	75.304.197,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi	86 Nilai											
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan	1 Dokumen											
1164	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.976.000,00	4.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976.000,00	4.976.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 %											
1165	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.999.900,00	16.460.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999.900,00	16.460.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1166	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	438.559.188,00	181.430.088,00	175.493.140,00	432.515.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.052.328,00	613.945.407,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1167	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	310.342.000,00	160.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.342.000,00	160.476.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik.	1 Laporan											
1168	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	789.308.052,00	738.230.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.308.052,00	738.230.478,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1169	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	117 Unit	80.450.000,00	80.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.450.000,00	80.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	89 %											
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	89 %											
1170	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.000.000,00	85.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	85.315.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1171	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70.000.000,00	80.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	80.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1172	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	29 Dokumen	140.065.792,00	180.677.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.065.792,00	180.677.005,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik	89 %											
1173	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	190.055.892,00	136.243.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.055.892,00	136.243.892,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1174	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja													
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	170.037.392,00	116.325.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.037.392,00	116.325.392,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1175	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	14.997.000,00	14.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997.000,00	14.997.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1176	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen	140.065.492,00	101.993.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.065.492,00	101.993.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1177	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	140.066.192,00	77.721.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.066.192,00	77.721.405,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali	82.5 Nilai											
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen											
1178	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950.000,00	13.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan											
1179	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.386.246.936,00	985.769.693,00	629.246.900,00	610.249.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.493.836,00	1.596.019.273,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1180	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.464.000,00	35.000.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.464.000,00	35.000.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1181	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	284.960.000,00	146.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.960.000,00	146.692.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	12 Bulan											
1182	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit	543.480.000,00	557.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.480.000,00	557.480.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1183	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	185 Unit	129.950.000,00	91.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.950.000,00	91.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Ditindaklanjuti	100 Persen											
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	2 Dokumen											
1184	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	369.987.000,00	230.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.987.000,00	230.804.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1185	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Dokumen	251.865.000,00	130.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.865.000,00	130.124.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen											
1186	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	175.007.800,00	544.400.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.007.800,00	544.400.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	85 Persen											
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan											
1187	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	29.970.000,00	21.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.970.000,00	21.330.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1188	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	83.852.000,00	48.404.000,00	30.875.454.175,00	32.071.291.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.959.306.175,00	32.119.695.425,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1189	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	77.985.000,00	42.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.985.000,00	42.465.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	12 Laporan											
1190	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik													
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	12 Laporan	69.981.000,00	51.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.981.000,00	51.105.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1191	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	70.000.000,00	47.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	47.894.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Level											
1192	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	90 Orang	99.996.000,00	73.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.996.000,00	73.676.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1193	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	19.995.000,00	10.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995.000,00	10.140.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1194	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	42.560.000,00	29.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.560.000,00	29.728.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	87 Persen											
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	1 Laporan											
1195	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	44.400.000,00	30.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400.000,00	30.030.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Laporan											
1196	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	44.400.000,00	31.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400.000,00	31.785.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Humas dan Protokol													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manjemen Kinerja	80 nilai											
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Pesen											
1197	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	0,00	77.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.440.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 persen											
1198	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan													
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	6 Dokumen	0,00	278.165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.165.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1199	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5 Laporan	0,00	5.319.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319.816.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1200	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan													
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	5 Laporan	0,00	403.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.256.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya Fasilitasi Keprotokolan	100 Persen											
1201	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Laporan	0,00	388.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.398.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1202	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan													
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	6 Laporan	0,00	642.957.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.957.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Sekretariat DPRD													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.02	SEKRETARIAT DPRD													
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (SETWAN)	86 Persen											
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan Terhadap Penganggaran Belanja OPD	100 Persen											
1203	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	491.165.710,00	495.356.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.165.710,00	495.356.005,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1204	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	307.463.410,00	287.448.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.463.410,00	287.448.605,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen											
1205	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/ Bulan	13.882.480.678,00	11.483.270.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.882.480.678,00	11.483.270.707,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1206	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	155.478.410,00	185.100.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.478.410,00	185.100.705,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1207	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	151.841.510,00	135.563.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.841.510,00	135.563.805,00	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Selesai Dengan Baik dan Di Sampaikan Tepat Waktu	100 Persen											
1208	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	169.070.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.070.300,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1209	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	460.016.000,00	498.521.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.016.000,00	498.521.386,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1210	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.834.120.446,00	1.941.833.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.120.446,00	1.941.833.246,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1211	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	168.631.600,00	141.209.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.631.600,00	141.209.600,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1212	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.075.320.000,00	1.096.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.320.000,00	1.096.920.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1213	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.802.329.336,00	10.048.362.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.802.329.336,00	10.048.362.956,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen											
1214	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	77.600.000,00	77.600.000,00	12.434.375.500,00	15.465.738.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.511.975.500,00	15.543.338.236,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pelayanan Penunjang Kantor Yang Selesai Dengan Baik Dan Berkualitas	100 Persen											
1215	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00	15.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1216	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	380.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00	950.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1217	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.677.324.042,00	2.005.449.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.324.042,00	2.005.449.087,00	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	100 Persen											
1218	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	61 Unit	3.750.756.238,00	3.915.956.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.756.238,00	3.915.956.238,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1219	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3.015.661.300,00	3.115.236.300,00	21.388.884.912,00	23.101.365.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.404.546.212,00	26.216.602.212,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1220	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	643.040.000,00	1.143.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.040.000,00	1.143.040.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen											
1221	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD													
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 Orang/ Bulan	59.732.867.624,00	62.926.813.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.732.867.624,00	62.926.813.904,00	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1222	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	729 Paket	1.694.242.500,00	1.785.578.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.242.500,00	1.785.578.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1223	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	314.618.510,00	304.365.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.618.510,00	304.365.805,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen											
1224	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	30 Laporan	184.444.240,00	119.333.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.444.240,00	119.333.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1225	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48 Laporan	932.320.400,00	1.285.361.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.320.400,00	1.285.361.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Fasilitas Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD (SETWAN)	100 Persen											
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD	100 Persen											
1226	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1.931.295.420,00	1.896.054.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.295.420,00	1.896.054.110,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1227	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	21 Dokumen	20.090.198.230,00	17.458.355.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.090.198.230,00	17.458.355.002,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1228	4.02.02.1.01.0004	Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	926.795.510,00	1.060.156.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.795.510,00	1.060.156.305,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terbentuknya Kebijakan Anggaran Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Fungsi DPRD	100 Persen											
1229	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1.765.207.192,00	75.911.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.207.192,00	75.911.892,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1230	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1.685.902.010,00	64.867.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.902.010,00	64.867.710,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1231	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1.839.257.410,00	4.865.797.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.257.410,00	4.865.797.405,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1232	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1.702.591.710,00	855.896.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.591.710,00	855.896.705,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1233	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1.812.628.310,00	862.044.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.628.310,00	862.044.305,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen											
1234	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	9.602.197.714,00	7.947.975.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.602.197.714,00	7.947.975.299,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1235	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	9.599.763.250,00	5.644.015.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599.763.250,00	5.644.015.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1236	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat													
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	8.786.622.980,00	5.457.067.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786.622.980,00	5.457.067.715,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1237	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	10.684.155.020,00	5.995.348.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.684.155.020,00	5.995.348.410,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1238	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah													
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1.665.224.500,00	731.792.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.224.500,00	731.792.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen											
1239	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	6.285.481.230,00	3.638.481.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285.481.230,00	3.638.481.115,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1240	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli													
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27 Orang	4.872.166.400,00	4.467.166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872.166.400,00	4.467.166.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1241	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi													
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	730.186.800,00	670.186.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.186.800,00	670.186.800,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1242	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD													
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1.477.743.520,00	1.441.278.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.743.520,00	1.441.278.410,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1243	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD													
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	60 Dokumen	4.318.303.470,00	4.212.626.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318.303.470,00	4.212.626.130,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen											
1244	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	3.810.849.012,00	3.305.126.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810.849.012,00	3.305.126.902,00	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1245	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	886.076.800,00	2.905.029.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.076.800,00	2.905.029.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1246	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses													
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	35.222.107.320,00	35.186.696.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.222.107.320,00	35.186.696.210,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-											
1247	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	862.378.564,00	853.546.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.378.564,00	853.546.910,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-											
1248	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10 Dokumen	9.648.671.930,00	36.254.544.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648.671.930,00	36.254.544.515,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1249	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD													
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	180 Laporan	507.423.720,00	468.679.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.423.720,00	468.679.410,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1250	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	3.688.751.700,00	3.686.402.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688.751.700,00	3.686.402.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.01	PERENCANAAN													
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	87,15 Nilai											
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33 Dokumen											
1251	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	227.981.114,00	155.075.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.981.114,00	155.075.999,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1252	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11.474.400,00	11.474.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.474.400,00	11.474.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1253	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.444.900,00	11.444.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.444.900,00	11.444.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1254	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	35.221.600,00	4.869.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.221.600,00	4.869.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Jenis											
1255	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/ Bulan	16.365.850.481,00	15.275.945.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.365.850.481,00	15.275.945.418,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1256	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	900 Dokumen	176.934.150,00	118.820.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.934.150,00	118.820.625,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1257	5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen	128.225.512,00	95.670.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.225.512,00	95.670.102,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Jenis											
1258	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.000.810,00	47.723.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000.810,00	47.723.105,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1259	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	87.046.592,00	87.046.592,00	643.741.640,00	784.249.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.788.232,00	871.296.032,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1260	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	129.063.004,00	129.063.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.063.004,00	129.063.004,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1261	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	66.119.210,00	40.205.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.119.210,00	40.205.505,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1262	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	63.183.410,00	46.905.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.183.410,00	46.905.705,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1263	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	99.255.410,00	43.527.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.255.410,00	43.527.705,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1264	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	734.696.410,00	387.076.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.696.410,00	387.076.705,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	3 Jenis											
1265	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0,00	0,00	361.989.600,00	361.989.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.989.600,00	361.989.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1266	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	49.155.092,00	49.155.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.155.092,00	49.155.092,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Laporan											
1267	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	36.616.910,00	20.339.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.616.910,00	20.339.205,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1268	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	197.266.492,00	197.266.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.266.492,00	197.266.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1269	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	726.775.182,00	710.497.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.775.182,00	710.497.477,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	227 Unit											
1270	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	771.388.362,00	729.044.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.388.362,00	729.044.165,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1271	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit	192.660.410,00	186.882.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.660.410,00	186.882.705,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1272	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	346.066.492,00	352.066.492,00	1.714.616.000,00	1.983.598.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.682.492,00	2.335.664.657,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	100 Persen											
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi	3 Dokumen											
1273	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik													
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	84.497.500,00	15.570.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.497.500,00	15.570.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1274	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi													
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	164.767.400,00	93.767.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.767.400,00	93.767.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1275	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	1.558.970.642,00	1.114.761.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.970.642,00	1.114.761.117,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	7 Dokumen											
1276	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen	522.329.832,00	363.016.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.329.832,00	363.016.812,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1277	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi													
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	31.109.200,00	17.089.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.109.200,00	17.089.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	41 Dokumen											
1278	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	274.355.700,00	95.827.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.355.700,00	95.827.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1279	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan	582.461.632,00	418.498.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.461.632,00	418.498.812,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1280	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	27 Dokumen	239.556.800,00	156.066.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.556.800,00	156.066.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data SIPD	1 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1281	5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah													
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	91.369.700,00	44.481.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.369.700,00	44.481.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen											
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen											
1282	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	132.314.520,00	69.671.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.314.520,00	69.671.910,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1283	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	116.194.510,00	84.909.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.194.510,00	84.909.605,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1284	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	275.847.622,00	411.747.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.847.622,00	411.747.307,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1285	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	224.219.112,00	176.782.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.219.112,00	176.782.102,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	4 Dokumen											
1286	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	240.081.022,00	171.803.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.081.022,00	171.803.907,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1287	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	229.211.812,00	170.370.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.211.812,00	170.370.402,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1288	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	85.873.110,00	66.715.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.873.110,00	66.715.405,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1289	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	193.409.620,00	132.648.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.409.620,00	132.648.210,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infratraktur dan Kewilayahan	1 Dokumen											
1290	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	326.252.960,00	198.104.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.252.960,00	198.104.730,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1291	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	78.929.700,00	50.477.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.929.700,00	50.477.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1292	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	285.012.150,00	174.897.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.012.150,00	174.897.625,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1293	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	78.913.600,00	51.187.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.913.600,00	51.187.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPKAD)	87.5 Nilai											
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	9 dokumen											
1294	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	75.487.200,00	44.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.487.200,00	44.873.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	2244 dokumen											
1295	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/Bulan	20.152.321.982,00	21.428.130.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152.321.982,00	21.428.130.146,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Retribusi Jasa Usaha Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Retribusi Jasa Usaha
1296	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2200 Dokumen	8.628.432.002,00	975.110.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628.432.002,00	975.110.697,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	1 tahun											
1297	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.204.900,00	12.020.700,00	0,00	5.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.204.900,00	17.024.700,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1298	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	67.110.820,00	34.555.410,00	983.168.040,00	2.699.341.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.278.860,00	2.733.897.270,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1299	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	324.675.840,00	239.052.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.675.840,00	239.052.922,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1300	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.587.800,00	11.930.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.587.800,00	11.930.200,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1301	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.999.900,00	7.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999.900,00	7.999.900,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1302	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	127.305.410,00	111.027.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.305.410,00	111.027.705,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1303	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	544.586.000,00	185.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.586.000,00	185.083.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	1 tahun											
1304	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00	4.710.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1305	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	285.300.000,00	285.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.300.000,00	285.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	1 tahun											
1306	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	844.089.830,00	771.551.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.089.830,00	771.551.076,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1307	5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	15.520.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520.000,00	6.400.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1308	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	171.456.710,00	158.637.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.456.710,00	158.637.005,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1309	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.043.777.914,00	1.278.264.193,00	131.546.600,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.324.514,00	1.308.264.193,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu	100 Persen											
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu	72 Dokumen											
1310	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS													
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	58.287.100,00	47.133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.287.100,00	47.133.100,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1311	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	58.110.300,00	34.356.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.110.300,00	34.356.300,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1312	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	40.764.500,00	34.764.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.764.500,00	34.764.500,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1313	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	20.456.000,00	20.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.456.000,00	20.456.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1314	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	1.089.801.740,00	891.146.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.801.740,00	891.146.920,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1315	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	674.584.700,00	667.382.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.584.700,00	667.382.700,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen SK Gubernur tentang evaluasi kabupaten/kota disusun tepat waktu	27 SK Gubernur											
1316	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	9 Laporan	140.119.200,00	109.226.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.119.200,00	109.226.700,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1317	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	9 Laporan	118.846.700,00	80.274.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.846.700,00	80.274.200,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1318	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	9 Laporan	143.127.400,00	63.616.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.127.400,00	63.616.900,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1319	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	9 Dokumen	194.972.400,00	194.972.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.972.400,00	194.972.400,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1320	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	9 Dokumen	188.929.000,00	65.936.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.929.000,00	65.936.500,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase laporan perbendaharaan disusun tepat waktu	6 dokumen											
1321	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)													
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	609.999.800,00	651.859.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.999.800,00	651.859.800,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD disusun tepat waktu	2 dokumen											
1322	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	628.600.306,00	722.799.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.600.306,00	722.799.306,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1323	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi													
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	103.404.400,00	73.052.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.404.400,00	73.052.400,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu	4 dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1324	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	2.026.843.633,00	2.026.843.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.843.633,00	2.026.843.633,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1325	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan													
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.265.185.944,00	325.315.879.304,00	205.265.185.944,00	325.315.879.304,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Rokok Pungutan bagi Wisatawan Asing Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Rokok Pungutan bagi Wisatawan Asing
1326	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	151.187.931.213,00	55.923.938.944,00	0,00	0,00	151.187.931.213,00	55.923.938.944,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) DAK Non Fisik-BOS Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) DAK Non Fisik-BOS Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1327	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.188.016.684,00	1.018.848.956.716,00	582.188.016.684,00	1.018.848.956.716,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Air Permukaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Rokok Pajak Air Permukaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Rokok
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan implementasi SIPD	12 dokumen											
1328	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	145.903.500,00	65.933.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.903.500,00	65.933.500,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah	100 Persen 46.00 Persen											
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah disusun tepat waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 dokumen 46 Persen											
1329	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga													
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	118.872.300,00	121.715.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.872.300,00	121.715.300,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1330	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	44.000.000,00	22.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	22.166.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1331	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	323.449.000,00	214.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.449.000,00	214.630.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1332	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	1.295.156.812,00	1.961.750.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.156.812,00	1.961.750.124,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPKAD)	87,5 Nilai											
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	1 tahun											
1333	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.748.500,00	43.748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.748.500,00	43.748.500,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1334	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.449.100,00	9.449.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449.100,00	9.449.100,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1335	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1336	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	10.485.000,00	10.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.485.000,00	10.485.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1337	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	93.271.000,00	93.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.271.000,00	93.962.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	1 tahun											
1338	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1339	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	1 tahun											
1340	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	154.525.000,00	154.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.525.000,00	154.525.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1341	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.260.000,00	15.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260.000,00	15.260.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1342	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	629.690.444,00	907.690.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.690.444,00	907.690.444,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah	100 Persen 46,00 Persen											
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah disusun tepat waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 dokumen 46 Persen											
1343	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6 Laporan	2.400.000.000,00	2.102.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000.000,00	2.102.504.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		Badan Pendapatan Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88 Nilai Sakip											
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	100 Persen											
1344	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	22.721.100,00	20.336.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721.100,00	20.336.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1345	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	24.941.200,00	24.941.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.941.200,00	24.941.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	100 Persen											
1346	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	340 Orang/ Bulan	140.831.740.151,00	125.381.527.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.831.740.151,00	125.381.527.196,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Air Permukaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Air Permukaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1347	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen											
1348	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.039.000,00	10.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039.000,00	10.556.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1349	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	318.006.500,00	318.006.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.006.500,00	318.006.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1350	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	101.575.894,00	101.575.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.575.894,00	101.575.894,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1351	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	54.960.300,00	324.960.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.960.300,00	324.960.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1352	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.428.800,00	2.428.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428.800,00	2.428.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1353	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1354	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	483.325.000,00	483.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.325.000,00	483.325.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1355	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	0,00	0,00	226.733.625,00	218.777.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.733.625,00	218.777.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1356	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90 Unit	0,00	0,00	970.874.300,00	1.390.847.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.874.300,00	1.390.847.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1357	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	14.636.000,00	14.636.000,00	6.540.431.524,00	8.217.578.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555.067.524,00	8.232.214.553,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen											
1358	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.148.700,00	6.147.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.700,00	6.147.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1359	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	387.433.104,00	387.433.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.433.104,00	387.433.104,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1360	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	420.453.373,00	434.453.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.453.373,00	434.453.373,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1361	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	124.469.592,00	124.469.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.469.592,00	124.469.592,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1362	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	1.434.609.652,00	1.434.609.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.609.652,00	1.434.609.652,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1363	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	839.934.430,00	465.547.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.934.430,00	465.547.215,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1364	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	571.794.960,00	748.794.960,00	712.457.500,00	917.412.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.252.460,00	1.666.207.210,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1365	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	1.213.538.973,00	1.135.206.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.538.973,00	1.135.206.543,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 persen											
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina	100 persen											
1366	5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1 Laporan	27.008.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.008.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56.23 Persen											
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian PAD terhadap target PAD	100 Persen											
1367	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	238.541.400,00	128.726.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.541.400,00	128.726.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1368	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	259.290.600,00	93.709.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.290.600,00	93.709.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1369	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	143.625.200,00	142.974.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.625.200,00	142.974.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1370	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan	378.095.700,00	308.975.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.095.700,00	308.975.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1371	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	47.120.000,00	34.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.120.000,00	34.960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip											
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen											
1372	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.259.300,00	5.259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259.300,00	5.259.300,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1373	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	134.216.140,00	192.580.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.216.140,00	192.580.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1374	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1375	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	10.239.200,00	10.239.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.239.200,00	10.239.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1376	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.854.500,00	4.854.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854.500,00	4.854.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1377	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1378	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	77.400.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400.000,00	63.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen											
1379	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.789.800,00	1.789.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.800,00	1.789.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1380	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	261.000.000,00	261.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000.000,00	261.000.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1381	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1382	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1383	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	175.714.492,00	175.714.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.714.492,00	175.714.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1384	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	21.180.000,00	21.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.180.000,00	21.180.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1385	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	643.353.314,00	529.409.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.353.314,00	529.409.379,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1386	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	16.723.800,00	16.723.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.723.800,00	16.723.800,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56.23 Persen											
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1387	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	1.753.359.942,00	1.151.015.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.359.942,00	1.151.015.939,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1388	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	5000 Dokumen SSPD	1.715.377.516,00	1.219.650.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.377.516,00	1.219.650.694,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip											
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen											
1389	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.664.700,00	3.664.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664.700,00	3.664.700,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1390	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	122.248.420,00	129.410.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.248.420,00	129.410.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1391	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1392	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.691.900,00	4.691.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691.900,00	4.691.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1393	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.775.000,00	4.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775.000,00	4.775.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1394	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	29.700.000,00	44.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700.000,00	44.580.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen											
1395	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.491.500,00	1.491.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.500,00	1.491.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1396	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	181.000.000,00	181.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000.000,00	181.000.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1397	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1398	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.703.000,00	46.703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.703.000,00	46.703.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1399	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	154.708.392,00	154.708.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.708.392,00	154.708.392,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1400	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	41.020.000,00	41.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.020.000,00	41.020.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1401	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	430.385.464,00	326.376.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.385.464,00	326.376.788,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1402	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	20.625.800,00	13.435.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.625.800,00	13.435.800,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56.23 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	100 Persen											
1403	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	360.859.772,00	240.708.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.859.772,00	240.708.132,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1404	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	14518 Dokumen SSPD	671.186.002,00	499.708.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.186.002,00	499.708.821,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip											
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen											
1405	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.949.800,00	6.949.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949.800,00	6.949.800,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1406	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	136.866.890,00	142.850.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.866.890,00	142.850.490,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1407	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1408	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.783.700,00	6.783.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783.700,00	6.783.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1409	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.000,00	3.375.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1410	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.285.000,00	21.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.285.000,00	21.285.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen											
1411	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.978.200,00	1.978.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.200,00	1.978.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1412	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000,00	184.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	184.000.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1413	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000.000,00	294.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1414	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.855.000,00	45.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.855.000,00	45.855.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1415	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	225.937.992,00	225.937.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.937.992,00	225.937.992,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1416	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	21.460.000,00	21.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.460.000,00	21.460.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1417	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	533.098.428,00	435.432.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.098.428,00	435.432.198,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1418	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250.000,00	16.250.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56.23 Persen											
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	100 Persen											
1419	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	449.620.592,00	286.723.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.620.592,00	286.723.542,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1420	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12620 Dokumen SSPD	498.676.002,00	328.171.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.676.002,00	328.171.247,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip											
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen											
1421	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.037.600,00	8.924.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037.600,00	8.924.100,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1422	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	133.993.390,00	174.516.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.993.390,00	174.516.890,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1423	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1424	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	17.186.050,00	17.186.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186.050,00	17.186.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1425	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840.000,00	4.840.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1426	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.575.000,00	10.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575.000,00	10.575.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1427	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	18.120.000,00	16.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120.000,00	16.065.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen											
1428	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.978.200,00	1.978.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.200,00	1.978.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1429	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000.000,00	378.000.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1430	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	437.230.947,00	437.230.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.230.947,00	437.230.947,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1431	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.265.000,00	36.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.265.000,00	36.265.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1432	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	188.338.992,00	188.338.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.338.992,00	188.338.992,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1433	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920.000,00	19.920.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1434	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	664.194.297,00	750.945.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.194.297,00	750.945.024,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1435	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.840.000,00	27.840.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56.23 Persen											
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	100 Persen											
1436	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	2.140.725.352,00	990.567.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.725.352,00	990.567.152,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1437	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	288 Dokumen SSPD	665.703.576,00	459.796.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.703.576,00	459.796.526,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip											
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen											
1438	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.435.800,00	4.435.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435.800,00	4.435.800,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1439	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.920.870,00	404.759.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.920.870,00	404.759.830,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1440	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	57.122.194,00	57.122.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.122.194,00	57.122.194,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1441	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	65.536.700,00	65.536.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.536.700,00	65.536.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1442	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6.424.000,00	6.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424.000,00	6.424.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1443	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	20.875.000,00	20.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.875.000,00	20.875.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1444	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	13.365.000,00	13.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365.000,00	13.365.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen											
1445	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.491.500,00	1.491.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.500,00	1.491.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1446	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	474.550.000,00	474.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.550.000,00	474.550.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1447	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	391.923.894,00	391.923.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.923.894,00	391.923.894,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1448	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	47.895.800,00	51.270.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.895.800,00	51.270.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1449	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	203.989.104,00	226.489.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.989.104,00	226.489.104,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1450	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040.000,00	17.040.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1451	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	751.906.893,00	945.518.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.906.893,00	945.518.368,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1452	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	33.026.900,00	48.644.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.026.900,00	48.644.600,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56.23 Persen											
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	100 Persen											
1453	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	2 Laporan	2.609.200.078,00	1.513.483.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.200.078,00	1.513.483.023,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1454	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	154572 Dokumen SSPD	490.087.084,00	481.976.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.087.084,00	481.976.264,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip											
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen											
1455	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.931.000,00	16.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.931.000,00	16.931.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1456	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	145.966.580,00	145.966.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.966.580,00	145.966.580,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1457	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	56.718.634,00	56.718.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.718.634,00	56.718.634,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1458	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.463.600,00	22.463.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.463.600,00	22.463.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1459	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.212.500,00	8.212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.212.500,00	8.212.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1460	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.375.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00	15.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1461	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20.040.000,00	18.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.040.000,00	18.120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen											
1462	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.826.000,00	2.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826.000,00	2.826.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1463	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1464	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	310.000.000,00	337.094.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000.000,00	337.094.457,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1465	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1466	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	147.497.500,00	147.497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.497.500,00	147.497.500,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1467	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300.000,00	38.300.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1468	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	551.731.412,00	463.096.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.731.412,00	463.096.668,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1469	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	35.020.000,00	35.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.020.000,00	35.020.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56.23 Persen											
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	100 Persen											
1470	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	1.154.773.644,00	731.553.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.773.644,00	731.553.314,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1471	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	13119 Dokumen SSPD	590.206.150,00	345.965.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.206.150,00	345.965.575,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip											
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen											
1472	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.009.700,00	7.009.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009.700,00	7.009.700,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1473	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	116.788.300,00	116.788.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.788.300,00	116.788.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1474	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1475	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.399.700,00	3.399.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399.700,00	3.399.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1476	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.250.800,00	3.250.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.800,00	3.250.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1477	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975.000,00	2.975.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1478	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen											
1479	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.789.800,00	1.789.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.800,00	1.789.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1480	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	120.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	130.000.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1481	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	359.849.487,00	359.849.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.849.487,00	359.849.487,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1482	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	47.995.000,00	47.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.995.000,00	47.995.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1483	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	104.518.700,00	104.518.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.518.700,00	104.518.700,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1484	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.100.000,00	14.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	14.290.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1485	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	412.176.002,00	330.787.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.176.002,00	330.787.477,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1486	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	8.099.200,00	8.099.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.099.200,00	8.099.200,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56.23 Persen											
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	100 Persen											
1487	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	492.786.822,00	303.965.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.786.822,00	303.965.444,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1488	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	10000 Dokumen SSPD	594.342.232,00	349.734.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.342.232,00	349.734.362,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip											
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen											
1489	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.660.400,00	2.660.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.400,00	2.660.400,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1490	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	110.050.400,00	110.050.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.050.400,00	110.050.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1491	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.280.000,00	30.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.280.000,00	30.280.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1492	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.674.000,00	3.674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674.000,00	3.674.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1493	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1494	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.325.000,00	4.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325.000,00	4.325.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1495	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	42.900.000,00	26.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900.000,00	26.454.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen											
1496	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.193.200,00	1.193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.200,00	1.193.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1497	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1498	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000,00	218.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	218.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1499	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.835.000,00	42.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.835.000,00	42.835.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1500	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	152.991.500,00	152.991.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.991.500,00	152.991.500,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1501	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	16.390.000,00	16.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390.000,00	16.390.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1502	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	707.464.134,00	560.964.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.464.134,00	560.964.789,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1503	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	17.560.000,00	17.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.560.000,00	17.560.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56.23 Persen											
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	100 Persen											
1504	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	440.509.592,00	270.503.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.509.592,00	270.503.542,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1505	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	10963 Dokumen SSPD	463.615.756,00	318.124.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.615.756,00	318.124.116,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip											
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen											
1506	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.827.100,00	3.827.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827.100,00	3.827.100,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1507	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	122.245.980,00	122.245.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.245.980,00	122.245.980,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1508	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	27.837.000,00	27.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.837.000,00	27.837.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1509	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.182.900,00	5.182.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182.900,00	5.182.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1510	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1511	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575.000,00	3.575.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1512	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	55.410.000,00	61.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.410.000,00	61.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen											
1513	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.193.200,00	1.193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.200,00	1.193.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1514	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1515	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000.000,00	237.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1516	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	52.490.000,00	52.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.490.000,00	52.490.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1517	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	123.835.592,00	123.835.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.835.592,00	123.835.592,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1518	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	14.200.000,00	21.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00	21.390.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1519	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	333.843.542,00	352.455.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.843.542,00	352.455.017,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1520	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	16.020.500,00	15.304.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020.500,00	15.304.800,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56.23 Persen											
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	100 Persen											
1521	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	491.616.002,00	317.121.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.616.002,00	317.121.247,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1522	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	13155 Dokumen SSPD	458.820.592,00	311.143.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.820.592,00	311.143.542,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.03	KEPEGAWAIAN													
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86,5 Nilai											
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	4 jenis											
1523	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	65.646.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.646.000,00	10.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1524	5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1525	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	75.074.600,00	37.042.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.074.600,00	37.042.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1526	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	100.020.000,00	51.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.020.000,00	51.540.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3 Dokumen											
1527	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 Orang/ Bulan	31.401.080.353,00	29.450.461.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.401.080.353,00	29.450.461.161,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	6 Jenis											
1528	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.762.400,00	17.762.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.762.400,00	17.762.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1529	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	153.768.400,00	153.768.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.768.400,00	153.768.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1530	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	85.079.034,00	85.079.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.079.034,00	85.079.034,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1531	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.503.400,00	10.280.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.503.400,00	10.280.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1532	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	4.137.000,00	4.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137.000,00	4.137.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1533	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	290.593.000,00	197.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.593.000,00	197.985.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah terlaksana	1 Jenis											
1534	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 Unit	200.000,00	0,00	575.633.000,00	575.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.833.000,00	575.633.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	3 Jenis											
1535	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.386.400,00	2.386.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386.400,00	2.386.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1536	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	253.600.000,00	253.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600.000,00	253.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1537	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	867.129.578,00	720.630.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.129.578,00	720.630.233,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah terlaksana	4 Jenis											
1538	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	996.648.320,00	1.010.648.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.648.320,00	1.010.648.320,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1539	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	118.731.000,00	316.731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.731.000,00	316.731.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1540	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	117.700.000,00	136.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.700.000,00	136.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Instansi	85,08 Nilai											
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana	6 Jenis											
1541	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	74.830.000,00	41.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.830.000,00	41.856.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1542	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	890.904.000,00	788.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.904.000,00	788.914.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1543	5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	71.584.000,00	39.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.584.000,00	39.368.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1544	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian													
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	150.033.410,00	97.385.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.033.410,00	97.385.705,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1545	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN													
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	271.750.500,00	154.596.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.750.500,00	154.596.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1546	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	214.203.012,00	132.931.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.203.012,00	132.931.602,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah jenis layanan mutasi promosi ASN terlaksana baik	3 Jenis											
1547	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	71.793.110,00	34.097.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.793.110,00	34.097.405,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1548	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN													
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12 Laporan	187.543.410,00	116.113.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.543.410,00	116.113.705,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1549	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	189.454.410,00	90.184.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.454.410,00	90.184.705,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan karier jabatan fungsional yang terlaksana sesuai ketentuan	5 Jenis											
1550	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	100.730.492,00	73.996.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.730.492,00	73.996.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1551	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	1.587.606.492,00	1.492.206.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.606.492,00	1.492.206.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1552	5.03.02.1.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	27.248.000,00	18.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.248.000,00	18.608.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1553	5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	280.244.000,00	195.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.244.000,00	195.266.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1554	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	12 Dokumen	119.600.410,00	62.366.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.600.410,00	62.366.705,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana	5 Dokumen											
1555	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Dokumen	150.185.902,00	93.996.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.185.902,00	93.996.197,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1556	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai													
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3 Orang	122.577.100,00	59.545.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.577.100,00	59.545.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1557	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai													
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400 Orang	177.870.702,00	122.816.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.870.702,00	122.816.997,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1558	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN													
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1500 Orang	136.347.902,00	84.056.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.347.902,00	84.056.197,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1559	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan	32.684.700,00	17.066.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.684.700,00	17.066.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus Pengembangan SDM berbasis Kompetensi	100 Persen											
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah jenis kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang dilaksanakan	6 Jenis											
1560	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional													
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	2 Dokumen	273.191.492,00	267.709.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.191.492,00	267.709.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1561	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi													
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	263.898.000,00	204.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.898.000,00	204.089.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1562	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota													
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	140 Orang	499.545.492,00	531.056.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.545.492,00	531.056.492,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1563	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar													
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	2 Laporan	246.566.500,00	116.684.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.566.500,00	116.684.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1564	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga													
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	3 Dokumen	114.950.910,00	69.561.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.950.910,00	69.561.205,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1565	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Dokumen	120.678.000,00	43.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.678.000,00	43.366.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.03	KEPEGAWAIAN													
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	8 6 , 5 Nilai											
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	2 Jenis											
1566	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.361.800,00	3.176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361.800,00	3.176.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1567	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	48.298.000,00	23.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.298.000,00	23.338.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milih daerah penunjang terlaksana	1 layanan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1568	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	0,00	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550.000,00	25.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	1 Jenis											
1569	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	241.398.952,00	143.732.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.398.952,00	143.732.722,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta terlaksana	2 Jenis											
1570	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	78.656.500,00	78.656.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.656.500,00	78.656.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1571	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660.000,00	9.660.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Instansi	79,80 Nilai											
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN	1 Jenis											
1572	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center													
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1.598.227.300,00	1.583.657.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.227.300,00	1.583.657.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.03	KEPEGAWAIAN													
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manaemen Kinerja	86,5 Nilai											
	5.03.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	88 persen											
1573	5.03.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	7.000.000.000,00	18.642.800.000,00	1.000.000.000,00	3.057.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00	21.700.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Riset dan Inovasi Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80 Nilai											
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen											
1574	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	55.000.000,00	23.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	23.789.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1575	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	50.000.000,00	35.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	35.162.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen											
1576	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/ Bulan	11.284.006.527,00	10.735.967.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284.006.527,00	10.735.967.860,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	100 Persen											
1577	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	21.938.000,00	21.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.938.000,00	21.938.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1578	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	198.905.500,00	205.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.905.500,00	205.509.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1579	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	107.436.400,00	107.436.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.436.400,00	107.436.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1580	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	24.180.200,00	24.180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.180.200,00	24.180.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1581	5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	14.998.700,00	14.998.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998.700,00	14.998.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1582	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	568.024.000,00	201.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.024.000,00	201.969.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100 Persen											
1583	5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	95 Paket	0,00	0,00	419.204.600,00	607.456.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.204.600,00	607.456.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1584	5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	65 Unit	0,00	0,00	465.615.240,00	1.070.406.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.615.240,00	1.070.406.340,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan	100 Persen											
1585	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.992.600,00	11.162.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992.600,00	11.162.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1586	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	167.200.000,00	167.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.200.000,00	167.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1587	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	341.506.444,00	341.506.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.506.444,00	341.506.444,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan	100 Persen											
1588	5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	795.794.806,00	784.032.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.794.806,00	784.032.101,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1589	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.100.582.562,00	769.250.757,00	236.945.000,00	236.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.527.562,00	1.006.195.757,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	100 Persen											
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 Persen											
1590	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	6 Laporan	4.270.000.000,00	6.274.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000.000,00	6.274.365.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1591	5.05.02.1.01.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1 Laporan	325.000.000,00	292.539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000.000,00	292.539.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1592	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan													
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	7 Dokumen	386.742.000,00	245.784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.742.000,00	245.784.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1593	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan													
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	1 Rekomen dasi	227.852.000,00	1.693.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.852.000,00	1.693.920.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 Persen											
1594	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	3 Dokumen	250.000.000,00	394.398.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	394.398.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1595	5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	0,00	231.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1596	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5 Dokumen	975.000.000,00	894.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000.000,00	894.682.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1597	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	266.000.000,00	234.732.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000.000,00	234.732.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1598	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	234.000.000,00	218.611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000.000,00	218.611.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1599	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	0,00	668.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1600	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	185.000.000,00	167.232.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	167.232.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1601	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	139.365.900,00	61.661.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.365.900,00	61.661.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1602	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	4 Laporan	170.000.000,00	150.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	150.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Penghubung													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG													
	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Badan Penghubung)	82 Nilai											
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100 persen											
1603	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.999.300,00	4.999.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999.300,00	4.999.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100 persen											
1604	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/ Bulan	3.119.038.696,00	3.168.063.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119.038.696,00	3.168.063.101,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100 persen											
1605	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.989.400,00	14.989.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.989.400,00	14.989.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1606	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	54.981.200,00	60.977.600,00	0,00	6.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.981.200,00	67.693.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1607	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1608	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.499.300,00	6.090.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499.300,00	6.090.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1609	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	62.171.000,00	99.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.171.000,00	99.764.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100 persen											
1610	5.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	79 Unit	0,00	29.091.000,00	229.503.420,00	515.139.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.503.420,00	544.230.256,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen											
1611	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.989.100,00	8.989.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989.100,00	8.989.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1612	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	306.800.000,00	306.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.800.000,00	306.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1613	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.159.107.136,00	1.213.956.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.107.136,00	1.213.956.466,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas barang milik daerah	100 persen											
1614	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	1.332.537.868,00	1.581.337.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.537.868,00	1.581.337.868,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1615	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	175.164.000,00	317.796.000,00	220.179.000,00	220.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.343.000,00	537.975.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1616	5.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	141.769.196,00	151.625.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.769.196,00	151.625.796,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	90 Indeks											
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 Indeks											
1617	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat													
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	12 Laporan	93.309.700,00	48.717.600,00	66.618.787,00	66.618.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.928.487,00	115.336.387,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1618	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya													
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	12 Laporan	314.769.196,00	326.087.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.769.196,00	326.087.665,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1619	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Laporan	2.485.776.784,00	2.715.122.253,00	0,00	64.762.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.776.784,00	2.779.884.875,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Inspektorat													
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH													
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	87,5 Persen											
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	100 Persen											
1620	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	49.999.800,00	18.521.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999.800,00	18.521.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1621	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	40.000.000,00	24.137.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	24.137.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen											
1622	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	163 Orang/ Bulan	26.324.679.033,00	26.039.950.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.324.679.033,00	26.039.950.471,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi	100 Persen											
1623	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.999.400,00	49.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999.400,00	49.999.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1624	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	99.999.800,00	99.997.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999.800,00	99.997.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1625	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	158.109.394,00	158.109.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.109.394,00	158.109.394,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1626	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.070.300,00	40.070.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.070.300,00	40.070.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1627	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	44.140.800,00	44.140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.140.800,00	44.140.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1628	6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	39.960.000,00	39.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.960.000,00	39.960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1629	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	849.995.000,00	647.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.995.000,00	647.514.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100 Persen											
1630	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	193 Unit	0,00	0,00	1.709.720.040,00	1.694.023.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.720.040,00	1.694.023.740,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi	100 Persen											
1631	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.092.900,00	5.092.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092.900,00	5.092.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1632	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	280.500.000,00	318.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500.000,00	318.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1633	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	309.560.560,00	309.560.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.560.560,00	309.560.560,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen											
1634	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	1.621.453.428,00	1.617.453.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.453.428,00	1.617.453.428,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1635	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	131.952.212,00	142.752.212,00	0,00	199.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.952.212,00	341.752.212,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1636	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	224.762.984,00	155.155.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.762.984,00	155.155.410,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 Persen											
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pembinaan dan Pengawasan Internal	100 Persen											
1637	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan	204.768.384,00	92.116.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.768.384,00	92.116.810,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1638	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	254.791.784,00	159.626.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.791.784,00	159.626.210,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1639	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja													
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	45 Laporan	79.999.500,00	48.013.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.999.500,00	48.013.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1640	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan													
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	252.391.492,00	142.605.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.391.492,00	142.605.705,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1641	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	58 Laporan	904.768.184,00	547.158.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.768.184,00	547.158.610,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1642	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	449.960.300,00	283.700.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.960.300,00	283.700.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1643	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	55 Dokumen	404.768.484,00	196.177.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.768.484,00	196.177.910,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu	100 Persen											
1644	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah													
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	114.768.684,00	50.875.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.768.684,00	50.875.110,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1645	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	34 Laporan	912.792.776,00	514.691.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.792.776,00	514.691.215,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	100 Persen											
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan	100 Persen											
1646	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan													
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	54 Rekomendasi	394.509.276,00	299.286.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.509.276,00	299.286.015,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1647	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan													
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1.664.241.952,00	1.291.866.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.241.952,00	1.291.866.617,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan	100 Persen											
1648	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3 Perangkat Daerah	282.141.676,00	211.249.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.141.676,00	211.249.315,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1649	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah	169.988.800,00	141.882.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.988.800,00	141.882.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1650	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	494.364.900,00	283.068.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.364.900,00	283.068.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1651	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	99.996.400,00	77.916.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.996.400,00	77.916.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.5 Nilai											
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen											
1652	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	93.164.000,00	57.956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.164.000,00	57.956.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1653	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	38.000.000,00	22.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	22.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	100 %											
1654	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ Bulan	10.015.015.243,00	9.075.753.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015.015.243,00	9.075.753.924,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	6 Laporan											
1655	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	14.921.500,00	14.921.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.921.500,00	14.921.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1656	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	18.140.000,00	18.140.000,00	221.977.300,00	221.977.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.117.300,00	240.117.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1657	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	77.229.424,00	77.229.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.229.424,00	77.229.424,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1658	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	35.880.500,00	35.880.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.880.500,00	35.880.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1659	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.996.100,00	4.996.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996.100,00	4.996.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1660	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	402.759.000,00	228.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.759.000,00	228.215.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	3 Laporan											
1661	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	0,00	0,00	189.401.500,00	294.406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.401.500,00	294.406.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1662	8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	416.922.740,00	416.922.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.922.740,00	416.922.740,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan	3 Laporan											
1663	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.994.800,00	11.994.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994.800,00	11.994.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1664	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130.000.000,00	139.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	139.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1665	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	916.019.544,00	830.659.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.019.544,00	830.659.070,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah terpelihara	5 Laporan											
1666	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23 unit Unit	790.100.000,00	804.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.100.000,00	804.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1667	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	19.960.000,00	19.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.960.000,00	19.960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1668	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	181.981.800,00	181.981.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.981.800,00	181.981.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1669	8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	16.880.000,00	37.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.880.000,00	37.680.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	92 %											
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang											
1670	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	1.196.846.794,00	1.223.475.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.846.794,00	1.223.475.089,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1671	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka													
			Jumlah Paskibraka	72 Orang	3.535.199.600,00	3.448.095.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535.199.600,00	3.448.095.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	85 %											
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum KepalaDaerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1200 Orang											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1672	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1200 Orang	24.374.767.294,00	24.179.333.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.374.767.294,00	24.179.333.089,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terdata	85 %											
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang											
1673	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang	681.089.000,00	990.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.089.000,00	990.317.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah	85 %											
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang											
1674	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	1.049.045.322,00	801.214.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.045.322,00	801.214.207,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial	95 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40 Orang											
1675	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40 Orang	676.176.212,00	3.152.903.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.176.212,00	3.152.903.802,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1676	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12 Dokumen	999.999.700,00	958.372.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.999.700,00	958.372.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN V

**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN
DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI
DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**



PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

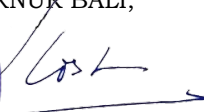
Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1				PELAYANAN UMUM										
1	01	1	01	Pendidikan	1.335.808.92 8.423,00	1.307.715.70 0.586,00	575.750.280, 00	815.257.500 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.384.67 8.703,00	1.308.530.95 8.086,00
1	01	1	02	Kesehatan	644.303.280. 862,00	671.950.619. 448,00	25.370.309.9 40,00	35.637.037. 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.673.590. 802,00	707.587.657. 322,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56.113.058.8 58,20	47.113.290.6 01,00	653.058.500, 00	646.176.800 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.766.117.3 58,20	47.759.467.4 01,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	52.303.158.8 87,00	47.997.574.0 71,00	5.347.201.60 0,00	5.380.824.6 24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.650.360.4 87,00	53.378.398.6 95,00
1	01	1	06	Sosial	26.359.157.3 65,00	23.777.668.2 49,00	3.534.046.60 0,00	5.289.644.4 65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.893.203.9 65,00	29.067.312.7 14,00
1	01	2	07	Tenaga Kerja	35.356.478.0 08,00	35.940.424.2 34,00	144.064.000, 00	152.010.960 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500.542.0 08,00	36.092.435.1 94,00
1	01	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	607.727.686, 00	470.036.373, 00	26.266.900,0 0	126.266.900 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.994.586, 00	596.303.273, 00
1	01	2	09	Pangan	570.389.570, 00	615.967.144, 00	17.648.960,0 0	16.771.460, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.038.530, 00	632.738.604, 00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	632.370.134, 00	507.384.917, 00	17.615.500,0 0	48.441.643, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.985.634, 00	555.826.560, 00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	589.682.750, 00	326.704.025, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.682.750, 00	326.704.025, 00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.716.072.9 27,00	25.396.262.6 08,00	0,00	66.263.600, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.716.072.9 27,00	25.462.526.2 08,00
1	01	2	15	Perhubungan	31.765.192.1 84,00	32.679.261.8 57,40	1.259.814.21 6,00	740.664.460 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.025.006.4 00,00	33.419.926.3 17,40

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	32.020.233.725,00	31.517.467.448,00	897.741.340,00	1.467.428.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.917.975.065,00	32.984.895.928,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19.484.045.702,00	15.948.780.362,00	972.452.200,00	955.055.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.456.497.902,00	16.903.835.662,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	18.687.270.400,00	17.034.847.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.687.270.400,00	17.034.847.795,00
1	01	2	20	Statistik	431.471.640,00	281.847.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.471.640,00	281.847.820,00
1	01	2	22	Kebudayaan	88.687.463.171,00	71.279.598.446,00	79.434.358.833,00	15.566.259.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.121.822.004,00	86.845.857.739,00
1	01	2	24	Kearsipan	751.603.126,00	576.120.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.603.126,00	576.120.481,00
1	01	3	25	Kelautan dan Perikanan	30.164.295.869,00	30.017.688.470,20	3.359.595.000,00	3.347.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.523.890.869,00	33.365.283.470,20
1	01	3	26	Pariwisata	15.971.578.094,00	24.377.082.606,00	274.162.200,00	724.253.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.245.740.294,00	25.101.336.494,00
1	01	3	27	Pertanian	67.024.386.021,00	59.085.432.556,00	167.607.800,00	159.156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.191.993.821,00	59.244.588.756,00
1	01	3	28	Kehutanan	46.863.572.188,00	43.891.823.773,00	0,00	446.257.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.863.572.188,00	44.338.081.085,00
1	01	3	30	Perdagangan	18.811.366.381,00	17.427.691.853,00	476.633.000,00	505.981.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.287.999.381,00	17.933.673.213,00
1	01	3	31	Perindustrian	184.771.302,00	261.738.097,00	10.613.160,00	411.249.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.384.462,00	672.987.857,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	210.340.008.488,00	273.502.228.232,00	34.883.686.067,00	38.911.259.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.223.694.555,00	312.413.487.275,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	244.318.471.976,00	253.963.069.629,00	33.823.260.412,00	38.567.104.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.141.732.388,00	292.530.173.777,00
1	01	5	01	Perencanaan	26.336.104.087,00	22.778.497.637,00	2.720.347.240,00	3.129.837.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056.451.327,00	25.908.334.842,00
1	01	5	02	Keuangan	222.167.260.604,00	193.765.807.717,00	9.565.211.589,00	13.478.962.003,00	151.187.931.213,00	55.923.938.944,00	787.453.202.628,00	1.344.164.836.020,00	1.170.373.606.034,00	1.607.333.544.684,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	01	5	03	Kepegawaian	48.414.453.589,00	56.663.145.772,00	1.601.183.000,00	3.658.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.015.636.589,00	60.321.528.772,00
1	01	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	1.518.830.394,00	1.232.466.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.830.394,00	1.232.466.689,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	22.163.525.639,00	24.972.788.562,00	1.121.764.840,00	1.914.807.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.285.290.479,00	26.887.596.102,00
1	01	5	07	Penghubung	9.372.901.876,00	10.144.407.649,00	516.301.207,00	873.415.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889.203.083,00	11.017.823.314,00
1	01	6	01	Inspektorat	36.954.528.203,00	34.051.151.092,00	1.709.720.040,00	1.893.023.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.664.248.243,00	35.944.174.832,00
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	45.280.165.833,00	46.314.918.705,00	828.301.540,00	933.306.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.108.467.373,00	47.248.225.245,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN										
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	34.718.255.235,00	30.550.960.865,00	3.072.131.469,00	3.072.131.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.790.386.704,00	33.623.092.334,00
2	03	1	06	Sosial	351.411.800,00	341.811.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.411.800,00	341.811.800,00
2	03	4	01	Sekretariat Daerah	4.578.799.210,00	3.907.074.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578.799.210,00	3.907.074.634,00
3				EKONOMI										
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	148.983.574.122,00	232.976.550.599,00	147.540.761.302,00	247.562.731.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.524.335.424,00	480.539.281.989,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	7.787.188.750,00	2.560.983.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787.188.750,00	2.560.983.100,00
3	04	2	09	Pangan	1.613.499.804,00	3.185.536.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.499.804,00	3.185.536.005,00
3	04	2	15	Perhubungan	15.882.342.059,00	71.154.021.171,00	795.443.200,00	959.443.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.677.785.259,00	72.113.464.371,00
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	55.267.782.810,00	51.704.354.448,00	302.535.745.010,00	161.874.237.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.803.527.820,00	213.578.591.746,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.351.217.54 6,00	6.126.105.02 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351.217.54 6,00	6.126.105.02 1,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	1.483.872.54 0,00	873.825.194, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.872.54 0,00	873.825.194, 00
3	04	2	21	Persandian	410.712.320, 00	294.555.205, 00	0,00	29.602.200, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.712.320, 00	324.157.405, 00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	2.550.757.68 4,00	2.629.465.46 4,00	100.260.000, 00	100.260.000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.017.68 4,00	2.729.725.46 4,00
3	04	3	27	Pertanian	27.853.595.8 54,00	47.339.740.3 43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.853.595.8 54,00	47.339.740.3 43,00
3	04	3	28	Kehutanan	228.400.730, 00	120.085.615, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.400.730, 00	120.085.615, 00
3	04	3	29	Energi dan Sumber Daya Mineral	115.499.500, 00	76.085.500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.499.500, 00	76.085.500,0 0
3	04	3	30	Perdagangan	1.806.347.48 4,00	1.442.412.34 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.347.48 4,00	1.442.412.34 4,00
3	04	3	31	Perindustrian	2.715.522.18 6,00	5.408.971.16 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.522.18 6,00	5.408.971.16 1,00
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP										
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.305.185.9 52,00	14.878.925.2 22,00	5.710.000.55 2,00	7.835.000.5 52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.015.186.5 04,00	22.713.925.7 74,00
4	05	2	10	Pertanahan	382.727.700, 00	6.113.479.70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.727.700, 00	6.113.479.70 0,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	10.227.631.1 65,00	16.389.853.3 37,00	2.925.000.00 0,00	9.224.394.0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.152.631.1 65,00	25.614.247.3 37,00
4	05	3	28	Kehutanan	89.554.810,0 0	161.666.105, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.554.810,0 0	161.666.105, 00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM										
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.460.133.3 06,00	36.020.272.6 71,00	37.022.050.1 55,00	41.022.050. 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.482.183.4 61,00	77.042.322.8 26,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.698.948.850,00	8.687.995.075,00	1.135.527.580,00	725.527.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834.476.430,00	9.413.522.655,00
6				KESEHATAN										
6	07	1	02	Kesehatan	40.948.676.178,00	43.340.921.394,00	70.897.234.075,00	73.376.651.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.845.910.253,00	116.717.573.345,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	678.793.860,00	474.711.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.793.860,00	474.711.630,00
7				PARIWISATA										
7	08	3	26	Pariwisata	8.192.610.074,00	6.504.588.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192.610.074,00	6.504.588.089,00
8				PENDIDIKAN										
8	10	1	01	Pendidikan	408.777.010.402,00	386.784.978.725,00	222.625.673.320,00	238.301.609.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.402.683.722,00	625.086.587.861,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	87.810.156.532,00	94.989.113.800,00	67.374.500,00	67.374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.877.531.032,00	95.056.488.300,00
8	10	2	22	Kebudayaan	533.250.563.292,00	540.181.314.072,00	64.043.500,00	64.043.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.314.606.792,00	540.245.357.572,00
8	10	2	23	Perpustakaan	565.598.328,00	323.970.632,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.598.328,00	368.970.632,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL										
9	11	1	06	Sosial	8.010.218.500,00	8.042.068.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010.218.500,00	8.042.068.200,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.588.375.500,00	1.452.716.900,00	4.115.256.000,00	4.115.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703.631.500,00	5.567.972.900,00
9	11	3	32	Transmigrasi	24.884.800,00	24.884.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.884.800,00	24.884.800,00
				TOTAL	4.880.783.654.845,20	5.048.643.494.325,60	1.007.960.216.627,00	964.238.008.694,00	151.187.931.213,00	55.923.938.944,00	787.453.202.628,00	1.344.164.836.020,00	6.827.385.005.313,20	7.412.970.277.983,60


 GUBERNUR BALI,

 WAYAN KOSTER

LAMPIRAN VI

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL



PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA
UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2025

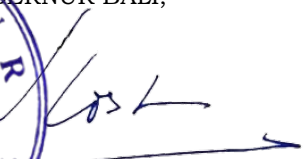
No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
A SPM Bidang Pendidikan				
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	138.370.000,00	90.910.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	3.533.566.200,00	3.523.966.200,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	85.899.900,00	76.299.900,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.871.116.400,00	8.871.116.400,00
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	68.000.000.000,00	68.000.000.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	4.704.150.000,00	4.704.150.000,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	56.800.000,00	37.600.000,00
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	22.212.384.000,00	22.612.384.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	5.393.781.500,00	5.633.745.400,00
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	4.012.000.000,00	4.012.000.000,00
Total			117.008.068.000,00	117.562.171.900,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
2.	Literasi dan Numerasi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	39.999.700,00	34.239.700,00
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	39.999.400,00	26.079.400,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	4.649.915.980,00	3.487.687.843,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	362.880.000,00	362.880.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	104.996.800,00	86.942.800,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	37.908.000,00	31.636.000,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	101.970.000,00	94.290.000,00
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	382.366.000,00	382.366.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	105.000.000,00	77.120.000,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	52.774.000,00	14.040.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	31.956.434.118,00	27.034.056.126,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	12.590.598.000,00	11.427.503.600,00
		Total		50.424.841.998,00
3.	Kekhususan SMK	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	104.628.200,00	86.574.200,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	522.432.000,00	460.992.000,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.955.825.000,00	1.718.208.400,00
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	47.370.185.000,00	47.370.185.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	105.000.000,00	88.862.000,00
Total		51.058.070.200,00	49.724.821.600,00	
4.	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	900.976.300,00	752.324.300,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	162.820.000,00	125.380.000,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	40.386.000,00	13.950.000,00
Total		1.104.182.300,00	891.654.300,00	
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			219.595.162.498,00	211.237.489.269,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
B SPM Bidang Kesehatan				
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	267.525.580,00	186.176.380,00
Total			267.525.580,00	186.176.380,00
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	141.542.800,00	70.891.400,00
Total			141.542.800,00	70.891.400,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			409.068.380,00	257.067.780,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	41.269.710.452,00	43.218.719.622,00
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	29.565.559.255,00	29.543.323.255,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.868.839.454,00	1.517.285.649,00
Total			72.704.109.161,00	74.279.328.526,00
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14.436.373.000,00	18.340.072.150,00
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	3.182.090.552,00	3.167.010.552,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	258.946.400,00	258.946.400,00
Total			17.877.409.952,00	21.766.029.102,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			90.581.519.113,00	96.045.357.628,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	125.033.700,00	111.749.700,00
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	175.149.750,00	88.481.225,00
Total			300.183.450,00	200.230.925,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			300.183.450,00	200.230.925,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum				
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	20.450.348.273,00	20.450.348.273,00
		Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	349.687.312,00	236.615.902,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	29.999.900,00	29.999.900,00
		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19.993.200,00	19.993.200,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
Total			20.850.028.685,00	20.736.957.275,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			20.850.028.685,00	20.736.957.275,00
F SPM Bidang Sosial				
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	220.000.000,00	155.516.600,00
		Penyediaan Alat Bantu	30.024.300,00	120.325.600,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	28.624.600,00	57.784.600,00
Total			2.778.648.900,00	2.833.626.800,00
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100.000.000,00	100.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	125.759.400,00	125.759.400,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	236.941.200,00	226.861.200,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	59.720.000,00	22.080.000,00
		Pengasuhan	91.401.500,00	91.401.500,00
		Penyediaan Makanan	1.882.032.600,00	2.078.897.100,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	21.680.300,00	21.680.300,00
		Penyediaan Sandang	89.750.000,00	89.750.000,00
Total			2.607.285.000,00	2.756.429.500,00
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	164.987.000,00	164.987.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	24.500.800,00	14.352.200,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	58.890.600,00	37.290.600,00
		Pemulasaraan	332.890.100,00	320.890.100,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.000.000,00	10.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	1.200.262.500,00	1.147.462.500,00
		Penyediaan Sandang	70.000.000,00	70.000.000,00
Total			1.871.531.000,00	1.764.982.400,00
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Pemulangan ke Daerah Asal	164.120.000,00	158.840.000,00
		Penyediaan Permakanan	19.999.400,00	19.999.400,00
Total			184.119.400,00	178.839.400,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	344.931.800,00	335.331.800,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.240.000,00	3.240.000,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.240.000,00	3.240.000,00
Total			351.411.800,00	341.811.800,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			7.792.996.100,00	7.875.689.900,00


 GUBERNUR BALI,

 WAYAN KOSTER

LAMPIRAN VII

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD



PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	1.336.384.678.703,00	1.308.530.958.086,00
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0,00	631.110.920.522,00	624.864.830.661,00
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0,00	126.764.100,00	102.298.100,00
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0,00	79.999.100,00	60.319.100,00
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	0,00	85.000.000,00	59.140.000,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	669.673.590.802,00	707.587.657.322,00
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	110.015.978.059,00	115.416.636.836,00
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	755.220.894,00	510.202.629,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0,00	389.259.970,00	233.749.065,00
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	685.451.330,00	556.984.815,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	56.766.117.358,20	47.759.467.401,00
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0,00	27.492.573.554,00	26.954.443.379,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	72.704.109.161,00	74.279.328.526,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00	17.877.409.952,00	21.766.029.102,00
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0,00	2.778.074.300,00	2.762.994.300,00
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0,00	126.606.924.300,00	210.399.437.300,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0,00	138.124.183.048,00	239.408.352.921,00
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	4.300.654.522,00	3.777.048.389,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0,00	2.137.776.552,00	947.896.672,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0,00	1.857.401.380,00	1.266.060.330,00
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	2.605.998.300,00	6.543.576.100,00
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	1.371.076.750,00	1.603.886.225,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	57.650.360.487,00	53.378.398.695,00
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	28.571.880.335,00	26.219.011.565,00
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	9.218.506.369,00	7.404.080.769,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	29.893.203.965,00	29.067.312.714,00
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	0,00	115.633.100,00	123.193.100,00
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	0,00	1.175.000,00	0,00
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	0,00	7.441.584.300,00	7.533.878.100,00
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0,00	142.567.700,00	55.758.600,00
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0,00	351.411.800,00	341.811.800,00
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	0,00	309.258.400,00	329.238.400,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	35.500.542.008,00	36.092.435.194,00
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0,00	287.347.600,00	291.120.100,00
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	0,00	102.977.100,00	99.137.100,00
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	0,00	6.960.714.000,00	1.744.175.850,00
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	0,00	436.150.050,00	426.550.050,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	633.994.586,00	596.303.273,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	114.967.700,00	169.369.300,00
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0,00	4.656.445.300,00	4.520.485.300,00
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0,00	11.878.600,00	9.958.600,00
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0,00	9.996.400,00	2.732.700,00
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0,00	817.082.900,00	780.566.400,00
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0,00	93.260.600,00	84.860.600,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	588.038.530,00	632.738.604,00
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0,00	493.326.192,00	1.617.709.142,00
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0,00	512.815.610,00	1.124.436.042,00
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0,00	607.358.002,00	443.390.821,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	0,00	75.876.000,00	5.882.758.000,00
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	0,00	86.847.700,00	23.521.700,00
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	0,00	220.004.000,00	207.200.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	649.985.634,00	555.826.560,00
2	11	02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	0,00	217.110.620,00	153.867.210,00
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	520.210.725,00	379.600.492,00
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0,00	73.261.000,00	40.041.000,00
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	0,00	58.056.300,00	37.816.300,00
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	0,00	19.999.700,00	10.399.700,00
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0,00	1.117.590.230,00	1.131.077.115,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0,00	57.999.700,00	34.399.700,00
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	19.994.300,00	10.394.300,00
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0,00	11.068.408.590,00	23.816.651.520,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	0,00	353.619.030,00	204.017.715,00
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	0,00	236.063.720,00	122.686.310,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	15.572.756.285,00	14.041.722.804,00
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	0,00	135.878.612,00	91.323.202,00
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	0,00	666.251.370,00	440.695.435,00
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	5.341.186.660,00	10.888.784.767,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	0,00	678.793.860,00	474.711.630,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	33.025.006.400,00	33.419.926.317,40
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	0,00	15.246.672.949,00	71.027.660.216,00
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0,00	784.178.850,00	584.527.925,00
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	0,00	646.933.460,00	501.276.230,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	32.917.975.065,00	32.984.895.928,00
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	0,00	12.609.073.172,00	10.121.323.906,00
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	0,00	345.194.454.648,00	203.457.267.840,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	20.456.497.902,00	16.903.835.662,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	0,00	308.686.594,00	789.809.889,00
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0,00	183.432.810,00	77.397.105,00
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0,00	2.615.568.416,00	4.399.123.302,00
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	0,00	192.110.220,00	87.702.810,00
2	17	07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0,00	635.576.002,00	404.183.821,00
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0,00	415.843.504,00	367.888.094,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	18.687.270.400,00	17.034.847.795,00
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0,00	215.186.230,00	140.433.115,00
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0,00	151.553.520,00	103.638.110,00
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0,00	818.735.740,00	435.076.657,00
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0,00	223.606.230,00	156.281.902,00
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	0,00	74.790.820,00	38.395.410,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	0,00	1.949.998.400,00	10.986.468.200,00
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	0,00	84.427.532.632,00	82.570.020.100,00
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	0,00	431.471.640,00	281.847.820,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	0,00	410.712.320,00	324.157.405,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	168.121.822.004,00	86.845.857.739,00
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	0,00	48.940.842.892,00	59.521.199.202,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	0,00	845.299.070,00	1.461.431.865,00
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	0,00	185.453.000,00	144.883.000,00
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	0,00	10.859.622.006,00	698.392.891,00
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0,00	5.796.891.000,00	5.658.917.100,00
2	22	09	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	0,00	466.686.498.824,00	472.760.533.514,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0,00	500.465.344,00	293.666.435,00
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0,00	110.132.984,00	75.304.197,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	0,00	751.603.126,00	576.120.481,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	33.523.890.869,00	33.365.283.470,20
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	0,00	154.596.492,00	288.231.492,00
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0,00	472.272.902,00	456.739.697,00
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	0,00	1.023.918.104,00	968.135.194,00
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	181.509.884,00	150.791.884,00
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0,00	818.720.302,00	865.827.197,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	16.245.740.294,00	25.101.336.494,00
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	0,00	1.051.520.156,00	623.848.516,00
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0,00	5.920.600.136,00	4.894.574.906,00
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	0,00	157.368.084,00	140.088.084,00
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0,00	1.063.121.698,00	846.076.583,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	67.191.993.821,00	59.244.588.756,00
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	14.937.925.066,00	35.496.475.195,00
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00	1.130.808.892,00	1.554.210.222,00
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0,00	10.400.607.072,00	9.312.187.885,00
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0,00	1.251.181.194,00	848.586.526,00
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	0,00	133.073.630,00	128.280.515,00
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
3	28	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	46.863.572.188,00	44.338.081.085,00
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	0,00	198.400.230,00	103.565.115,00
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	30.000.500,00	16.520.500,00
3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	0,00	89.554.810,00	161.666.105,00
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0,00	8.000.000,00	4.160.000,00
3	29	03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	0,00	12.500.000,00	10.100.000,00
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	0,00	94.999.500,00	61.825.500,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	19.287.999.381,00	17.933.673.213,00
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	0,00	302.955.644,00	198.569.414,00
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	0,00	24.968.600,00	13.442.800,00
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	0,00	243.576.100,00	147.180.600,00
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0,00	99.999.600,00	48.499.200,00
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0,00	834.014.578,00	761.690.873,00
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0,00	300.832.962,00	273.029.457,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	195.384.462,00	672.987.857,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
3	31	02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0,00	2.665.522.286,00	5.382.011.261,00
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0,00	49.999.900,00	26.959.900,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0,00	24.884.800,00	24.884.800,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	180.207.586.384,00	209.481.313.818,00
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	0,00	945.287.760,00	793.973.186,00
4	01	03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	0,00	2.474.593.012,00	1.736.831.282,00
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	29.340.774.424,00	67.038.191.764,00
4	01	05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	0,00	4.578.799.210,00	3.907.074.634,00
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0,00	796.859.800,00	905.328.800,00
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	31.369.793.175,00	32.396.033.425,00
4	01	08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0,00	88.800.000,00	61.815.000,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD			
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	133.739.752.666,00	142.525.125.817,00
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	0,00	144.401.979.722,00	150.005.047.960,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	23.240.773.183,00	21.829.938.198,00
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	3.549.418.406,00	2.319.080.141,00
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	2.266.259.738,00	1.759.316.503,00
5	02		KEUANGAN			
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	204.173.094.896,00	186.242.990.455,00
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0,00	944.910.893.420,00	1.405.838.529.823,00
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0,00	4.181.478.112,00	4.422.765.424,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	17.108.139.606,00	10.829.258.982,00
5	03		KEPEGAWAIAN			
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	43.560.217.737,00	55.022.498.570,00
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	6.455.418.852,00	5.299.030.202,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	1.518.830.394,00	1.232.466.689,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	15.856.330.579,00	15.358.909.702,00
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	7.428.959.900,00	11.528.686.400,00
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG			
5	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	6.928.728.616,00	7.796.514.387,00
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	0,00	2.960.474.467,00	3.221.308.927,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	31.979.995.651,00	31.603.939.415,00
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0,00	3.579.009.588,00	2.034.965.370,00
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	0,00	3.105.243.004,00	2.305.270.047,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	13.595.343.451,00	12.494.514.658,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0,00	4.732.046.394,00	4.671.570.389,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0,00	24.374.767.294,00	24.179.333.089,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	681.089.000,00	990.317.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	1.049.045.322,00	801.214.207,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	1.676.175.912,00	4.111.275.902,00

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

LAMPIRAN VIII

**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA DENGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**



PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0000						Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.063.620.648.771,00	2.010.006.201.371,00	2.025.939.279.447,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.978.898.137.471,00	1.925.441.322.871,00	1.930.882.791.147,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.978.898.137.471,00	1.925.441.322.871,00	1.930.882.791.147,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	641.352.072.777,00	623.895.980.326,00	623.701.468.661,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	303.861.587.328,00	293.591.789.139,00	293.515.552.474,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	68.000.000.000,00	68.000.000.000,00	68.000.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0036	Pengadaan Mebel Sekolah	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0041	Pengadaaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	382.366.000,00	382.366.000,00	382.366.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	4.704.150.000,00	4.704.150.000,00	4.704.150.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.768.179.000,00	2.768.028.800,00	2.768.028.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	31.956.434.118,00	27.034.056.126,00	27.034.056.126,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	77.120.000,00	77.120.000,00	77.120.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	125.380.000,00	125.380.000,00	125.380.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	170.812.122.210,00	165.502.406.613,00	165.426.169.948,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	57.409.900,00	57.409.900,00	57.409.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	76.299.900,00	76.299.900,00	76.299.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	44.690.000,00	44.690.000,00	44.690.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.871.116.400,00	8.871.116.400,00	8.871.116.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	86.942.800,00	86.942.800,00	86.942.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	10.919.377.000,00	10.881.822.600,00	10.881.822.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	311.551.509.717,00	305.551.944.844,00	305.551.944.844,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	22.212.384.000,00	22.612.384.000,00	22.612.384.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11.150.616.000,00	11.150.616.000,00	11.150.616.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	3.914.925.900,00	3.914.925.900,00	3.914.925.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0033	Pengadaaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	47.370.185.000,00	47.370.185.000,00	47.370.185.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	5.338.581.500,00	5.633.745.400,00	5.633.745.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.418.875.000,00	1.718.208.400,00	1.718.208.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	20.272.868.244,00	16.854.550.194,00	16.854.550.194,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	88.862.000,00	88.862.000,00	88.862.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	460.992.000,00	460.992.000,00	460.992.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	184.860.785.993,00	182.279.551.870,00	182.279.551.870,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	45.760.000,00	51.250.000,00	51.250.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	37.600.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	68.960.000,00	68.960.000,00	68.960.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	4.012.000.000,00	4.012.000.000,00	4.012.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	9.211.539.880,00	9.211.539.880,00	9.211.539.880,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	86.574.200,00	86.574.200,00	86.574.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	25.938.975.732,00	24.752.246.343,00	24.633.971.343,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	3.523.966.200,00	3.523.966.200,00	3.523.966.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.431.464.000,00	1.431.464.000,00	1.322.189.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	4.649.915.980,00	3.487.687.843,00	3.487.687.843,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	761.324.300,00	761.324.300,00	752.324.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	11.288.796.052,00	11.264.294.800,00	11.264.294.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	15.547.600,00	15.547.600,00	15.547.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	90.910.000,00	90.910.000,00	90.910.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	16.171.600,00	16.171.600,00	16.171.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.918.000.000,00	1.918.000.000,00	1.918.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	362.880.000,00	362.880.000,00	362.880.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	60.319.100,00	60.319.100,00	60.319.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	60.319.100,00	60.319.100,00	60.319.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	26.079.400,00	26.079.400,00	26.079.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	34.239.700,00	34.239.700,00	34.239.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.337.485.745.594,00	1.301.485.023.445,00	1.307.121.003.386,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	193.750.900,00	193.750.900,00	185.200.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.979.500,00	85.979.500,00	77.429.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	107.771.400,00	107.771.400,00	107.771.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.322.423.300.012,00	1.287.577.140.086,00	1.293.262.292.519,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.320.993.293.712,00	1.286.147.133.786,00	1.291.832.286.219,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.284.575.800,00	1.284.575.800,00	1.284.575.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	145.430.500,00	145.430.500,00	145.430.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	766.145.000,00	766.145.000,00	766.145.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	766.145.000,00	766.145.000,00	766.145.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.193.400,00	68.193.400,00	68.193.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	68.193.400,00	68.193.400,00	68.193.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	986.579.810,00	1.144.000.610,00	1.129.444.610,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	459.411.560,00	616.832.360,00	616.832.360,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.840.000,00	10.840.000,00	10.840.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.526.250,00	31.526.250,00	31.526.250,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	389.802.000,00	389.802.000,00	375.246.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.847.361.472,00	8.535.378.449,00	8.509.311.957,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	978.222.150,00	978.222.150,00	978.222.150,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.869.139.322,00	7.557.156.299,00	7.531.089.807,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.200.415.000,00	3.200.415.000,00	3.200.415.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	954.685.000,00	954.685.000,00	954.685.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.977.200.000,00	1.977.200.000,00	1.977.200.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	268.530.000,00	268.530.000,00	268.530.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	84.722.511.300,00	84.564.878.500,00	95.056.488.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	84.722.511.300,00	84.564.878.500,00	95.056.488.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.255.080.400,00	1.254.868.400,00	10.986.468.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1.255.080.400,00	1.254.868.400,00	10.986.468.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	0,00	0,00	9.731.599.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	36.390.000,00	36.390.000,00	36.390.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	148.051.900,00	148.051.900,00	148.051.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	193.722.000,00	192.831.500,00	192.831.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	775.739.500,00	778.887.500,00	778.887.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	101.177.000,00	98.707.500,00	98.707.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	81.967.430.900,00	81.810.010.100,00	82.570.020.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	21.650.590.900,00	21.493.170.100,00	21.493.180.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	13.526.517.500,00	14.135.386.700,00	14.310.452.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	8.124.073.400,00	7.357.783.400,00	7.182.727.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	316.840.000,00	316.840.000,00	316.840.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.03	0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	316.840.000,00	316.840.000,00	316.840.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.760.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.760.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	1.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001						UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	2.198.234.366,00	1.997.568.065,00	1.997.568.065,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0001	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.198.234.366,00	1.997.568.065,00	1.997.568.065,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.198.234.366,00	1.997.568.065,00	1.997.568.065,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.163.362.000,00	1.163.362.000,00	1.163.362.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	685.647.000,00	685.647.000,00	685.647.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	94.290.000,00	94.290.000,00	94.290.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	14.040.000,00	14.040.000,00	14.040.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	31.636.000,00	31.636.000,00	31.636.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	545.681.000,00	545.681.000,00	545.681.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	477.715.000,00	477.715.000,00	477.715.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	77.760.000,00	77.760.000,00	77.760.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	31.374.000,00	31.374.000,00	31.374.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.02	0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	354.631.000,00	354.631.000,00	354.631.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.034.872.366,00	834.206.065,00	834.206.065,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.880.100,00	169.801.800,00	169.801.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.162.500,00	139.084.200,00	139.084.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.499.600,00	3.499.600,00	3.499.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.218.000,00	27.218.000,00	27.218.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	755.752.266,00	556.164.265,00	556.164.265,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	755.752.266,00	556.164.265,00	556.164.265,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.240.000,00	108.240.000,00	108.240.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.400.000,00	98.400.000,00	98.400.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0002						UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	811.530.342,00	722.630.735,00	737.186.735,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	87.742.100,00	87.742.100,00	102.298.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	60.376.800,00	60.376.800,00	67.654.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	03	1.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	60.376.800,00	60.376.800,00	67.654.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	27.365.300,00	27.365.300,00	34.643.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	03	1.02	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	27.365.300,00	27.365.300,00	34.643.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	59.140.000,00	59.140.000,00	59.140.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	59.140.000,00	59.140.000,00	59.140.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	06	1.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	59.140.000,00	59.140.000,00	59.140.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	664.648.242,00	575.748.635,00	575.748.635,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.440.600,00	32.440.600,00	32.440.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.613.000,00	8.613.000,00	8.613.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.547.600,00	6.547.600,00	6.547.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.280.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	541.397.642,00	452.498.035,00	452.498.035,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	541.397.642,00	452.498.035,00	452.498.035,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.810.000,00	90.810.000,00	90.810.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.810.000,00	90.810.000,00	90.810.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kesehatan	338.833.668.623,00	342.440.940.464,00	328.620.964.157,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	338.833.668.623,00	342.440.940.464,00	328.620.964.157,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	29.136.354.690,00	28.784.573.725,00	28.830.653.725,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	28.850.109.360,00	28.514.606.100,00	28.560.686.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	208.365.580,00	186.176.380,00	186.176.380,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	109.857.800,00	70.891.400,00	70.891.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	198.797.730,00	149.964.615,00	149.964.615,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	137.301.520,00	137.301.520,00	137.301.520,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	204.191.520,00	204.191.520,00	204.191.520,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	109.976.400,00	90.493.200,00	90.493.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	88.276.492,00	88.276.492,00	134.356.492,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.434.272.498,00	2.268.289.953,00	2.268.289.953,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	53.127.000,00	53.127.000,00	53.127.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	24.657.838.700,00	24.657.838.700,00	24.657.838.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	112.280.000,00	112.280.000,00	112.280.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	399.741.520,00	399.741.520,00	399.741.520,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	98.582.600,00	58.533.800,00	58.533.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	89.529.110,00	73.251.405,00	73.251.405,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	89.529.110,00	73.251.405,00	73.251.405,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	196.716.220,00	196.716.220,00	196.716.220,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	101.876.540,00	101.876.540,00	101.876.540,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	94.839.680,00	94.839.680,00	94.839.680,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	232.728.360,00	212.162.760,00	212.162.760,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	176.894.460,00	156.328.860,00	156.328.860,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	176.894.460,00	156.328.860,00	156.328.860,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	55.833.900,00	55.833.900,00	55.833.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	44.313.900,00	44.313.900,00	44.313.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	269.509.970,00	233.749.065,00	233.749.065,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	184.423.570,00	168.145.865,00	168.145.865,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	184.423.570,00	168.145.865,00	168.145.865,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	85.086.400,00	65.603.200,00	65.603.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	85.086.400,00	65.603.200,00	65.603.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	464.042.730,00	415.209.615,00	556.984.815,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	357.317.730,00	308.484.615,00	308.484.615,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	357.317.730,00	308.484.615,00	308.484.615,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	85.600.000,00	85.600.000,00	227.375.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	85.600.000,00	85.600.000,00	227.375.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	21.125.000,00	21.125.000,00	21.125.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	21.125.000,00	21.125.000,00	21.125.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	308.731.032.873,00	312.795.245.299,00	298.787.413.792,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.402.210,00	81.124.505,00	81.124.505,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.666.800,00	51.666.800,00	51.666.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.735.410,00	29.457.705,00	29.457.705,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	299.367.555.223,00	303.779.006.279,00	289.547.046.672,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	299.173.273.209,00	303.633.557.380,00	289.281.147.773,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	194.282.014,00	145.448.899,00	265.898.899,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.530.245.594,00	1.525.514.094,00	1.676.242.194,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.583.700,00	8.583.700,00	8.583.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.069.751.200,00	1.056.019.700,00	1.061.851.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	273.968.394,00	273.968.394,00	273.968.394,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77.170.300,00	77.170.300,00	90.081.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.772.000,00	100.772.000,00	232.757.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.379.058.346,00	6.052.828.921,00	6.066.828.921,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	484.500.000,00	484.500.000,00	484.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.894.558.346,00	5.568.328.921,00	5.582.328.921,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.356.771.500,00	1.356.771.500,00	1.416.171.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	515.400.000,00	515.400.000,00	515.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.769.500,00	81.769.500,00	141.169.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	759.602.000,00	759.602.000,00	759.602.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001						UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	5.435.016.046,00	5.271.844.101,00	5.797.088.101,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	295.385.034,00	213.996.509,00	242.840.509,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	295.385.034,00	213.996.509,00	242.840.509,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	295.385.034,00	213.996.509,00	242.840.509,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.139.631.012,00	5.057.847.592,00	5.554.247.592,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	319.350.500,00	302.677.900,00	302.677.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.924.000,00	17.924.000,00	17.924.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.584.400,00	111.911.800,00	111.911.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.458.100,00	155.458.100,00	155.458.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.134.000,00	6.134.000,00	6.134.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.174.585.512,00	1.109.474.692,00	1.109.474.692,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	363.900.000,00	363.900.000,00	363.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	810.685.512,00	745.574.692,00	745.574.692,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.145.695.000,00	1.145.695.000,00	1.142.095.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.175.000,00	39.175.000,00	39.175.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.520.000,00	56.520.000,00	52.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0002						UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa	9.736.301.689,00	9.452.345.499,00	9.683.150.316,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	195.077.120,00	139.008.800,00	139.008.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	195.077.120,00	139.008.800,00	139.008.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	1.01	0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	195.077.120,00	139.008.800,00	139.008.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.541.224.569,00	9.313.336.699,00	9.544.141.516,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	492.940.500,00	492.940.500,00	477.424.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.895.200,00	82.895.200,00	67.379.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	410.045.300,00	410.045.300,00	410.045.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.746.835.086,00	1.518.947.216,00	1.519.547.216,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	644.000.000,00	644.000.000,00	644.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.102.835.086,00	874.947.216,00	875.547.216,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.370.000,00	345.370.000,00	347.170.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.100.000,00	108.100.000,00	108.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.270.000,00	144.270.000,00	146.070.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	6.956.078.983,00	6.956.078.983,00	7.200.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.956.078.983,00	6.956.078.983,00	7.200.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003						UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	6.485.355.390,00	5.826.207.545,00	8.967.179.509,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.021.804.820,00	2.411.614.090,00	4.349.441.560,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3.021.804.820,00	2.411.614.090,00	4.349.441.560,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	102.880.400,00	64.996.400,00	64.996.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	158.690.210,00	98.034.105,00	98.034.105,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1.017.847.192,00	786.038.672,00	811.728.172,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.742.387.018,00	1.462.544.913,00	3.374.682.883,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.463.550.570,00	3.414.593.455,00	4.617.737.949,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	902.580.120,00	902.456.120,00	1.880.200.614,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.015.500,00	5.015.500,00	5.015.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	651.780.020,00	651.656.020,00	1.629.400.514,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	202.695.800,00	202.695.800,00	202.695.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.790.800,00	19.790.800,00	19.790.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.798.000,00	21.798.000,00	21.798.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.086.875.510,00	1.038.042.395,00	1.038.042.395,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.500.000,00	98.500.000,00	98.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	988.375.510,00	939.542.395,00	939.542.395,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.474.094.940,00	1.474.094.940,00	1.699.494.940,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	263.900.000,00	263.900.000,00	263.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.690.000,00	50.690.000,00	52.490.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.159.504.940,00	1.159.504.940,00	1.383.104.940,00
1.02.0.00.0.00.01.0004						RSUD Bali Mandara	284.941.693.514,00	279.649.255.619,00	279.657.255.619,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	54.255.586.205,00	54.255.586.205,00	54.255.586.205,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	54.255.586.205,00	54.255.586.205,00	54.255.586.205,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	45.978.212.000,00	45.978.212.000,00	45.978.212.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	8.277.374.205,00	8.277.374.205,00	8.277.374.205,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	230.686.107.309,00	225.393.669.414,00	225.401.669.414,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.686.107.309,00	25.393.669.414,00	25.401.669.414,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.686.107.309,00	25.393.669.414,00	25.401.669.414,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005						Rumah Sakit Jiwa	54.564.212.278,00	52.886.260.683,00	54.906.260.683,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	16.659.813.670,00	16.659.813.670,00	16.659.813.670,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	16.659.813.670,00	16.659.813.670,00	16.659.813.670,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	16.659.813.670,00	16.659.813.670,00	16.659.813.670,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.904.398.608,00	36.226.447.013,00	38.246.447.013,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.904.398.608,00	10.226.447.013,00	10.246.447.013,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.114.110.402,00	1.114.110.402,00	1.114.110.402,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.790.288.206,00	9.112.336.611,00	9.132.336.611,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	28.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	28.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006						Rumah Sakit Mata Bali Mandara	93.000.000.000,00	93.000.000.000,00	93.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	93.000.000.000,00	93.000.000.000,00	93.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007						UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	10.482.523.866,00	9.972.197.466,00	10.074.597.466,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.874.943.754,00	5.647.943.894,00	5.636.736.094,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4.851.273.960,00	4.753.236.430,00	4.753.236.430,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	360.783.000,00	360.783.000,00	360.783.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.490.490.960,00	4.392.453.430,00	4.392.453.430,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.023.669.794,00	894.707.464,00	883.499.664,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1.023.669.794,00	894.707.464,00	883.499.664,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.607.580.112,00	4.324.253.572,00	4.437.861.372,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	680.691.200,00	672.586.300,00	683.794.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.575.400,00	11.575.400,00	11.575.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	252.289.300,00	244.184.400,00	255.392.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	408.786.200,00	408.786.200,00	408.786.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.720.300,00	3.720.300,00	3.720.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	906.126.200,00	906.126.200,00	1.006.126.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	56.126.200,00	56.126.200,00	56.126.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	850.000.000,00	850.000.000,00	950.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.898.521.612,00	1.768.299.972,00	1.768.299.972,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	780.000.000,00	780.000.000,00	780.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.113.439.612,00	983.217.972,00	983.217.972,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.122.241.100,00	977.241.100,00	979.641.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	532.441.100,00	387.441.100,00	389.841.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	492.000.000,00	492.000.000,00	492.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008						Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya	28.628.426.900,00	28.628.426.840,00	33.598.734.816,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.713.622.900,00	4.713.926.300,00	5.545.396.782,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4.713.622.900,00	4.713.926.300,00	5.545.396.782,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1.112.792.100,00	1.112.792.100,00	1.944.262.582,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.600.830.800,00	3.601.134.200,00	3.601.134.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	42.953.900,00	42.953.900,00	55.199.360,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	42.953.900,00	42.953.900,00	55.199.360,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	42.953.900,00	42.953.900,00	55.199.360,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.871.850.100,00	23.871.546.640,00	27.998.138.674,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.064.071.200,00	1.064.047.740,00	1.277.735.050,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	992.955.200,00	992.931.740,00	1.206.619.050,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.116.000,00	71.116.000,00	71.116.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.589.845.900,00	1.589.845.900,00	217.865.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	471.980.900,00	471.980.900,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	217.865.000,00	217.865.000,00	217.865.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	837.033.000,00	836.753.000,00	911.753.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.280.000,00	250.000.000,00	325.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	586.753.000,00	586.753.000,00	586.753.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	905.900.000,00	905.900.000,00	1.725.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.000.000,00	54.000.000,00	174.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	221.900.000,00	221.900.000,00	271.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	630.000.000,00	630.000.000,00	1.280.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	19.475.000.000,00	19.475.000.000,00	23.864.885.624,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	19.475.000.000,00	19.475.000.000,00	23.864.885.624,00
1.03.1.04.0.00.01.0001						UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	3.920.805.940,00	3.920.805.940,00	3.622.829.827,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.920.805.940,00	3.920.805.940,00	3.622.829.827,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.785.872.610,00	2.785.872.610,00	2.614.977.855,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	2.785.872.610,00	2.785.872.610,00	2.614.977.855,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	2.785.872.610,00	2.785.872.610,00	2.614.977.855,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.134.933.330,00	1.134.933.330,00	1.007.851.972,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.556.900,00	93.556.900,00	93.556.900,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.782.000,00	11.782.000,00	11.782.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.930.200,00	20.930.200,00	20.930.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.638.700,00	4.638.700,00	4.638.700,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.446.000,00	4.446.000,00	4.446.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.626.300,00	117.626.300,00	114.255.500,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	70.010.800,00	70.010.800,00	66.640.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.615.500,00	47.615.500,00	47.615.500,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.193.200,00	221.193.200,00	221.193.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.193.200,00	1.193.200,00	1.193.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	702.556.930,00	702.556.930,00	578.846.372,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	329.075.880,00	329.075.880,00	263.965.060,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.960.000,00	23.960.000,00	23.960.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	349.521.050,00	349.521.050,00	290.921.312,00
1.03.1.04.0.00.01.0002						UPTD Pengelolaan Air Minum	38.269.710.452,00	36.218.719.622,00	43.218.719.622,00
1.03.1.04.0.00.01.0002	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	38.269.710.452,00	36.218.719.622,00	43.218.719.622,00
1.03.1.04.0.00.01.0002	1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	38.269.710.452,00	36.218.719.622,00	43.218.719.622,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.03.1.04.0.00.01.0002	1	03	03	1.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	38.269.710.452,00	36.218.719.622,00	43.218.719.622,00
1.03.1.04.0.00.01.0003						UPTD Pengelolaan Air Limbah	16.436.373.000,00	15.340.072.150,00	18.340.072.150,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	16.436.373.000,00	15.340.072.150,00	18.340.072.150,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	16.436.373.000,00	15.340.072.150,00	18.340.072.150,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	05	1.01	0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	16.436.373.000,00	15.340.072.150,00	18.340.072.150,00
1.03.1.04.2.10.01.0000						Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	452.790.974.923,00	515.723.236.616,00	578.400.378.746,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	27.568.323.054,00	26.998.603.379,00	26.954.443.379,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12.603.641.220,00	12.603.641.220,00	12.600.071.220,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0009	Pembangunan Tanggul Sungai	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	217.073.500,00	217.073.500,00	216.563.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	11.293.200.000,00	11.293.200.000,00	11.293.200.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	310.353.300,00	310.353.300,00	310.353.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	210.236.200,00	210.236.200,00	209.216.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	572.778.220,00	572.778.220,00	570.738.220,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	14.964.681.834,00	14.394.962.159,00	14.354.372.159,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	9.575.918.330,00	9.527.085.215,00	9.527.085.215,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.799.225.634,00	3.392.283.009,00	3.354.753.009,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.589.537.870,00	1.475.593.935,00	1.472.533.935,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	31.402.440.709,00	31.060.608.904,00	31.060.608.904,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	31.402.440.709,00	31.060.608.904,00	31.060.608.904,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.859.117.454,00	1.517.285.649,00	1.517.285.649,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	29.543.323.255,00	29.543.323.255,00	29.543.323.255,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.425.956.952,00	3.425.956.952,00	3.425.956.952,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	3.425.956.952,00	3.425.956.952,00	3.425.956.952,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	3.167.010.552,00	3.167.010.552,00	3.167.010.552,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	258.946.400,00	258.946.400,00	258.946.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	2.762.994.300,00	2.762.994.300,00	2.762.994.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	2.762.994.300,00	2.762.994.300,00	2.762.994.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07	1.01	0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	2.762.994.300,00	2.762.994.300,00	2.762.994.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	164.638.342.300,00	239.638.342.300,00	210.399.437.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	164.638.342.300,00	239.638.342.300,00	210.399.437.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	158.161.555.800,00	233.261.555.800,00	203.922.650.800,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.476.786.500,00	6.376.786.500,00	6.476.786.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	149.152.544.485,00	147.797.656.615,00	239.408.352.921,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	149.152.544.485,00	147.797.656.615,00	239.408.352.921,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	79.206.000,00	79.206.000,00	79.206.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	16.726.643.413,00	16.726.643.413,00	23.776.643.413,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan	58.369.753.120,00	58.369.753.120,00	58.369.753.120,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	25.538.155.276,00	24.248.378.226,00	24.248.378.226,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	21.962.734.461,00	21.962.734.461,00	106.169.930.112,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	16.246.134.607,00	16.246.134.607,00	16.099.635.262,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	8.409.202.000,00	8.409.202.000,00	8.909.202.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0042	Pembangunan Jalan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.720.715.608,00	1.655.604.788,00	1.655.604.788,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0044	Pengelolaan Leger Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.251.891.912,00	1.108.611.526,00	1.162.070.534,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	819.430.222,00	770.597.107,00	770.597.107,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	819.430.222,00	770.597.107,00	770.597.107,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	432.461.690,00	338.014.419,00	391.473.427,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	191.515.540,00	171.982.294,00	131.915.802,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	240.946.150,00	166.032.125,00	259.557.625,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.488.214.952,00	1.227.771.672,00	947.896.672,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	59.292.100,00	59.292.100,00	36.792.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.01	0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	59.292.100,00	59.292.100,00	36.792.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	702.511.870,00	588.567.935,00	231.192.935,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02	0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	702.511.870,00	588.567.935,00	231.192.935,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	335.639.550,00	254.251.025,00	154.251.025,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03	0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	296.306.950,00	214.918.425,00	114.918.425,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	39.332.600,00	39.332.600,00	39.332.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	390.771.432,00	325.660.612,00	525.660.612,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	140.220.800,00	140.220.800,00	140.220.800,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	250.550.632,00	185.439.812,00	385.439.812,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	55.311.398.129,00	46.157.988.413,00	46.751.615.429,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	646.726.604,00	451.394.144,00	451.394.144,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	373.006.372,00	242.784.732,00	242.784.732,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	273.720.232,00	208.609.412,00	208.609.412,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.066.016.071,00	41.433.492.915,00	41.433.492.915,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.066.016.071,00	41.433.492.915,00	41.433.492.915,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.280.720,00	494.280.720,00	1.128.840.720,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.172.600,00	22.172.600,00	22.172.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.485.000,00	57.485.000,00	57.485.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.820.120,00	50.820.120,00	50.820.120,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.734.000,00	66.734.000,00	66.734.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.816.000,00	15.816.000,00	15.816.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	52.250.000,00	52.250.000,00	52.250.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.003.000,00	229.003.000,00	863.563.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	544.881.300,00	544.881.300,00	544.881.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	82.638.800,00	82.638.800,00	82.638.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	462.242.500,00	462.242.500,00	462.242.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.042.456.040,00	1.042.456.040,00	1.042.456.040,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.190.600,00	7.190.600,00	7.190.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	436.600.000,00	436.600.000,00	436.600.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.770.000,00	49.770.000,00	49.770.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	548.895.440,00	548.895.440,00	548.895.440,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.517.037.394,00	2.191.483.294,00	2.150.550.310,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.568.132.460,00	1.568.132.460,00	1.527.199.476,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	192.696.230,00	143.863.115,00	143.863.115,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	756.208.704,00	479.487.719,00	479.487.719,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.667.688.430,00	9.423.522.855,00	9.413.522.655,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.838.837.380,00	1.676.060.330,00	1.266.060.330,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	281.619.450,00	200.230.925,00	200.230.925,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	169.869.750,00	88.481.225,00	88.481.225,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01	0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	111.749.700,00	111.749.700,00	111.749.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.557.217.930,00	1.475.829.405,00	1.065.829.405,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	1.557.217.930,00	1.475.829.405,00	1.065.829.405,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.523.090.300,00	6.523.090.300,00	6.543.576.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	6.523.090.300,00	6.523.090.300,00	6.543.576.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5.531.654.300,00	5.531.654.300,00	5.552.140.100,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	991.436.000,00	991.436.000,00	991.436.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.305.760.750,00	1.224.372.225,00	1.603.886.225,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.305.760.750,00	1.224.372.225,00	1.603.886.225,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	8.518.400,00	8.518.400,00	358.918.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.255.283.350,00	1.173.894.825,00	1.173.894.825,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	41.959.000,00	41.959.000,00	71.073.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.121.179.700,00	6.121.179.700,00	6.113.479.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	6.121.179.700,00	6.121.179.700,00	6.113.479.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	5.882.758.000,00	5.882.758.000,00	5.882.758.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	05	1.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5.882.758.000,00	5.882.758.000,00	5.882.758.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	05	1.01	0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5.882.758.000,00	5.882.758.000,00	5.882.758.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	31.221.700,00	31.221.700,00	23.521.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	06	1.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	31.221.700,00	31.221.700,00	23.521.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	06	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	31.221.700,00	31.221.700,00	23.521.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	207.200.000,00	207.200.000,00	207.200.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	207.200.000,00	207.200.000,00	207.200.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	207.200.000,00	207.200.000,00	207.200.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000						Satuan Polisi Pamong Praja	57.071.537.968,00	53.610.945.194,00	54.221.190.392,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	57.071.537.968,00	53.610.945.194,00	54.221.190.392,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	57.071.537.968,00	53.610.945.194,00	54.221.190.392,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.906.001.735,00	25.701.451.565,00	26.219.011.565,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	25.171.533.677,00	24.243.704.492,00	24.597.104.492,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	58.998.610,00	42.720.905,00	42.720.905,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	29.999.900,00	29.999.900,00	29.999.900,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	20.450.348.273,00	20.450.348.273,00	20.450.348.273,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	81.949.400,00	81.949.400,00	81.949.400,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19.993.200,00	19.993.200,00	19.993.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	103.555.110,00	87.277.405,00	87.277.405,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4.207.317.872,00	3.344.599.507,00	3.648.199.507,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	219.371.312,00	186.815.902,00	236.615.902,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.734.468.058,00	1.457.747.073,00	1.549.907.073,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12.181.200,00	12.181.200,00	12.181.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1.419.622.038,00	1.175.456.463,00	1.233.056.463,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	302.664.820,00	270.109.410,00	304.669.410,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	0,00	0,00	72.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0,00	0,00	72.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.165.536.233,00	27.909.493.629,00	28.002.178.827,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.998.328.311,00	23.002.728.987,00	23.004.273.585,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.998.328.311,00	23.002.728.987,00	23.004.273.585,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	795.582.690,00	795.582.690,00	863.723.290,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.706.800,00	40.706.800,00	40.706.800,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	551.436.600,00	551.436.600,00	544.290.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.033.390,00	106.033.390,00	106.033.390,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.301.900,00	12.301.900,00	12.301.900,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.104.000,00	85.104.000,00	160.391.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.985.300,00	103.985.300,00	103.985.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	103.985.300,00	103.985.300,00	103.985.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.140.116.342,00	895.950.767,00	895.950.767,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.998.700,00	2.998.700,00	2.998.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.720.000,00	48.720.000,00	48.720.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	923.397.642,00	679.232.067,00	679.232.067,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.106.523.590,00	3.090.245.885,00	3.113.245.885,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.841.523.590,00	2.825.245.885,00	2.839.245.885,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.000.000,00	190.000.000,00	199.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.501.346.374,00	24.559.699.193,00	25.125.996.194,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.125.667.400,00	3.067.878.800,00	3.067.878.800,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	109.275.000,00	109.275.000,00	109.275.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	109.275.000,00	109.275.000,00	109.275.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.417.754.600,00	1.359.966.000,00	1.359.966.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	380.586.200,00	380.586.200,00	380.586.200,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	8.175.000,00	8.175.000,00	8.175.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	21.450.000,00	21.450.000,00	21.450.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	283.594.200,00	283.594.200,00	283.594.200,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	339.191.400,00	339.191.400,00	339.191.400,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	380.257.800,00	322.469.200,00	322.469.200,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.000.069.200,00	1.000.069.200,00	1.000.069.200,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.03	0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	752.027.200,00	752.027.200,00	752.027.200,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	248.042.000,00	248.042.000,00	248.042.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	598.568.600,00	598.568.600,00	598.568.600,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	154.667.000,00	154.667.000,00	154.667.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	28.980.000,00	28.980.000,00	28.980.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	103.478.000,00	103.478.000,00	103.478.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	208.097.500,00	208.097.500,00	208.097.500,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	13.590.000,00	13.590.000,00	13.590.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	89.756.100,00	89.756.100,00	89.756.100,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.375.678.974,00	21.491.820.393,00	22.058.117.394,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.922.000,00	88.922.000,00	88.922.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.621.000,00	34.621.000,00	34.621.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.301.000,00	54.301.000,00	54.301.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.676.945.478,00	13.955.863.947,00	14.490.760.948,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.676.945.478,00	13.955.863.947,00	14.490.760.948,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.504.200,00	73.504.200,00	73.504.200,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	73.504.200,00	73.504.200,00	73.504.200,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	419.589.624,00	419.589.624,00	419.589.624,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.982.800,00	9.982.800,00	9.982.800,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.047.800,00	116.047.800,00	116.047.800,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.229.424,00	86.229.424,00	86.229.424,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.258.600,00	20.258.600,00	20.258.600,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.071.000,00	181.071.000,00	181.071.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	868.666.700,00	868.666.700,00	868.666.700,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	868.666.700,00	868.666.700,00	868.666.700,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.444.386.448,00	1.281.609.398,00	1.295.609.398,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.000.000,00	258.000.000,00	258.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.186.386.448,00	1.023.609.398,00	1.037.609.398,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.803.664.524,00	4.803.664.524,00	4.821.064.524,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.287.969.800,00	2.287.969.800,00	2.287.969.800,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.380.000,00	22.380.000,00	22.380.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.413.504.724,00	2.413.504.724,00	2.413.504.724,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.810.000,00	64.810.000,00	82.210.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001						UPTD Pengendalian Bencana Daerah	7.979.307.573,00	7.654.304.443,00	7.654.304.443,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.336.201.969,00	4.336.201.969,00	4.336.201.969,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	960.581.900,00	960.581.900,00	960.581.900,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.02	0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	751.322.000,00	751.322.000,00	751.322.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	209.259.900,00	209.259.900,00	209.259.900,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	3.375.620.069,00	3.375.620.069,00	3.375.620.069,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.04	0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	3.375.620.069,00	3.375.620.069,00	3.375.620.069,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.643.105.604,00	3.318.102.474,00	3.318.102.474,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.839.100,00	66.839.100,00	66.839.100,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.846.800,00	16.846.800,00	16.846.800,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.992.300,00	25.992.300,00	25.992.300,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.648.730.000,00	1.648.697.100,00	1.648.697.100,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.648.730.000,00	1.648.697.100,00	1.648.697.100,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.364.078.904,00	1.039.108.674,00	1.039.108.674,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.124.078.904,00	799.108.674,00	799.108.674,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.457.600,00	563.457.600,00	563.457.600,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.800.000,00	140.800.000,00	140.800.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	312.657.600,00	312.657.600,00	312.657.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	31.934.543.832,00	29.832.077.135,00	29.898.303.673,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	30.930.213.432,00	28.827.800.435,00	28.894.026.973,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	123.193.100,00	123.193.100,00	123.193.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.484.600,00	3.484.600,00	3.484.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3.484.600,00	3.484.600,00	3.484.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	119.708.500,00	119.708.500,00	119.708.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	78.398.500,00	78.398.500,00	78.398.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	41.310.000,00	41.310.000,00	41.310.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.309.938.600,00	4.309.759.900,00	4.309.759.900,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	2.833.805.500,00	2.833.626.800,00	2.833.626.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	57.784.600,00	57.784.600,00	57.784.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	120.504.300,00	120.325.600,00	120.325.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	155.516.600,00	155.516.600,00	155.516.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	840.468.300,00	840.468.300,00	840.468.300,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	600.647.100,00	600.647.100,00	600.647.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	226.861.200,00	226.861.200,00	226.861.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	12.960.000,00	12.960.000,00	12.960.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	456.825.400,00	456.825.400,00	456.825.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	151.012.500,00	151.012.500,00	151.012.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	14.352.200,00	14.352.200,00	14.352.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30.570.600,00	30.570.600,00	30.570.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	260.890.100,00	260.890.100,00	260.890.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	178.839.400,00	178.839.400,00	178.839.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan	19.999.400,00	19.999.400,00	19.999.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.04	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	158.840.000,00	158.840.000,00	158.840.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	55.758.600,00	55.758.600,00	55.758.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	17.136.600,00	17.136.600,00	17.136.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	17.136.600,00	17.136.600,00	17.136.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	38.622.000,00	38.622.000,00	38.622.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	29.142.000,00	29.142.000,00	29.142.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.480.000,00	9.480.000,00	9.480.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	341.811.800,00	341.811.800,00	341.811.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	341.811.800,00	341.811.800,00	341.811.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	335.331.800,00	335.331.800,00	335.331.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	329.238.400,00	329.238.400,00	329.238.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	329.238.400,00	329.238.400,00	329.238.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	329.238.400,00	329.238.400,00	329.238.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.770.272.932,00	23.668.038.635,00	23.734.265.173,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.904.600,00	34.904.600,00	34.904.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.717.600,00	5.717.600,00	5.717.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.952.200,00	4.952.200,00	4.952.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.234.800,00	24.234.800,00	24.234.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.681.909.121,00	18.921.528.881,00	18.959.955.419,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.681.909.121,00	18.921.528.881,00	18.959.955.419,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	348.243.992,00	348.221.740,00	348.221.740,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.508.200,00	7.508.200,00	7.508.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.310.892,00	140.288.640,00	140.288.640,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.022.700,00	96.022.700,00	96.022.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.647.200,00	5.647.200,00	5.647.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.505.000,00	87.505.000,00	87.505.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.462.484,00	668.462.484,00	668.462.484,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	488.462.484,00	488.462.484,00	488.462.484,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.036.752.735,00	3.694.920.930,00	3.722.720.930,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.175.080.364,00	1.175.080.364,00	1.189.080.364,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.695.930.825,00	1.695.930.825,00	1.745.930.825,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.165.741.546,00	823.909.741,00	787.709.741,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.004.330.400,00	1.004.276.700,00	1.004.276.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.004.330.400,00	1.004.276.700,00	1.004.276.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	169.369.300,00	169.369.300,00	169.369.300,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	37.085.800,00	37.085.800,00	37.085.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.01	0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	37.085.800,00	37.085.800,00	37.085.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	132.283.500,00	132.283.500,00	132.283.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.02	0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	132.283.500,00	132.283.500,00	132.283.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	27.906.100,00	27.906.100,00	27.906.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	27.906.100,00	27.906.100,00	27.906.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	27.906.100,00	27.906.100,00	27.906.100,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.03	0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	9.958.600,00	9.958.600,00	9.958.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	04	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	9.958.600,00	9.958.600,00	9.958.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	04	1.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	9.958.600,00	9.958.600,00	9.958.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.732.700,00	2.732.700,00	2.732.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2.732.700,00	2.732.700,00	2.732.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	05	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	2.732.700,00	2.732.700,00	2.732.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	780.620.100,00	780.566.400,00	780.566.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	36.685.700,00	36.674.800,00	36.674.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.01	0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	36.685.700,00	36.674.800,00	36.674.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	743.934.400,00	743.891.600,00	743.891.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	648.691.600,00	648.691.600,00	648.691.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.02	0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	95.242.800,00	95.200.000,00	95.200.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	13.743.600,00	13.743.600,00	13.743.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	13.743.600,00	13.743.600,00	13.743.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	1.03	0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	13.743.600,00	13.743.600,00	13.743.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0001						UPTD Pelayanan Sosial	9.004.146.858,00	8.557.165.741,00	8.557.165.741,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.06.0001	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.004.146.858,00	8.557.165.741,00	8.557.165.741,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	9.004.146.858,00	8.557.165.741,00	8.557.165.741,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.224.118.200,00	3.224.118.200,00	3.224.118.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.915.961.200,00	1.915.961.200,00	1.915.961.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	91.401.500,00	91.401.500,00	91.401.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	1.478.250.000,00	1.478.250.000,00	1.478.250.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	89.750.000,00	89.750.000,00	89.750.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	21.680.300,00	21.680.300,00	21.680.300,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	125.759.400,00	125.759.400,00	125.759.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.308.157.000,00	1.308.157.000,00	1.308.157.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	996.450.000,00	996.450.000,00	996.450.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	164.987.000,00	164.987.000,00	164.987.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.720.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.780.028.658,00	5.333.047.541,00	5.333.047.541,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	342.770.200,00	341.798.200,00	341.798.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.813.400,00	9.813.400,00	9.813.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.000.000,00	169.028.000,00	169.028.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159.941.800,00	159.941.800,00	159.941.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.015.000,00	3.015.000,00	3.015.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	553.321.344,00	553.321.344,00	553.321.344,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.100.000,00	216.100.000,00	216.100.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	337.221.344,00	337.221.344,00	337.221.344,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.883.937.114,00	4.437.927.997,00	4.437.927.997,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263.322.984,00	263.322.984,00	263.322.984,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.484.397.000,00	3.484.397.000,00	3.484.397.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.136.217.130,00	690.208.013,00	690.208.013,00
1.06.2.08.0.00.06.0002						UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	5.216.457.038,00	5.059.999.473,00	5.159.999.473,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.216.457.038,00	5.059.999.473,00	5.159.999.473,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.216.457.038,00	5.059.999.473,00	5.159.999.473,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	4.492.579.200,00	4.492.579.200,00	4.492.579.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	127.407.200,00	127.407.200,00	127.407.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	127.407.200,00	127.407.200,00	127.407.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.365.172.000,00	4.365.172.000,00	4.365.172.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03	1.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	4.361.812.000,00	4.361.812.000,00	4.361.812.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	71.117.000,00	71.117.000,00	71.117.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	71.117.000,00	71.117.000,00	71.117.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	07	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	2.099.000,00	2.099.000,00	2.099.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	07	1.03	0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	69.018.000,00	69.018.000,00	69.018.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	652.760.838,00	496.303.273,00	596.303.273,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.727.700,00	47.727.700,00	47.727.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.528.800,00	1.528.800,00	1.528.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.266.900,00	26.266.900,00	26.266.900,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.932.000,00	19.932.000,00	19.932.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.033.138,00	443.575.573,00	543.575.573,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.131.492,00	129.131.492,00	129.131.492,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83.519.944,00	83.510.884,00	183.510.884,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	387.381.702,00	230.933.197,00	230.933.197,00
2.07.3.29.0.00.01.0001						UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	956.267.093,00	874.878.568,00	884.145.328,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	956.267.093,00	874.878.568,00	884.145.328,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	250.590.000,00	250.590.000,00	260.122.500,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	250.590.000,00	250.590.000,00	260.122.500,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	250.590.000,00	250.590.000,00	260.122.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	705.677.093,00	624.288.568,00	624.022.828,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.736.194,00	30.736.194,00	30.736.194,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.252.600,00	3.252.600,00	3.252.600,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.117.700,00	6.117.700,00	6.117.700,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.899.394,00	12.899.394,00	12.899.394,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	986.500,00	986.500,00	986.500,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.280.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.000.000,00	28.000.000,00	45.734.260,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000.000,00	28.000.000,00	45.734.260,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.489.192,00	257.489.192,00	257.489.192,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.489.192,00	233.489.192,00	233.489.192,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.451.707,00	308.063.182,00	290.063.182,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.770.000,00	80.770.000,00	62.770.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.131.673,00	35.131.673,00	35.131.673,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	273.550.034,00	192.161.509,00	192.161.509,00
2.07.3.29.0.00.01.0002						UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	982.392.064,00	949.836.654,00	949.836.654,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	406.250.050,00	406.250.050,00	406.250.050,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	406.250.050,00	406.250.050,00	406.250.050,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	406.250.050,00	406.250.050,00	406.250.050,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	576.142.014,00	543.586.604,00	543.586.604,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.704.974,00	30.704.974,00	30.704.974,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.980.300,00	4.980.300,00	4.980.300,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.896.400,00	7.896.400,00	7.896.400,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.944.274,00	14.944.274,00	14.944.274,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.884.000,00	2.884.000,00	2.884.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.177.912,00	132.177.912,00	132.177.912,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	957.700,00	957.700,00	957.700,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.220.212,00	119.220.212,00	119.220.212,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.259.128,00	380.703.718,00	380.703.718,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.566.492,00	129.566.492,00	129.566.492,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	268.692.636,00	236.137.226,00	236.137.226,00
2.07.3.29.3.32.01.0000						Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	41.326.065.581,00	41.958.886.022,00	36.920.406.612,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	30.997.600,00	30.997.600,00	30.997.600,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	30.997.600,00	30.997.600,00	30.997.600,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30.997.600,00	30.997.600,00	30.997.600,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	99.137.100,00	99.137.100,00	99.137.100,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	65.223.300,00	65.223.300,00	65.223.300,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	65.223.300,00	65.223.300,00	65.223.300,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	33.913.800,00	33.913.800,00	33.913.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	33.913.800,00	33.913.800,00	33.913.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	6.831.921.000,00	6.831.921.000,00	1.744.175.850,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	5.566.000,00	5.566.000,00	5.566.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	5.566.000,00	5.566.000,00	5.566.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	6.826.355.000,00	6.826.355.000,00	1.738.609.850,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	25.775.000,00	25.775.000,00	25.775.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.03	0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	6.798.780.000,00	6.798.780.000,00	1.711.034.850,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.252.739.581,00	34.885.560.022,00	34.924.825.762,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.917.389.502,00	31.957.152.568,00	31.929.952.568,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.917.389.502,00	31.957.152.568,00	31.929.952.568,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.853.294,00	201.853.294,00	240.853.294,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.992.900,00	14.992.900,00	14.992.900,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.179.800,00	41.179.800,00	41.179.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.133.994,00	65.133.994,00	65.133.994,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.124.600,00	15.124.600,00	15.124.600,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.614.000,00	8.614.000,00	8.614.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.758.000,00	46.758.000,00	85.758.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.064.000,00	116.064.000,00	106.276.700,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	116.064.000,00	116.064.000,00	106.276.700,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.128.277.567,00	1.128.277.567,00	1.138.330.607,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.873.100,00	2.873.100,00	2.873.100,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	384.000.000,00	384.000.000,00	394.053.040,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	741.404.467,00	741.404.467,00	741.404.467,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.889.155.218,00	1.482.212.593,00	1.509.412.593,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	741.917.508,00	741.917.508,00	755.917.508,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	213.265.968,00	213.265.968,00	213.265.968,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	933.971.742,00	527.029.117,00	540.229.117,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	90.970.300,00	90.970.300,00	100.970.300,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	66.085.500,00	66.085.500,00	76.085.500,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	51.825.500,00	51.825.500,00	61.825.500,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05	1.08		Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	51.825.500,00	51.825.500,00	61.825.500,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05	1.08	0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	51.825.500,00	51.825.500,00	61.825.500,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	24.884.800,00	24.884.800,00	24.884.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	24.884.800,00	24.884.800,00	24.884.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	24.884.800,00	24.884.800,00	24.884.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32	03	1.01	0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	24.884.800,00	24.884.800,00	24.884.800,00
2.13.2.12.2.14.01.0000						Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24.521.921.537,00	22.854.712.284,00	26.263.941.863,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24.521.921.537,00	22.854.712.284,00	26.263.941.863,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	408.031.750,00	326.643.225,00	326.704.025,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	252.790.030,00	203.956.915,00	204.017.715,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	252.790.030,00	203.956.915,00	204.017.715,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02	1.01	0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	252.790.030,00	203.956.915,00	204.017.715,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	155.241.720,00	122.686.310,00	122.686.310,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	155.241.720,00	122.686.310,00	122.686.310,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03	1.01	0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	155.241.720,00	122.686.310,00	122.686.310,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	23.541.511.927,00	22.053.357.429,00	25.462.526.208,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	123.878.612,00	91.323.202,00	91.323.202,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	123.878.612,00	91.323.202,00	91.323.202,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03	1.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	123.878.612,00	91.323.202,00	91.323.202,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	554.639.370,00	440.695.435,00	440.695.435,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	554.639.370,00	440.695.435,00	440.695.435,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01	0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	144.337.830,00	95.504.715,00	95.504.715,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	394.020.840,00	328.910.020,00	328.910.020,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01	0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	16.280.700,00	16.280.700,00	16.280.700,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	7.566.609.660,00	7.200.820.980,00	10.888.784.767,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.566.609.660,00	7.200.820.980,00	10.888.784.767,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.106.706.520,00	1.968.805.710,00	2.018.805.710,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	164.394.940,00	99.284.120,00	99.284.120,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	298.160.120,00	265.604.710,00	265.604.710,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4.997.348.080,00	4.867.126.440,00	8.505.090.227,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.296.384.285,00	14.320.517.812,00	14.041.722.804,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	205.480.012,00	172.924.602,00	172.924.602,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.715.000,00	15.715.000,00	15.715.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.765.012,00	157.209.602,00	157.209.602,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.951.889.701,00	11.984.690.363,00	11.682.916.555,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.823.823.571,00	11.905.457.348,00	11.578.483.540,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	128.066.130,00	79.233.015,00	104.433.015,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.710.950,00	390.987.750,00	309.966.550,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.992.400,00	5.992.400,00	5.992.400,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.523.100,00	172.799.900,00	91.786.700,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.738.750,00	75.738.750,00	75.738.750,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.048.100,00	6.048.100,00	6.048.100,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.626.600,00	4.626.600,00	4.626.600,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.350.000,00	1.350.000,00	3.510.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.432.000,00	124.432.000,00	122.264.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.439.600,00	6.439.600,00	6.439.600,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.439.600,00	6.439.600,00	6.439.600,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	690.670.594,00	609.282.069,00	609.282.069,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.800.000,00	174.800.000,00	174.800.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	515.870.594,00	434.482.069,00	434.482.069,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.198.193.428,00	1.156.193.428,00	1.260.193.428,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.098.383.428,00	1.056.383.428,00	1.151.383.428,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.810.000,00	99.810.000,00	108.810.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	572.377.860,00	474.711.630,00	474.711.630,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	572.377.860,00	474.711.630,00	474.711.630,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	572.377.860,00	474.711.630,00	474.711.630,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03	1.01	0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	199.955.000,00	199.955.000,00	199.955.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03	1.01	0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	372.422.860,00	274.756.630,00	274.756.630,00
2.15.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perhubungan	31.634.991.426,00	32.261.119.334,40	33.502.227.534,40
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	31.634.991.426,00	32.261.119.334,40	33.502.227.534,40
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	792.120.912,00	596.788.452,00	746.788.452,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	320.283.542,00	238.895.017,00	238.895.017,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	297.783.542,00	216.395.017,00	216.395.017,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	73.926.000,00	73.926.000,00	73.926.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	66.726.000,00	66.726.000,00	66.726.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	70.876.000,00	70.876.000,00	70.876.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.10	0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	70.876.000,00	70.876.000,00	70.876.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	327.035.370,00	213.091.435,00	363.091.435,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	327.035.370,00	213.091.435,00	363.091.435,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	454.226.050,00	372.837.525,00	527.945.725,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	454.226.050,00	372.837.525,00	527.945.725,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	454.226.050,00	372.837.525,00	527.945.725,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	598.942.460,00	501.276.230,00	501.276.230,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	598.942.460,00	501.276.230,00	501.276.230,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	598.942.460,00	501.276.230,00	501.276.230,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.789.702.004,00	30.790.217.127,40	31.726.217.127,40
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.167.000,00	38.167.000,00	38.167.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.967.000,00	25.967.000,00	25.967.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.634.739.316,00	25.863.286.215,40	25.844.686.215,40
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.619.225.316,00	25.847.772.215,40	25.801.722.215,40
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.514.000,00	15.514.000,00	42.964.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.284.919.500,00	1.292.405.194,00	1.292.405.194,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.993.800,00	6.993.800,00	6.993.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	731.986.000,00	739.471.694,00	739.471.694,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.600.000,00	75.600.000,00	75.600.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.253.700,00	9.253.700,00	9.253.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	461.086.000,00	461.086.000,00	461.086.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.080.478.600,00	1.072.849.000,00	1.994.849.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.922.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	80.478.600,00	72.849.000,00	72.849.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	642.485.436,00	642.485.436,00	642.485.436,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.710.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295.000.000,00	295.000.000,00	295.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	342.775.436,00	342.775.436,00	342.775.436,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.108.912.152,00	1.881.024.282,00	1.913.624.282,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	904.767.984,00	904.767.984,00	918.767.984,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.770.000,00	73.770.000,00	73.770.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.130.374.168,00	902.486.298,00	921.086.298,00
2.15.0.00.0.00.01.0001						UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	2.673.927.910,00	2.266.985.285,00	2.266.985.285,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.195.951.218,00	1.789.008.593,00	1.789.008.593,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	596.800.000,00	596.800.000,00	596.800.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02	1.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	596.800.000,00	596.800.000,00	596.800.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.599.151.218,00	1.192.208.593,00	1.192.208.593,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02	1.05	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.599.151.218,00	1.192.208.593,00	1.192.208.593,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	477.976.692,00	477.976.692,00	477.976.692,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.378.100,00	190.378.100,00	190.378.100,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.244.400,00	4.244.400,00	4.244.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.987.700,00	70.987.700,00	70.987.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.346.000,00	114.346.000,00	114.346.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.818.992,00	101.818.992,00	101.818.992,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.193.200,00	1.193.200,00	1.193.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.860.000,00	57.860.000,00	57.860.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.765.792,00	42.765.792,00	42.765.792,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.779.600,00	185.779.600,00	185.779.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167.299.600,00	167.299.600,00	167.299.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.480.000,00	18.480.000,00	18.480.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002						UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	66.081.290.328,00	65.641.792.293,00	65.641.792.293,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	65.439.656.356,00	65.065.269.141,00	65.065.269.141,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	65.439.656.356,00	65.065.269.141,00	65.065.269.141,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	65.439.656.356,00	65.065.269.141,00	65.065.269.141,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	641.633.972,00	576.523.152,00	576.523.152,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.338.948,00	211.338.948,00	211.338.948,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	915.400,00	915.400,00	915.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.589.960,00	148.589.960,00	148.589.960,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.324.588,00	20.324.588,00	20.324.588,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.876.000,00	9.876.000,00	9.876.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.633.000,00	31.633.000,00	31.633.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.685.000,00	23.685.000,00	23.685.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	23.685.000,00	23.685.000,00	23.685.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.681.892,00	74.681.892,00	74.681.892,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	471.000,00	471.000,00	471.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.300.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.910.892,00	40.910.892,00	40.910.892,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.928.132,00	266.817.312,00	266.817.312,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	313.788.132,00	248.677.312,00	248.677.312,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.140.000,00	18.140.000,00	18.140.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003						UPTD Perlengkapan Jalan	3.603.503.552,00	3.504.995.802,00	3.668.995.802,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.360.260.260,00	3.262.594.030,00	3.426.594.030,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	3.360.260.260,00	3.262.594.030,00	3.426.594.030,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.454.737.020,00	2.422.181.610,00	2.586.181.610,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02	1.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	905.523.240,00	840.412.420,00	840.412.420,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	243.243.292,00	242.401.772,00	242.401.772,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.243.200,00	22.243.200,00	22.243.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.276.800,00	5.276.800,00	5.276.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.966.400,00	16.966.400,00	16.966.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.295.600,00	60.454.080,00	60.454.080,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.295.600,00	60.454.080,00	60.454.080,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.704.492,00	159.704.492,00	159.704.492,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.654.492,00	150.654.492,00	150.654.492,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.050.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004						UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	551.736.404,00	461.839.574,00	453.389.774,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	70.684.200,00	70.684.200,00	56.582.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	70.684.200,00	70.684.200,00	56.582.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	03	1.09	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	70.684.200,00	70.684.200,00	56.582.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	481.052.204,00	391.155.374,00	396.807.574,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	354.181.504,00	264.284.674,00	269.936.874,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.460.060,00	37.460.060,00	57.137.660,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	314.401.444,00	224.504.614,00	210.479.214,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	486.700,00	486.700,00	486.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	486.700,00	486.700,00	486.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.384.000,00	126.384.000,00	126.384.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.984.000,00	120.984.000,00	120.984.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000						Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	223.753.724.311,00	219.691.804.785,00	222.528.593.259,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	223.021.859.351,00	219.085.799.560,00	221.922.588.034,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	10.858.076.172,00	10.121.323.906,00	10.121.323.906,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	10.858.076.172,00	10.121.323.906,00	10.121.323.906,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0015	Penyusunan Konten	1.056.490.780,00	1.007.657.665,00	1.007.657.665,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0018	Diseminasi Informasi	1.002.349.282,00	855.849.937,00	855.849.937,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.687.524.460,00	1.618.158.099,00	1.618.158.099,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	2.309.613.170,00	2.195.669.235,00	2.195.669.235,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0022	Pelayanan Informasi Publik	1.288.405.032,00	1.223.294.212,00	1.223.294.212,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	304.234.420,00	271.679.010,00	271.679.010,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.209.459.028,00	2.949.015.748,00	2.949.015.748,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	179.179.180.114,00	178.917.239.200,00	178.816.368.200,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	179.179.180.114,00	178.917.239.200,00	178.816.368.200,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02	0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis	2.588.763.600,00	2.588.563.600,00	2.588.539.600,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02	0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	158.359.578.322,00	158.049.429.500,00	157.949.018.500,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02	0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	18.230.838.192,00	18.279.246.100,00	18.278.810.100,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.984.603.065,00	30.047.236.454,00	32.984.895.928,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.368.000,00	32.064.000,00	32.064.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.477.700,00	18.173.700,00	18.173.700,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.890.300,00	13.890.300,00	13.890.300,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.969.708.217,00	24.449.902.050,00	27.265.349.524,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.526.326.517,00	23.006.520.350,00	24.255.027.824,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.443.381.700,00	1.443.381.700,00	3.010.321.700,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	509.814.800,00	493.614.800,00	493.026.800,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.443.000,00	15.443.000,00	15.443.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.914.800,00	42.914.800,00	42.914.800,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.500.000,00	87.500.000,00	87.500.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.670.400,00	13.670.400,00	13.670.400,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.522.600,00	31.522.600,00	31.522.600,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.630.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	306.134.000,00	289.934.000,00	289.346.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.377.741.340,00	1.367.428.480,00	1.467.428.480,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	199.761.000,00	199.037.500,00	199.037.500,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	480.000.000,00	480.000.000,00	580.000.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	697.980.340,00	688.390.980,00	688.390.980,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.998.700,00	601.942.200,00	601.942.200,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.998.700,00	2.998.700,00	2.998.700,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	385.000.000,00	418.943.500,00	418.943.500,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.508.972.008,00	3.102.284.924,00	3.125.084.924,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.151.128.888,00	2.151.128.888,00	2.153.928.888,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	6.400.000,00	6.400.000,00	3.600.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.490.000,00	99.490.000,00	99.490.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.164.773.120,00	759.086.036,00	781.886.036,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.180.000,00	86.180.000,00	86.180.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	346.958.640,00	281.847.820,00	281.847.820,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	346.958.640,00	281.847.820,00	281.847.820,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	346.958.640,00	281.847.820,00	281.847.820,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	108.715.510,00	92.437.805,00	92.437.805,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01	0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	114.495.110,00	98.217.405,00	98.217.405,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01	0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	123.748.020,00	91.192.610,00	91.192.610,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	384.906.320,00	324.157.405,00	324.157.405,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	384.906.320,00	324.157.405,00	324.157.405,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	281.525.110,00	260.054.900,00	260.054.900,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	34.024.900,00	34.024.900,00	34.024.900,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	172.677.410,00	151.222.200,00	151.222.200,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	10.312.800,00	10.312.800,00	10.312.800,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	64.510.000,00	64.495.000,00	64.495.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	103.381.210,00	64.102.505,00	64.102.505,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	103.381.210,00	64.102.505,00	64.102.505,00
2.16.2.20.2.21.02.0001						UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital	7.513.820.490,00	7.513.820.490,00	7.513.820.490,00
2.16.2.20.2.21.02.0001	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.513.820.490,00	7.513.820.490,00	7.513.820.490,00
2.16.2.20.2.21.02.0001	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	7.513.820.490,00	7.513.820.490,00	7.513.820.490,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.16.2.20.2.21.02.0001	2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	7.513.820.490,00	7.513.820.490,00	7.513.820.490,00
2.16.2.20.2.21.02.0001	2	16	03	1.02	0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4.099.398.250,00	4.099.398.250,00	4.099.398.250,00
2.16.2.20.2.21.02.0001	2	16	03	1.02	0016	Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	3.414.422.240,00	3.414.422.240,00	3.414.422.240,00
2.16.2.20.2.21.02.0002						UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali	17.313.228.044,00	17.127.079.150,00	17.127.079.150,00
2.16.2.20.2.21.02.0002	2	16	03	1.02	0018	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	11.075.241.894,00	10.003.000.592,00	10.003.000.592,00
2.16.2.20.2.21.02.0002	2	16	03	1.02	0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	6.237.986.150,00	7.124.078.558,00	7.124.078.558,00
2.17.0.00.0.00.01.0000						Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.897.471.038,00	18.500.439.217,00	18.153.008.387,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	21.897.471.038,00	18.500.439.217,00	18.153.008.387,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	806.122.594,00	789.809.889,00	789.809.889,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	796.202.994,00	779.890.289,00	779.890.289,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.01	0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	796.202.994,00	779.890.289,00	779.890.289,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9.919.600,00	9.919.600,00	9.919.600,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.02	0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9.919.600,00	9.919.600,00	9.919.600,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	93.674.810,00	77.397.105,00	77.397.105,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	26.908.000,00	26.908.000,00	26.908.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	26.908.000,00	26.908.000,00	26.908.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	66.766.810,00	50.489.105,00	50.489.105,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	66.766.810,00	50.489.105,00	50.489.105,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	120.258.220,00	87.702.810,00	87.702.810,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	120.258.220,00	87.702.810,00	87.702.810,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06	1.01	0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	94.108.620,00	61.553.210,00	61.553.210,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06	1.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	26.149.600,00	26.149.600,00	26.149.600,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	537.661.002,00	404.183.821,00	404.183.821,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	537.661.002,00	404.183.821,00	404.183.821,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	471.821.002,00	338.343.821,00	338.343.821,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	65.840.000,00	65.840.000,00	65.840.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	400.443.504,00	367.888.094,00	367.888.094,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	400.443.504,00	367.888.094,00	367.888.094,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	207.163.804,00	174.608.394,00	174.608.394,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	08	1.01	0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	97.119.700,00	97.119.700,00	97.119.700,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	08	1.01	0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	46.160.000,00	46.160.000,00	46.160.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.939.310.908,00	16.773.457.498,00	16.426.026.668,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.164.212,00	110.608.802,00	110.608.802,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	134.899.312,00	102.343.902,00	102.343.902,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.264.900,00	8.264.900,00	8.264.900,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.437.269.734,00	13.524.957.809,00	13.165.169.179,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.437.269.734,00	13.524.957.809,00	13.165.169.179,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.047.794,00	211.047.794,00	211.047.794,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.997.800,00	10.997.800,00	10.997.800,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.405.800,00	48.405.800,00	48.405.800,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.071.194,00	76.071.194,00	76.071.194,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.573.000,00	49.573.000,00	49.573.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	700.452.200,00	697.297.500,00	683.055.300,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	700.452.200,00	697.297.500,00	683.055.300,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.143.253.156,00	948.210.568,00	948.210.568,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.993.900,00	1.993.900,00	1.993.900,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.000.000,00	246.000.000,00	246.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	895.259.256,00	700.216.668,00	700.216.668,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.304.123.812,00	1.281.335.025,00	1.307.935.025,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	797.265.444,00	774.476.657,00	788.476.657,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.920.000,00	49.920.000,00	49.920.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	456.938.368,00	456.938.368,00	469.538.368,00
2.17.0.00.0.00.01.0001						UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4.922.510.640,00	4.876.932.596,00	4.876.932.296,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	4.444.701.646,00	4.399.123.602,00	4.399.123.302,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.444.701.646,00	4.399.123.602,00	4.399.123.302,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	4.444.701.646,00	4.399.123.602,00	4.399.123.302,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	477.808.994,00	477.808.994,00	477.808.994,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.659.450,00	74.659.450,00	74.659.450,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	699.600,00	699.600,00	699.600,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.146.100,00	13.146.100,00	13.146.100,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.904.050,00	56.904.050,00	56.904.050,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	999.700,00	999.700,00	999.700,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	990.000,00	990.000,00	990.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.755.068,00	209.755.068,00	209.755.068,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	989.100,00	989.100,00	989.100,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.265.968,00	160.265.968,00	160.265.968,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.394.476,00	193.394.476,00	193.394.476,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.191.492,00	101.191.492,00	101.191.492,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.132.984,00	90.132.984,00	90.132.984,00
2.18.0.00.0.00.01.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.793.937.440,00	17.880.632.350,00	17.908.672.989,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	19.793.937.440,00	17.880.632.350,00	17.908.672.989,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	189.266.230,00	140.433.115,00	140.433.115,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	189.266.230,00	140.433.115,00	140.433.115,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	189.266.230,00	140.433.115,00	140.433.115,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	136.193.520,00	103.638.110,00	103.638.110,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	136.193.520,00	103.638.110,00	103.638.110,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	136.193.520,00	103.638.110,00	103.638.110,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	640.175.740,00	435.076.657,00	435.076.657,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	640.175.740,00	435.076.657,00	435.076.657,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	498.754.100,00	358.765.837,00	358.765.837,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.01	0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	141.421.640,00	76.310.820,00	76.310.820,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	182.326.230,00	156.281.902,00	156.281.902,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	182.326.230,00	156.281.902,00	156.281.902,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal	17.280.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	126.146.230,00	100.101.902,00	100.101.902,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	38.900.000,00	38.900.000,00	38.900.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	70.950.820,00	38.395.410,00	38.395.410,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	70.950.820,00	38.395.410,00	38.395.410,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	70.950.820,00	38.395.410,00	38.395.410,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.575.024.900,00	17.006.807.156,00	17.034.847.795,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.130.595.620,00	13.858.300.172,00	13.871.356.811,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.130.595.620,00	13.858.300.172,00	13.871.356.811,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	388.864.400,00	446.464.400,00	722.947.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.073.400,00	5.073.400,00	5.073.400,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.134.300,00	73.134.300,00	73.134.300,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.133.700,00	24.133.700,00	24.133.700,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216.523.000,00	274.123.000,00	550.606.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.475.820.930,00	1.260.955.224,00	1.260.955.224,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.846.500,00	3.846.500,00	3.846.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.000.000,00	152.000.000,00	152.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.319.974.430,00	1.105.108.724,00	1.105.108.724,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.579.743.950,00	1.441.087.360,00	1.179.588.360,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.336.436.050,00	1.197.779.460,00	926.700.460,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	243.307.900,00	243.307.900,00	252.887.900,00
2.22.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kebudayaan	122.097.572.925,00	94.216.212.579,00	108.242.520.599,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	122.097.572.925,00	94.216.212.579,00	108.242.520.599,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	53.426.096.592,00	41.283.438.702,00	56.833.436.602,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	26.440.535.816,00	14.623.432.026,00	14.623.432.026,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.495.511.752,00	1.267.700.522,00	1.267.700.522,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	24.945.024.064,00	13.355.731.504,00	13.355.731.504,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	16.905.030.676,00	16.742.253.626,00	16.742.251.526,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	15.514.685.970,00	15.400.742.035,00	15.400.739.935,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1.390.344.706,00	1.341.511.591,00	1.341.511.591,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10.080.530.100,00	9.917.753.050,00	25.467.753.050,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	10.080.530.100,00	9.917.753.050,00	25.467.753.050,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	1.477.712.594,00	1.461.431.865,00	1.461.431.865,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.477.712.594,00	1.461.431.865,00	1.461.431.865,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.129.840.224,00	1.129.837.200,00	1.129.837.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	347.872.370,00	331.594.665,00	331.594.665,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	144.883.000,00	144.883.000,00	144.883.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	144.883.000,00	144.883.000,00	144.883.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	144.883.000,00	144.883.000,00	144.883.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	747.226.006,00	698.392.891,00	698.392.891,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	216.157.230,00	167.324.115,00	167.324.115,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	216.157.230,00	167.324.115,00	167.324.115,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	531.068.776,00	531.068.776,00	531.068.776,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	274.241.876,00	274.241.876,00	274.241.876,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	52.108.700,00	52.108.700,00	52.108.700,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	114.107.300,00	114.107.300,00	114.107.300,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	90.610.900,00	90.610.900,00	90.610.900,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	66.301.654.733,00	50.628.066.121,00	49.104.376.241,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.476.840,00	94.366.020,00	94.366.020,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	155.302.340,00	90.191.520,00	90.191.520,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.174.500,00	4.174.500,00	4.174.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59.971.149.617,00	44.461.396.228,00	42.916.706.348,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	59.409.471.111,00	44.013.661.657,00	42.422.197.777,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	559.678.506,00	445.734.571,00	492.508.571,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.656.467.460,00	1.775.597.927,00	1.775.597.927,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.085.500,00	27.085.500,00	27.085.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.442.876.760,00	1.562.007.227,00	1.562.007.227,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.915.200,00	22.915.200,00	22.915.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.240.000,00	46.240.000,00	46.240.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.895.032.568,00	1.677.177.698,00	1.677.177.698,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.495.000,00	5.495.000,00	5.495.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	720.000.000,00	720.000.000,00	720.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.950.000,00	24.950.000,00	24.950.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.144.587.568,00	926.732.698,00	926.732.698,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.619.528.248,00	2.619.528.248,00	2.640.528.248,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	871.787.460,00	871.787.460,00	885.787.460,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.950.000,00	14.950.000,00	14.950.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.732.790.788,00	1.732.790.788,00	1.739.790.788,00
2.22.0.00.0.00.01.0001						UPTD Taman Budaya	10.949.647.150,00	10.575.259.935,00	10.575.259.885,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.687.762.600,00	2.687.762.600,00	2.687.762.600,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.687.762.600,00	2.687.762.600,00	2.687.762.600,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2.317.246.600,00	2.317.246.600,00	2.317.246.600,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	02	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	370.516.000,00	370.516.000,00	370.516.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.261.884.550,00	7.887.497.335,00	7.887.497.285,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.829.700,00	158.829.700,00	158.829.700,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.997.000,00	69.997.000,00	69.997.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.998.700,00	49.998.700,00	49.998.700,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.340.000,00	8.340.000,00	8.340.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.994.000,00	24.994.000,00	24.994.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	242.248.000,00	242.248.000,00	242.247.950,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	242.248.000,00	242.248.000,00	242.247.950,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.147.898.058,00	1.773.510.843,00	1.773.510.843,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	985.600.000,00	985.600.000,00	985.600.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.930.000,00	14.930.000,00	14.930.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.147.368.058,00	772.980.843,00	772.980.843,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.712.908.792,00	5.712.908.792,00	5.712.908.792,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.519.480.000,00	3.519.480.000,00	3.519.480.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.128.428.792,00	2.128.428.792,00	2.128.428.792,00
2.22.0.00.0.00.01.0002						UPTD Museum Bali	19.694.083.129,00	14.468.748.759,00	14.468.476.759,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.511.307.000,00	2.599.686.100,00	2.599.414.100,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	2.511.307.000,00	2.599.686.100,00	2.599.414.100,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	879.170.300,00	879.170.300,00	879.170.300,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.463.387.400,00	1.551.766.500,00	1.551.494.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	168.749.300,00	168.749.300,00	168.749.300,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.182.776.129,00	11.869.062.659,00	11.869.062.659,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.395.500,00	185.395.500,00	185.395.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	61.517.500,00	61.517.500,00	61.517.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.301.000,00	8.301.000,00	8.301.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.402.000,00	5.402.000,00	5.402.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.175.000,00	5.175.000,00	5.175.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.086.300,00	429.308.200,00	429.308.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.086.300,00	429.308.200,00	429.308.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.230.291.376,00	1.040.403.506,00	1.040.403.506,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.386.400,00	2.386.400,00	2.386.400,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	206.000.000,00	256.000.000,00	256.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.264.840,00	19.264.840,00	19.264.840,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.002.640.136,00	762.752.266,00	762.752.266,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.746.002.953,00	10.213.955.453,00	10.213.955.453,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.600.000,00	101.600.000,00	101.600.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.080.000,00	157.080.000,00	157.080.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.606.322.953,00	9.955.275.453,00	9.955.275.453,00
2.22.0.00.0.00.01.0003						UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	6.960.112.624,00	6.618.280.819,00	6.618.280.819,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.059.503.000,00	3.059.503.000,00	3.059.503.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	3.059.503.000,00	3.059.503.000,00	3.059.503.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	756.260.200,00	756.260.200,00	756.260.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2.038.410.200,00	2.038.410.200,00	2.038.410.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	264.832.600,00	264.832.600,00	264.832.600,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.900.609.624,00	3.558.777.819,00	3.558.777.819,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.862.800,00	145.862.800,00	145.862.800,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.995.300,00	29.995.300,00	29.995.300,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.057.000,00	53.057.000,00	53.057.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.593.100,00	51.593.100,00	51.593.100,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.777.400,00	6.777.400,00	6.777.400,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.578.473.800,00	1.236.641.995,00	1.236.641.995,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.491.500,00	1.491.500,00	1.491.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.930.000,00	42.930.000,00	42.930.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.184.052.300,00	842.220.495,00	842.220.495,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.141.273.024,00	2.141.273.024,00	2.141.273.024,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.975.000,00	123.975.000,00	123.975.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.970.000,00	14.970.000,00	14.970.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.002.328.024,00	2.002.328.024,00	2.002.328.024,00
2.22.0.00.0.00.05.0000						Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	482.164.038.708,00	480.783.920.457,00	487.186.677.249,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	466.524.654.824,00	466.524.197.124,00	472.760.533.514,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	465.844.815.188,00	465.844.680.388,00	471.928.683.008,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.01	0001	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	465.625.077.876,00	465.625.070.676,00	471.741.628.706,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.01	0002	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	219.737.312,00	219.609.712,00	187.054.302,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	327.491.706,00	327.271.506,00	528.438.391,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.02	0001	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	65.266.000,00	65.165.900,00	65.165.900,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.02	0002	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	262.225.706,00	262.105.606,00	463.272.491,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.03		Penyelenggaraan Desa Adat	352.347.930,00	352.245.230,00	303.412.115,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.03	0003	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	352.347.930,00	352.245.230,00	303.412.115,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.639.383.884,00	14.259.723.333,00	14.426.143.735,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.000.000,00	36.797.300,00	36.797.300,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.904.900,00	24.904.900,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.892.400,00	11.892.400,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.131.795.722,00	10.752.350.771,00	10.952.832.800,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.131.795.722,00	10.752.350.771,00	10.952.832.800,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	342.515.100,00	342.515.100,00	342.515.100,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.934.200,00	10.934.200,00	10.934.200,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.145.200,00	36.145.200,00	36.145.200,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.243.700,00	19.243.700,00	19.243.700,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.192.000,00	276.192.000,00	276.192.000,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267.604.080,00	267.604.080,00	265.058.683,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	267.604.080,00	267.604.080,00	265.058.683,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.179.734,00	548.166.834,00	562.166.834,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	548.179.734,00	548.166.834,00	562.166.834,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.312.289.248,00	2.312.289.248,00	2.266.773.018,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	566.441.852,00	566.441.852,00	566.441.852,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.745.847.396,00	1.745.847.396,00	1.700.331.166,00
3.25.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kelautan dan Perikanan	32.120.948.099,00	30.568.843.018,20	32.316.466.445,20
3.25.0.00.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	32.120.948.099,00	30.568.843.018,20	32.316.466.445,20

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	32.120.948.099,00	30.568.843.018,20	32.316.466.445,20
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	243.271.492,00	243.271.492,00	243.271.492,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	187.475.000,00	187.475.000,00	187.475.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	17.475.000,00	17.475.000,00	17.475.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0013	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	55.796.492,00	55.796.492,00	55.796.492,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	55.796.492,00	55.796.492,00	55.796.492,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	399.163.402,00	382.885.697,00	432.885.697,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	382.301.902,00	366.024.197,00	416.024.197,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	382.301.902,00	366.024.197,00	416.024.197,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	16.861.500,00	16.861.500,00	16.861.500,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.09	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	16.861.500,00	16.861.500,00	16.861.500,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	175.820.000,00	175.820.000,00	175.820.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	175.820.000,00	175.820.000,00	175.820.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	159.720.000,00	159.720.000,00	159.720.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.791.884,00	150.791.884,00	150.791.884,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	150.791.884,00	150.791.884,00	150.791.884,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	20.708.900,00	20.708.900,00	20.708.900,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	130.082.984,00	130.082.984,00	130.082.984,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	345.438.502,00	329.160.797,00	329.160.797,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	345.438.502,00	329.160.797,00	329.160.797,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	345.438.502,00	329.160.797,00	329.160.797,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.806.462.819,00	29.286.913.148,20	30.984.536.575,20
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.018.000,00	36.018.000,00	36.018.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.018.000,00	36.018.000,00	36.018.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.447.615.889,00	24.042.010.153,20	25.702.348.375,20
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.447.615.889,00	24.042.010.153,20	25.702.348.375,20
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.039.083.300,00	1.039.083.300,00	1.038.933.300,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.459.500,00	7.459.500,00	7.459.500,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	728.957.900,00	728.957.900,00	728.957.900,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	189.642.400,00	189.642.400,00	189.642.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.923.500,00	18.923.500,00	18.923.500,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.100.000,00	94.100.000,00	93.950.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	279.565.620,00	279.565.620,00	267.565.620,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	279.565.620,00	279.565.620,00	267.565.620,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.661.000,00	134.661.000,00	161.661.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.611.000,00	3.611.000,00	3.611.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.050.000,00	131.050.000,00	158.050.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.869.519.010,00	3.755.575.075,00	3.778.010.280,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	950.364.936,00	950.364.936,00	964.364.936,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.828.924.074,00	2.714.980.139,00	2.738.415.344,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.230.000,00	90.230.000,00	75.230.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001						UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	1.470.616.664,00	1.438.061.254,00	1.438.061.254,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	824.870.604,00	792.315.194,00	792.315.194,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	824.870.604,00	792.315.194,00	792.315.194,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	824.870.604,00	792.315.194,00	792.315.194,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	645.746.060,00	645.746.060,00	645.746.060,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.277.200,00	46.277.200,00	46.277.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.664.000,00	4.664.000,00	4.664.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.117.200,00	7.117.200,00	7.117.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.996.000,00	1.996.000,00	1.996.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.554.200,00	38.554.200,00	38.554.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.554.200,00	38.554.200,00	38.554.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.070.200,00	129.070.200,00	129.070.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	471.000,00	471.000,00	471.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.599.200,00	128.599.200,00	128.599.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.844.460,00	431.844.460,00	431.844.460,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.497.984,00	166.497.984,00	166.497.984,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	265.346.476,00	265.346.476,00	265.346.476,00
3.25.0.00.0.00.01.0002						UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	1.190.536.568,00	1.157.605.758,00	1.157.605.758,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	537.041.800,00	536.666.400,00	536.666.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	537.041.800,00	536.666.400,00	536.666.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	46.041.000,00	46.041.000,00	46.041.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	491.000.800,00	490.625.400,00	490.625.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	653.494.768,00	620.939.358,00	620.939.358,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.933.000,00	41.933.000,00	41.933.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.433.000,00	8.433.000,00	8.433.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.072.080,00	37.072.080,00	37.072.080,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.072.080,00	37.072.080,00	37.072.080,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.020.500,00	118.020.500,00	118.020.500,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.020.500,00	1.020.500,00	1.020.500,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	456.469.188,00	423.913.778,00	423.913.778,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.232.000,00	92.232.000,00	92.232.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	349.457.188,00	316.901.778,00	316.901.778,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.780.000,00	14.780.000,00	14.780.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003						UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	1.029.922.792,00	899.566.752,00	899.566.752,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	31.760.000,00	44.960.000,00	44.960.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	31.760.000,00	44.960.000,00	44.960.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	31.760.000,00	44.960.000,00	44.960.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	998.162.792,00	854.606.752,00	854.606.752,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.248.100,00	69.957.100,00	69.957.100,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	4.366.900,00	4.366.900,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.748.100,00	8.286.000,00	8.286.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.500.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	15.804.200,00	15.804.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	17.096.600,00	17.096.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	596.600,00	596.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	934.914.692,00	767.553.052,00	767.553.052,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.768.000,00	133.600.000,00	133.600.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	784.146.692,00	633.953.052,00	633.953.052,00
3.25.0.00.0.00.01.0004						UPTD Pelabuhan Perikanan	299.586.430,00	283.308.725,00	283.308.725,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	23.854.000,00	23.854.000,00	23.854.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	23.854.000,00	23.854.000,00	23.854.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	23.854.000,00	23.854.000,00	23.854.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	275.732.430,00	259.454.725,00	259.454.725,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.085.900,00	76.085.900,00	76.085.900,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.835.900,00	26.835.900,00	26.835.900,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.750.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.445.200,00	20.445.200,00	20.445.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.445.200,00	20.445.200,00	20.445.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.201.330,00	150.923.625,00	150.923.625,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.800.000,00	127.800.000,00	127.800.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.401.330,00	23.123.625,00	23.123.625,00
3.26.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pariwisata	23.772.668.250,00	22.906.846.057,00	31.605.924.583,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	23.772.668.250,00	22.906.846.057,00	31.605.924.583,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	763.520.156,00	633.298.516,00	623.848.516,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	348.735.516,00	283.624.696,00	274.174.696,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	348.735.516,00	283.624.696,00	274.174.696,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	0,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	0,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	149.195.900,00	149.195.900,00	149.195.900,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	149.195.900,00	149.195.900,00	149.195.900,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	265.588.740,00	200.477.920,00	200.477.920,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04	0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	71.872.510,00	55.594.805,00	55.594.805,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04	0013	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	193.716.230,00	144.883.115,00	144.883.115,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.992.241.136,00	4.894.574.906,00	4.894.574.906,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4.992.241.136,00	4.894.574.906,00	4.894.574.906,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	276.946.020,00	244.390.610,00	244.390.610,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	322.393.804,00	289.838.394,00	289.838.394,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4.392.901.312,00	4.360.345.902,00	4.360.345.902,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	140.088.084,00	140.088.084,00	140.088.084,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	97.601.384,00	97.601.384,00	97.601.384,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	97.601.384,00	97.601.384,00	97.601.384,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	42.486.700,00	42.486.700,00	42.486.700,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	42.486.700,00	42.486.700,00	42.486.700,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	894.950.698,00	846.117.583,00	846.076.583,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	894.950.698,00	846.117.583,00	846.076.583,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	267.634.092,00	267.634.092,00	267.634.092,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	250.391.504,00	217.836.094,00	217.836.094,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	376.925.102,00	360.647.397,00	360.606.397,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.981.868.176,00	16.392.766.968,00	25.101.336.494,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.996.812,00	90.441.402,00	90.441.402,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.996.812,00	90.441.402,00	90.441.402,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.168.970.608,00	12.612.424.810,00	12.603.424.810,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.168.970.608,00	12.612.424.810,00	12.603.424.810,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	536.894.354,00	813.338.782,00	813.338.782,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.216.600,00	7.216.600,00	7.216.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	356.550.660,00	621.745.088,00	621.745.088,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.617.494,00	69.617.494,00	69.617.494,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.882.600,00	9.882.600,00	9.882.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.627.000,00	104.877.000,00	104.877.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.120.381.428,00	1.805.927.000,00	10.514.504.500,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.008.200,00	182.008.200,00	182.008.200,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.938.373.228,00	1.623.918.800,00	10.332.496.300,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.032.624.974,00	1.070.634.974,00	1.079.627.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	551.217.000,00	577.947.000,00	577.947.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	481.407.974,00	492.687.974,00	501.680.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000						Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	95.210.725.266,00	87.068.727.729,00	100.863.659.495,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.872.356.332,00	1.504.480.199,00	2.826.680.199,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.872.356.332,00	1.504.480.199,00	2.826.680.199,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	458.286.192,00	295.509.142,00	1.617.709.142,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	458.286.192,00	295.509.142,00	1.617.709.142,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03	1.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	458.286.192,00	295.509.142,00	1.617.709.142,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.280.702.010,00	1.124.436.042,00	1.124.436.042,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	122.605.830,00	73.772.715,00	73.772.715,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	122.605.830,00	73.772.715,00	73.772.715,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	1.158.096.180,00	1.050.663.327,00	1.050.663.327,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.158.096.180,00	1.050.663.327,00	1.050.663.327,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	133.368.130,00	84.535.015,00	84.535.015,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	133.368.130,00	84.535.015,00	84.535.015,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	133.368.130,00	84.535.015,00	84.535.015,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	93.338.368.934,00	85.564.247.530,00	98.036.979.296,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	93.338.368.934,00	85.564.247.530,00	98.036.979.296,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	18.031.877.596,00	17.264.402.010,00	31.107.402.010,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	10.170.151.720,00	10.137.996.310,00	15.137.996.310,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	10.170.151.720,00	10.137.996.310,00	15.137.996.310,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	4.483.050.104,00	3.877.951.568,00	3.925.951.568,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	4.483.050.104,00	3.877.951.568,00	3.925.951.568,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.378.675.772,00	3.248.454.132,00	12.043.454.132,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.04	0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.378.675.772,00	3.248.454.132,00	12.043.454.132,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.998.847.192,00	1.474.210.222,00	1.554.210.222,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	1.998.847.192,00	1.474.210.222,00	1.554.210.222,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	967.168.752,00	543.948.422,00	543.948.422,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.031.678.440,00	930.261.800,00	1.010.261.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	9.027.321.012,00	8.947.637.045,00	8.947.637.045,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.968.467.602,00	8.882.272.553,00	8.882.272.553,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.01	0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.968.467.602,00	8.882.272.553,00	8.882.272.553,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.05		Kesejahteraan Hewan	58.853.410,00	65.364.492,00	65.364.492,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.05	0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	58.853.410,00	65.364.492,00	65.364.492,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	177.113.630,00	128.280.515,00	128.280.515,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	120.113.630,00	71.280.515,00	71.280.515,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	120.113.630,00	71.280.515,00	71.280.515,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	64.103.209.504,00	57.749.717.738,00	56.299.449.504,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	696.731.314,00	485.121.149,00	485.121.149,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	410.577.162,00	296.633.227,00	296.633.227,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	286.154.152,00	188.487.922,00	188.487.922,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59.539.397.002,00	53.446.348.516,00	51.914.068.522,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	59.247.337.822,00	53.284.510.976,00	51.668.380.982,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	292.059.180,00	161.837.540,00	245.687.540,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	385.218.340,00	385.218.340,00	384.830.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.263.000,00	19.263.000,00	19.263.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	212.818.940,00	212.818.940,00	212.430.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.003.400,00	67.003.400,00	67.003.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.125.000,00	19.125.000,00	19.125.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.008.000,00	67.008.000,00	67.008.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	713.109.662,00	758.687.236,00	758.687.236,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	417.000.000,00	417.000.000,00	417.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	296.109.662,00	341.687.236,00	341.687.236,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.768.753.186,00	2.674.342.497,00	2.756.742.497,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.845.842.822,00	1.930.486.888,00	1.952.286.888,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	742.110.364,00	563.055.609,00	593.655.609,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.800.000,00	180.800.000,00	210.800.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0009						UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	1.563.864.462,00	1.356.145.250,00	1.356.145.250,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.031.538.402,00	991.594.410,00	991.594.410,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.031.538.402,00	991.594.410,00	991.594.410,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	443.499.872,00	358.855.806,00	358.855.806,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	443.499.872,00	358.855.806,00	358.855.806,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	298.322.760,00	246.234.104,00	246.234.104,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	145.177.112,00	112.621.702,00	112.621.702,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	588.038.530,00	632.738.604,00	632.738.604,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.007.660,00	68.130.160,00	68.130.160,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.927.800,00	3.927.800,00	3.927.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.579.860,00	31.702.360,00	31.702.360,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.951.230,00	251.484.476,00	251.484.476,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.230.000,00	127.230.000,00	127.230.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.721.230,00	124.254.476,00	124.254.476,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.079.640,00	313.123.968,00	313.123.968,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	172.908.820,00	185.930.984,00	185.930.984,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.110.820,00	85.132.984,00	85.132.984,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.060.000,00	42.060.000,00	42.060.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	532.326.060,00	364.550.840,00	364.550.840,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	532.326.060,00	364.550.840,00	364.550.840,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	532.326.060,00	364.550.840,00	364.550.840,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	532.326.060,00	364.550.840,00	364.550.840,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3	27	04	1.03	0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	233.221.240,00	150.623.335,00	150.623.335,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	299.104.820,00	213.927.505,00	213.927.505,00
3.27.2.09.0.00.01.0012						UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.584.277.780,00	1.988.513.777,00	1.988.513.777,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.330.406.594,00	848.586.526,00	848.586.526,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.330.406.594,00	848.586.526,00	848.586.526,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	505.720.500,00	342.943.450,00	342.943.450,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	490.482.740,00	285.383.657,00	285.383.657,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	05	1.01	0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	334.203.354,00	220.259.419,00	220.259.419,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.253.871.186,00	1.139.927.251,00	1.139.927.251,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.655.900,00	55.655.900,00	55.655.900,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	599.900,00	599.900,00	599.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.056.000,00	5.056.000,00	5.056.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.840.332,00	424.884.660,00	424.884.660,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.520.000,00	220.520.000,00	220.520.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.320.332,00	204.364.660,00	204.364.660,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	799.374.954,00	659.386.691,00	659.386.691,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	232.277.312,00	245.299.476,00	245.299.476,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	561.897.642,00	408.887.215,00	408.887.215,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0013						UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3.256.180.246,00	2.908.301.541,00	2.908.218.025,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.357.702.810,00	1.951.224.367,00	1.951.140.851,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.357.702.810,00	1.951.224.367,00	1.951.140.851,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.357.702.810,00	1.951.224.367,00	1.951.140.851,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	898.477.436,00	957.077.174,00	957.077.174,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.721.700,00	49.721.700,00	49.721.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.095.200,00	6.095.200,00	6.095.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.126.500,00	11.126.500,00	11.126.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.970.816,00	355.015.144,00	355.015.144,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	262.970.816,00	289.015.144,00	289.015.144,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.784.920,00	552.340.330,00	552.340.330,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	238.971.640,00	265.015.968,00	265.015.968,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	275.943.280,00	282.454.362,00	282.454.362,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.870.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0014						UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.044.603.154,00	836.234.367,00	836.234.367,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	635.498.224,00	407.596.191,00	407.596.191,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	635.498.224,00	407.596.191,00	407.596.191,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	327.905.372,00	197.683.732,00	197.683.732,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	307.592.852,00	209.912.459,00	209.912.459,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	409.104.930,00	428.638.176,00	428.638.176,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.966.500,00	42.966.500,00	42.966.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.197.300,00	3.197.300,00	3.197.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.269.200,00	7.269.200,00	7.269.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.183.020,00	220.205.184,00	220.205.184,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.109.000,00	135.109.000,00	135.109.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.074.020,00	85.096.184,00	85.096.184,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.955.410,00	165.466.492,00	165.466.492,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.155.410,00	133.666.492,00	133.666.492,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.950.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.850.000,00	11.850.000,00	11.850.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0015						UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.993.508.141,00	2.449.832.794,00	2.449.832.794,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.593.544.736,00	2.030.336.143,00	2.030.336.143,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2.546.350.536,00	1.983.141.943,00	1.983.141.943,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.02	0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	763.221.710,00	584.166.955,00	584.166.955,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.02	0011	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	914.853.530,00	703.243.365,00	703.243.365,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.02	0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	503.705.372,00	373.483.732,00	373.483.732,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.02	0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	364.569.924,00	322.247.891,00	322.247.891,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	47.194.200,00	47.194.200,00	47.194.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.03	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	47.194.200,00	47.194.200,00	47.194.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	399.963.405,00	419.496.651,00	419.496.651,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.995.000,00	42.995.000,00	42.995.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.996.900,00	1.996.900,00	1.996.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.998.100,00	5.998.100,00	5.998.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.911.503,00	238.933.667,00	238.933.667,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.912.191,00	117.912.191,00	117.912.191,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.999.312,00	121.021.476,00	121.021.476,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.056.902,00	137.567.984,00	137.567.984,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.570.410,00	92.081.492,00	92.081.492,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.566.492,00	42.566.492,00	42.566.492,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000						Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	44.383.868.988,00	41.765.075.864,00	42.698.526.270,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.498.797.450,00	1.417.408.925,00	1.513.408.925,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.498.797.450,00	1.417.408.925,00	1.513.408.925,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	186.422.620,00	153.867.210,00	153.867.210,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	101.639.800,00	101.639.800,00	101.639.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	101.639.800,00	101.639.800,00	101.639.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	84.782.820,00	52.227.410,00	52.227.410,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.02	0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	84.782.820,00	52.227.410,00	52.227.410,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	95.413.600,00	95.413.600,00	95.413.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	95.413.600,00	95.413.600,00	95.413.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	70.333.600,00	70.333.600,00	70.333.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	25.080.000,00	25.080.000,00	25.080.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	40.041.000,00	40.041.000,00	40.041.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	40.041.000,00	40.041.000,00	40.041.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	04	1.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	40.041.000,00	40.041.000,00	40.041.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	37.816.300,00	37.816.300,00	37.816.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	37.816.300,00	37.816.300,00	37.816.300,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	05	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	37.816.300,00	37.816.300,00	37.816.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	10.399.700,00	10.399.700,00	10.399.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10.399.700,00	10.399.700,00	10.399.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	06	1.01	0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.399.700,00	10.399.700,00	10.399.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.083.910.230,00	1.035.077.115,00	1.131.077.115,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	1.083.910.230,00	1.035.077.115,00	1.131.077.115,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08	1.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1.083.910.230,00	1.035.077.115,00	1.131.077.115,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	34.399.700,00	34.399.700,00	34.399.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	34.399.700,00	34.399.700,00	34.399.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	09	1.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	34.399.700,00	34.399.700,00	34.399.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.394.300,00	10.394.300,00	10.394.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	10.394.300,00	10.394.300,00	10.394.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	10	1.01	0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	10.394.300,00	10.394.300,00	10.394.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	42.885.071.538,00	40.347.666.939,00	41.185.117.345,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	42.885.071.538,00	40.347.666.939,00	41.185.117.345,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	152.398.230,00	103.565.115,00	103.565.115,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	152.398.230,00	103.565.115,00	103.565.115,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	152.398.230,00	103.565.115,00	103.565.115,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	16.520.500,00	16.520.500,00	16.520.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	16.520.500,00	16.520.500,00	16.520.500,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	16.520.500,00	16.520.500,00	16.520.500,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	64.074.810,00	47.797.105,00	161.666.105,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	64.074.810,00	47.797.105,00	161.666.105,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	64.074.810,00	47.797.105,00	161.666.105,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.652.077.998,00	40.179.784.219,00	40.903.365.625,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.694.200,00	37.694.200,00	37.694.200,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.694.200,00	37.694.200,00	37.694.200,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.205.398.846,00	37.840.537.920,00	38.216.477.014,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.168.919.046,00	37.804.058.120,00	38.113.997.214,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.479.800,00	36.479.800,00	102.479.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	486.562.000,00	486.562.000,00	801.004.312,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.097.000,00	17.097.000,00	17.097.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.975.000,00	47.975.000,00	362.417.312,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.000.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294.640.000,00	294.640.000,00	294.640.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	609.843.344,00	609.843.344,00	621.843.344,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.560.000,00	196.560.000,00	208.560.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	413.283.344,00	413.283.344,00	413.283.344,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.312.579.608,00	1.205.146.755,00	1.226.346.755,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	840.290.360,00	840.290.360,00	836.290.360,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	472.289.248,00	364.856.395,00	390.056.395,00
3.28.2.11.0.00.01.0001						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	943.845.756,00	708.446.804,00	708.446.804,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.801.800,00	61.801.800,00	61.801.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.205.900,00	3.205.900,00	3.205.900,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.025.900,00	10.025.900,00	10.025.900,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.650.000,00	34.650.000,00	34.650.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.920.000,00	13.920.000,00	13.920.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.253.592,00	75.253.592,00	75.253.592,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.753.592,00	43.753.592,00	43.753.592,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	806.790.364,00	571.391.412,00	571.391.412,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.705.410,00	133.427.705,00	133.427.705,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	657.084.954,00	437.963.707,00	437.963.707,00
3.28.2.11.0.00.01.0002						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	615.450.489,00	517.784.259,00	680.499.259,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.271.800,00	57.271.800,00	57.271.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.129.800,00	3.129.800,00	3.129.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.443.900,00	13.443.900,00	13.443.900,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.698.100,00	3.698.100,00	3.698.100,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.484.092,00	62.484.092,00	93.384.092,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.050.000,00	18.050.000,00	21.050.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.434.092,00	44.434.092,00	72.334.092,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.694.597,00	398.028.367,00	529.843.367,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	488.554.597,00	390.888.367,00	390.888.367,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.140.000,00	7.140.000,00	138.955.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0003						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	401.538.504,00	368.983.094,00	368.983.094,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.996.700,00	49.996.700,00	49.996.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.373.700,00	1.373.700,00	1.373.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.355.700,00	11.355.700,00	11.355.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.707.300,00	1.707.300,00	1.707.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.560.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.397.312,00	85.841.902,00	85.841.902,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.397.312,00	77.841.902,00	77.841.902,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.144.492,00	233.144.492,00	233.144.492,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	223.154.492,00	223.154.492,00	223.154.492,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	341.539.476,00	341.539.476,00	341.539.476,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.411.700,00	63.411.700,00	63.411.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.137.000,00	3.137.000,00	3.137.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.811.900,00	10.811.900,00	10.811.900,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.502.800,00	2.502.800,00	2.502.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.960.000,00	12.960.000,00	12.960.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.319.792,00	68.319.792,00	68.319.792,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.940.000,00	23.940.000,00	23.940.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.379.792,00	44.379.792,00	44.379.792,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.807.984,00	209.807.984,00	209.807.984,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.425.000,00	123.425.000,00	123.425.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.382.984,00	86.382.984,00	86.382.984,00
3.28.2.11.0.00.01.0005						UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1.316.729.227,00	1.316.729.227,00	1.335.246.827,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.451.300,00	24.451.300,00	24.451.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.530.500,00	2.530.500,00	2.530.500,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.920.800,00	6.920.800,00	6.920.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.354.292,00	567.354.292,00	567.354.292,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	324.000.000,00	324.000.000,00	324.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	243.354.292,00	243.354.292,00	243.354.292,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	724.923.635,00	724.923.635,00	743.441.235,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.130.000,00	112.130.000,00	112.130.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.823.635,00	600.823.635,00	619.341.235,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.970.000,00	11.970.000,00	11.970.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0006						UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	371.563.452,00	339.008.042,00	430.892.490,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	371.563.452,00	339.008.042,00	430.892.490,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	371.563.452,00	339.008.042,00	430.892.490,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	235.876.092,00	235.876.092,00	284.186.892,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	235.876.092,00	235.876.092,00	284.186.892,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	03	1.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	235.876.092,00	235.876.092,00	284.186.892,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	135.687.360,00	103.131.950,00	146.705.598,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.802.000,00	5.802.000,00	5.802.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.866.500,00	4.866.500,00	4.866.500,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	935.500,00	935.500,00	935.500,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.914.540,00	31.914.540,00	75.488.188,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.914.540,00	31.914.540,00	75.488.188,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.970.820,00	65.415.410,00	65.415.410,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.970.820,00	65.415.410,00	65.415.410,00
3.28.2.11.0.00.01.0007						UPTD Pengelolaan Sampah	24.769.120.864,00	24.663.894.482,00	24.225.772.482,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	24.254.822.590,00	24.254.773.520,00	23.816.651.520,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	24.254.822.590,00	24.254.773.520,00	23.816.651.520,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	11	1.01	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	24.254.822.590,00	24.254.773.520,00	23.816.651.520,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	514.298.274,00	409.120.962,00	409.120.962,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.097.300,00	65.097.300,00	65.097.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.229.000,00	5.229.000,00	5.229.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.701.300,00	11.701.300,00	11.701.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.917.000,00	3.917.000,00	3.917.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.200.974,00	344.023.662,00	344.023.662,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.930.974,00	225.753.662,00	225.753.662,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.270.000,00	118.270.000,00	118.270.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000						Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24.844.884.105,00	23.741.397.190,00	23.476.248.717,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	24.844.884.105,00	23.741.397.190,00	23.476.248.717,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	20.127.945.919,00	19.105.847.529,00	18.790.699.056,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	296.235.644,00	198.569.414,00	198.569.414,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	296.235.644,00	198.569.414,00	198.569.414,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	296.235.644,00	198.569.414,00	198.569.414,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	13.448.600,00	13.448.600,00	13.442.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	13.448.600,00	13.448.600,00	13.442.800,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	1.01	0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	13.448.600,00	13.448.600,00	13.442.800,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	147.251.600,00	147.251.600,00	147.180.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	147.251.600,00	147.251.600,00	147.180.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	147.251.600,00	147.251.600,00	147.180.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	48.499.200,00	48.499.200,00	48.499.200,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	48.499.200,00	48.499.200,00	48.499.200,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	1.01	0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	48.499.200,00	48.499.200,00	48.499.200,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	564.173.402,00	547.895.697,00	547.895.697,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	461.672.200,00	461.672.200,00	461.672.200,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	456.000.000,00	456.000.000,00	456.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.01	0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	5.672.200,00	5.672.200,00	5.672.200,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	102.501.202,00	86.223.497,00	86.223.497,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	102.501.202,00	86.223.497,00	86.223.497,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	289.312.962,00	273.035.257,00	273.029.457,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	289.312.962,00	273.035.257,00	273.029.457,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07	1.03	0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	289.312.962,00	273.035.257,00	273.029.457,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.769.024.511,00	17.877.147.761,00	17.562.081.888,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.290.800,00	41.290.800,00	41.290.800,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.290.800,00	41.290.800,00	41.290.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.665.986.223,00	14.920.608.818,00	14.578.942.945,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.665.986.223,00	14.920.608.818,00	14.578.942.945,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	857.824.994,00	857.824.994,00	857.824.994,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.267.000,00	18.267.000,00	18.267.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	557.763.600,00	557.763.600,00	557.763.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.483.394,00	67.483.394,00	67.483.394,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.840.000,00	14.840.000,00	14.840.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.424.000,00	6.424.000,00	6.424.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.047.000,00	193.047.000,00	193.047.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.143.326.050,00	996.826.705,00	996.826.705,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	576.131.150,00	429.631.805,00	429.631.805,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.194.900,00	227.194.900,00	227.194.900,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	985.596.444,00	985.596.444,00	1.012.196.444,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	834.042.460,00	834.042.460,00	848.042.460,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	151.553.984,00	151.553.984,00	164.153.984,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4.716.938.186,00	4.635.549.661,00	4.685.549.661,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.689.978.286,00	4.608.589.761,00	4.658.589.761,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	4.689.978.286,00	4.608.589.761,00	4.658.589.761,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	126.162.000,00	126.162.000,00	176.162.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4.563.816.286,00	4.482.427.761,00	4.482.427.761,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	26.959.900,00	26.959.900,00	26.959.900,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	26.959.900,00	26.959.900,00	26.959.900,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04	1.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	26.959.900,00	26.959.900,00	26.959.900,00
3.31.3.30.0.00.02.0001						UPTD Rumah Kreatif	1.413.740.462,00	1.397.449.357,00	1.396.409.357,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	723.421.500,00	723.421.500,00	723.421.500,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	723.421.500,00	723.421.500,00	723.421.500,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	723.421.500,00	723.421.500,00	723.421.500,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	690.318.962,00	674.027.857,00	672.987.857,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	541.712.060,00	541.698.660,00	541.348.660,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	533.435.060,00	533.421.660,00	533.071.660,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.212.000,00	3.212.000,00	3.212.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.555.410,00	28.277.705,00	27.587.705,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.555.410,00	28.277.705,00	27.587.705,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.051.492,00	104.051.492,00	104.051.492,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	104.051.492,00	104.051.492,00	104.051.492,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
3.31.3.30.0.00.02.0002						UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	602.780.646,00	586.175.101,00	585.386.501,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	602.780.646,00	586.175.101,00	585.386.501,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	213.795.176,00	213.795.176,00	213.795.176,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	213.795.176,00	213.795.176,00	213.795.176,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	06	1.02	0005	Pengembangan Layanan Pengujian	213.795.176,00	213.795.176,00	213.795.176,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	388.985.470,00	372.379.925,00	371.591.325,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.741.540,00	96.413.700,00	97.045.100,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.455.700,00	1.455.700,00	1.455.700,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.147.800,00	76.819.960,00	77.451.360,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.038.040,00	16.038.040,00	16.038.040,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.274.886,00	154.997.181,00	153.577.181,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.274.886,00	142.997.181,00	141.577.181,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.969.044,00	120.969.044,00	120.969.044,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.969.044,00	120.969.044,00	120.969.044,00
4.01.0.00.0.00.01.0004						Biro Hukum	6.533.521.328,00	5.895.049.413,00	5.872.138.462,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	6.533.521.328,00	5.895.049.413,00	5.872.138.462,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	6.533.521.328,00	5.895.049.413,00	5.872.138.462,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.350.928.210,00	3.943.985.585,00	3.907.074.634,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.754.241.474,00	1.444.965.079,00	1.444.965.079,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	945.050.722,00	896.217.607,00	896.217.607,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	161.709.540,00	96.598.720,00	96.598.720,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	263.058.042,00	181.669.517,00	181.669.517,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	384.423.170,00	270.479.235,00	270.479.235,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	2.596.686.736,00	2.499.020.506,00	2.462.109.555,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	2.336.823.296,00	2.304.267.886,00	2.267.456.935,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	259.863.440,00	194.752.620,00	194.652.620,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.182.593.118,00	1.951.063.828,00	1.965.063.828,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	887.126.934,00	885.485.514,00	885.485.514,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.740.700,00	13.740.700,00	13.740.700,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	774.135.334,00	774.122.914,00	774.122.914,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.990.900,00	10.990.900,00	10.990.900,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.260.000,00	86.631.000,00	86.631.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.295.466.184,00	1.065.578.314,00	1.079.578.314,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	468.823.394,00	452.545.689,00	466.545.689,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	766.752.790,00	555.142.625,00	555.142.625,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.290.000,00	56.290.000,00	56.290.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0000						Sekretariat Daerah	81.731.654.004,00	79.607.960.494,00	79.617.296.271,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78.743.344.494,00	76.559.741.000,00	76.609.455.509,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78.743.344.494,00	76.559.741.000,00	76.609.455.509,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.988.309.510,00	3.048.219.494,00	3.007.840.762,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.988.309.510,00	3.048.219.494,00	3.007.840.762,00
4.01.2.23.2.24.01.0001						Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	36.841.226.210,00	36.427.911.885,00	70.640.793.885,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.834.911.012,00	1.736.949.282,00	1.736.831.282,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	522.296.590,00	473.463.475,00	473.354.475,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.01	0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	410.877.990,00	362.044.875,00	361.982.075,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	111.418.600,00	111.418.600,00	111.372.400,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	373.114.800,00	373.114.800,00	373.114.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	262.095.300,00	262.095.300,00	262.095.300,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	111.019.500,00	111.019.500,00	111.019.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	939.499.622,00	890.371.007,00	890.362.007,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	257.041.422,00	208.208.307,00	208.208.307,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	682.458.200,00	682.162.700,00	682.153.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	33.034.524.424,00	32.839.191.764,00	67.038.191.764,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	7.241.424.748,00	7.046.092.088,00	17.046.092.088,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	6.687.143.996,00	6.491.811.336,00	16.491.811.336,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	554.280.752,00	554.280.752,00	554.280.752,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	25.793.099.676,00	25.793.099.676,00	49.992.099.676,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	25.793.099.676,00	25.793.099.676,00	49.992.099.676,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.971.790.774,00	1.851.770.839,00	1.865.770.839,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	332.213.362,00	218.269.427,00	218.269.427,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	332.213.362,00	218.269.427,00	218.269.427,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	634.660.920,00	628.584.920,00	628.584.920,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.976.600,00	15.976.600,00	15.976.600,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	416.282.320,00	410.206.320,00	410.206.320,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.727.000,00	31.727.000,00	31.727.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.675.000,00	170.675.000,00	170.675.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.004.916.492,00	1.004.916.492,00	1.018.916.492,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	905.956.492,00	905.956.492,00	919.956.492,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.160.000,00	86.160.000,00	86.160.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003						Biro Umum dan Protokol	82.271.922.878,00	79.685.743.710,00	115.444.290.003,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	722.619.826,00	576.120.481,00	576.120.481,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	722.619.826,00	576.120.481,00	576.120.481,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	722.619.826,00	576.120.481,00	576.120.481,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	367.563.066,00	318.729.951,00	318.729.951,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	1.01	0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	367.563.066,00	318.729.951,00	318.729.951,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	355.056.760,00	257.390.530,00	257.390.530,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	49.957.500,00	49.957.500,00	49.957.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	1.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	305.099.260,00	207.433.030,00	207.433.030,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	81.549.303.052,00	79.109.623.229,00	114.868.169.522,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	81.549.303.052,00	79.109.623.229,00	114.868.169.522,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	81.549.303.052,00	79.109.623.229,00	114.868.169.522,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	538.866.748,00	413.080.028,00	413.080.028,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	538.866.748,00	413.080.028,00	413.080.028,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	645.879.744,00	385.436.464,00	473.686.464,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	645.879.744,00	385.436.464,00	473.686.464,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	320.620.172,00	190.398.532,00	262.467.532,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	320.620.172,00	190.398.532,00	262.467.532,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.655.484.218,00	14.760.659.943,00	22.930.214.169,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	685.137.840,00	620.027.020,00	620.027.020,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.647.671.358,00	2.403.505.783,00	2.403.493.583,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.336.554.462,00	7.059.833.477,00	11.862.833.477,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.465.579.684,00	4.303.252.134,00	7.692.607.347,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	520.540.874,00	374.041.529,00	351.252.742,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.456.678.900,00	17.328.674.720,00	33.164.325.685,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.069.469.360,00	2.069.469.360,00	2.069.469.360,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.056.844.128,00	9.991.733.308,00	25.565.733.308,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.330.365.412,00	5.267.472.052,00	5.529.123.017,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.977.575.878,00	12.472.967.023,00	17.017.198.392,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.876.182.652,00	6.518.073.142,00	7.375.876.952,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.101.393.226,00	5.954.893.881,00	9.641.321.440,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.927.341.034,00	6.084.841.034,00	6.317.806.694,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.927.341.034,00	6.084.841.034,00	6.317.806.694,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	26.235.707.234,00	26.073.081.281,00	33.033.142.054,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	16.340.186.288,00	16.177.560.335,00	20.348.851.434,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	9.491.023.848,00	9.491.023.848,00	12.279.793.522,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	404.497.098,00	404.497.098,00	404.497.098,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	229.115.000,00	229.115.000,00	224.717.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	229.115.000,00	229.115.000,00	224.717.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	1.562.034.124,00	1.171.369.204,00	1.031.531.504,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1.562.034.124,00	1.171.369.204,00	1.031.531.504,00
4.01.2.23.2.24.01.0005						Biro Organisasi	2.890.119.047,00	2.616.653.603,00	2.777.482.103,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	551.280.928,00	368.970.632,00	368.970.632,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	551.280.928,00	368.970.632,00	368.970.632,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	453.187.944,00	293.666.435,00	293.666.435,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	266.769.168,00	175.614.020,00	175.614.020,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	55.666.492,00	32.877.705,00	32.877.705,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	100.066.392,00	77.277.605,00	77.277.605,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.01	0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	111.036.284,00	65.458.710,00	65.458.710,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	186.418.776,00	118.052.415,00	118.052.415,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	63.965.792,00	41.177.005,00	41.177.005,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	122.452.984,00	76.875.410,00	76.875.410,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	98.092.984,00	75.304.197,00	75.304.197,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	98.092.984,00	75.304.197,00	75.304.197,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	03	1.01	0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	98.092.984,00	75.304.197,00	75.304.197,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2.338.838.119,00	2.247.682.971,00	2.408.511.471,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	2.338.838.119,00	2.247.682.971,00	2.408.511.471,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	692.615.760,00	647.038.186,00	793.973.186,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	222.545.792,00	199.757.005,00	346.692.005,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	54.880.000,00	54.880.000,00	85.315.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	55.560.000,00	55.560.000,00	80.700.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	112.105.792,00	89.317.005,00	180.677.005,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	470.069.968,00	447.281.181,00	447.281.181,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	136.243.892,00	136.243.892,00	136.243.892,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	116.325.392,00	116.325.392,00	116.325.392,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	14.997.000,00	14.997.000,00	14.997.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	101.993.492,00	101.993.492,00	101.993.492,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	100.510.192,00	77.721.405,00	77.721.405,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.646.222.359,00	1.600.644.785,00	1.614.538.285,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.976.000,00	4.976.000,00	4.976.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.976.000,00	4.976.000,00	4.976.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	790.988.307,00	790.988.307,00	790.881.807,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.460.400,00	16.460.400,00	16.460.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	614.051.907,00	614.051.907,00	613.945.407,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.476.000,00	160.476.000,00	160.476.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	850.258.052,00	804.680.478,00	818.680.478,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	769.808.052,00	724.230.478,00	738.230.478,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.450.000,00	80.450.000,00	80.450.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007						Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	34.875.949.111,00	34.475.149.870,00	35.803.618.998,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	457.739.800,00	457.739.800,00	905.328.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	231.620.000,00	231.620.000,00	230.804.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	231.620.000,00	231.620.000,00	230.804.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	131.620.000,00	131.620.000,00	130.124.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	131.620.000,00	131.620.000,00	130.124.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	94.499.800,00	94.499.800,00	544.400.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	94.499.800,00	94.499.800,00	544.400.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	31.531.284.175,00	31.531.037.197,00	32.396.033.425,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	31.317.925.175,00	31.317.678.197,00	32.183.490.425,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	21.330.000,00	21.330.000,00	21.330.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	31.254.130.175,00	31.253.883.197,00	32.119.695.425,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	42.465.000,00	42.465.000,00	42.465.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	99.271.000,00	99.271.000,00	98.999.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	51.105.000,00	51.105.000,00	51.105.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	48.166.000,00	48.166.000,00	47.894.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	114.088.000,00	114.088.000,00	113.544.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	73.948.000,00	73.948.000,00	73.676.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	10.140.000,00	10.140.000,00	10.140.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	29.728.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	43.575.000,00	43.575.000,00	61.815.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	20.910.000,00	20.910.000,00	30.030.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	20.910.000,00	20.910.000,00	30.030.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	22.665.000,00	22.665.000,00	31.785.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	22.665.000,00	22.665.000,00	31.785.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.843.350.136,00	2.442.797.873,00	2.440.441.773,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.194.620.136,00	1.794.067.873,00	1.777.711.773,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.015.493.836,00	1.614.941.573,00	1.596.019.273,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.666.300,00	30.666.300,00	35.000.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.460.000,00	148.460.000,00	146.692.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634.780.000,00	634.780.000,00	648.780.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	543.480.000,00	543.480.000,00	557.480.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.300.000,00	91.300.000,00	91.300.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0008						Biro Humas dan Protokol	6.001.250.000,00	6.001.249.600,00	7.110.033.300,00
4.01.2.23.2.24.01.0008	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	77.440.000,00	77.440.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0008	4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	5.701.250.000,00	5.701.249.600,00	6.001.237.600,00
4.01.2.23.2.24.01.0008	4	01	01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	278.166.000,00	278.165.600,00	278.165.600,00
4.01.2.23.2.24.01.0008	4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5.019.828.000,00	5.019.828.000,00	5.319.816.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0008	4	01	01	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	403.256.000,00	403.256.000,00	403.256.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0008	4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	200.000.000,00	222.560.000,00	1.031.355.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0008	4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	388.398.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0008	4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	100.000.000,00	122.560.000,00	642.957.700,00
4.02.0.00.0.00.01.0000						Sekretariat DPRD	277.671.654.488,00	276.163.870.996,00	292.530.173.777,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	277.671.654.488,00	276.163.870.996,00	292.530.173.777,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	147.773.376.222,00	146.740.472.765,00	150.005.047.960,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	11.868.172.860,00	17.526.245.417,00	20.414.565.417,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.030.112.520,00	1.896.054.110,00	1.896.054.110,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	10.196.314.330,00	14.720.035.002,00	17.458.355.002,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	641.746.010,00	910.156.305,00	1.060.156.305,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.787.061.132,00	6.511.147.722,00	6.724.518.017,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	75.911.892,00	1.953.991.892,00	75.911.892,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	64.867.710,00	64.867.710,00	64.867.710,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD	895.785.110,00	2.758.069.405,00	4.865.797.405,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD	872.174.410,00	855.896.705,00	855.896.705,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	878.322.010,00	878.322.010,00	862.044.305,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	22.191.813.064,00	25.799.399.424,00	25.776.199.424,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5.347.460.414,00	7.947.975.299,00	7.947.975.299,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	5.044.255.800,00	5.644.015.800,00	5.644.015.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	5.017.200.830,00	5.457.067.715,00	5.457.067.715,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	6.051.103.820,00	6.018.548.410,00	5.995.348.410,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	731.792.200,00	731.792.200,00	731.792.200,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	12.328.427.020,00	14.556.337.855,00	14.429.738.855,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.524.381.230,00	3.591.761.115,00	3.638.481.115,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4.467.166.400,00	4.467.166.400,00	4.467.166.400,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	670.186.800,00	670.186.800,00	670.186.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.389.943.820,00	1.441.278.410,00	1.441.278.410,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	3.276.748.770,00	4.385.945.130,00	4.212.626.130,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	91.505.715.632,00	41.174.412.612,00	41.396.852.612,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.968.968.812,00	3.082.686.902,00	3.305.126.902,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	54.317.495.200,00	2.905.029.500,00	2.905.029.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses	35.219.251.620,00	35.186.696.210,00	35.186.696.210,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	588.000.664,00	853.546.910,00	853.546.910,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	588.000.664,00	853.546.910,00	853.546.910,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	6.504.185.850,00	40.319.382.825,00	40.409.626.725,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.960.601.230,00	36.164.300.615,00	36.254.544.515,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	369.032.820,00	468.679.410,00	468.679.410,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.174.551.800,00	3.686.402.800,00	3.686.402.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	129.898.278.266,00	129.423.398.231,00	142.525.125.817,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	552.920.020,00	782.804.610,00	782.804.610,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	335.389.710,00	495.356.005,00	495.356.005,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	217.530.310,00	287.448.605,00	287.448.605,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.084.061.598,00	12.648.982.747,00	11.803.935.217,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.882.480.678,00	12.374.218.237,00	11.483.270.707,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101.166.410,00	139.200.705,00	185.100.705,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100.414.510,00	135.563.805,00	135.563.805,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.595.466.382,00	7.658.458.888,00	13.726.847.188,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	149.002.100,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	439.034.000,00	498.521.386,00	498.521.386,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.734.090.446,00	1.740.133.446,00	1.941.833.246,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	137.117.600,00	141.209.600,00	141.209.600,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.075.320.000,00	1.096.920.000,00	1.096.920.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.060.902.236,00	4.181.674.456,00	10.048.362.956,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.508.990.500,00	13.597.468.500,00	15.543.338.236,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.508.990.500,00	13.597.468.500,00	15.543.338.236,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.543.024.042,00	2.432.319.287,00	2.971.149.087,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.700.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	850.000.000,00	893.000.000,00	950.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.677.324.042,00	1.523.619.287,00	2.005.449.087,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.798.342.450,00	29.298.342.450,00	31.275.598.450,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.750.756.238,00	3.750.756.238,00	3.915.956.238,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.404.546.212,00	24.904.546.212,00	26.216.602.212,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	643.040.000,00	643.040.000,00	1.143.040.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	61.568.152.634,00	61.822.811.929,00	65.016.758.209,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	59.732.867.624,00	59.732.867.624,00	62.926.813.904,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.579.698.500,00	1.785.578.500,00	1.785.578.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	255.586.510,00	304.365.805,00	304.365.805,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	1.247.320.640,00	1.182.209.820,00	1.404.694.820,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	184.444.240,00	119.333.420,00	119.333.420,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.062.876.400,00	1.062.876.400,00	1.285.361.400,00
5.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27.707.328.292,00	25.912.923.397,00	25.908.334.842,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	27.707.328.292,00	25.912.923.397,00	25.908.334.842,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	27.707.328.292,00	25.912.923.397,00	25.908.334.842,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.544.619.206,00	2.321.966.141,00	2.319.080.141,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.305.487.542,00	1.224.098.817,00	1.224.098.817,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	15.570.300,00	15.570.300,00	15.570.300,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	93.767.400,00	93.767.400,00	93.767.400,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.196.149.842,00	1.114.761.117,00	1.114.761.117,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	449.420.232,00	373.266.712,00	380.106.712,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	424.005.332,00	347.851.812,00	363.016.812,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	25.414.900,00	25.414.900,00	17.089.900,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	735.504.132,00	670.393.312,00	670.393.312,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	95.827.700,00	95.827.700,00	95.827.700,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	483.609.632,00	418.498.812,00	418.498.812,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	156.066.800,00	156.066.800,00	156.066.800,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	54.207.300,00	54.207.300,00	44.481.300,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	54.207.300,00	54.207.300,00	44.481.300,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.998.814.538,00	1.559.316.503,00	1.759.316.503,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	673.332.564,00	543.110.924,00	743.110.924,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	102.227.320,00	69.671.910,00	69.671.910,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	101.187.310,00	84.909.605,00	84.909.605,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	260.580.422,00	211.747.307,00	411.747.307,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	209.337.512,00	176.782.102,00	176.782.102,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	671.759.564,00	541.537.924,00	541.537.924,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	220.637.022,00	171.803.907,00	171.803.907,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	202.925.812,00	170.370.402,00	170.370.402,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.993.110,00	66.715.405,00	66.715.405,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	165.203.620,00	132.648.210,00	132.648.210,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	653.722.410,00	474.667.655,00	474.667.655,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	295.770.960,00	198.104.730,00	198.104.730,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	50.477.700,00	50.477.700,00	50.477.700,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	256.286.150,00	174.897.625,00	174.897.625,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	51.187.600,00	51.187.600,00	51.187.600,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.163.894.548,00	22.031.640.753,00	21.829.938.198,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	231.698.014,00	182.864.899,00	182.864.899,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	203.909.114,00	155.075.999,00	155.075.999,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.474.400,00	11.474.400,00	11.474.400,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11.444.900,00	11.444.900,00	11.444.900,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.869.600,00	4.869.600,00	4.869.600,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.671.010.143,00	15.776.302.800,00	15.490.436.145,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.365.850.481,00	15.585.087.073,00	15.275.945.418,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	176.934.150,00	95.545.625,00	118.820.625,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	128.225.512,00	95.670.102,00	95.670.102,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.646.669.686,00	1.563.133.661,00	1.565.797.761,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64.000.810,00	47.723.105,00	47.723.105,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	870.779.432,00	868.631.932,00	871.296.032,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.063.004,00	129.063.004,00	129.063.004,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.483.210,00	40.205.505,00	40.205.505,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	63.183.410,00	46.905.705,00	46.905.705,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.805.410,00	43.527.705,00	43.527.705,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	403.354.410,00	387.076.705,00	387.076.705,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	411.144.692,00	411.144.692,00	411.144.692,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	361.989.600,00	361.989.600,00	361.989.600,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.155.092,00	49.155.092,00	49.155.092,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	960.658.584,00	928.103.174,00	928.103.174,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.616.910,00	20.339.205,00	20.339.205,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.266.492,00	197.266.492,00	197.266.492,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	726.775.182,00	710.497.477,00	710.497.477,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.242.713.429,00	3.170.091.527,00	3.251.591.527,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	771.388.362,00	715.044.165,00	729.044.165,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	192.660.410,00	176.382.705,00	186.882.705,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.278.664.657,00	2.278.664.657,00	2.335.664.657,00
5.02.0.00.0.00.02.0000						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.304.807.848.688,00	1.314.979.743.277,00	1.436.447.783.061,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02				KEUANGAN	1.304.807.848.688,00	1.314.979.743.277,00	1.436.447.783.061,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.274.804.651.537,00	1.285.233.060.196,00	1.405.838.529.823,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.694.665.340,00	1.726.010.520,00	1.695.239.520,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	42.069.100,00	74.355.100,00	47.133.100,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	41.892.300,00	34.356.300,00	34.356.300,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	40.764.500,00	40.764.500,00	34.764.500,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	20.456.000,00	20.456.000,00	20.456.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	949.618.740,00	889.103.920,00	891.146.920,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	599.864.700,00	666.974.700,00	667.382.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	514.026.700,00	514.026.700,00	514.026.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	109.226.700,00	109.226.700,00	109.226.700,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	80.274.200,00	80.274.200,00	80.274.200,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	63.616.900,00	63.616.900,00	63.616.900,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	194.972.400,00	194.972.400,00	194.972.400,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	65.936.500,00	65.936.500,00	65.936.500,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	491.359.800,00	555.859.800,00	651.859.800,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	491.359.800,00	555.859.800,00	651.859.800,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	692.692.706,00	795.858.706,00	795.851.706,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	619.640.306,00	722.806.306,00	722.799.306,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	73.052.400,00	73.052.400,00	73.052.400,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.271.346.377.491,00	1.281.605.610.970,00	1.402.115.618.597,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.026.843.633,00	2.026.843.633,00	2.026.843.633,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	205.265.185.944,00	205.265.185.944,00	325.315.879.304,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	55.464.624.677,00	55.464.624.677,00	55.923.938.944,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.008.589.723.237,00	1.018.848.956.716,00	1.018.848.956.716,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	65.529.500,00	35.693.500,00	65.933.500,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.06	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	65.529.500,00	35.693.500,00	65.933.500,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.889.794.112,00	1.604.795.111,00	2.320.261.424,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.889.794.112,00	1.604.795.111,00	2.320.261.424,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga	121.715.300,00	121.715.300,00	121.715.300,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	22.166.000,00	22.166.000,00	22.166.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	214.630.000,00	214.630.000,00	214.630.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.531.282.812,00	1.246.283.811,00	1.961.750.124,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.113.403.039,00	28.141.887.970,00	28.288.991.814,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.873.000,00	44.873.000,00	44.873.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.873.000,00	44.873.000,00	44.873.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.568.190.303,00	22.529.837.599,00	22.403.240.843,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.608.826.901,00	21.554.726.902,00	21.428.130.146,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	959.363.402,00	975.110.697,00	975.110.697,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.209.022.052,00	3.055.316.097,00	3.306.015.697,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.099.400,00	17.024.700,00	17.024.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.620.551.220,00	2.483.197.670,00	2.733.897.270,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	239.052.922,00	239.052.922,00	239.052.922,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.930.200,00	11.930.200,00	11.930.200,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.999.900,00	7.999.900,00	7.999.900,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	127.305.410,00	111.027.705,00	111.027.705,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.083.000,00	185.083.000,00	185.083.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.010.000,00	290.010.000,00	290.010.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.710.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.300.000,00	285.300.000,00	285.300.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.001.307.684,00	2.221.851.274,00	2.244.852.274,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	758.551.076,00	757.551.076,00	771.551.076,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	174.914.710,00	158.637.005,00	158.637.005,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.061.441.898,00	1.299.263.193,00	1.308.264.193,00
5.02.0.00.0.00.02.0001						UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.400.024.044,00	3.400.024.044,00	3.400.024.044,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.102.504.000,00	2.102.504.000,00	2.102.504.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.102.504.000,00	2.102.504.000,00	2.102.504.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.102.504.000,00	2.102.504.000,00	2.102.504.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.297.520.044,00	1.297.520.044,00	1.297.520.044,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.844.600,00	161.844.600,00	161.844.600,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.748.500,00	43.748.500,00	43.748.500,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.449.100,00	9.449.100,00	9.449.100,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.485.000,00	10.485.000,00	10.485.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.962.000,00	93.962.000,00	93.962.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.200.000,00	58.200.000,00	58.200.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.077.475.444,00	1.077.475.444,00	1.077.475.444,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.525.000,00	154.525.000,00	154.525.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.260.000,00	15.260.000,00	15.260.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	907.690.444,00	907.690.444,00	907.690.444,00
5.02.0.00.0.00.03.0000						Badan Pendapatan Daerah	161.634.444.409,00	146.570.842.943,00	142.936.417.472,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	743.296.900,00	742.646.500,00	709.346.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	743.296.900,00	742.646.500,00	709.346.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	162.026.400,00	162.026.400,00	128.726.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	93.709.600,00	93.709.600,00	93.709.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	143.625.200,00	142.974.800,00	142.974.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	308.975.700,00	308.975.700,00	308.975.700,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	34.960.000,00	34.960.000,00	34.960.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	160.891.147.509,00	145.828.196.443,00	142.227.070.972,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.662.300,00	47.662.300,00	45.277.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.721.100,00	22.721.100,00	20.336.100,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.941.200,00	24.941.200,00	24.941.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	143.633.709.782,00	129.039.205.832,00	125.381.527.196,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	143.633.709.782,00	129.039.205.832,00	125.381.527.196,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.254.352.494,00	1.254.352.494,00	1.254.352.494,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.556.000,00	10.556.000,00	10.556.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	318.006.500,00	318.006.500,00	318.006.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.575.894,00	101.575.894,00	101.575.894,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	324.960.300,00	324.960.300,00	324.960.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.428.800,00	2.428.800,00	2.428.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	483.325.000,00	483.325.000,00	483.325.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.824.583.949,00	9.828.190.278,00	9.841.839.893,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.733.625,00	226.733.625,00	218.777.440,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.279.862.900,00	1.279.242.100,00	1.390.847.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.317.987.424,00	8.322.214.553,00	8.232.214.553,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	814.033.877,00	814.033.877,00	828.033.877,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.147.400,00	6.147.400,00	6.147.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	387.433.104,00	387.433.104,00	387.433.104,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.453.373,00	420.453.373,00	434.453.373,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.266.805.107,00	4.794.751.662,00	4.826.040.212,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	124.469.592,00	124.469.592,00	124.469.592,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.434.609.652,00	1.434.609.652,00	1.434.609.652,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	839.934.430,00	465.547.215,00	465.547.215,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.634.252.460,00	1.634.252.460,00	1.666.207.210,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.233.538.973,00	1.135.872.743,00	1.135.206.543,00
5.02.0.00.0.00.03.0001						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng	5.173.382.464,00	4.001.387.704,00	4.001.267.704,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.428.837.458,00	2.370.786.633,00	2.370.666.633,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.428.837.458,00	2.370.786.633,00	2.370.666.633,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.741.959.942,00	1.107.129.447,00	1.151.015.939,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	1.686.877.516,00	1.263.657.186,00	1.219.650.694,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.744.545.006,00	1.630.601.071,00	1.630.601.071,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.783.600,00	307.783.600,00	307.783.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.259.300,00	5.259.300,00	5.259.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	192.580.600,00	192.580.600,00	192.580.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.239.200,00	10.239.200,00	10.239.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.854.500,00	4.854.500,00	4.854.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.789.800,00	532.789.800,00	532.789.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.789.800,00	1.789.800,00	1.789.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261.000.000,00	261.000.000,00	261.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	903.971.606,00	790.027.671,00	790.027.671,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.714.492,00	175.714.492,00	175.714.492,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.180.000,00	21.180.000,00	21.180.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	643.353.314,00	529.409.379,00	529.409.379,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.723.800,00	16.723.800,00	16.723.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0002						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana	2.236.083.794,00	1.907.274.153,00	1.907.274.153,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.004.115.774,00	740.416.953,00	740.416.953,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.004.115.774,00	740.416.953,00	740.416.953,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	370.929.772,00	240.708.132,00	240.708.132,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	633.186.002,00	499.708.821,00	499.708.821,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.231.968.020,00	1.166.857.200,00	1.166.857.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.121.720,00	212.121.720,00	212.121.720,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.664.700,00	3.664.700,00	3.664.700,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.410.120,00	129.410.120,00	129.410.120,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.691.900,00	4.691.900,00	4.691.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.775.000,00	4.775.000,00	4.775.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.580.000,00	44.580.000,00	44.580.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.491.500,00	372.491.500,00	372.491.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.491.500,00	1.491.500,00	1.491.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.000.000,00	181.000.000,00	181.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	647.354.800,00	582.243.980,00	582.243.980,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.703.000,00	46.703.000,00	46.703.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.708.392,00	154.708.392,00	154.708.392,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.020.000,00	41.020.000,00	41.020.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	391.487.608,00	326.376.788,00	326.376.788,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.435.800,00	13.435.800,00	13.435.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0003						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan	2.487.670.204,00	2.048.172.169,00	2.048.052.169,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	956.846.594,00	615.014.789,00	614.894.789,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	956.846.594,00	615.014.789,00	614.894.789,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	449.620.592,00	286.843.542,00	286.723.542,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	507.226.002,00	328.171.247,00	328.171.247,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.530.823.610,00	1.433.157.380,00	1.433.157.380,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.243.990,00	208.243.990,00	208.243.990,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.949.800,00	6.949.800,00	6.949.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142.850.490,00	142.850.490,00	142.850.490,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.783.700,00	6.783.700,00	6.783.700,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.285.000,00	21.285.000,00	21.285.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479.978.200,00	479.978.200,00	479.978.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.978.200,00	1.978.200,00	1.978.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.000.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294.000.000,00	294.000.000,00	294.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	842.601.420,00	744.935.190,00	744.935.190,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.855.000,00	45.855.000,00	45.855.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.937.992,00	225.937.992,00	225.937.992,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.460.000,00	21.460.000,00	21.460.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	533.098.428,00	435.432.198,00	435.432.198,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.250.000,00	16.250.000,00	16.250.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung	4.427.042.451,00	3.548.043.881,00	3.547.988.881,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.259.998.928,00	1.446.113.678,00	1.450.363.678,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.259.998.928,00	1.446.113.678,00	1.450.363.678,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.635.525.352,00	984.417.152,00	990.567.152,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	624.473.576,00	461.696.526,00	459.796.526,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.167.043.523,00	2.101.930.203,00	2.097.625.203,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.414.540,00	261.412.040,00	257.107.040,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.925.600,00	8.924.100,00	8.924.100,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.517.890,00	174.516.890,00	174.516.890,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.186.050,00	17.186.050,00	17.186.050,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.575.000,00	10.575.000,00	10.575.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.370.000,00	20.370.000,00	16.065.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	817.209.147,00	817.209.147,00	817.209.147,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.978.200,00	1.978.200,00	1.978.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	378.000.000,00	378.000.000,00	378.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	437.230.947,00	437.230.947,00	437.230.947,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.088.419.836,00	1.023.309.016,00	1.023.309.016,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.265.000,00	36.265.000,00	36.265.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.338.992,00	188.338.992,00	188.338.992,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.920.000,00	19.920.000,00	19.920.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	816.055.844,00	750.945.024,00	750.945.024,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.840.000,00	27.840.000,00	27.840.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar	5.843.244.417,00	4.601.026.077,00	4.724.906.077,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.156.287.162,00	1.995.459.287,00	1.995.459.287,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.156.287.162,00	1.995.459.287,00	1.995.459.287,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.609.200.078,00	1.513.483.023,00	1.513.483.023,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	547.087.084,00	481.976.264,00	481.976.264,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.686.957.255,00	2.605.566.790,00	2.729.446.790,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	572.520.464,00	572.518.524,00	572.518.524,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.435.800,00	4.435.800,00	4.435.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	404.761.770,00	404.759.830,00	404.759.830,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.122.194,00	57.122.194,00	57.122.194,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.536.700,00	65.536.700,00	65.536.700,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.424.000,00	6.424.000,00	6.424.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.875.000,00	20.875.000,00	20.875.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.365.000,00	13.365.000,00	13.365.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	867.965.394,00	867.965.394,00	867.965.394,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.491.500,00	1.491.500,00	1.491.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	474.550.000,00	474.550.000,00	474.550.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.923.894,00	391.923.894,00	391.923.894,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.246.471.397,00	1.165.082.872,00	1.288.962.872,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.270.800,00	51.270.800,00	51.270.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.489.104,00	226.489.104,00	226.489.104,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.040.000,00	17.040.000,00	17.040.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	901.906.893,00	820.518.368,00	945.518.368,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.764.600,00	49.764.600,00	48.644.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0006						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar	3.449.917.963,00	2.684.865.828,00	2.684.865.828,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.744.904.794,00	1.077.518.889,00	1.077.518.889,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.744.904.794,00	1.077.518.889,00	1.077.518.889,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.154.773.644,00	731.553.314,00	731.553.314,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	590.131.150,00	345.965.575,00	345.965.575,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.705.013.169,00	1.607.346.939,00	1.607.346.939,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.012.314,00	284.012.314,00	284.012.314,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.931.000,00	16.931.000,00	16.931.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.966.580,00	145.966.580,00	145.966.580,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.718.634,00	56.718.634,00	56.718.634,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.463.600,00	22.463.600,00	22.463.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.212.500,00	8.212.500,00	8.212.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.120.000,00	18.120.000,00	18.120.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	589.920.457,00	589.920.457,00	589.920.457,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.826.000,00	2.826.000,00	2.826.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	337.094.457,00	337.094.457,00	337.094.457,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	831.080.398,00	733.414.168,00	733.414.168,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.497.500,00	147.497.500,00	147.497.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.300.000,00	38.300.000,00	38.300.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	560.762.898,00	463.096.668,00	463.096.668,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.020.000,00	35.020.000,00	35.020.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli	2.321.050.743,00	1.822.952.970,00	1.822.952.970,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.070.409.054,00	653.699.806,00	653.699.806,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.070.409.054,00	653.699.806,00	653.699.806,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	492.786.822,00	303.965.444,00	303.965.444,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	577.622.232,00	349.734.362,00	349.734.362,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.250.641.689,00	1.169.253.164,00	1.169.253.164,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.923.500,00	171.923.500,00	171.923.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.009.700,00	7.009.700,00	7.009.700,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.788.300,00	116.788.300,00	116.788.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.399.700,00	3.399.700,00	3.399.700,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.250.800,00	3.250.800,00	3.250.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.639.287,00	491.639.287,00	491.639.287,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.789.800,00	1.789.800,00	1.789.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	359.849.487,00	359.849.487,00	359.849.487,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	587.078.902,00	505.690.377,00	505.690.377,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.995.000,00	47.995.000,00	47.995.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.518.700,00	104.518.700,00	104.518.700,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.290.000,00	14.290.000,00	14.290.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	412.176.002,00	330.787.477,00	330.787.477,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.099.200,00	8.099.200,00	8.099.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0008						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung	2.428.083.982,00	1.988.585.947,00	1.988.585.947,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	881.626.348,00	588.627.658,00	588.627.658,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	881.626.348,00	588.627.658,00	588.627.658,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	433.280.592,00	270.503.542,00	270.503.542,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	448.345.756,00	318.124.116,00	318.124.116,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.546.457.634,00	1.399.958.289,00	1.399.958.289,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.023.800,00	180.023.800,00	180.023.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.660.400,00	2.660.400,00	2.660.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.050.400,00	110.050.400,00	110.050.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.280.000,00	30.280.000,00	30.280.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.674.000,00	3.674.000,00	3.674.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.325.000,00	4.325.000,00	4.325.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.454.000,00	26.454.000,00	26.454.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.193.200,00	429.193.200,00	429.193.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.193.200,00	1.193.200,00	1.193.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218.000.000,00	218.000.000,00	218.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	937.240.634,00	790.741.289,00	790.741.289,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.835.000,00	42.835.000,00	42.835.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.991.500,00	152.991.500,00	152.991.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.390.000,00	16.390.000,00	16.390.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	707.464.134,00	560.964.789,00	560.964.789,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.560.000,00	17.560.000,00	17.560.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem	2.317.832.764,00	1.824.142.078,00	1.823.426.378,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	970.096.594,00	628.264.789,00	628.264.789,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	970.096.594,00	628.264.789,00	628.264.789,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	496.176.002,00	317.121.247,00	317.121.247,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	473.920.592,00	311.143.542,00	311.143.542,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.347.736.170,00	1.195.877.289,00	1.195.161.589,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.492.980,00	226.492.980,00	226.492.980,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.827.100,00	3.827.100,00	3.827.100,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.245.980,00	122.245.980,00	122.245.980,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.837.000,00	27.837.000,00	27.837.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.182.900,00	5.182.900,00	5.182.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.575.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.650.000,00	61.650.000,00	61.650.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.253.556,00	403.193.200,00	403.193.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.193.200,00	1.193.200,00	1.193.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.060.356,00	237.000.000,00	237.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	665.989.634,00	566.191.109,00	565.475.409,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.490.000,00	52.490.000,00	52.490.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.435.592,00	123.835.592,00	123.835.592,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.200.000,00	21.390.000,00	21.390.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	433.843.542,00	352.455.017,00	352.455.017,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.020.500,00	16.020.500,00	15.304.800,00
5.03.5.04.0.00.02.0000						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40.045.227.431,00	37.240.043.344,00	37.986.224.139,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	38.884.413.037,00	36.095.506.655,00	36.753.757.450,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.980.109.552,00	3.817.332.502,00	3.715.372.502,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.335.444.922,00	1.286.611.807,00	1.255.051.807,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	41.856.000,00	41.856.000,00	41.856.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	820.474.000,00	820.474.000,00	788.914.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	39.368.000,00	39.368.000,00	39.368.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	113.663.410,00	97.385.705,00	97.385.705,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	154.596.500,00	154.596.500,00	154.596.500,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	165.487.012,00	132.931.602,00	132.931.602,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	338.628.930,00	289.795.815,00	240.395.815,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	50.375.110,00	34.097.405,00	34.097.405,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	137.791.410,00	121.513.705,00	116.113.705,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	150.462.410,00	134.184.705,00	90.184.705,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	1.879.721.394,00	1.863.443.689,00	1.842.443.689,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	73.996.492,00	73.996.492,00	73.996.492,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.492.206.492,00	1.492.206.492,00	1.492.206.492,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	18.608.000,00	18.608.000,00	18.608.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	216.266.000,00	216.266.000,00	195.266.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	78.644.410,00	62.366.705,00	62.366.705,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	426.314.306,00	377.481.191,00	377.481.191,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	110.273.902,00	93.996.197,00	93.996.197,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	59.545.100,00	59.545.100,00	59.545.100,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	139.094.702,00	122.816.997,00	122.816.997,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	100.333.902,00	84.056.197,00	84.056.197,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	17.066.700,00	17.066.700,00	17.066.700,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.904.303.485,00	32.278.174.153,00	33.038.384.948,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.382.600,00	102.382.600,00	102.382.600,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.042.600,00	37.042.600,00	37.042.600,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.540.000,00	51.540.000,00	51.540.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.401.080.353,00	28.921.450.366,00	29.450.461.161,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.401.080.353,00	28.921.450.366,00	29.450.461.161,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	469.012.234,00	469.012.234,00	469.012.234,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.762.400,00	17.762.400,00	17.762.400,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153.768.400,00	153.768.400,00	153.768.400,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.079.034,00	85.079.034,00	85.079.034,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.280.400,00	10.280.400,00	10.280.400,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.137.000,00	4.137.000,00	4.137.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.985.000,00	197.985.000,00	197.985.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	575.633.000,00	575.633.000,00	575.633.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	575.633.000,00	575.633.000,00	575.633.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.123.115.978,00	976.616.633,00	976.616.633,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.386.400,00	2.386.400,00	2.386.400,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.600.000,00	253.600.000,00	253.600.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	867.129.578,00	720.630.233,00	720.630.233,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.233.079.320,00	1.233.079.320,00	1.464.279.320,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	996.648.320,00	996.648.320,00	1.010.648.320,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	118.731.000,00	118.731.000,00	316.731.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.700.000,00	117.700.000,00	136.900.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.160.814.394,00	1.144.536.689,00	1.232.466.689,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.160.814.394,00	1.144.536.689,00	1.232.466.689,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.160.814.394,00	1.144.536.689,00	1.232.466.689,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	202.709.492,00	202.709.492,00	267.709.492,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	245.776.000,00	245.776.000,00	204.089.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	466.439.492,00	466.439.492,00	531.056.492,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	116.684.500,00	116.684.500,00	116.684.500,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	85.838.910,00	69.561.205,00	69.561.205,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	43.366.000,00	43.366.000,00	43.366.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0001						UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	1.835.212.552,00	1.737.546.322,00	1.867.771.322,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03				KEPEGAWAIAN	1.835.212.552,00	1.737.546.322,00	1.867.771.322,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.451.247.300,00	1.451.247.300,00	1.583.657.700,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	1.451.247.300,00	1.451.247.300,00	1.583.657.700,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	1.451.247.300,00	1.451.247.300,00	1.583.657.700,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	383.965.252,00	286.299.022,00	284.113.622,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.699.800,00	28.699.800,00	26.514.400,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.361.800,00	5.361.800,00	3.176.400,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.338.000,00	23.338.000,00	23.338.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.550.000,00	25.550.000,00	25.550.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.550.000,00	25.550.000,00	25.550.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.398.952,00	143.732.722,00	143.732.722,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.398.952,00	143.732.722,00	143.732.722,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.316.500,00	88.316.500,00	88.316.500,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.656.500,00	78.656.500,00	78.656.500,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.660.000,00	9.660.000,00	9.660.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0002						UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	20.700.000.000,00	21.700.000.000,00	21.700.000.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0002	5	03	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	20.700.000.000,00	21.700.000.000,00	21.700.000.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0002	5	03	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	20.700.000.000,00	21.700.000.000,00	21.700.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000						Badan Riset dan Inovasi Daerah	26.975.192.479,00	26.458.707.363,00	26.887.596.102,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	26.975.192.479,00	26.458.707.363,00	26.887.596.102,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.049.416.900,00	11.049.416.600,00	11.528.686.400,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	8.206.608.000,00	8.206.608.000,00	8.506.608.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	5.874.365.000,00	5.874.365.000,00	6.274.365.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.01	0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	292.539.000,00	292.539.000,00	292.539.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	245.784.000,00	245.784.000,00	245.784.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1.793.920.000,00	1.793.920.000,00	1.693.920.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2.463.154.500,00	2.463.154.500,00	2.642.424.300,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	215.129.000,00	215.129.000,00	394.398.800,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	231.500.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	894.682.000,00	894.682.000,00	894.682.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	234.732.500,00	234.732.500,00	234.732.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	218.611.000,00	218.611.000,00	218.611.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	400.000.000,00	400.000.000,00	668.500.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	379.654.400,00	379.654.100,00	379.654.100,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	167.233.000,00	167.232.700,00	167.232.700,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	61.661.400,00	61.661.400,00	61.661.400,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	150.760.000,00	150.760.000,00	150.760.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.925.775.579,00	15.409.290.763,00	15.358.909.702,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.951.000,00	58.951.000,00	58.951.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.789.000,00	23.789.000,00	23.789.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.162.000,00	35.162.000,00	35.162.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.442.366.836,00	10.807.953.521,00	10.735.967.860,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.442.366.836,00	10.807.953.521,00	10.735.967.860,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.292.800,00	563.292.800,00	576.031.300,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.938.000,00	21.938.000,00	21.938.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.905.500,00	198.905.500,00	205.509.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.436.400,00	107.436.400,00	107.436.400,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.180.200,00	24.180.200,00	24.180.200,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.998.700,00	14.998.700,00	14.998.700,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.834.000,00	195.834.000,00	201.969.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.214.143.531,00	1.684.011.440,00	1.677.862.540,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	551.291.800,00	607.456.200,00	607.456.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	662.851.731,00	1.076.555.240,00	1.070.406.340,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.699.044,00	519.869.144,00	519.869.144,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.992.600,00	11.162.700,00	11.162.700,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.200.000,00	167.200.000,00	167.200.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341.506.444,00	341.506.444,00	341.506.444,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.133.322.368,00	1.775.212.858,00	1.790.227.858,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	795.794.806,00	779.517.101,00	784.032.101,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.337.527.562,00	995.695.757,00	1.006.195.757,00
5.07.0.00.0.00.01.0000						Badan Penghubung	10.780.850.683,00	10.899.023.314,00	11.017.823.314,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG	10.780.850.683,00	10.899.023.314,00	11.017.823.314,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.243.782.367,00	3.243.656.007,00	3.221.308.927,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3.243.782.367,00	3.243.656.007,00	3.221.308.927,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	113.273.387,00	113.273.387,00	115.336.387,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	364.482.196,00	364.446.896,00	326.087.665,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.766.026.784,00	2.765.935.724,00	2.779.884.875,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.537.068.316,00	7.655.367.307,00	7.796.514.387,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.300,00	4.999.300,00	4.999.300,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.300,00	4.999.300,00	4.999.300,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.119.038.696,00	3.237.233.406,00	3.168.063.101,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.119.038.696,00	3.237.233.406,00	3.168.063.101,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.848.600,00	253.075.500,00	278.537.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.989.400,00	14.989.400,00	14.989.400,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.981.200,00	67.693.600,00	67.693.600,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.567.000,00	6.090.500,00	6.090.500,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.311.000,00	74.302.000,00	99.764.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	546.003.420,00	545.880.801,00	544.230.256,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	546.003.420,00	545.880.801,00	544.230.256,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.474.896.236,00	1.474.896.236,00	1.529.745.566,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.989.100,00	8.989.100,00	8.989.100,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	306.800.000,00	306.800.000,00	306.800.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.159.107.136,00	1.159.107.136,00	1.213.956.466,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.139.282.064,00	2.139.282.064,00	2.270.938.664,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.462.537.868,00	1.462.537.868,00	1.581.337.868,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	534.975.000,00	534.975.000,00	537.975.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	141.769.196,00	141.769.196,00	151.625.796,00
6.01.0.00.0.00.01.0000						Inspektorat	36.779.683.543,00	35.843.889.401,00	35.944.174.832,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	36.779.683.543,00	35.843.889.401,00	35.944.174.832,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	36.779.683.543,00	35.843.889.401,00	35.944.174.832,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.353.877.588,00	2.034.815.370,00	2.034.965.370,00

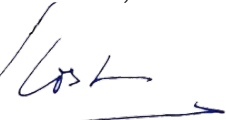
Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.674.358.128,00	1.469.249.045,00	1.469.399.045,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	137.694.384,00	92.116.810,00	92.116.810,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	205.213.784,00	159.626.210,00	159.626.210,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	48.013.500,00	48.013.500,00	48.013.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	165.394.492,00	142.605.705,00	142.605.705,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	592.736.184,00	547.158.610,00	547.158.610,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	283.700.300,00	283.700.300,00	283.700.300,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	241.605.484,00	196.027.910,00	196.177.910,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	679.519.460,00	565.566.325,00	565.566.325,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	96.452.684,00	50.875.110,00	50.875.110,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	583.066.776,00	514.691.215,00	514.691.215,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.470.453.104,00	2.256.310.047,00	2.305.270.047,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.731.149.328,00	1.585.392.632,00	1.591.152.632,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	324.932.376,00	293.526.015,00	299.286.015,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.406.216.952,00	1.291.866.617,00	1.291.866.617,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	739.303.776,00	670.917.415,00	714.117.415,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	236.435.676,00	168.049.315,00	211.249.315,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	141.882.800,00	141.882.800,00	141.882.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	283.068.900,00	283.068.900,00	283.068.900,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	77.916.400,00	77.916.400,00	77.916.400,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.955.352.851,00	31.552.763.984,00	31.603.939.415,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.659.000,00	42.659.000,00	42.659.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.521.800,00	18.521.800,00	18.521.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.137.200,00	24.137.200,00	24.137.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.324.679.033,00	25.987.991.440,00	26.039.950.471,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.324.679.033,00	25.987.991.440,00	26.039.950.471,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.079.972.694,00	1.079.800.694,00	1.079.791.694,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.999.400,00	49.999.400,00	49.999.400,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.999.800,00	99.997.800,00	99.997.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	158.109.394,00	158.109.394,00	158.109.394,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.070.300,00	40.070.300,00	40.070.300,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44.140.800,00	44.140.800,00	44.140.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.960.000,00	39.960.000,00	39.960.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	647.693.000,00	647.523.000,00	647.514.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.759.720.040,00	1.757.498.340,00	1.694.023.740,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.759.720.040,00	1.757.498.340,00	1.694.023.740,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	595.153.460,00	595.153.460,00	633.153.460,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.092.900,00	5.092.900,00	5.092.900,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280.500.000,00	280.500.000,00	318.500.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	309.560.560,00	309.560.560,00	309.560.560,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.153.168.624,00	2.089.661.050,00	2.114.361.050,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.621.453.428,00	1.621.453.428,00	1.617.453.428,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	306.952.212,00	306.952.212,00	341.752.212,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	224.762.984,00	161.255.410,00	155.155.410,00
8.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.942.512.449,00	47.344.524.367,00	47.248.225.245,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	47.942.512.449,00	47.344.524.367,00	47.248.225.245,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	47.942.512.449,00	47.344.524.367,00	47.248.225.245,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	4.687.872.394,00	4.671.570.389,00	4.671.570.389,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.687.872.394,00	4.671.570.389,00	4.671.570.389,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.239.752.794,00	1.223.475.089,00	1.223.475.089,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	0012	Pembentukan Paskibraka	3.448.119.600,00	3.448.095.300,00	3.448.095.300,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	24.195.610.794,00	24.179.333.089,00	24.179.333.089,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	24.195.610.794,00	24.179.333.089,00	24.179.333.089,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	24.195.610.794,00	24.179.333.089,00	24.179.333.089,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	503.817.000,00	503.817.000,00	990.317.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	503.817.000,00	503.817.000,00	990.317.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	503.817.000,00	503.817.000,00	990.317.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	836.547.322,00	787.714.207,00	801.214.207,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	836.547.322,00	787.714.207,00	801.214.207,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	836.547.322,00	787.714.207,00	801.214.207,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	4.150.316.912,00	4.111.281.902,00	4.111.275.902,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4.150.316.912,00	4.111.281.902,00	4.111.275.902,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3.185.459.212,00	3.152.903.802,00	3.152.903.802,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	964.857.700,00	958.378.100,00	958.372.100,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.568.348.027,00	13.090.807.780,00	12.494.514.658,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.596.000,00	80.596.000,00	80.596.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.956.000,00	57.956.000,00	57.956.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.640.000,00	22.640.000,00	22.640.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.015.015.243,00	9.700.525.646,00	9.075.753.924,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.015.015.243,00	9.700.525.646,00	9.075.753.924,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	601.359.824,00	601.359.824,00	601.359.824,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.921.500,00	14.921.500,00	14.921.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.117.300,00	240.117.300,00	240.117.300,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.229.424,00	77.229.424,00	77.229.424,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.880.500,00	35.880.500,00	35.880.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.996.100,00	4.996.100,00	4.996.100,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.215.000,00	228.215.000,00	228.215.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	711.824.240,00	711.550.640,00	711.329.240,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	294.901.500,00	294.627.900,00	294.406.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	416.922.740,00	416.922.740,00	416.922.740,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.144.530.920,00	981.753.870,00	981.753.870,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.994.800,00	11.994.800,00	11.994.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.100.000,00	139.100.000,00	139.100.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	993.436.120,00	830.659.070,00	830.659.070,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.015.021.800,00	1.015.021.800,00	1.043.721.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	790.100.000,00	790.100.000,00	804.100.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.960.000,00	19.960.000,00	19.960.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	181.981.800,00	181.981.800,00	181.981.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.980.000,00	22.980.000,00	37.680.000,00
TOTAL							7.165.907.488.376,00	7.070.354.858.916,60	7.412.970.277.983,60


 GUBERNUR BALI,

 WAYAN KOSTER

LAMPIRAN IX

SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH



PROVINSI BALI
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	748.575.564,00	541.537.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.575.564,00	0,00
2	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kelautan dan Perikanan	76.748.000,00	36.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.748.000,00	0,00
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	512.815.610,00	1.124.436.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.815.610,00	0,00
4	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	145.368.130,00	84.535.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.368.130,00	0,00
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.868.281.012,00	8.947.637.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868.281.012,00	0,00
6	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	64.062.969.064,00	56.140.293.304,00	167.607.800,00	159.156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.230.576.864,00	0,00
7	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.130.808.892,00	1.554.210.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.808.892,00	0,00
8	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.214.740.096,00	31.107.402.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214.740.096,00	0,00
9	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	133.073.630,00	128.280.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.073.630,00	0,00
10	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	898.477.436,00	957.077.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.477.436,00	0,00
11	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2.030.315.210,00	1.951.140.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.315.210,00	0,00
12	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.251.181.194,00	848.586.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.181.194,00	0,00
13	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.253.871.186,00	1.139.927.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.871.186,00	0,00
14	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	461.989.872,00	358.855.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.989.872,00	0,00
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	532.326.060,00	364.550.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.326.060,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
16	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	570.389.570,00	615.967.144,00	17.648.960,00	16.771.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.038.530,00	0,00
17	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	0,00	17.096.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	769.108.410,00	474.667.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.108.410,00	0,00
19	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	6.960.714.000,00	1.744.175.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960.714.000,00	0,00
20	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	30.997.600,00	30.997.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.997.600,00	0,00
21	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	24.884.800,00	24.884.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.884.800,00	0,00
22	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	36.313.800,00	33.913.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.313.800,00	0,00
23	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	0,00
24	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	34.145.788.437,00	34.818.549.062,00	116.064.000,00	106.276.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.261.852.437,00	0,00
25	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	21.185.389.994,00	22.545.456.200,00	297.723.512.120,00	156.270.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.908.902.114,00	0,00
26	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	12.208.600.822,00	9.720.851.556,00	400.472.350,00	400.472.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.609.073.172,00	0,00
27	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	28.511.261.717,00	28.392.382.524,00	897.741.340,00	887.428.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.409.003.057,00	0,00
28	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	289.327.110,00	230.452.700,00	0,00	29.602.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.327.110,00	0,00
29	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	431.471.640,00	281.847.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.471.640,00	0,00
30	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	308.686.594,00	789.809.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.686.594,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
31	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	192.110.220,00	87.702.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.110.220,00	0,00
32	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	635.576.002,00	404.183.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.576.002,00	0,00
33	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	183.432.810,00	77.397.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.432.810,00	0,00
34	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	415.843.504,00	367.888.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.843.504,00	0,00
35	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	75.876.000,00	5.882.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.876.000,00	0,00
36	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan	644.638.650,00	527.945.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.638.650,00	0,00
37	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Dinas Perhubungan	646.933.460,00	501.276.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.933.460,00	0,00
38	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Perhubungan	29.856.909.704,00	31.302.640.427,40	783.049.940,00	423.576.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.639.959.644,00	0,00
39	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan	1.664.501.312,00	746.788.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.501.312,00	0,00
40	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	415.850.050,00	406.250.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.850.050,00	0,00
41	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	559.755.110,00	543.586.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.755.110,00	0,00
42	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	256.350.000,00	260.122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.350.000,00	0,00
43	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	650.934.461,00	578.288.568,00	28.000.000,00	45.734.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.934.461,00	0,00
44	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	855.776.610,00	596.977.855,00	2.018.000.000,00	2.018.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.776.610,00	0,00
45	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	99.316.900,00	93.556.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.316.900,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
46	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2.615.568.416,00	4.399.123.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.568.416,00	0,00
47	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital	7.248.885.100,00	6.849.600.100,00	894.220.390,00	664.220.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143.105.490,00	0,00
48	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	139.540.200,00	56.582.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.540.200,00	0,00
49	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	483.085.844,00	346.071.614,00	88.050.156,00	50.735.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.136.000,00	0,00
50	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Perlengkapan Jalan	201.157.692,00	181.947.692,00	100.650.800,00	60.454.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.808.492,00	0,00
51	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	UPTD Perlengkapan Jalan	2.952.773.060,00	2.767.150.830,00	495.443.200,00	659.443.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448.216.260,00	0,00
52	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	674.531.492,00	416.913.492,00	143.228.800,00	61.063.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.760.292,00	0,00
53	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	1.895.951.218,00	1.489.008.593,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.951.218,00	0,00
54	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	549.507.452,00	431.688.632,00	144.834.520,00	144.834.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.341.972,00	0,00
55	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	7.938.004.159,00	65.065.269.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938.004.159,00	0,00
56	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali	14.624.906.894,00	12.588.446.592,00	3.517.540.150,00	4.538.632.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.142.447.044,00	0,00
57	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	8.000.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
58	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	94.999.500,00	61.825.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.999.500,00	0,00
59	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	12.500.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00
60	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	493.326.192,00	1.617.709.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.326.192,00	0,00
61	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	19.999.700,00	10.399.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999.700,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
62	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	19.994.300,00	10.394.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.994.300,00	0,00
63	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	30.000.500,00	16.520.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.500,00	0,00
64	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	89.554.810,00	161.666.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.554.810,00	0,00
65	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	198.400.230,00	103.565.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.400.230,00	0,00
66	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	73.261.000,00	40.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.261.000,00	0,00
67	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	58.056.300,00	37.816.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.056.300,00	0,00
68	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	267.453.600,00	95.413.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.453.600,00	0,00
69	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	57.999.700,00	34.399.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.999.700,00	0,00
70	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.117.590.230,00	1.131.077.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.590.230,00	0,00
71	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	42.958.559.998,00	40.588.923.313,00	0,00	314.442.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.958.559.998,00	0,00
72	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	104.999.800,00	101.639.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.999.800,00	0,00
73	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	181.509.884,00	150.791.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.509.884,00	0,00
74	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Dinas Kelautan dan Perikanan	104.596.492,00	73.271.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.596.492,00	0,00
75	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan	199.047.500,00	175.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.047.500,00	0,00
76	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Kelautan dan Perikanan	424.573.902,00	432.885.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.573.902,00	0,00
77	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	323.958.502,00	329.160.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.958.502,00	0,00
78	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kelautan dan Perikanan	27.575.641.299,00	27.696.995.055,20	3.263.523.520,00	3.251.523.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.839.164.819,00	0,00
79	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	50.000.000,00	44.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
80	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	1.023.004.792,00	767.553.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.004.792,00	0,00
81	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	341.539.476,00	341.539.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.539.476,00	0,00
82	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	401.538.504,00	368.983.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.538.504,00	0,00
83	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	615.450.489,00	548.684.259,00	0,00	131.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.450.489,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
84	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	943.845.756,00	708.446.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.845.756,00	0,00
85	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	252.757.125,00	284.186.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.757.125,00	0,00
86	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	103.772.820,00	71.217.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.772.820,00	0,00
87	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan	47.699.000,00	23.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.699.000,00	0,00
88	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan	265.287.230,00	239.009.525,00	20.445.200,00	20.445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.732.430,00	0,00
89	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	UPTD Pengelolaan Sampah	8.143.408.590,00	14.592.257.520,00	2.925.000.000,00	9.224.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068.408.590,00	0,00
90	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengelolaan Sampah	514.298.274,00	409.120.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.298.274,00	0,00
91	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	53.241.000,00	46.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.241.000,00	0,00
92	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	616.422.688,00	583.867.278,00	37.072.080,00	37.072.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.494.768,00	0,00
93	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	824.870.604,00	792.315.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.870.604,00	0,00
94	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	607.191.860,00	607.191.860,00	38.554.200,00	38.554.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.746.060,00	0,00
95	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	718.504.292,00	715.905.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.504.292,00	0,00
96	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.781.478.112,00	2.320.261.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.478.112,00	0,00
97	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.900.746.173,00	4.302.043.353,00	0,00	0,00	151.187.931.213,00	0,00	787.453.202.628,00	1.344.164.836.020,00	943.541.880.014,00	0,00
98	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.508.972.008,00	3.125.084.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.972.008,00	0,00
99	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	121.385.210,00	64.102.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.385.210,00	0,00
100	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.400.000.000,00	2.102.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000.000,00	0,00
103	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.049.045.322,00	801.214.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.045.322,00	0,00
104	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	88.800.000,00	61.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
105	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	494.339.000,00	324.742.000,00	30.875.454.175,00	32.071.291.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.369.793.175,00	0,00
106	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	2.274.100.936,00	1.738.892.193,00	629.246.900,00	610.249.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903.347.836,00	0,00
107	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	796.859.800,00	905.328.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.859.800,00	0,00
108	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	666.251.370,00	440.695.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.251.370,00	0,00
109	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.341.186.660,00	10.888.784.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341.186.660,00	0,00
110	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	478.838.860,00	274.756.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.838.860,00	0,00
111	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	135.878.612,00	91.323.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.878.612,00	0,00
112	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.572.756.285,00	13.975.459.204,00	0,00	66.263.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.572.756.285,00	0,00
113	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	74.790.820,00	38.395.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.790.820,00	0,00
114	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	215.186.230,00	140.433.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.186.230,00	0,00
115	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	223.606.230,00	156.281.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.606.230,00	0,00
116	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	151.553.520,00	103.638.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.553.520,00	0,00
117	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	399.963.405,00	419.496.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.963.405,00	0,00
118	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.030.491.536,00	2.030.336.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.491.536,00	0,00
119	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	409.104.930,00	428.638.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.104.930,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
120	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	662.378.224,00	407.596.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.378.224,00	0,00
121	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	799.475.444,00	1.077.475.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.475.444,00	0,00
122	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	685.451.330,00	556.984.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.451.330,00	0,00
123	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	29.502.478.890,00	28.665.246.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.502.478.890,00	0,00
124	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	386.037.860,00	212.162.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.037.860,00	0,00
125	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kesehatan	307.948.589.922,00	297.910.684.792,00	808.482.700,00	876.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.757.072.622,00	0,00
126	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	389.259.970,00	233.749.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.259.970,00	0,00
127	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	79.999.100,00	60.319.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.999.100,00	0,00
128	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	91.710.229.302,00	385.399.859.525,00	105.424.355.920,00	238.301.609.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.134.585.222,00	0,00
129	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	68.541.829.632,00	68.197.460.900,00	62.106.500,00	62.106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.603.936.132,00	0,00
130	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.949.998.400,00	1.254.868.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.998.400,00	0,00
131	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00
132	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.333.399.627.415,00	1.305.649.329.186,00	486.943.680,00	705.529.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.886.571.095,00	0,00
133	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	115.633.100,00	81.883.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.633.100,00	0,00
134	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	817.082.900,00	780.566.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.082.900,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
135	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	351.411.800,00	341.811.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.411.800,00	0,00
136	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00
137	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	114.967.700,00	169.369.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.967.700,00	0,00
138	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.996.400,00	2.732.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996.400,00	0,00
139	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	309.258.400,00	329.238.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.258.400,00	0,00
140	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	11.878.600,00	9.958.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.878.600,00	0,00
141	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	24.011.617.507,00	21.840.537.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.011.617.507,00	0,00
142	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	142.567.700,00	55.758.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.567.700,00	0,00
143	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	19.743.600,00	13.743.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.743.600,00	0,00
144	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	159.546.100,00	27.906.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.546.100,00	0,00
145	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	4.187.786.100,00	4.309.759.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187.786.100,00	0,00
146	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Bali Mandara	0,00	0,00	45.978.212.000,00	45.978.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.978.212.000,00	0,00
147	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	RSUD Bali Mandara	200.686.107.309,00	213.786.906.414,00	10.000.000.000,00	11.614.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.686.107.309,00	0,00
148	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rumah Sakit Jiwa	35.904.398.608,00	34.447.947.013,00	2.000.000.000,00	3.798.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.904.398.608,00	0,00
149	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	81.218.160.000,00	81.854.455.000,00	8.781.840.000,00	11.145.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
150	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya	0,00	4.432.604.682,00	0,00	1.112.792.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya	0,00	55.199.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya	0,00	26.091.555.474,00	0,00	1.906.583.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa	8.534.083.369,00	7.702.516.516,00	1.007.141.200,00	1.841.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.541.224.569,00	0,00
154	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	369.183.034,00	242.840.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.183.034,00	0,00
155	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	4.267.662.612,00	5.198.951.792,00	371.968.400,00	355.295.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639.631.012,00	0,00
156	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	85.000.000,00	59.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00
157	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	126.764.100,00	102.298.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.764.100,00	0,00
158	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	674.314.242,00	575.748.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.314.242,00	0,00
159	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	1.287.636.000,00	1.163.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.636.000,00	0,00
160	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	968.841.766,00	724.477.765,00	88.806.600,00	109.728.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.648.366,00	0,00
161	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	3.092.844.820,00	2.967.378.684,00	0,00	1.382.062.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092.844.820,00	0,00
162	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	2.193.368.850,00	1.747.459.895,00	1.282.741.720,00	2.870.278.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476.110.570,00	0,00
163	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelayanan Sosial	2.340.031.658,00	1.879.622.541,00	3.454.397.000,00	3.284.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794.428.658,00	0,00
164	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	UPTD Pelayanan Sosial	3.253.798.200,00	3.224.118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253.798.200,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
165	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	5.991.551.454,00	5.613.674.894,00	38.498.300,00	23.061.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030.049.754,00	0,00
166	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	3.550.910.192,00	3.210.142.552,00	1.118.135.920,00	1.227.718.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669.046.112,00	0,00
167	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	49.868.800,00	26.460.800,00	26.266.900,00	26.266.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.135.700,00	0,00
168	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	4.499.000,00	2.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.000,00	0,00
169	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	135.087.200,00	130.767.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.087.200,00	0,00
170	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.303.913.000,00	2.768.687.400,00	299.191.400,00	299.191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603.104.400,00	0,00
171	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.658.635.950,00	18.896.633.370,00	3.120.681.700,00	3.161.484.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.779.317.650,00	0,00
172	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	25.865.611.676,00	49.992.099.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.865.611.676,00	0,00
173	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Kebudayaan	10.859.622.006,00	698.392.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859.622.006,00	0,00
174	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dinas Kebudayaan	185.453.000,00	144.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.453.000,00	0,00
175	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan	46.040.342.892,00	56.833.436.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.040.342.892,00	0,00
176	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Dinas Kebudayaan	845.299.070,00	1.461.431.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.299.070,00	0,00
177	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kebudayaan	63.851.222.573,00	47.424.369.014,00	331.754.660,00	1.680.007.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.182.977.233,00	0,00
178	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	112.110.820,00	52.227.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.110.820,00	0,00

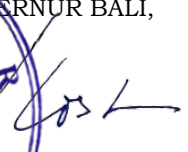
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
179	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	466.686.498.824,00	472.760.533.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.686.498.824,00	0,00
180	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	15.390.927.644,00	14.041.994.892,00	386.694.240,00	384.148.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.777.621.884,00	0,00
181	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	14.299.040,00	27.046.545,00	17.615.500,00	48.441.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.914.540,00	0,00
182	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	3.108.806.000,00	3.059.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108.806.000,00	0,00
183	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	3.635.688.148,00	3.523.777.819,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.688.148,00	0,00
184	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	UPTD Museum Bali	2.624.041.500,00	2.535.370.600,00	64.043.500,00	64.043.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.085.000,00	0,00
185	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Museum Bali	2.309.218.256,00	2.092.737.386,00	78.680.909.933,00	9.776.325.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.990.128.189,00	0,00
186	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	1.842.461.900,00	1.563.261.900,00	2.772.940.069,00	2.772.940.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615.401.969,00	0,00
187	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	2.019.204.804,00	1.694.234.574,00	1.623.900.800,00	1.623.867.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643.105.604,00	0,00
188	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	UPTD Taman Budaya	2.900.500.000,00	2.687.762.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.500.000,00	0,00
189	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Taman Budaya	3.500.406.550,00	4.196.719.335,00	0,00	3.690.777.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.406.550,00	0,00
190	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	748.575.764,00	743.110.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.575.764,00	0,00
191	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.520.425.943,00	18.700.100.993,00	2.720.347.240,00	3.129.837.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.240.773.183,00	0,00
192	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.549.418.406,00	2.319.080.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.418.406,00	0,00
193	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Humas dan Protokol	0,00	7.110.033.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Biro Organisasi	110.132.984,00	75.304.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.132.984,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
195	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Biro Organisasi	455.465.344,00	248.666.435,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.465.344,00	0,00
196	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Biro Organisasi	655.221.968,00	447.281.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.221.968,00	0,00
197	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Organisasi	1.643.635.140,00	1.182.022.966,00	175.493.140,00	432.515.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.128.280,00	0,00
198	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.474.593.012,00	1.736.831.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474.593.012,00	0,00
199	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	332.213.362,00	218.269.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.213.362,00	0,00
200	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Umum	0,00	102.791.682.352,00	0,00	3.822.264.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Biro Umum dan Protokol	751.603.126,00	576.120.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.603.126,00	0,00
202	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Umum dan Protokol	87.026.794.480,00	7.346.122.091,00	2.121.288.292,00	908.100.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.148.082.772,00	0,00
203	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja	28.571.880.335,00	26.147.011.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.571.880.335,00	0,00
204	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Satuan Polisi Pamong Praja	29.625.318.133,00	27.406.706.127,00	602.619.100,00	595.472.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.227.937.233,00	0,00
205	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sekretariat Daerah	81.731.654.004,00	79.617.296.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.731.654.004,00	0,00
206	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.857.191.552,00	3.715.372.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857.191.552,00	0,00
207	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.518.830.394,00	1.232.466.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.830.394,00	0,00
208	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34.575.659.485,00	32.462.751.948,00	575.633.000,00	575.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.151.292.485,00	0,00
209	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	681.089.000,00	990.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.089.000,00	0,00
210	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.676.175.912,00	4.111.275.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.175.912,00	0,00
211	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.374.767.294,00	24.179.333.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.374.767.294,00	0,00
212	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.423.015.387,00	10.138.103.794,00	416.922.740,00	416.922.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.839.938.127,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
213	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.323.566.308,00	25.554.645.954,00	1.114.714.640,00	2.734.345.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.438.280.948,00	0,00
214	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Riset dan Inovasi Daerah	7.428.959.900,00	10.628.686.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428.959.900,00	0,00
215	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Riset dan Inovasi Daerah	14.734.565.739,00	13.444.102.162,00	1.121.764.840,00	1.914.807.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.856.330.579,00	0,00
216	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Biro Hukum	4.578.799.210,00	3.907.074.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578.799.210,00	0,00
217	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Biro Organisasi	290.065.792,00	346.692.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.065.792,00	0,00
218	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	236.063.720,00	122.686.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.063.720,00	0,00
219	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	353.619.030,00	204.017.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.619.030,00	0,00
220	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	818.735.740,00	435.076.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.735.740,00	0,00
221	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.518.619.900,00	16.867.579.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.518.619.900,00	0,00
222	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	219.353.600,00	220.044.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.353.600,00	0,00
223	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	7.000.000.000,00	18.642.800.000,00	1.000.000.000,00	3.057.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00	0,00
224	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	1.598.227.300,00	1.583.657.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.227.300,00	0,00
225	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	383.375.252,00	258.563.622,00	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.925.252,00	0,00
226	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Hukum	1.650.931.478,00	1.290.406.508,00	683.947.240,00	674.657.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.878.718,00	0,00
227	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3.475.162.748,00	17.046.092.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475.162.748,00	0,00
228	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.410.075.092,00	1.255.321.092,00	398.256.320,00	392.180.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.331.412,00	0,00
229	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	766.145.000,00	766.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.145.000,00	0,00
230	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa	292.517.120,00	139.008.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.517.120,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
231	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	557.858.886,00	443.575.573,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.858.886,00	0,00
232	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.732.046.394,00	4.671.570.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732.046.394,00	0,00
TOTAL				3.746.313.427.225,00	4.152.937.785.229,60	624.889.525.795,00	581.586.883.173,00	151.187.931.213,00	55.923.938.944,00	787.453.202.628,00	1.344.164.836.020,00	5.309.844.086.861,00	6.134.613.443.366,60



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN X

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN



LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI BALI
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON			JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	PPPK	
Golongan IV/e	1					14			15
Golongan IV/d		17				8			25
Golongan IV/c		19	1			451			471
Golongan IV/b		2	101			1,279	2		1,384
Golongan IV/a		1	66	89		898	35		1,089
JUMLAH GOLONGAN IV	1	39	168	89	0	2,650	37	0	2,984
Golongan III/e									0
Golongan III/d			4	111		1,289	457		1,861
Golongan III/c				20		427	254		701
Golongan III/b						976	502		1,478
Golongan III/a						374	361		735
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	4	131	0	3,066	1,574	0	4,775
Golongan II/e									0
Golongan II/d						175	253		428
Golongan II/c						49	406		455
Golongan II/b						1	28		29
Golongan II/a							20		20
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	225	707	0	932

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON			JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	PPPK	
Golongan I/e									0
Golongan I/d							4		4
Golongan I/c							4		4
Golongan I/b							1		1
Golongan I/a									0
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Golongan VII								313	313
JUMLAH GOLONGAN VII	0	0	0	0	0	0	0	313	313
Golongan IX								8,289	8,289
JUMLAH GOLONGAN IX	0	0	0	0	0	0	0	8,289	8,289
Golongan X								140	140
JUMLAH GOLONGAN X	0	0	0	0	0	0	0	140	140
Golongan XI								36	36
JUMLAH GOLONGAN XI	0	0	0	0	0	0	0	36	36
TOTAL	1	39	172	220	0	5,941	2,327	8,778	17,478



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

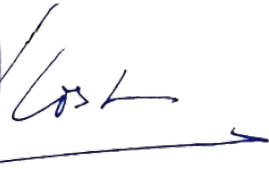
LAMPIRAN XI

DAFTAR PIUTANG DAERAH



PROVINSI BALI
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2023	Perkiraan Penambahan Tahun 2024	Perkiraan Pengurangan s/d. Desember 2024	Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Piutang Pajak Daerah		52,151,207,987.00	44,354,090,408.00	52,151,207,987.00	44,354,090,408.00
	a. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	2017 s/d. 2019	126,767,000.00	0.00	126,767,000.00	-
	b. Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2017 dan 2019	277,695,000.00	0.00	277,695,000.00	-
	c. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Desember 2023	51,369,828,554.00	43,977,172,975.00	51,369,828,554.00	43,977,172,975.00
	d. Piutang Pajak Air Permukaan	Desember 2023	376,917,433.00	376,917,433.00	376,917,433.00	376,917,433.00
	e. Piutang Pajak Rokok	-	-	-	-	-
2	Piutang Retribusi	-	-	-	-	-
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-
5	Piutang Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah			52,151,207,987.00	44,354,090,408.00	52,151,207,987.00	44,354,090,408.00

 GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XII

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA



LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025

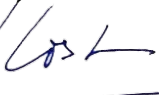
PROVINSI BALI
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH
DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal Yang telah disertakan sampai Tahun 2024	Penyertaan Modal Tahun 2025	Jumlah Modal yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun 2025	Sisa Modal yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (investasi) Daerah Tahun 2025	Jumlah Modal (Investasi) yang akan Diterima Kembali Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2004	PT. BPD Bali	- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali - Keputusan Gubernur Bali Nomor 377/01-CH/2021 tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali	Uang	764.912.000.000,00	644.912.000.000,00	120.000.000.000,00	644.912.000.000,00	0,00	224.454.593.470,00	-
2	2010	PT. Jankrida Bali Mandara (Perseroda)	- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali - Keputusan Gubernur Bali Nomor 377/01-CH/2021 tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali	Uang	180.000.000.000,00	142.000.000.000,00	38.000.000.000,00	142.000.000.000,00	0,00	1.928.163.220,00	-
3	1974	Perunda Kertha Bali Sagana	- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali Menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Sagana	Uang	5.282.769.658,00	5.282.769.658,00	0,00	5.282.769.658,00	0,00	27.000.000.000,00	-
4	2003	PT. Puri Raharja	- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	8.736.000.000,00	8.736.000.000,00	0,00	8.736.000.000,00	0,00	221.082.422,00	-

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal Yang telah disertakan sampai Tahun 2024	Penyertaan Modal Tahun 2025	Jumlah Modal yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun 2025	Sisa Modal yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (investasi) Daerah Tahun 2025	Jumlah Modal (Investasi) yang akan Diterima Kembali Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1990	PT. Asuransi Bangun Askrida	- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Asuransi Bangun Askrida - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Asuransi Bangun Askrida - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00	-
6	2013	PT. Jasamarga Bali Tul	- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	100.000.000.000,00	0,00	0,00	-
Jumlah					1.060.080.769.658,00	902.080.769.658,00	158.000.000.000,00	902.080.769.658,00	-	253.603.839.112,00	-



 GUBERNUR BALI,



 WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XIII

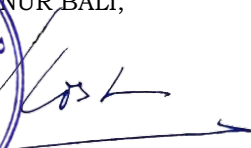
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN



LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI BALI
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada akhir tahun 2024	Perkiraan Penambahan Tahun 2025	Perkiraan Pengurangan Tahun 2025	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Aset Tetap Rusak Berat	Aset Lainnya	27.319.681.313,01	12.244.575.701,21	2.708.012.891,00	36.856.244.123,21
2	Aset Tetap Yang Akan Di Hibahkan	Aset Lainnya	204.075.601.922,00	-	27.048.506.000,00	177.027.095.922,00
3	Aset Lain-Lain Lainnya	Aset Lainnya	1.322.021.645,76	-	549.088.097,66	772.933.548,10
Jumlah			232.717.304.880,77	12.244.575.701,21	30.305.606.988,66	214.656.273.593,31

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XIV

**DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM
DISELESAIKAN DAN DINGGARKAN KEMBALI
DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN**



LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI BALI
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1) Tahun Pertama

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7		9
1								
2				NIHIL				
3								
dst.								
Jumlah								

PROVINSI BALI
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

2) Tahun Kedua

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sd Akhir TA T-2 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-2	Perubahan APBD TA T-2		APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
dst.											
Jumlah											

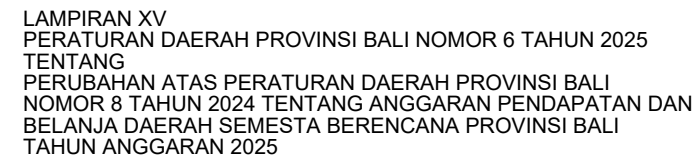


WAYAN KOSTER

GUBERNUR BALI,

LAMPIRAN XV

DAFTAR DANA CADANGAN



No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					NIHIL			
Jumlah								

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XVI

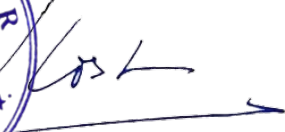
DAFTAR PINJAMAN DAERAH



LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI BALI
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman (%)	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PT. SMI	PP 43/2020 tentang Perubahan PP 23/2020	2021	1.450.000.000.000,00	10	0%	Pembangunan Pusat Kesenian Bali	248.917.013.352,00	0%	1.055.294.920.719,00	0%
2	PT. Bank BPD Bali	PP 56/2018 tentang Pinjaman Daerah	2024	347.159.148.424,28	1	0%	Mendanai program kegiatan prioritas	0,00	0%	347.159.148.424,28	0%
Jumlah				1.797.159.148.424,00				248.917.013.352,00		1.402.454.069.143,28	

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER